PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

c. bahwa untuk menyelaraskan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Oktober 2021
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (04/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH, MH
Pembina
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akibat kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan kondisi pertumbuhan ekonomi menyebabkan ada beberapa kebijakan dan peraturan baru yang harus disesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD agar dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai pada tahun yang direncanakan. Penyelarasan yang dilakukan diantaranya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk penyelarasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat salah satunya

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah serta kebijakan dan Strategi pembangunan Daerah tahun 2019-2024 dengan kondisi sekarang;
- sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dari tahun 2020 sampai 2024;
- sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019 sampai tahun 2024, termasuk dalam menentukan Program-program prioritas;
- sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Arah Kebijakan baru yang ditetapkan; dan
- sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode Tahun 2019–2024 hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 Juni 2018, telah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 17 Februari 2019 di Pontianak. Berpedoman pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode ini merupakan periode lima tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2005–2025. Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024.

Dalam perjalanannya ketika proses implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024, terjadi dinamisasi situasi dan regulasi yang pada akhirnya berimplikasi terhadap target capaian dan kapasitas riil anggaran pembangunan daerah. Dinamisasi situasi terjadi setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Conona Virus Disease* 2019 (*Covid–19*) Sebagai Bencana Nasional. Dinamisasi regulasi salah satunya terpotret dari perubahan kebijakan nasional dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Selain daripada itu perubahan kebijakan juga terjadi di level Provinsi Kalimantan Barat, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023. Mengacu pada hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 pada tahun 2020, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 merekomendasikan dilakukan penyempurnaan, salah satunya terhadap optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Dalam hal ini perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024 dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi berupa peraturan perundang–udangan yang lebih tinggi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Presiden Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014–2034;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3),
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2)

1.3 Hubungan Antar – Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, disusun dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 dan RPJMD

Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional. Hubungan antar-dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

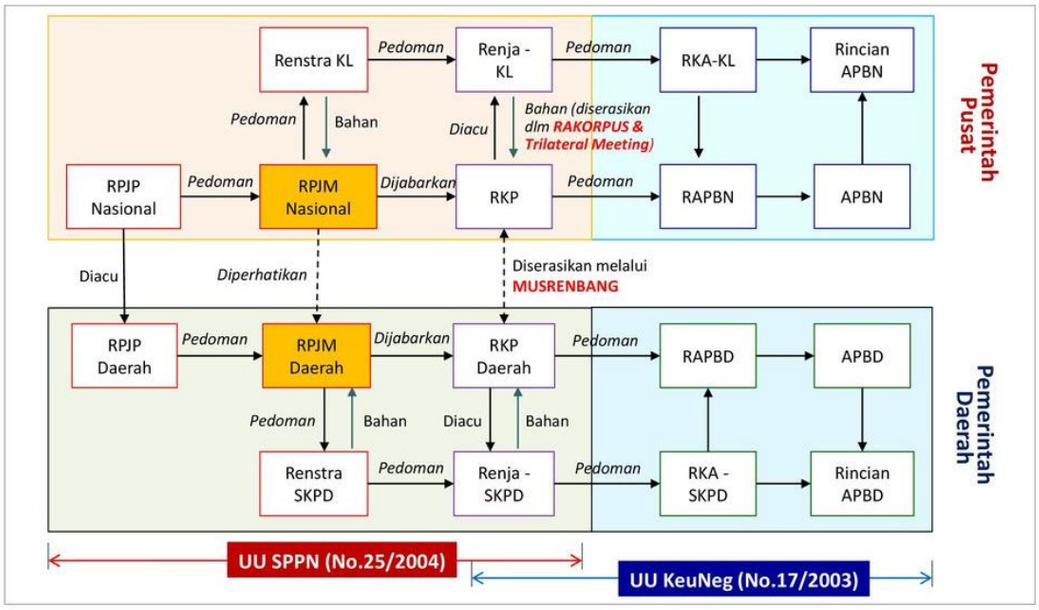

Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antar-Dokumen
Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Keselarasan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 terhadap RPJPD Kabupaten Sanggau tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, RTRW Kabupaten Sanggau, KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, dan RKPD Kabupaten Sanggau dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau dengan RPJMN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2019-2024 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan

kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan RPJMD tahun 2019-2024 perlu mencermati dan memperhatikan RPJMN tahun 2019-2024 sehingga RPJMD 2019-2024 yang disusun menggambarkan arah kebijakan nasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin terformulasikannya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau yang responsif terhadap arah pembangunan nasional. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 selain untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang maju dan terdepan juga untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan nasional. Keterkaitan dan keselarasan antara dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dan dokumen RPJMN tahun 2019-2024 merupakan konsekuensi langsung dari penerapan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.2 Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021. Berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sanggau dengan arah serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategis dan program antara RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan langkah untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan pembangunan daerah serta menjamin adanya dokumen kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi dan terpadu guna mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat seutuhnya. Dalam hal ini, hubungan antara kedua dokumen

kebijakan tersebut menggambarkan keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program pemerintah Kabupaten Sanggau periode 2019-2024 dan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023.

1.3.3 Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau dengan RPJPD, RKPD, Renstra dan Renja

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025. Dalam hal ini, dokumen RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 adalah instrumen kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menentukan arah pembangunan selama lima tahun kedepan yang dituangkan kedalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Kemudian, dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 merupakan instrumen kebijakan yang disusun untuk mendukung tercapainya arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Karena itu, dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025. Kedua dokumen kebijakan tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan perangkat daerah merupakan penjabaran langsung dari tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam hal ini, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah tidak keluar dari tujuan, sasaran, program yang tetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Karena itu, Bappeda Kabupaten Sanggau perlu melakukan verifikasi dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin dan memastikan konsistensi dan keterkaitan antara dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Konsistensi dan keterkaitan antara kedua dokumen ini menjamin terwujudnya Kabupaten Sanggau sebagai daerah yang maju dan terdepan.

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sanggau berpedoman langsung pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Mengingat RKPD merupakan dokumen pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk mendukung terlaksananya RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memastikan bahwa dokumen RKPD selaras, memuat, dan mendukung arah, tema, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan langsung dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Karena itu, keterpaduan antara kedua dokumen tersebut sangat penting guna mendukung pelaksanaan

pembangunan yang terarah dalam rangka terwujudnya Kabupaten Sanggau sebagai daerah yang maju dan terdepan.

1.3.4 Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kabupaten Sanggau tahun 2014-2034, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sanggau dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Hal ini dilakukan untuk menjamin arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau selama lima tahun kedepan tidak bertentangan dengan kebijakan RTRW Kabupaten Sanggau. Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau disusun dan dilaksanakan untuk mendukung implementasi kebijakan RTRW secara efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dokumen RPJMD tahun 2019-2024 dan dokumen RTRW Kabupaten Sanggau merupakan kedua dokumen pembangunan daerah yang saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sanggau yang berkelanjutan.

1.3.5 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sanggau

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau memuat hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil analisis terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sanggau yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan alternatif proyeksi, baik tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan guna merealisasikan TPB sesuai dengan target yang telah ditentukan.

1.3.6 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan perangkat daerah merupakan penjabaran langsung dari tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Dalam hal ini, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah tidak keluar dari tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024. Karena itu, Bappeda Kabupaten Sanggau perlu melakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin dan memastikan konsistensi dan keterkaitan antara Rancangan RPJMD tahun 2019-2024 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2019-2024. Konsistensi dan keterkaitan antara kedua dokumen ini menjamin terwujudnya Kabupaten Sanggau sebagai daerah yang maju dan terdepan.

1.3.7 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sanggau berpedoman langsung pada RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024. Mengingat RKPD merupakan dokumen pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk mendukung terlaksananya RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024, maka pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau perlu memastikan bahwa dokumen RKPD selaras, memuat, dan mendukung arah, tema, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Dokumen RKPD dan dokumen RPJMD tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan langsung dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Karena itu, keterpaduan antara kedua dokumen tersebut sangat penting guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang terarah dalam rangka terwujudnya Kabupaten Sanggau sebagai daerah yang maju dan terdepan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019–2024 sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Untuk menyesuaikan RPJMD Kabupaten Sanggau terhadap adanya perubahan kebijakan nasional dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini (bencana non alam/ *Covid-19*)
2. Untuk melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, target dan indikator program dan kegiatan.

3. Menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berkualitas sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019–2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar-dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi-kondisi Kabupaten Sanggau meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelaanan umum, dan aspek daya saing daerahserta digambarkan juga tentang pencapaian sasaran RPJMD, Kejadian Luar Biasa pandemi *Covid-19*, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan masa lalu dan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan, kerangka pendanaan, proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam

tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rentang waktu 2019-2024, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi sertaseluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indicator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya perubahan RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau dalam 4 (empat) tahun kedepan serta memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaanya.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau. Kabupaten Sanggau terletak pada koordinat 1°10" Lintang Utara- 0°06' Lintang Selatan dan 109°08' Bujur Timur-111°03' Bujur Barat dengan luas 12.857,70 km2 atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Malaysia Timur (Serawak)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya
- Sebelah Timur : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau
- Sebelah Barat : Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Sanggau memiliki 5 (lima) nilai strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terletak ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya, dan Sintang.
2. Dilalui jalan lintas Trans Kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Serawak dan Brunei Darussalam. Lintas Trans Kalimantan ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api.
3. Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Serawak) dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong.
5. Dilewati jalur Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Jalur Sungai Kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.

Kelima nilai strategis letak wilayah Kabupaten Sanggau di atas merupakan bagian dari potensi daerah Kabupaten Sanggau yang dapat dimaksimalkan sebagai modal pembangunan daerah menuju Kabupaten Sanggau yang maju dan terdepan. Dalam hal ini, strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau perlu memperhatikan kelima nilai strategis tersebut.

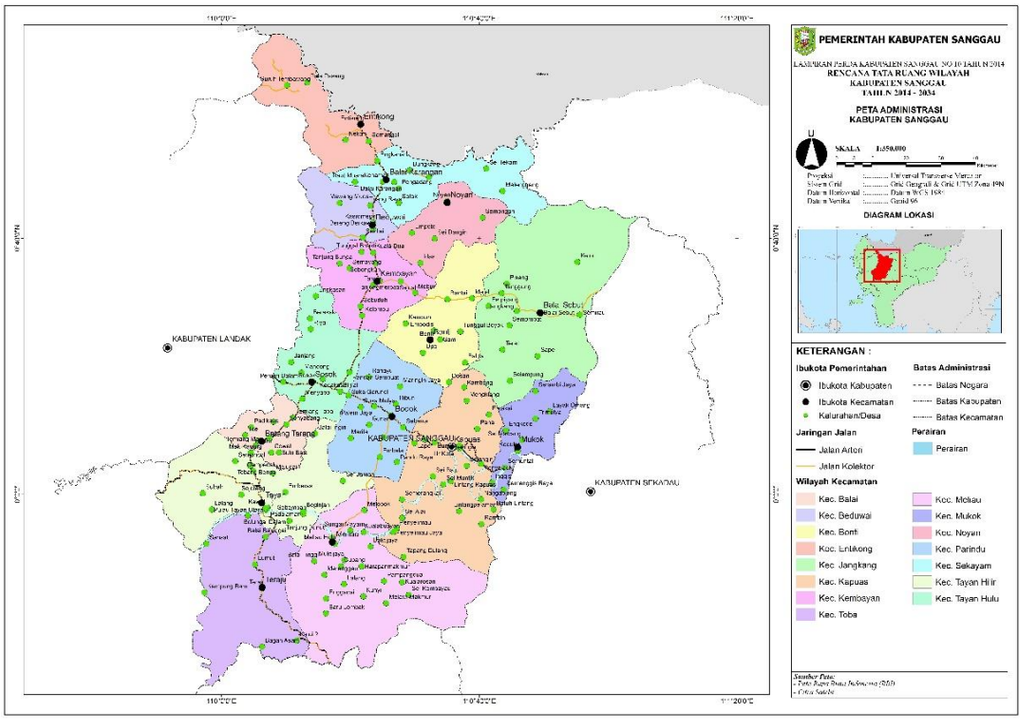

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Sanggau
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Sanggau yang awalnya memiliki 22 Kecamatan kini menjadi 15 Kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau nomor 32 tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang merubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan yang terdiri dari 163 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kelurahan	Luas/Area (Km²)	Persentase
1	Toba	7	0	1.127,20	8,77
2	Meliau	19	0	1.495,70	11,63
3	Kapuas	20	6	1.382,00	10,75
4	Mukok	9	0	501,00	3,90
5	Jangkang	11	0	1.589,20	12,36
6	Bonti	9	0	1.121,80	8,72
7	Parindu	14	0	593,90	4,62
8	Tayan Hilir	15	0	1.050,50	8,17
9	Balai	12	0	395,60	3,08
10	Tayan Hulu	11	0	719,20	5,59
11	Kembayan	11	0	610,80	4,75
12	Beduai	5	0	435,00	3,38
13	Noyan	5	0	487,90	3,79
14	Sekayam	10	0	841,01	6,54
15	Entikong	5	0	506,89	3,94
Jumlah Total		**163**	**6**	**12.857,70**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau dalam angka tahun 2020

Dari sisi luas wilayah, kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 12,36% dari total luas Kabupaten Sanggau, Sebaliknya kecamatan yang memiliki luas wilayah paling rendah adalah Kecamatan Balai sebesar 3,08% dari total luas wilayah Kabupaten Sanggau.

Cukup tingginya gap antara luasan dan jumlah desa/kelurahan antar-kecamatan, serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa. Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya.

2.1.1.2 Iklim

Kabupaten Sanggau termasuk daerah beriklim tropis. Tahun 2020 diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 10-29 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 12-20 hari pada bulan Maret. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 48-335 mm pada bulan Agustus (terendah) hingga sebesar 71-1201 mm pada bulan Maret (tertinggi).

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa aliran sungai, diantaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas termasuk sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau dengan muara di Kabupaten Kubu Raya.

Bentuk topografi Kabupaten Sanggau menggambarkan dua hal penting: pertama, topografi sebagai potensi pembangunan dan kedua, topografi sebagai permasalahan pembangunan. Satu sisi bentuk topografi Kabupaten Sanggau dapat menjadi modal pembangunan daerah mana kala pemerintah Kabupaten Sanggau mampu mengelola aliran sungai yang ada sebagai potensi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk topografi dengan kelima aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program yang tepat sehingga topografi yang dimiliki dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.

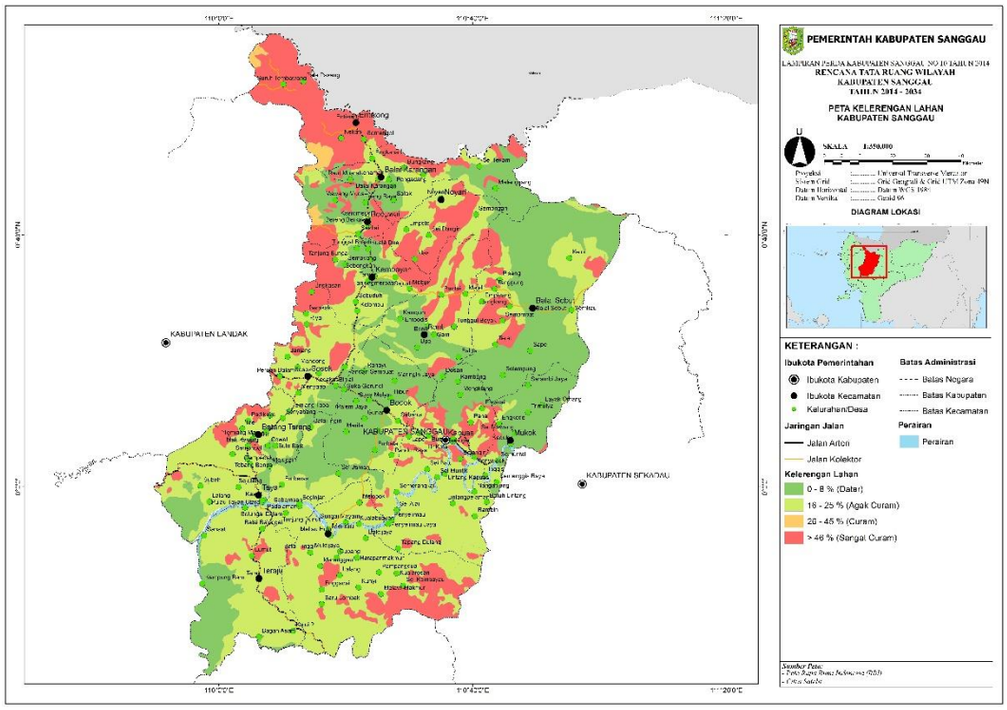

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Sanggau
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau sebagian besar adalah jenis tanah padsolik merah kuning batuan dan padat serta jenis tanah latosol. Jenis tanah podsolik merah kuning batuan dan padat hampir merata di seluruh kecamatan dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil, yaitu 19,375 hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

2.1.1.5 Geologi

Formasi geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intruksif dan Plutonik Basa Menengah, Intruksif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intruksif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Lapisan Plistosen hampir terdapat di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sanggau, kecuali di Kecamatan Toba dan Kecamatan Beduai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat di Kecamatan Tayan Hulu.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Pengembangan Kawasan Strategis

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau memiliki tiga kawasan strategis, terdiri atas:

1. **Kawasan Strategis Nasional**

   Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, terdiri atas:

   a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa; dan
   b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia dengan Malaysia, terdiri dari Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri serta Kawasan Pertambangan Bauksit; dan
b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan, yaitu Kawasan Ekosistem Gunung Niyut Penrissen.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan terdiri atas:

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Bandar Entikong Jaya di Entikong, Kawasan Perkotaan Sanggau, Kawasan Perkotaan Balai Karangan dan Kawasan Industri Tayan.
b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Keraton Surya Negara di Kota Sanggau.
c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu Kawasan Kebun Raya Danau Lait di Kecamatan Tayan Hilir.

Ketiga kawasan di atas dipandang sebagai kawasan strategis yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau selama 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan dan mendukung pembangunan ketiga kawasan strategis tersebut. Semua stakeholders terutama perangkat daerah dan sektor swasta didorong untuk bersama-sama memformulasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan ketiga kawasan tersebut sehingga visi Kabupaten Sanggau dapat terwujud.

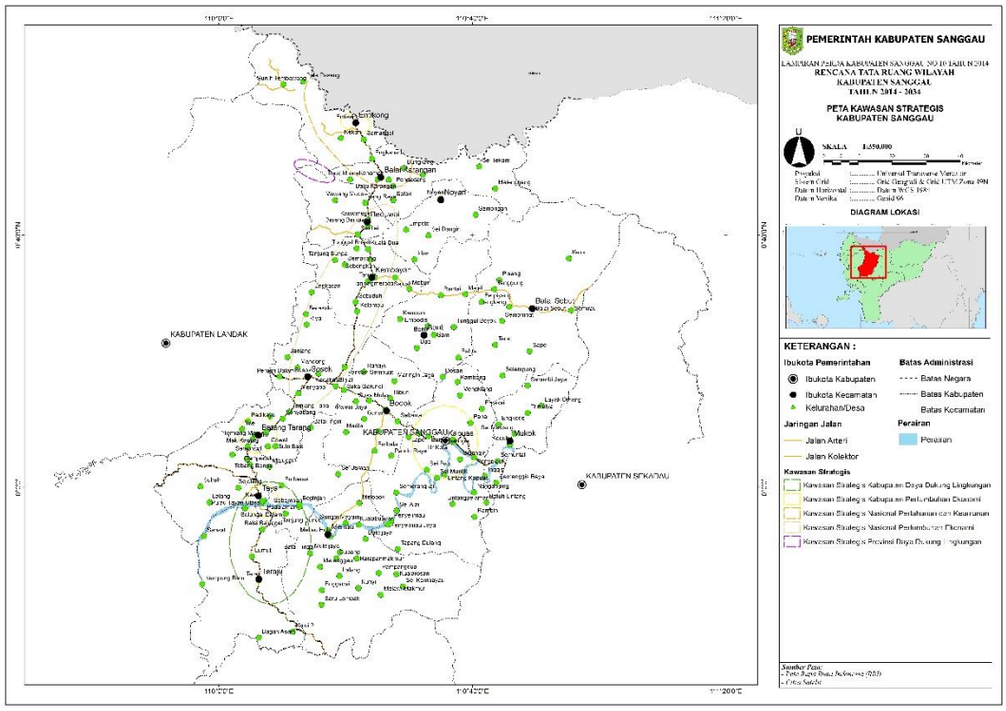

Gambar 2. 3 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sanggau
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

Ketiga kawasan strategis Kabupaten Sanggau di atas dapat dioptimalkan sebagai sumber daya yang dapat menopang pembangunan Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat mempertimbangkan ketiga kawasan tersebut sebagai landasan empiris perumusan kebijakan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024).

2.1.2.2 Arah Pengembangan Kawasan

Sesuai dari arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau, penggunaan lahan di Kabupaten Sanggau dibedakan menurut kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan suatu kawasan yang lebih berfungsi sebagai kawasan konservasi dan tidak dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya. Kawasan ini menjaga keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Sanggau dan juga Provinsi Kalimantan Barat.

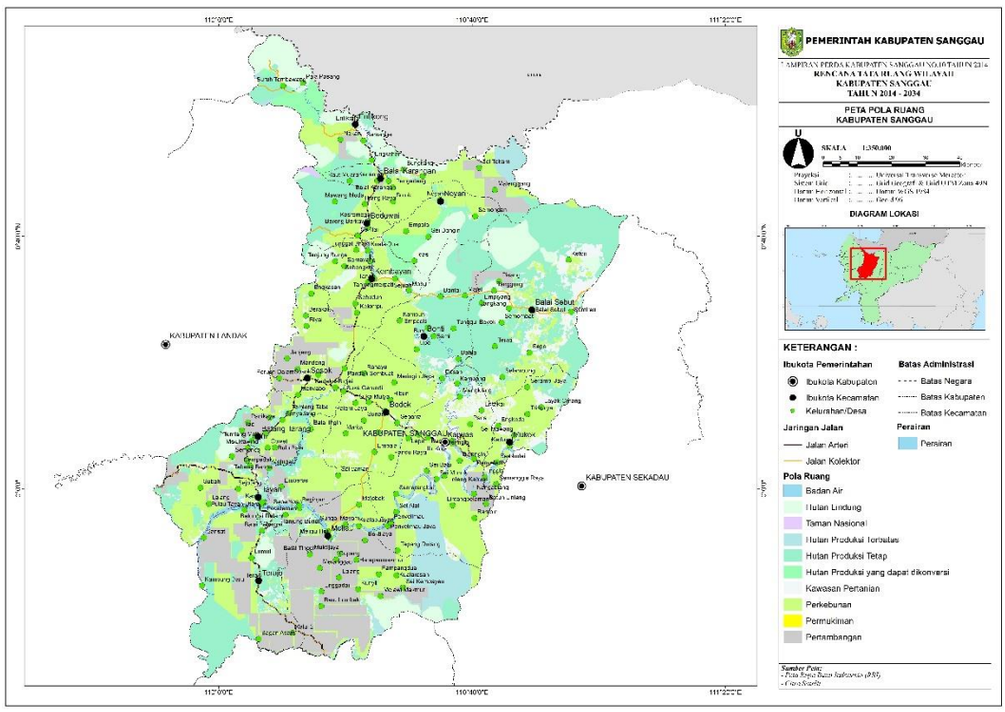

Gambar 2. 4 Peta Pola Ruang Kabupaten Sanggau

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

Ada beberapa jenis kawasan lindung yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau, antara lain kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya; kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya; dan kawasan rawan bencana. Sedangkan kawasan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau, antara lain hutan produksi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan pemukiman. Pengembangan kawasan budidaya di arahkan pada penguatan dan pemberdayaan potensi kawasan yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Di bawah ini secara khusus dijelaskan arah pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Sanggau.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

a. Hutan Produksi (HP) di Sei Sekayam-Mengkiang yang diarahkan menjadi pemanfaatan Alokasi Penggunaan Lainnya (APL)

b. Kawasan Hutan Produksi (HP) terdistribusi di Kecamatan Kapuas, Beduai, Parindu, Jangkang, Balai, dan Kembayan.

Mengingat terbatasnya kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam bidang kehutanan, pemerintah Kabupaten Sanggau perlu membangun kemitraan strategis dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam perumusan kebijakan pemanfatan kawasan hutan yang secara langsung berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat adat di Kabupaten Sanggau. Salah satu hal penting yang harus dilakukan bersama antara pemerintah Kabupaten Sanggau, pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah menyediakan payung hukum tentang pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat adat Kabupaten Sanggau. Keberadaan payung hukum memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memanfatkan kawasan hutan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sanggau. Lebih lanjut dapat diperhatikan dalam peta sebagai berikut:

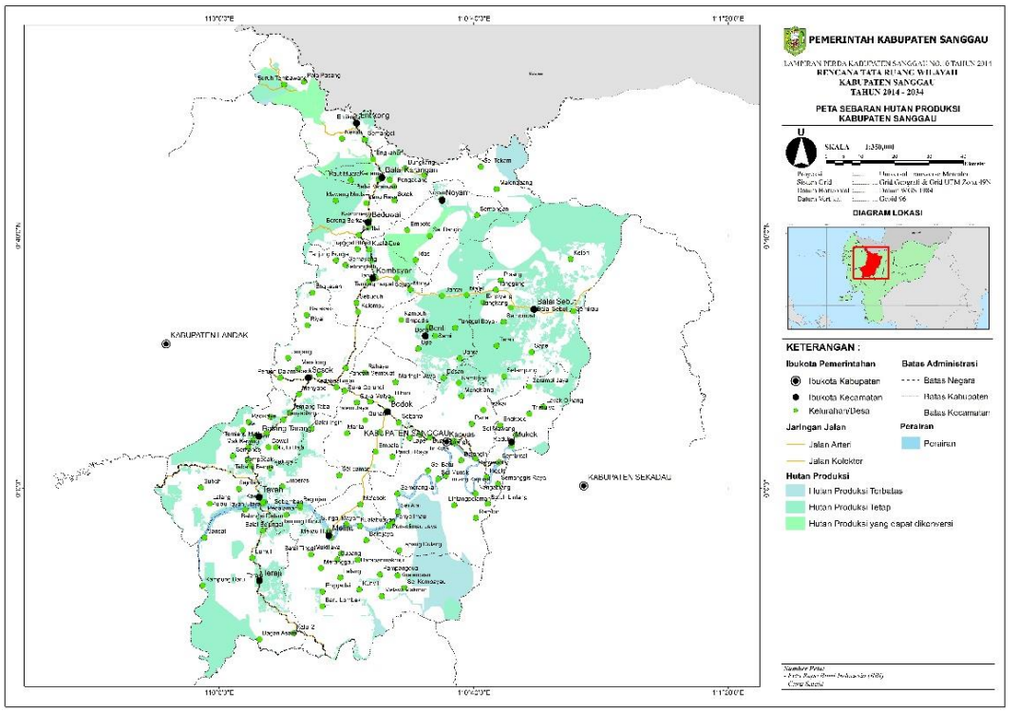

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Hutan Peruntukan Hutan Produksi Kabupaten Sanggau

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

a. Pengembangan pertanian lahan basah perlu didukung dengan pembangunan jaringan irigasi, terutama pada kawasan pertanian rawan banjir seperti di Kecamatan Kembayan, Beduai, dan Jangkang

b. Pengembangan pertanian lahan kering diarahkan pada areal yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, berdasarkan komoditasnya adalah:

   1. Jagung, di Kecamatan Parindu, Kembayan, Kapuas, Tayan Hulu, Beduai dan Sekayam
   2. Ubi kayu, di kecamatan Kapuas, Kembayan, Tayan Hulu, Tayan Hilir, Balai dan Toba
   3. Ubi Jalar, di Kecamatan Kapuas, Kembayan, Mukok, Parindu, Tayan Hilir dan Beduai
   4. Kacang tanah, di Kecamatan Sekayam, Kembayan, Meliau, Mukok, Entikong dan Beduai
   5. Kacang kedelai, di Kecamatan Mukok dan Kembayan
   6. Kacang hijau, di Kecamatan Beduai, Kembayan dan Tayan Hulu

7. Sayur-sayuran, di semua kecamatan
8. Buah-buahan, terutama durian di Batang Tarang, Kecamatan Balai dan rambutan di Kecamatan Sekayam, Kembayan, Mukok dan Bonti.

c. Pengembangan pertanian lahan basah seluas 1.658 Ha dan lahan kering seluas 1.707 Ha di daerah SP 16 dan SP 18 dalam mendukung program nasional yaitu *Food Estate.*

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

a. Kegiatan perkebunan kelapa sawit; arah pengembangan diprioritaskan pada kawasan di Kecamatan Parindu, Kapuas, Mukok, Tayan Hulu, Meliau, Kembayan, Bonti, Toba, Balai, Noyan dan Sekayam
b. Kegiatan perkebunan karet; arah pengembangannya diprioritaskan tersebar pada semua kecamatan
c. Kegiatan perkebunan kakao; arah pengembangannya diprioritaskan pada Kawasan

Kabupaten Sanggau memiliki tiga kawasan perkebunan terdiri atas perkebunan sawit, perkebunan karet, dan perkebunan kakao. Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan kebijakan pemanfaatan kawasan perkebunan secara proposional dan berkelanjutan. Sejauh ini, perkebunan sawit mendominasi kawasan perkebunan di Kabupaten Sanggau, sementara perkebunan karet dan perkebunan kakao belum menjadi perhatian dad dari *stakeholders* baik pemerintah daerah, masyarakat, dan investor.

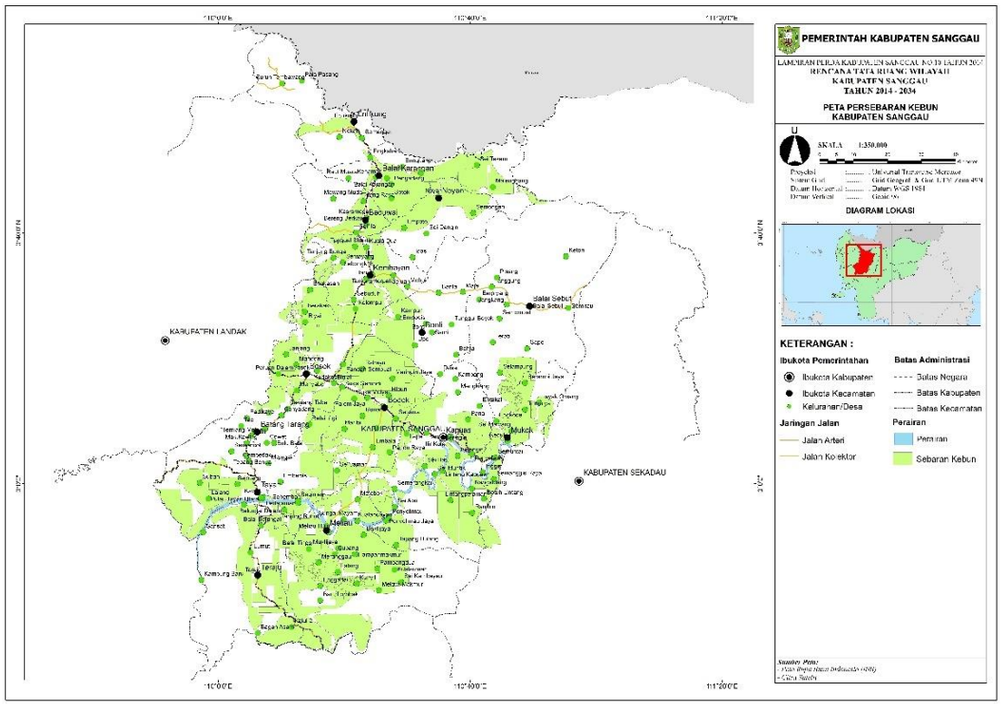

Gambar 2. 6 Peta Kawasan Perkebunan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

4. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan Peternakan di Kabupaten Sanggau diarahkan pada setiap kecamatan berdasarkan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau dapat dikembangkan sebagai kawasan perternakan kategori sesuai dan sesuai bersyarat. Kegiatan peternakan ini umumnya berupa usaha peternakan penduduk yang tersebar di tiap kecamatan wilayah Kabupaten Sanggau. Jenis ternak yang diusahakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan peternakan ini dapat diarahkan pada setiap kecamatan, dengan prioritas pengembanan pada kecamatan yang memiliki rumput yang relatif luas.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Arahan pengembangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Sanggau ini diprioritaskan pada kegiatan:

a. Eksploitasi bauksit di kawasan potensial di Kecamatan Tayan Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba;
b. Pengembangan jenis pertambangan lainnya (seperti; feldspar, granit dan kaolin di Kecamatan Bonti; emas di Kecamatan

Kapuas dan Kecamatan Mukok;

c. Air raksa di Kecamatan Sekayam, Kecamatan Noyan dan Kecamatan Bonti;
d. Perak di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Toba;
e. Alumunium di Kecamatan Sekayam, Kecamatan Bonti, Kecamatan Jangkang dan Kecamatan Kapuas;
f. Minyak bumi dan batubara di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Toba dan Kecamatan Tayan Hilir.

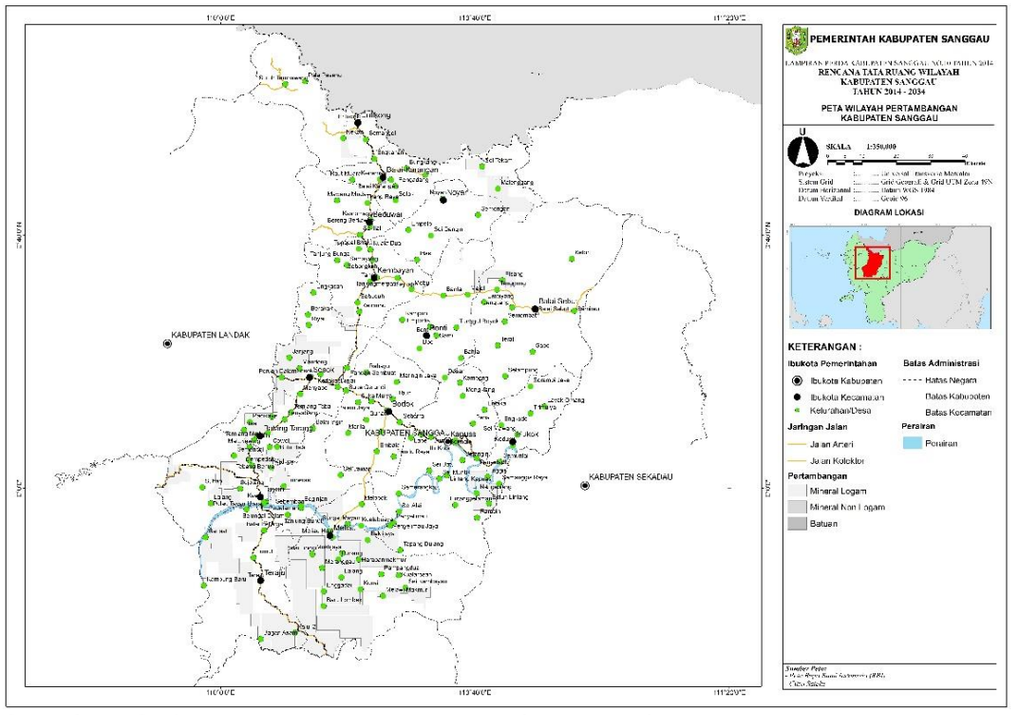

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Potensi Pertambangan
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034

Pengembangan kegiatan pertambangan diprioritaskan pada jenis pertambangan ekpolitasi dan eksplorasi bahan tambangan bauksit dalam areal seluas 36.400 ha (2,83%) yang terletak di Kecamatan Tayan Hilir, Meliau dan Toba. Potensi pertambangan bauksit ini diketahui mempunyai cadangan mineral sebanyak 432.000.000 ton yang terkandung dalam areal seluas 119.509 Ha.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri merupakan kawasan produktif yang diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah pada suatu kawasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kawasan ini adalah aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku serta untuk memasarkan

barang jadi. Oleh karena itu, kedekatan akan jaringan jalan dan pelabuhan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kawasan industri. Selain itu perlu diperhatikannya mengenai dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/kawasan industri di wilayah Kabupaten Sanggau diarahkan sebagai berikut:

a. Industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) diarahkan di Kecamatan Parindu, Kembayan, Meliau, Kapuas, Bonti dan Tayan Hilir.
b. Industri pengolahan hasil hutan diarahkan di Kecamatan Kapuas.
c. Industri pengolahan hasil pertambangan diarahkan di Kecamatan Tayan Hilir dan Toba.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman adalah kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Selain berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga, permukiman juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkungan terbatas.

Pengembangan kawasan permukiman diprioritaskan di Kota Sanggau, Kota Entikong, Kota Tayan dengan zona perumahan susun, deret dan taman, sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Ibu Kota Kecamatan (IKK) dapat mengembangkan zona perumahan taman ataupun renggang mengingat masih cukupnya ketersediaan lahan.

Dikaitkan dengan kondisi eksisting wilayah dan kecenderungan perkembangannya, maka hingga tahun 2034 diperkirakan akan terdapat pusat–pusat permukiman yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meningkat menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kota Batang Tarang, Meliau, Kedukul, Bonti, Beduai dan Kembayan. Begitu juga dengan kota yang berfungsi sebagai PPL, diharapkan kota-kota tersebut berpotensi menjadi PPK,

seperti Kota Teraju yang merupakan jalur poros selatan Pontianak-Tayan-Toba-Palangkaraya dan Kota Balai Karangan yang merupakan jalur kawasan perbatasan antar negara dan alternatif menuju Kabupaten Sintang. Untuk Kawasan Simpang Tanjung di Kecamatan Tayan Hulu, karena posisinya yang strategis akan berkembang menjadi kota kecil dengan fungsi sebagai kawasan komoditas khusus. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan sebagai berikut:

a. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan hutan produksi disediakan areal budidaya pertanian, perkebunan, peternakan seluas 2-5 ha/KK dikali jumlah KK pada kawasan permukiman tersebut.
b. Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan lindung, jika jumlah penduduknya kurang dari 50 KK, diarahkan untuk dipindahkan melalui penyelenggaraan terpadu dengan program transmigrasi, akan tetapi jika jumlah penduduknya lebih dari 50 KK, maka permukiman tersebut perlu ditata batas.

Penempatan penduduk diarahkan pada wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terbelakang dan berpenduduk sedikit, yaitu meliputi bagian wilayah Kecamatan Jangkang, Noyan, Beduai dan Toba, yang didukung dengan pengembangan kegiatan ekonomi (industri) berskala besar, serta pengembangan prasarana dan sarana wilayah perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kegiatan pariwisata didasarkan pada pertimbangan besarnya potensi wisata yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Sanggau. Tujuan dari pengembangan wisata ini untuk mengembangkan potensi wisata daerah agar dapat dijual atau dipasarkan guna meningkatkan perekonomian daerah dan agar dapat dijual atau dipasarkan guna meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha.

Perencanaan pembangunan untuk menentukan kawasan pengembangan pariwisata disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaan pembangunan berkenaan dengan pembiayaan personil yang tersedia.

Adapun Kawasan Pariwisata yang menjadi prioritas pengembangan wisata adalah sebagai berikut.

a. Zona 1, meliputi: Wisata Alam Danau Laet, Wisata Alam Riam Ensiling, Rumah Betang Domong Sembilan Raja Sepuloh, Riam Bondes dan Ritual Adat Nyeser.

b. Zona 2, meliputi: Gua Maria Thang Raya, Arung Jeram Suruh Tembawang, PLBN Entikong, Tembawang Tampunjuah dan Padong Pangeran

c. Prioritas 3, meliputi: Pancur Aji, Riam Macan, Kampung Wisata Sentana, Taman Kehati, Air Terjun Saka Dua, Pulo Mas, Batu Posok, Keraton Istana Surya Negara, Rumah Betang Nek Kopar dan Air Terjun Kuala Rosan

d. Prioritas 4, meliputi: Air Terjun Malan, Riam Asam, Sipant Lotup, Riam Suwok, Bukit Bakmun, Bukit Sebomban dan Bukit Bahu.

Apabila dilihat dari rencana pengembangan kawasan pariwisata yang mengikuti konsep tata ruang wilayah, Kabupaten Sanggau termasuk dalam Destinasi Pariwisata Provinsi 2 (DPP 2). Destinasi Pariwisata Kabupaten Sanggau ditetapkan berada di seluruh wilayah kecamatan dengan jumlah yang bervariasi di setiap kecamatannya. Penetapan destinasi pariwisata Kabupaten Sanggau secara umum terdiri dari 4 jenis destinasi pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan event wisata yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.

Kawasan pengembangan pariwisata merupakan arahan pembangunan kawasan pariwisata yang dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan daerah.

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Sanggau terdiri dari 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi:

a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1 adalah Zona Satu yang meliputi seluruh destinasi wisata yang ada di kecamatan Toba, Tayan Hilir, Balai dan Tayan Hulu;

b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2 adalah Zona Dua yang meliputi seluruh destinasi wisata yang ada di kecamatan Entikong, Beduai, Sekayam dan Kembayan;

c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 3 adalah Zona Tiga yang meliputi seluruh destinasi pariwisata yang ada di kecamatan Parindu, Kapuas dan Meliau;

d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 4 adalah Zona Empat yang meliputi seluruh destinasi pariwisata yang ada di kecamatan Noyan, Bonti, Jangkang dan Mukok.

Kawasan Strategis Pariwisata merupakan arahan pengembangan kawasan pariwisata yang dianggap strategis untuk menjawab isu isu strategis pembangunan wilayah dan atau pembangunan kepariwisataan. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Sanggau terdiri dari 5 KSP yang tersebar di 4 KPP sebagai berikut:

a. KSP 1 adalah Danau Laet
b. KSP 2 adalah Riam Ensiling
c. KSP 3 adalah PLBN Entikong
d. KSP 4 adalah Pancur Aji
e. KSP 5 adalah Sipant Lotup

2.1.2.3 Potensi Sumber Daya Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau memiliki potensi sumberdaya terutama pada sektor pertanian dalam artian luas. Selain tingginya ketersediaan sumberdaya pertanian, sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau (69,94%) bekerja pada sektor pertanian. Kedepan, potensi sumberdaya ini perlu terus dioptimalkan sehingga lebih memiliki *value added*, dan diharapkan dapat dijadikan *trigger* dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Adapun potensi sumber daya Kabupaten Sanggau sebagai berikut.

1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Potensi daerah Kabupaten Sanggau bidang pertanian tanaman pangan adalah produksi tanaman padi, jagung, kedelai dan ubi. Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa tanaman padi merupakan komoditas yang memiliki jumlah produksi sebesar 85.131,76 ton pada tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 jumlah produksi menurun sebesar 19.168,88 ton dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan luas lahan sawah mengalami penurunan menyesuaikan luas lahan baku sawah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Surat Keputusan Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 sehingga berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain itu jumlah produksi kedelai dan ubi juga mengalami penurunan di tahun 2020. Adapun penurunan produksi kedelai sebesar 3,84 ton, sementara penurunan produksi ubi sebesar 1.758 ton.

Tabel 2. 2
Jumlah Produksi Potensi Bidang Pertanian di Kabupaten Sanggau

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Produksi Tahun (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	182.837	204.940	74.603,57	85.131,76	65.962,88
Jagung	4.207	5.751	9.274,68	13.213	19.894,10*
Kedelai	6	4,50	5,40	5,34	1,5*
Ubi	16.578	18.513	12.047	23.914	22.156*

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hrotikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau. 2020
*Ket : * angka sementara*

Terdapat 4 jenis lahan pertanian di Kabupaten Sanggau yaitu Lahan Sawah Beririgasi, Lahan Sawah Tadah Hujan, Lahan Kering Tegal/Kebun dan Lahan Kering Ladang/Huma. Lahan Kering Tegal/Kebun merupakan lahan yang paling luas dibandingkan jenis lahan pertanian lainnya serta menjadi satu-satu nya jenis lahan pertanian yang mengalami peningkatan di tahun 2020. Peningkatan luasan lahan kering tegal/kebun terus terjadi dengan

peningkatan rata rata sekitar ±2.500 Ha tiap tahunnya. Sedangkan jenis lahan pertanian lainnya mengalami kondisi fluktuatif selama tahun 2017-2020, dimana pada lahan sawah irigasi terjadi peningkatan lusan di tahun 2017-2018 dan terjadi penurunan luasan sebesar 5.196 Ha di tahun 2019-2020, lahan sawah tadah hujan mengalami penurunan luasan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12.212 Ha di tahun 2020, dan lahan kering ladang/huma mengalami kenaikan di tahun 2018-2019 serta mengalami penurunan di tahun 2019-2020 sebesar 1.256 Ha. Adapun penjabaran lengkap terkait luasan jenis lahan pertanian adalah sebagai berikut;

Tabel 2. 3
Jumlah Luas Lahan Potensi Bidang Pertanian di Kabupaten Sanggau

Jenis Lahan Pertanian	Jumlah Luas Lahan (Hektar)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lahan Sawah beririgasi	17.172	18.810	18.988	18.988	13.792
Lahan Sawah Tadah Hujan	27.833	30.609	31.379	31.379	19.167
Lahan Kering Tegal/Kebun	50.769	55.769	63.354	65.365	65.715
Lahan Kering Ladang/Huma	47.432	63.115	61.944	63.608	62.352

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hrotikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau. 2020

Upaya peningkatan produktivitas bidang pertanian tidak terlepas dari peran sumber daya pengelola pertanian. Kabupaten Sanggau memiliki kelompok tani sebanyak 2.162 kelompok tani pada tahun 2020. Jumlah kelompok ini meningkat ditahun sebelumnya yaitu 1.874 kelompok tani, Selain jumlah kelompok tani, untuk peningkatan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Sanggau juga harus didukung dengan adanya ketersediaan mesin pertanian. Jumlah ketersediaan mesin pertanian di Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebanyak 64 unit.

2. Bidang Pertanian Hortikultura

Potensi daerah Kabupaten Sanggau bidang hortikultura adalah sayuran (bawang daun, sawi, lobak, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melinjo, petai, jengkol), buah-buahan (melon, semangka,

blewah, alpukat, belimbing, duku/langsat, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, nangka/cempedak, nenas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, markisa, sirsak, sukun, naga) dan bahan obat nabati (jahe, laos/lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, temukunci, dlingo, kapulaga, mengkudu, mahkota dewa, keji beling, sambiloto, lidah buaya).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, luas tanam dan populasi bidang hortikultura didominasi oleh produksi buah-buahan di tahun 2020 sebanyak 1.774.794 pohon/rumpun dan diikuti oleh sayuran seluas 1.610 hektar dan Biofarmaka seluas 196.961 m^2. Pada potensi bidang hortikultura, luas areal produksi sayuran mengalami penurunan luas tanam.

Tabel 2. 4
Jumlah Luas Tanam dan Populasi Bidang Hortikultura di Kabupaten Sanggau

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Luas Lahan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sayuran (Ha)	1.151	1.418	2.350	2.642	1.610
Buah-buahan (Pohon / Rumpun)	397.085	947.142	1.945.246	1.796.602	1.725.447
Biofarmaka (M^2)	59.772	64.857	66.515	119.229	196.961

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau. 2020

Berdasarkan tabel 2.5 jumlah produksi potensi bidang hortikultura di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan tiap tahun nya, kecuali pada produksi obat nabati yang memiliki kondisi yang fluktuatif terhadap peningkatan atau penurunan sektornya. Pada tahun 2020, produksi hortikultura memiliki penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan iklim yang mempengaruhi jumlah produksi komoditi tanaman hortikultura.

Tabel 2. 5
Jumlah Produksi Potensi Bidang Hortikultura di Kabupaten Sanggau

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Produksi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sayuran (Kwintal)	8.381	9.836	12.842	34.296	31.020
Buah-buahan (Kwintal)	131.036	129.560	348.519	378.441	105.360
Biofarmaka (M2)	209.021	41.585	82.888	453.770	233.376

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau. 2020

3. Bidang Perkebunan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, terdapat 7 (tujuh) jenis tanaman perkebunan yang merupakan produk unggulan potensi bidang perkebunan di Kabupaten Sanggau yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan aren. Jumlah luas areal potensi bidang perkebunan di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas dengan jumlah luas areal yang paling besar di Kabupaten Sanggau yang terus mengalami penambahan luasan area dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Luas areal kelapa sawit di Kabupaten Sanggau tahun 2017 seluas 265.847 Ha dan mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 seluas 314.047 Ha.

Selain komoditas kelapa sawit, yang menjadi salah satu komunitas andalan dan mengalami peningkatan adalah komoditas karet. Jumlah luas areal karet tahun 2016 seluas 106.269 Ha dan pada tahun 2020 sebesar 108.309 Ha. Komoditas dengan luas areal terkecil adalah komoditas aren yang hanya seluas 23 Ha pada tahun 2020.

Tabel 2. 6
Jumlah Luas Areal Potensi Bidang Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Luas Areal (Hektar)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	265.847	283.438	293.797	294.428	314.047
Karet	106.269	106.899	106.933	107.123	108.309

Kelapa	495	617	739	614	625
Kopi	134	129	129	124	179
Lada	2.512	2.584	2.615	2.705	2.839
Kakao	4.747	4.747	4.767	4.786	4.799
Aren	13	13	13	22	23

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, 2020.

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diasumsikan bahwa jumlah produksi potensi bidang perkebunan di Kabupaten Sanggau sejalan dengan luas areal perkebunan, dimana peningkatan luas lahan sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Adapaun jumlah produksi komoditas kelapa sawit merupakan produksi dengan jumlah yang paling besar diantara komoditas lainnya serta mengalami peningkatan produksi tiap tahunnya. Sedangkan produksi perkebunan terkecil adalah komoditas aren dengan jumlah produksi sebesar 13 ton di tahun 2020.

Tabel 2. 7
Jumlah Produksi Potensi Bidang Perkebunan di Kabupaten Sanggau

Jenis Tanaman Produksi	Jumlah Produksi (Ton)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	501.023	517.984	810.710	810.769	940.356
Karet	53.926	53.961	53.976	54.449	63.633
Kelapa	150	201	251	189	239
Kopi	45	46	22	15	12
Lada	1.443	1.462	1.464	1.465	2.144
Kakao	1.205	1.054	1.100	1.091	898
Aren	1	1	1	6	13

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, 2020.

4. Bidang Peternakan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, menunjukkan bahwa potensi unggulan bidang peternakan di Kabupaten Sanggau adalah sapi, kambing dan babi. Sedangkan untuk unggas adalah ternak ayam dan ternak itik. Jumlah populasi tertinggi bidang peternakan adalah babi dengan jumlah populasi tahun 2019 sebesar 33.701 ekor dan tahun 2020 sebesar 34.594 ekor. Jumlah populasi terendah bidang peternakan adalah kerbau dengan jumlah populasi 6 ekor pada tahun 2019 dan sebesar 6 ekor pada tahun 2020. Jumlah populasi tertinggi untuk unggas adalah ayam

dengan jumlah populasi tahun 2019 sebesar 1.580.559 ekor dan tahun 2020 sebesar 1.538.729 ekor. Sedangkan jumlah populasi terendah untuk unggas adalah itik dengan jumlah populasi pada tahun 2019 sebesar 17.426 ekor dan tahun 2020 sebesar 18.494 ekor.

Tabel 2. 8
Jumlah Populasi Potensi Bidang Peternakan dan Unggas di Kabupaten Sanggau

Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi	11.084	12.239	11.461	10.978	11.214
Kerbau	5.895	3	4	6	6
Kambing	32.111	6.679	6.495	6.467	6.483
Babi	7	33.587	32.919	33.701	34.594
Ayam	518.928	1.321.421	1.923.309	1.580.559	1.538.729
Itik	16.591	17.066	17.426	17.426	18.494

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, 2020

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa jumlah kasus wabah/endemi pada hewan di Kabupaten Sanggau tahun 2017 sebanyak 257 kasus.

5. Bidang Perikanan

Potensi bidang perikanan di Kabupaten Sanggau dapat dikategorikan menjadi perikanan perairan umum (ikan Patin, Gurami, Lais, Toman, Belida, Udang Galah, Baong, Tawes/Tengadak, Jelawat, Gabus, Tapah, dan Ikan Lainnya.) dan perikanan budidaya (ikan Mas, Nila, Lele Dumbo, Bawal, Gurami, Lainnya.). Jumlah produksi ikan perairan umum sebesar 1.335,10 ton pada tahun 2019 dan sebesar 1.700,20 ton pada tahun 2020. Sedangkan jumlah produksi ikan perairan budidaya pada tahun 2019 sebesar 6.661,00 ton dan tahun 2020 sebesar 8.154,82 ton.

Tabel 2. 9
Jumlah Produksi Potensi Bidang Perikanan di Kabupaten Sanggau

Jenis Perairan		Jumlah Produksi (Ton)			
	2016	2017	2018	2019	2020
Perairan Umum	1.457,70	1.448,60	1.512,70	1.335,10	1.700,20
Perairan Budidaya	5.621,00	5.657,60	7.707,00	6.661,00	8.154,82
Jumlah	7.078,7	7.106,20	9.219,7	7.996,10	9.855,02

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau. 2020

Berdasarkan data luas area perikanan menurut jenis budidaya ikan, terbagi menjadi Danau, Pagong, Keramba, Kolam Air Deras, Keramba Jaring Tancap (KJT), Kolam Teknis, Bendungan, Keramba Jaring Apung (KJA), dan Kolam Terpal. Jumlah areal terluas pada tahun 2019 adalah Kolam Teknis, seluas 165.200 Ha, sedangkan jumlah unit perikanan terbanyak adalah kolam jaring apung sebanyak 28.896 unit, sedangkan pada tahun 2020 jumlah areal terluas adalah kolam teknis, seluas 400.000 Ha, sedangkan jumlah unit perikanan terbanyak adalah KJA sebanyak 81.200 unit. Sejak tahun 2018 areal kolam terpal masuk katagori areal kolam teknis.

Tabel 2. 10
Luas Areal Perikanan menurut Jenis Budidaya Ikan di Kabupaten Sanggau

Areal Perikanan	Luas (Ha) / Jumlah (Unit)			
	2017	2018	2019	2020
Danau (Ha)	2.492	136.364	136.364	136.364
Pagong (Ha)	49,5	44	44	44
Keramba (Unit)	302	160	12.838	40.000
Kolam Air Deras (M^2)	90	1.000	1.250	4.308
KJT (Unit)	310	2.063	14.400	38.000
Kolam Teknis (Ha)	2.003	16,52	165.200	400.000
Bendungan (Ha)	90	12,85	12,85	12,85
KJA (Unit)	694	217	28.896	81.200
Kolam Terpal (Unit)	1.518	-	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan. 2020

Nilai perikanan umum dan budidaya di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah nilai perikanan perairan umum pada tahun 2017 sejumlah Rp. 47.304.600.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp. 58.906.800. Sedangkan perikanan perairan budidaya pada tahun 2017 bernilai Rp. 134.244.942.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp. 272.789.209.

Tabel 2. 11
Jumlah Nilai Perikanan Umum dan Budidaya di Kabupaten Sanggau

Jenis Ikan	Nilai Pada Tahun (Ribu Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
Ikan Perairan Umum				
Patin	5.040.000	3.783.500	5.894.000	8.781.500
Gurami	962.500	3.811.500	1.494.500	1.536.500
Lais	6.492.000	5.608.000	6.898.500	11.176.000
Toman	3.060.000	4.084.500	3.762.500	3.954.000
Belida	3.857.000	3.374.000	3.255.000	4.088.000

Jenis Ikan	Nilai Pada Tahun (Ribu Rupiah)			
	2017	2018	2019	2020
Udang Galah	453.600	2.980.000	1.824.000	1.920.800
Baong	4.231.500	3.300.500	6.440.000	8.326.500
Tawes/Tengadak	4.194.000	3.894.000	6.835.500	6.645.000
Gabus	3.663.000	4.819.500	5.852.000	5.706.000
Tapah	0	8.046.500	0	0
Jelawat	2.214.000	0	5.232.500	6.772.500
Ikan Lainnya	13.137.000	8.733.000	0	0
Subtotal I	**47.304.600**	**52.435.000**	**47.488.500**	**58.906.800**
Ikan Budidaya				
Mas	34.768.161	83.742.180	59.520.000	86.742.944
Nila	32.008.365	119.495.600	111.904.400	105.182.305
Lele Dumbo	38.040.743	68.163.900	78.367.450	35.821.744
Bawal	9.883.048	7.229.385	3.605.000	0
Gurami	4.465.187	226.200	1.980.000	3.555.000
Lainnya	15.079.438	96.126.515	0	0
Subtotal II	**134.244.942**	**374.983.780**	**255.376.850**	**272.789.209**
Jumlah Total	**181.549.542**	**427.418.780**	**302.865.350**	**331.696.009**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, 2020

6. Bidang Pertambangan

Data jenis potensi pertambangan serta lokasi menurut kecamatan di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Terdapat beragam jenis potensi bahan galian di Kabupaten Sanggau yaitu emas, arsen, bauksit, air raksa, antimoni, perak, feldspar, mika, pasir kwarsa, kaolin dan sebagainya yang tersebar di Kabupaten Sanggau. Namun, terdapat potensi bahan galian yang hanya berada pada satu lokasi misalnya bahan galian air raksa dan arsen yang hanya terdapat di Kecamatan Bonti.

Tabel 2. 12
Jenis Potensi Pertambangan Serta Lokasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau

Bahan Galian	Lokasi (Kec.)	Potensi
Emas	Meliau, Sekayam, Kapuas, Mukok, Jangkang, Beduai, Noyan, Entikong, Toba, Kembayan	54,4 Ton
Arsen	Bonti	-
Bauksit	Ty. Hilir, Ty. Hulu, Toba, Meliau, Kapuas, Balai, Kembayan, Beduai	84.036,22 MT
Air Raksa	Bonti	-
Antimoni	Meliau, Sekayam	-
Perak	Tayan, Meliau	-
Feldspar	Kembayan, Bonti	1.692.535 Ton
Mika	Bonti, Kembayan	10 Ton
Pasir Kwarsa	Tayan Hilir, Jangkang	65.450.000 Ton
Kaolin	Kapuas, Tayan Hilir, Sekayam, Mukok,	3.385.000 Ton

Bahan Galian	Lokasi (Kec.)	Potensi
Granit	Tayan Hulu, Bonti, Ty. Hilir, Beduai, Entikong, Jangkang, Parindu, Kembayan	>2.382.707.880 Ton
Andesit	Balai, Ty.Hilir, TY. Hulu, Entikong	34.500.000 Ton
Basalt	Tayan Hilir	>3.000.000.000 Ton
Batu sabak/Slate	Tayan Hilir	-
Agate	Hulu Sei. Sekayam	-
Intan	Hulu Sei. Sekayam, Entikong	-
Barit	Balai Karangan	
Diorit	Semuntai, Entikong	>768.000.000 Ton
Lempung	Balai Karangan, Ty. Hilir, Sekayam, Bonti, Ty. Hulu, Jangkang, Mukok, Parindu, Kembayan	-
Pasir Sungai	Semuntai, Beduai	-
Sirtu	Balai Karangan, Noyan, Beduai, Ty. Hulu	-
Tembaga	Noyan	-
Timbal	Balai Karangan	-
Seng	Balai Karangan	-
Mangan	Balai Karangan	-
Biji Besi	Bonti, Jangkang, Mukok, Tayan Hulu	-
Zirkon	Kapuas	93.000 Kg
Batu Bara	Jangkang, Bonti, kembayan, Beduai, Noyan, Sekayam	-
Air Terjun	Entikong, Noyan, Meliau, Kapuas	250.000.000 BCM
Minyak Bumi /Gas	Mukok	561.470.000 Barel
Rijang/ Chert	Kapuas	-
Pasir Darat	Kapuas	-
Jesper	Mukok	-

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Sanggau

Jumlah unit usaha potensi bidang pertambangan di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Bahan galian biji besi pada tahun 2020, terdapat 1 unit perusahaan swasta yang mengelola. Bahan galian bauksit (biji almunium) dikelola oleh 30 perusahaan. Bahan galian emas dikelola oleh 11 perusahaan swasta, dan bahan tambang mineral lainnya dikelola 21 perusahaan.

Tabel 2. 13
Jumlah Unit Usaha Potensi Bidang Pertambangan di Kabupaten Sanggau

Keterangan	Jumlah Pada Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Biji Besi	2 perusahaan swasta	2 perusahaan swasta	2 perusahaan swasta	1 perusahaan
Bauksit (Biji Almunium)	42 perusahaan (2 perusahaan pemerintah, 40 perusahaan swasta)	42 perusahaan (2 perusahaan pemerintah, 40 perusahaan swasta)	42 perusahaan (2 perusahaan pemerintah, 40 perusahaan swasta)	30 perusahaan
Emas	17 perusahaan swasta	17 perusahaan swasta	17 perusahaan swasta	11 perusahaan
Bahan Tambang Mineral Lainnya	8 perusahaan (1 perusahaan pemerintah, 7 perusahaan swasta)	8 perusahaan (1 perusahaan pemerintah, 7 perusahaan swasta)	8 perusahaan (1 perusahaan pemerintah, 7 perusahaan swasta)	21 perusahaan

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau. 2020

7. Bidang Pariwisata

Selama ini Objek wisata di Kabupaten Sanggau dikelompokan menjadi 2 kelompok, yang terdiri dari objek wisata alam dan objek wisata budaya. Objek wisata alam di Kabupaten Sanggau berjumlah 57 objek yang lokasinya tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan objek wisata budaya di Kabupaten Sanggau berjumlah 25 objek dan lokasinya tersebar dibeberapa kecamatan. Objek wisata di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok objek yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan jumlah objek wisata, pada tahun 2020 jumlah objek wisata paling tinggi adalah objek wisata alam dengan jumlah 57 objek. Jumlah objek wisata terendah pada tahun 2020 adalah objek wisata cagar alam.

Tabel 2. 14
Jumlah Objek Wisata Potensi Bidang Pariwisata
di Kabupaten Sanggau

Jenis Wisata	Jumlah Pada Tahun (Objek)			
	2017	2018	2019	2020
Wisata Budaya	6	6	6	25
Wisata Cagar Alam	2	2	2	1
Wisata Pertanian	2	2	2	-
Wisata Alam	44	44	44	57
Wisata Sejarah	15	15	15	27
Wisata Religi	4	4	4	5
Wisata Kuliner	2	2	2	5
Wisata Buatan	3	3	3	5

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau 2020.

Beragam dan meningkatnya jumlah objek wisata serta strategisnya wilayah karena berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Sarawak) menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Sanggau, baik dalam kegiatan perekonomian maupun kegiatan lain yang dapat menghasilkan devisa, seperti adanya kunjungan dari warga asing mancanegara melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. Kunjungan warga asing ini dapat berupa kunjungan usaha, wisata, kunjungan sosial budaya, kunjungan singkat, dan lainnya. Untuk itu, hal ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan sektor pariwisata, terutama melakukan pengelolaan daya tarik wisata yang berkualitas.

Adapun faktor terjadinya penurunan jumlah wisatawan karena adanya pandemi covid-19, sehingga banyak aktivitas wisata yang harus ditutup sementara atau mungkin dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu berdasarkan data pada tabel 2.15 terdapat 3 agen perjalanan wisata di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020, serta Pemandu wisata bersertifikat sebanyak 5 orang dan pemandu wisata tidak bersertifikat sebanyak 75 orang.

Tabel 2. 15
Jumlah Agen Perjalanan Wisata Dan Pemandu Wisata Potensi Bidang Pariwisata di Kabupaten Sanggau

Jenis	Jumlah Pada Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Agen Perjalanan Wisata	3	3	3	3	3
Pemandu Wisata Bersertifikat	0	5	5	5	5
Pemandu Wisata Tidak Bersertifikat	15	15	15	75	75

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau. 2020

Sementara itu berdasarkan data pada tabel 2.16, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sanggau tahun 2018 sebanyak 16.460 orang, tahun 2020 terjadi jumlah penurunan drastis wisatawan sebanyak 2.788 orang.

Semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Sanggau serta adanya dukungan fasilitas penunjang bagi wisatawan, tentu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang akan berkunjung.

Tabel 2. 16
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2018

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	1.099	1.853	785	993	1257
Februari	2.366	1.361	1.548	1.070	998
Maret	1.944	2.103	1.431	1.328	509
April	1.467	1.691	800	715	2
Mei	2.044	1.872	1.294	778	0
Juni	1.483	2.084	1.991	1.450	4
Juli	2.408	1.096	1.006	761	2
Agustus	1.402	1.268	1.407	1.276	1
September	2.228	957	1243	724	9
Oktober	3.326	1.098	1.159	n.a	3
November	4.384	1.058	1.648	n.a	3
Desember	7.142	2.758	2.148	n.a	0
Jumlah	**31.293**	**19.199**	**16.460**	**10.528**	**2.788**

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau. 2020

Permasalahan pada sektor pariwisata selama ini yaitu belum optimalnya daya tarik wisata terutama berbasis kearifan lokal; sarana dan prasarana destinasi pariwisata belum memadai; dan belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, permasalah baru yang menjadi

penyebab utama menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu adanya pandemic covid-19. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan perlunya ditetapkan strategi penyelesaian yang komprehensif dan integrative, khususnya penerapan pada era baru pasca pandemic covid-19 sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Sanggau dapat meningkat secara massif dan berkelanjutan. Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata dapat mewujudkan manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung. Sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.

2.1.2.4 Sektor Unggulan Kabupaten Sanggau

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Location Quotient (LQ), terdapat beberapa sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor unggulan/sektor basis dan sektor yang memiliki produktivitas berimbang. Adapaun yang termasuk kedalam sektor basis antara lain; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Industri Pengolahan. Sedangkan sektor ekonomi yang masuk ke dalam kategori sektor yang memiliki produktifitas berimbang antara lain; Sektor Informasi dan Komunikasi; dan Sektor Real Estat.

1. **Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

   Selama periode waktu 2016-2020, sektor ini memiliki nilai LQ>1, artinya sektor ini merupakan sektor unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif terutama pada subsektor tanaman perkebunan dan jasa pertanian serta perburuan dimana lebih cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Terdapat 7 (tujuh) jenis tanaman perkebunan yang merupakan produk unggulan potensi bidang perkebunan di Kabupaten Sanggau yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan aren. Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas

dengan jumlah luas areal yang paling besar di Kabupaten Sanggau yang terus mengalami penambahan luasan area dari 2019 sampai 2020. Luas areal kelapa sawit di Kabupaten Sanggau pada tahun 2019 seluas 294.428 meningkat menjadi 314.047 hektar pada tahun 2020. Selain komoditas kelapa sawit, terdapat komoditas karet yang menjadi komoditas andalan. Pada tahun 2020 produksi tanaman karet sebanyak 63.633 ton. Luas areal tanaman karet di tahun 2020 yaitu 108.309 hektar.

Potensi unggulan bidang peternakan di Kabupaten Sanggau adalah sapi, kambing, dan babi. Sedangkan untuk unggas adalah ternak ayam dan ternak itik. Jumlah populasi tertinggi bidang peternakan adalah babi dengan jumlah populasi pada tahun 2020 sebesar 34.594 ekor. Jumlah populasi terendah bidang peternakan adalah kambing dengan jumlah populasi 6.483 ekor pada tahun 2020. Jumlah populasi unggas juga mengalami peningkatan antara lain; ayam ras dengan jumlah populasi pada tahun 2020 sebesar 344.335 ekor dan populasi itik sebanyak 18.494 ekor. Populasi ayam ras juga mengalami peningkatan menjadi 1.538.729 ekor.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memiliki rapor yang sama dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada periode 2016-2020 sektor ini pula memiliki nilai LQ>1. Dengan kata lain sektor ini memiliki keunggulan kompetitif. Potensi bahan galian di Kabupaten Sanggau yaitu emas, arsen, bauksit, air raksa, antimoni, perak, feldspar, mika, pasir kwarsa, kaolin dan sebagainya yang tersebar di Kabupaten Sanggau. Namun, terdapat potensi bahan galian yang hanya berada pada satu lokasi misalnya bahan galian air raksa dan arsen yang hanya terdapat di Kecamatan Bonti.

3. Sektor Industri Pengolahan

Dalam periode waktu 2016-2020, sektor ini memiliki nilai rata-rata LQ>1 dengan nilai indeks rata-rata 1,09. Sejak 2010 sampai 2020 sektor ini merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif karena cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau.

4. Sektor Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Pada kondisi pandemic covid-19 saat ini, sektor informasi dan komunikasi menjadi semakin penting untuk menunjang berbagai aspek seperti Pendidikan, Pemerintahan, serta Ketenagakerjaan dalam melakukan aktivitas jarak jauh. Dari berbagai hal tersebut, sektor ini mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dan menjadi salah satu sektor yang memiliki produktivitas berimbang antara kabupaten dan provinsi dengan dibuktikan oleh nilai LQ yang hampir mendekati 1.

Selain itu, distribusi sektor Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 4,07 persen pada tahun 2019 menjadi 4,24 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB kategori Informasi dan Komunikasi pada tahun 2020 sekitar 7,94 persen.

Gambar 2. 8
Grafik Analisis Locatian Quary (LQ)

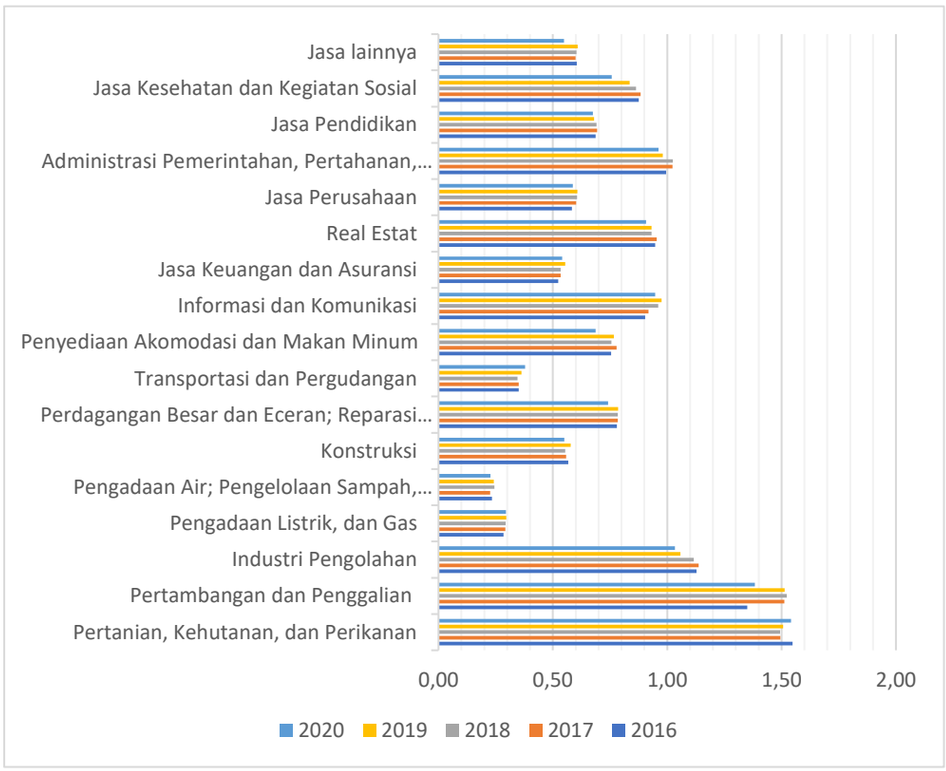

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klassen, yaitu perhitungan didasarkan pada dua hal yaitu proporsi output sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total produk domestik bruto per kapita dan pertumbuhan dari masing-masing sektor. Dari perhitungan proporsi dan pertumbuhan Dari perhitungan proporsi dan pertumbuhan tersebut,beberapa sektor dapat diklasifikasikan menjadi; (1) Prima, (2) Berkembang, (3) Potensial, dan (4) Relatif Terbelakang.

Jika suatu sektor tergolong dalam kelompok prima, tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, artinya daerah tersebut mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sektor tersebut. Tetapi jika suatu sektor masuk dalam kelompok relatif terbelakang tentu Pemerintah Daerah harus melakukan upaya pengembangan sektor tersebut dengan menganalisis berbagai faktor yang tersedia. Dari hasil perhitungan nilai Tipologi Klassen untuk tiap-tiap sektor lapangan usaha di Kabupaten Sanggau, diperoleh nilai sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17
Klasifikasi Sektoral Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2020

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010) ADHK		PDRB Per Kapita Sanggau	PDRB Per Kapita Kalimantan Barat	Laju Pertumbuhan Sektoral Sanggau
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.115.851,55	5.973.064,35	6,22
B	Pertambangan dan Penggalian	2.269.979,95	1.493.852,05	13,66
C	Industri Pengolahan	4.535.081,97	3.992.897,49	-2,14
D	Pengadaan Listrik, dan Gas	9.452,68	29.150,71	14,92
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9.564,06	38.312,19	1,88
F	Konstruksi	1.530.356,66	2.533.469,80	-7,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.780.189,59	3.414.432,70	-12,29
H	Transportasi dan Pergudangan	364.430,45	875.069,11	-13,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365.253,41	483.515,47	-25,69
J	Informasi dan Komunikasi	1.483.994,59	1.425.771,56	7,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	549.092,89	923.469,29	-0,26
L	Real Estate	704.003,00	706.284,60	1,12
M,N	Jasa Perusahaan	71.686,10	111.204,70	-5,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.351.230,11	1.279.015,45	2,06
P	Jasa Pendidikan	668.586,90	901.370,34	-6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	386.805,02	465.056,07	17,87
R,S, T,U	Jasa lainnya	144.991,30	240.225,08	-20,35
Total		27.340.550,21	24.886.160,97	0,7

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sanggau menjadi empat karakteristik, yaitu:

1. **Kuadran I (Prima):** Sektor Maju dan Cepat Tumbuh. Terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Adapun nilai PDRB per kapita tiap sektor dan rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Sanggau bernilai lebih tinggi dibandingkan provinsi sehingga ke-2 sektor tersebut.

2. **Kuadran II (Berkembang)**: Sektor Berkembang dan Cepat Tumbuh. Terdiri dari sektor pengadaan listrik, dan gas; sektor transportasi dan pergudangan; sektor jasa keuangan dan asuransi; dan sektor jasa Pendidikan. Sektor-sektor tersebut masuk ke dalam kategori berkembang karena memiliki rata-rata pdrb per kapita sektor lebih rendah tetapi rata-rata laju pertumbuhan sektor lebih tinggi dari rata-rata Provinsi.

3. **Kuadran III (Potensial)**: Sektor Maju tetapi Tertekan. Terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor informasi dan komunikasi. Pada kuadran ini sektor yang termasuk didalam nya merupakan sektor dengan peningkatan pada PDRB ADHK tahun terakhir yang lebih tinggi dibandingkan provinsi namun rata-rata laju pertumbuhan lebih rendah dari provinsi.

4. **Kuadran IV (Sektor Relatif Tertinggal)**: Terdiri dari sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; sektor konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut termasuk dalam kuadran IV dikarenakan memiliki rata-rata sektor/subsektor dan rata-rata laju pertumbuhan sektoral yang lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Secara umum di Kabupaten Sanggau tidak terdapat daerah berpotensi rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sanggau tidak termasuk jalur lempeng tektonik gunung berapi yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi dan longsor karena gempa tektonik. Namun, pada musim penghujan terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan ketinggian air sungai diatas rata-rata, terutama di sepanjang kawasan DAS Kapuas dan sub DAS Sekayam dengan area seluas ±365.743,00 Ha. Sedangkan kawasan berpotensi rawan longsor terdapat di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Jangkang dan Kapuas dengan intensitas dan luasan yang kecil. Adapun karakteristik kerawanan daerah bidang bencana alam di Kabupaten Sanggau sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 18
Karakteristik Kerawanan Daerah Bidang Bencana Alam di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Dusun / Desa / Kelurahan	Bencana	Ket.
1.	Kapuas	Ds. Sei Muntik	Banjir, tanah longsor, puting beliung	Luas Wilayah: 1.382,00 Km² Desa : 20 Dusun : 68 Kelurahan : 6
		Ds. Sei Bemban	Banjir dan tanah longsor	
		Lingkungan Sei Ranas Kel. Tj. Kapuas	Banjir dan tanah longsor	
		Kel. Sei. Sengkuang	Banjir dan tanah longsor	
		Kel. Tj. Kapuas	Banjir, tanah longsor, puting beliung	
		Kel. Tj. Sekayam	Banjir dan tanah longsor	
		Lingkungan Liku Kel. Beringin	Banjir dan tanah longsor	
		Dsn. Balai Nanga	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Kambong	Karhutla	
		Ds. Mengkiang	Karhutla	
		Ds. Rambing	Karhutla	
		Ds. Lape	Karhutla	
		Lintang Pelaman	Karhutla	
2.	Mukok	Ds. Kedukul	Banjir, tanah longsor serta karhutla	Luas Wilayah: 501,00 Km² Desa : 9 Dusun : 47
		Ds. Inggis	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Semuntai	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Sejata	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Layak Omang	Karhutla	
		Desa Sei Mawang	Karhutla	
3.	Jangkang	Ds. Semirau	Banjir dan tanah longsor	Luas Wilayah: 1.599,20 Km² Desa : 11 Dusun : 70
		Ds. Sape	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Tanggung	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Ketori	Karhutla	

No	Kecamatan	Dusun / Desa / Kelurahan	Bencana	Ket.
		Ds. Pisang	Karhutla	
		Ds. Balai Sebut	Karhutla	
		Ds. Selampang	Karhutla	
		Ds. Semombat	Karhutla	
4.	Bonti	Ds. Bonti	Banjir dan karhutla	Luas Wilayah: 1.121,80 Km² Desa : 9 Dusun : 53
		Ds. Upe	Banjir	
		Ds. Kampuh	Banjir	
		Ds. Bahta	Banjir dan puting beliung	
		Ds. Sami	Banjir, karhutla dan puting beliung	
		Ds. Bantai	Karhutla	
5.	Parindu	Ds. Gunam	Banjir	Luas Wilayah: 593,9 Km² Desa : 14 Dusun : 64
		Ds. Barakak	Banjir	
		Ds. Sengoret	Banjir	
		Ds. Marita	Karhutla	
		Ds. Suka Gerundi	Karhutla	
		Ds. Maringin Jaya	Karhutla	
		Ds. Maju Karya	Karhutla	
6.	Meliau	Ds. Sei Mayam	Banjir dan tanah longsor	Luas Wilayah: 1.495,70 Km² Desa : 19 Dusun : 82
		Ds. Meranggau	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Kunyil	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Pampang 2	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Meliau Hulu	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Meliau Hilir	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Kunyil	Banjir, tanah longsor serta karhutla	
		Ds. Kuala Buayan	Karhutla	
		Ds. Sei Kembayau	Karhutla	
		Ds. Cupang	Karhutla	
		Ds. Balai Tinggi	Karhutla	
7.	Tayan Hulu	Dsn. Kubing Ds. Puruan Dalam	Banjir dan tanah longsor	Luas Wilayah: 719,20 Km² Desa : 11 Dusun : 55
		Ds. Riyai	Banjir, tanah longsor serta karhutla	
		Ds. Barakak	Banjir, tanah longsor serta karhutla	
		Ds. Menyabo	Karhutla	
		Ds. Pandan Sembuat	Karhutla	
		Ds. Janjang	Karhutla	
8.	Batang Tarang	Ds. Temiang Mali	Tanah longsor	Luas Wilayah: 395,60 Km² Desa : 12 Dusun : 71
		Ds. Mak Kawing	Tanah longsor	
		Ds. Semoncol	Karhutla	
		Ds. Tae	Karhutla	
9.	Tayan Hilir	Dsn. Melungai	Banjir dan tanah longsor	Luas Wilayah: 1.050,00 Km² Desa : 15 Dusun : 87
		Dsn. Empetai	Banjir dan tanah longsor	
		Dsn. Kuala Tebang	Banjir dan tanah longsor	
		Dsn. Tanjung Melya	Banjir dan tanah longsor	
		Dsn. Tanduk A	Banjir dan tanah longsor	
		Dsn. Tanduk B	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Pulau Tayan	Banjir, tanah longsor, puting beliung	
		Ds. Pedalaman	Banjir, tanah longsor, puting beliung	

No	Kecamatan	Dusun / Desa / Kelurahan	Bencana	Ket.
		Ds. Kawat	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Balai Ingin	Karhutla	
		Ds. Sejotang	Karhutla	
		Ds. Lalang	Karhutla	
		Ds. Subah	Karhutla	
10.	Toba	Ds. Bagan Asam	Banjir, tanah longsor serta karhutla	Luas Wilayah: 1.127,20 Km² Desa : 7 Dusun : 29
		Ds. Kampung Baru	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Sansat	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Belungai Dalam	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Balai Belungai	Karhutla	
		Ds. Belungai Dalam	Karhutla	
11.	Kembayan	Dsn. Sui Kutanan Ds. Kuala Dua	Banjir	Luas Wilayah: 610,80 Km² Desa : 11 Dusun : 74
		Dsn. Keroyet Ds. Tj. Merpati	Banjir	
		Dsn. Tj Maya Ds. Tanap	Banjir	
		Dsn. Tj Selong Ds. Mobui	Banjir	
		Ds. Tj Bunga	Banjir	
		Dsn. Tj Robokan Ds. Semayam	Banjir	
		Ds. Kelompu	Karhutla	
		Ds. Tanap	Karhutla	
		Ds. Semayan	Karhutla	
12.	Beduai	Ds. Bereng Berkawat	Banjir	Luas Wilayah: 435,00 Km² Desa : 5 Dusun : 25
		Ds. Sei. Ilai	Banjir Dan Karhutla	
		Ds. Kasromego	Banjir	
		Ds. Thang Raya	Banjir	
		Ds. Mawang Muda	Karhutla	
		Ds. Bereng Berkawat	Karhutla	
13.	Sekayam	Ds. Balai Karangan	Banjir dan tanah longsor	Luas Wilayah: 841,01 Km² Desa : 10 Dusun : 55
		Ds. Sotok	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Malenggang	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Engkahan	Karhutla	
		Ds. Malenggang	Karhutla	
		Ds. Sei Tekam	Karhutla	
		Ds. Lubuk Sabuk	Karhutla	
14.	Entikong	Ds. Entikong	Banjir, tanah longsor serta karhutla	Luas Wilayah: 506,89 Km² Desa : 5 Dusun : 34
		Dsn. Entapang Ds. Entikong	Banjir dan tanah longsor	
		Dsn. Entikong Benuan Ds. Entikong	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Semanget	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Pala Pasang	Karhutla	
15.	Noyan	Ds. Sui Dangin	Banjir dan tanah longsor	Luas Wilayah: 487,90 Km² Desa : 5 Dusun : 30
		Ds. Noyan	Banjir dan tanah longsor	
		Ds. Semongan	Karhutla	
		Ds. Sei Dangin	Karhutla	

Sumber: PPID Kab. Sanggau 2018

2.1.4 Demografi

Dikutip dari Sukirno (2010), Adam Smith mengemukakan teorinya bahwa perkembangan penduduk di sebuah kawasan secara tidak langsung akan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah, akan memperluas cakupan pasar, sehingga akan meningkatkan spesialisasi dan perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Sanggau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau jumlah penduduk Kabupaten Sanggau tahun 2018 sebanyak 463.995 jiwa. Masuk di tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak 484.836 jiwa. Berikut disajikan Tabel jumlah penduduk Kabupaten Sanggau tahun 2016-2020.

Tabel 2. 19
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Toba	12.651	12.740	12.821	12.898	15,829
2	Meliau	49.256	49.673	50.060	50.432	50,408
3	Kapuas	86.428	87.577	88.684	89.773	88,308
4	Mukok	19.529	19.703	19.865	20.021	21,240
5	Jangkang	28.783	29.079	29.358	29.629	29,010
6	Bonti	22.231	22.518	22.794	23.065	23,288
7	Parindu	38.073	39.004	39.932	40.867	38,993
8	Tayan Hilir	33.796	34.389	34.969	35.546	36,710
9	Balai	23.483	23.634	23.770	23.898	28,891
10	Tayan Hulu	35.849	36.618	37.379	38.142	38,169
11	Kembayan	27.973	28.286	28.584	28.875	31,776
12	Beduai	11.295	11.362	11.422	11.478	13,032
13	Noyan	10.399	10.464	10.522	10.577	11,674
14	Sekayam	33.824	34.488	35.141	35.793	39,811
15	Entikong	17.641	18.166	18.694	19.230	17,697
Kab. Sanggau		**451.211**	**457.701**	**463.995**	**470.224**	**484.836**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyebaran penduduk Kabupaten Sanggau tidak merata antara kecamatan satu dengan lainnya. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Kapuas dengan kepadatan penduduk 64 jiwa per km^2 di tahun 2020. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya jarang adalah Kecamatan Toba yang kepadatan

penduduknya hanya 14 jiwa per km^2 di tahun 2020. Dilihat dari trend kepadatan penduduk selama 5 tahun terkahir, terdapat beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan kepadatan penduduk antara lain; Toba, Tayan Hilir, Balai, Kembayan, Beduai, Noyan, dan Sekayam. Hal tersebut menunjukan bahwa penyebaran penduduk di tiap kecamatan semakin bertambah, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk juga bertambah.

Tabel 2. 20
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (jiwa per km^2)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Toba	1.382,00	11	11	11	11	14
2	Meliau	501,00	33	33	33	34	34
3	Kapuas	407,90	63	63	64	65	64
4	Mukok	1.589,20	39	39	40	40	42
5	Jangkang	1.121,80	18	18	18	19	18
6	Bonti	435,00	20	20	20	21	21
7	Parindu	841,01	64	66	67	69	66
8	Tayan Hilir	610,80	32	33	33	34	35
9	Balai	1.127,20	59	60	60	60	73
10	Tayan Hulu	1.495,70	50	51	52	53	53
11	Kembayan	593,90	46	46	47	47	52
12	Beduai	1.050,50	26	26	26	26	30
13	Noyan	719,20	21	21	22	22	24
14	Sekayam	395,60	40	41	42	43	47
15	Entikong	506,89	35	36	37	38	35
Kab. Sanggau		**12.857,70**	**35**	**36**	**36**	**37**	**38**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Sanggau bekerja pada sektor pertanian karena sektor pertanian terkonsentrasi pada daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau berdomisili di daerah pedesaan. Sebagian besar penduduk lainnya bekerja pada sektor perdagangan dan jasa- jasa. Banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menjadi beban pada sektor ini karena sektor pertanian di Kabupaten Sanggau masih bersifat tradisional, yaitu dengan usaha tani subsistem dengan produktivitas yang rendah. Hal ini dikarenakan masih kecilnya pendapatan pada sektor ini sehingga membuka peluang beralihnya pekerja dari sektor pertanian ke sektor lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerja pada sektor pertanian berkurang dan pencari kerja di sektor lain meningkat, sehingga

menjadi salah satu potensi daerah. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal pemerataan pembangunan daerah. Untuk itu perlu penguatan peran kecamatan dan desa, serta stakeholder terkait dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada. Jika dilihat dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur, bentuk piramida penduduk Kabupaten Sanggau adalah ekspansif atau muda. Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk yang lebih terdistribusi ke dalam kelompok umur usia muda (kelahiran tinggi) atau piramida mempunyai alas yang lebar. Dari gambar piramida dibawah terlihat bahwa penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun yang memiliki grafik batang paling lebar, baik pada penduduk laki- laki maupun perempuan. Selain itu, Komposisi penduduk Kabupaten Sanggau didominasi oleh kelompok penduduk usia muda/ dewasa. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan di bidang demografi untuk mengantisipasi dampaknya di masa mendatang.

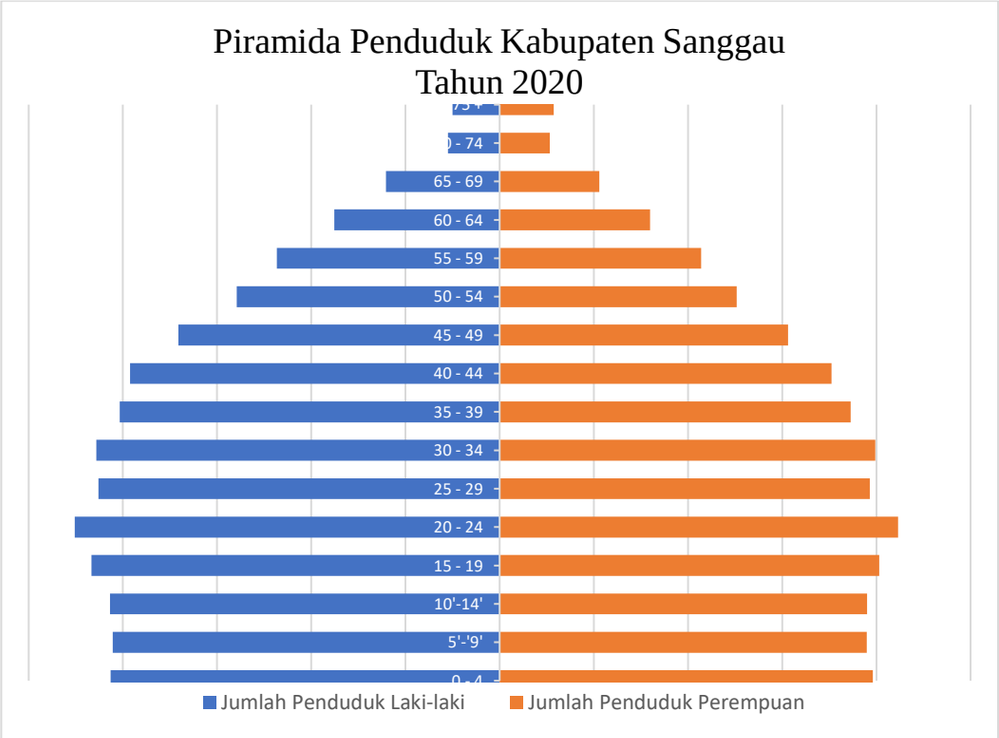

Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Sanggau

Implikasi dari struktur penduduk muda ini adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Dengan jumlah penduduk muda

yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar. Untuk itu, pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sanggau bekerja pada sektor pertanian, dan sektor pertanian terkonsentrasi pada daerah pedesaan, dan sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau berdomisili di daerah pedesaan. Banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian menjadi beban pada sektor ini, karena sektor pertanian di Kabupaten Sanggau masih bersifat tradisional yaitu dengan usaha tani subsistem dengan produktivitas yang rendah. Hal ini dikarenakan masih kecilnya pendapatan pada sektor ini sehingga membuka peluang beralihnya pekerja dari sektor pertanian ke sektor lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan.

Kondisi tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sanggau, jika dapat dimanfaatkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun jika sebaliknya, maka akan menciptakan permasalahan baru seperti peningkatan pengangguran yang berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, yang mencakup indikator yang berpotensi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Pada aspek ini dianggap penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Adapun fokus kesejahteraan diantaranya diukur dari indeks pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Untuk ketimpangan pendapatan (Indek Gini) tingkat kabupaten hanya dihitung sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2019 keatas hanya dihitung sampai tingkat provinsi.

Tabel 2. 21
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	63,90	64,61	65,16	65,67	65,77
2	Presentase Penduduk Miskin (%)	4,51	4,52	4,67	4,57	4,46*
3	Tingkat Pengangguran (%)	3,27	3,27	2,47	3,07	3,52
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,48	4,45	4,30	0,7
5	PDRB per kapita (ADHB) (ribu rupiah)	34.291	36.919	39.194	40.981*	41.898**
6	PDRB per kapita (ADHK) (ribu rupiah)	25.790	26.568	27.306	27.993*	27.837**
7	Ketimpangan Pendapatan / Indeks Gini	0,33	0,28	0,31	n.a	n.a

** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkun gan yang memungkinan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di Kabupaten Sanggau. Selian itu, IPM digunakan juga sebagai ukuran kinerja pemerintah serta sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU). Berdasrarkan data BPS Kabupaten Sanggau, pada tahun 2020 IPM Kabupaten Sanggau memiliki pertumbuhan sebesar 0,10 dari tahun sebelumnya. Adapun tingkat IPM Kabupaten sanggau berada pada urutan ke-9 di Kalimantan Barat. Kondisi ini menjadi tantangan ke depan agar menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat menurut kabupaten/kota tahun 2016-2020:

Tabel 2. 22
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2016-2020

Kabupaten /Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Tingkat IPM
Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	
Sambas	64,94	65,92	66,61	67,02	67,03	6
Bengkayang	65,45	65,99	66,85	67,57	67,87	4
Landak	64,58	64,93	65,45	65,96	65,98	8
Mempawah	63,84	64,00	64,90	65,50	65,74	10
Sanggau	**63,90**	**64,61**	**65,15**	**65,67**	**65,77**	**9**
Ketapang	64,74	65,71	66,41	67,16	67,17	5
Sintang	64,78	65,16	66,07	66,70	66,88	7
Kapuas Hulu	63,83	64,18	65,03	65,65	65,69	11
Sekadau	62,52	63,04	63,69	64,34	64,76	13
Melawi	64,25	64,43	65,05	65,54	65,55	12
Kayong Utara	60,87	61,52	61,82	62,66	62,68	14
Kubu Raya	65,54	66,31	67,23	67,76	67,95	3
Kota Pontianak	77,63	77,93	78,56	79,35	79,44	1
Kota Singkawang	70,10	70,25	71,08	71,72	71,94	2

Sumber : Badan Pusat Statistik, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data perbandingan, angka IPM Kabupaten Sanggau masih berada dibawah angka IPM Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Namun pertumbuhan IPM Kabupaten sanggau dari tahun 2019-2020 mengalami pertumbuhan melebihi nasional yaitu sebesar 0,10, sedangkan nasional hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,02R dan provinsi mengalami pertumbuhan hanya sebesar 0,02. Berikut merupakan trend perbandingan tingkat IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Sanggau pada tahun 2016-2020.

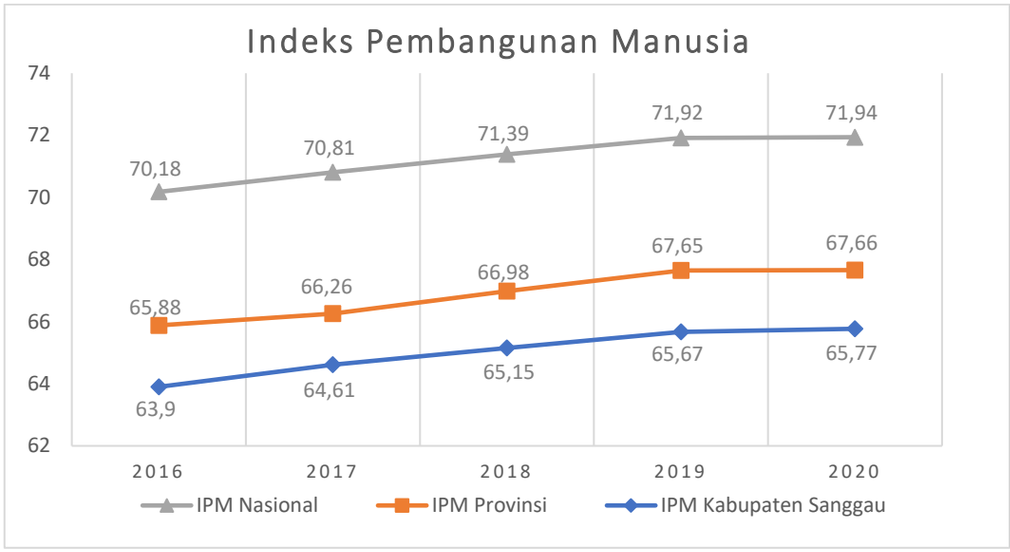

Gambar 2. 10
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat, dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Adapun variabel yang digunakan dalam menentukan analisis IPM yaitu;

1. **Angka Harapan Hidup Saat Lahir / AHH**

   Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

   Angka Harapan Hidup Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 sebesar 71,42 tahun di atas AHH Provinsi Kalimantan Barat yaitu 70,69 tahun, namun masih berada di bawah AHH Nasional yaitu 71,47 tahun. Artinya setiap bayi yang akan lahir di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 secara rata-rata akan mempunyai harapan untuk dapat hidup selama 71,42 tahun yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

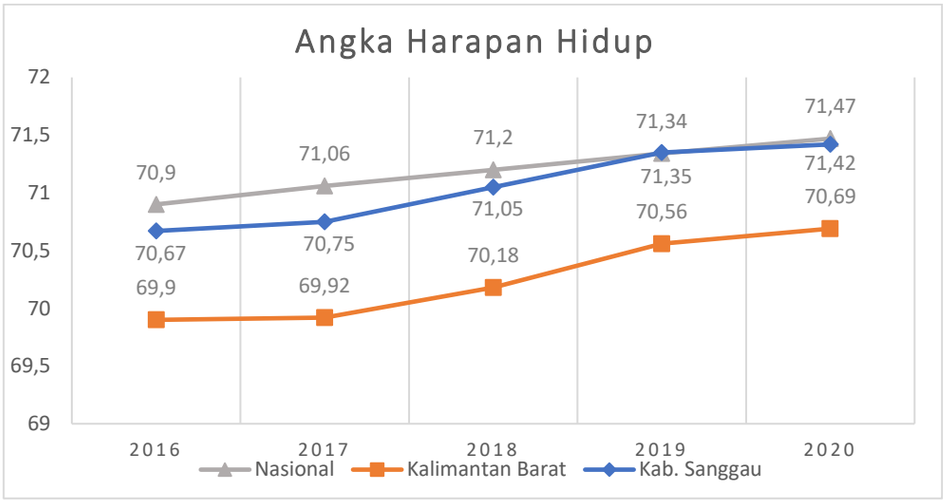

Gambar 2. 11
Perkembangan AHH Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Meningkatnya angka harapan hidup ini antara lain terkait dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, disamping kesadaran masyarakat tentang pola kebiasaan hidup sehat. Dan sudah pasti andil dari semakin gencarnya peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup maka sangat diperlukan persiapan perhatian terhadap peningkatan jumlah penduduk dalam kelompok usia tua (kelompok tidak produktif). Usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat prioritas utama. Hal ini disebabkan keeratan hubungan derajat kesehatan yang sangat mempengaruhi besaran angka harapan hidup di Kabupaten Sanggau.

2. Rata-rata Lama Sekolah – RLS

Kualitas pendidikan penduduk suatu daerah juga dapat diukur dari angka lama sekolah yang merupakan perhitungan rata-rata waktu lama sekolah per penduduk. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020 meskipun masih berada di bawah angka RLS provinsi dan nasional. RLS Kabupaten Sanggau

tahun 2020 sebesar 7,15 tahun di bawah RLS Provinsi Kalimantan Barat 7,37 tahun dan RLS Nasional 8,48 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya mencapai kelas satu SMP/SLTP sederajat. Perkembangan rata lama sekolah tersaji pada gambar berikut:

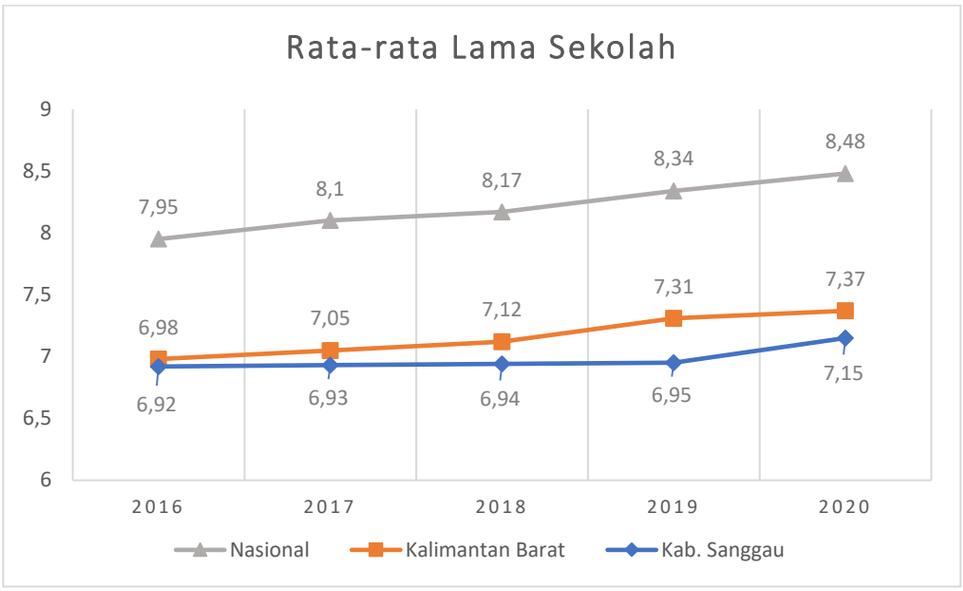

Gambar 2. 12
Perkembangan RLS Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Sanggau seperti data pada gambar di atas menunjukkan adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Sanggau menuju daerah yang maju dan terdepan. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka rata-rata lama sekolah. Selama tiga tahun kedepan, pemerintah Kabupaten Sanggau semakin berupaya meningkatkan angka RLS melalui strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang tepat. Salah satunya, pemerintah Kabupaten Sanggau berupaya bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan menusia yang maju dan terdepan di Kabupaten Sanggau. Namun demikian, meskipun rata-rata lama sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020, akan tetapi masih berada di bawah angka Provinsi dan Nasional. Beberapa masalah krusial yang terjadi diantaranya

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan problem ketersediaan tenaga pengajar yang berkompeten, dan sebaran tenaga pengajar yang belum merata. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu terus meningkatkan pembangunan dan layanan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

3. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Semakin tinggi angka harapan lama sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Sanggau yang lebih baik. Harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 11,57 tahun di bawah HLS Provinsi Kalimantan Barat 12,60 tahun dan HLS Nasional 12,95 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Sanggau diharapkan dapat bersekolah hingga mencapai kelas dua SMA/SLTA sederajat. Perkembangan harapan lama sekolah disajikan dalam gambar berikut:

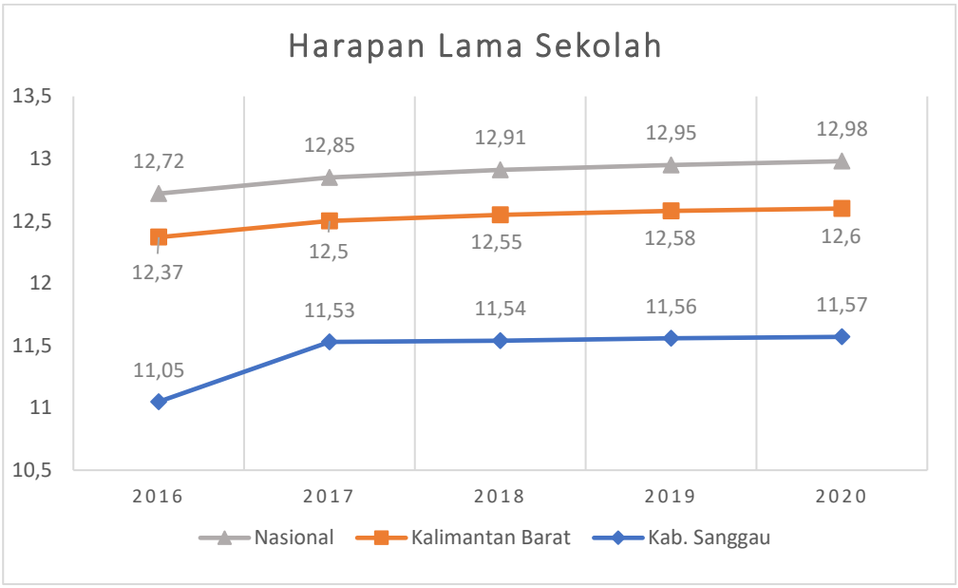

Gambar 2. 13
Perkembangan HLS Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli *(Purcashing Power Parity-PPP)*. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan daya beli antar- daerah berbeda-beda. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berakibat pada semakin rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Pengeluaran perkapita Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020 meskipun masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Pengeluaran perkapita tahun 2020 sebesar Rp.8.245.000,- di bawah pengeluaran perkapita Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp8.930.000,- dan pengeluaran perkapita nasional sebesar Rp11.013.000,-.

Pada gambar dibawah terlihat bahwa daya beli penduduk yang diwakili oleh pengeluaran per kapita di Kabupaten Sanggau dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya penurunan pengeluaran per kapita masyarakata Kabupaten Sanggau adalah terjadinya bencana non

alam yaitu pandemic covid-19. Hal tersebut juga selaras dengan terjadinya penurunan pengeluaran per kapita dari tingkat nasional bahkan provinsi. Oleh karena itu, tugas pemerintah yang terpenting adalah bagaimana agar daya beli masyarakat tersebut bisa meningkat lebih besar atau paling tidak jangan sampai terjadi penurunan kembali. Perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten Sanggau tahun 2016–2020 disajikan dalam gambar berikut:

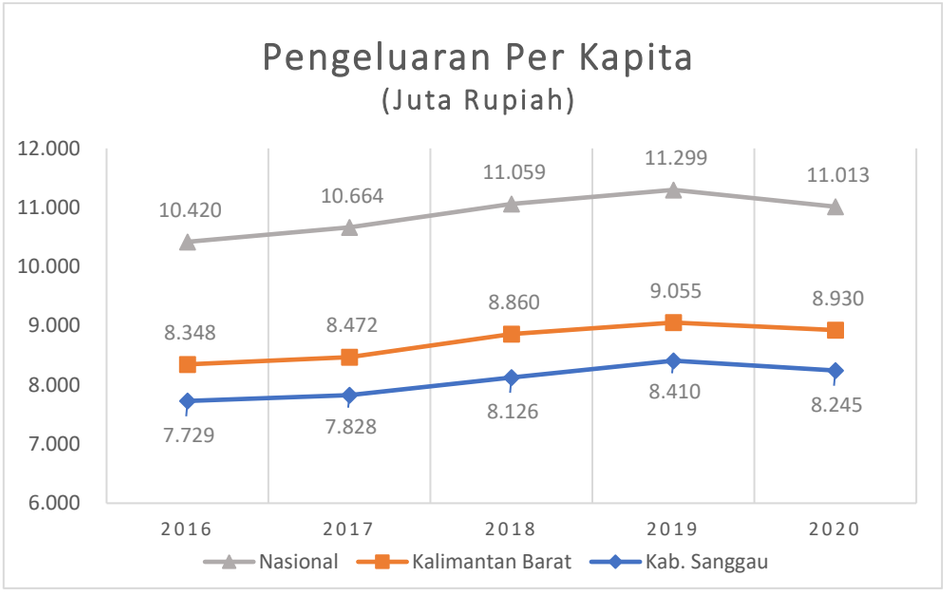

Gambar 2. 14
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Adapun definisi dari Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau tahun 2020 adalah 346.983 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 471.200 rupiah

per kapita per bulan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berjumlah 21,16 ribu jiwa atau sekitar 4,46 persen dari jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Kemiskinan di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, hal tersebut menandakan bahwa kondisi perekonomian penduduk Kabupaten Sanggau secara perlahan mulai membaik. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dimana terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin dan presentase kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Selain itu, berdasarkan data perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Sanggau masih berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

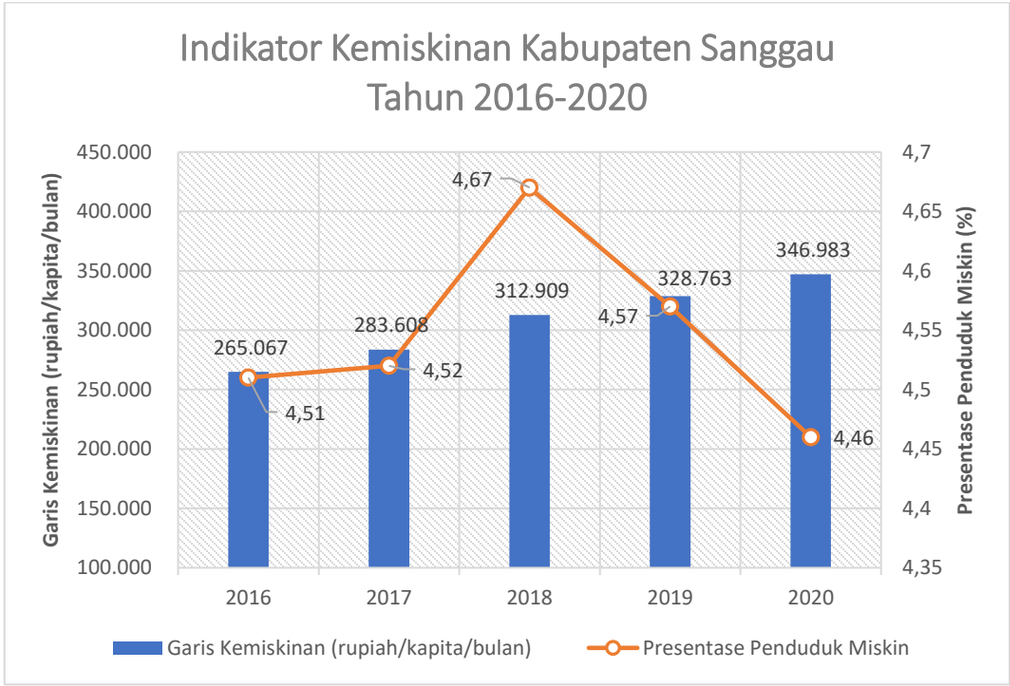

Gambar 2. 15
Penduduk Miskin Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2020
Sumber: Sanggau Dalam Angka 2021

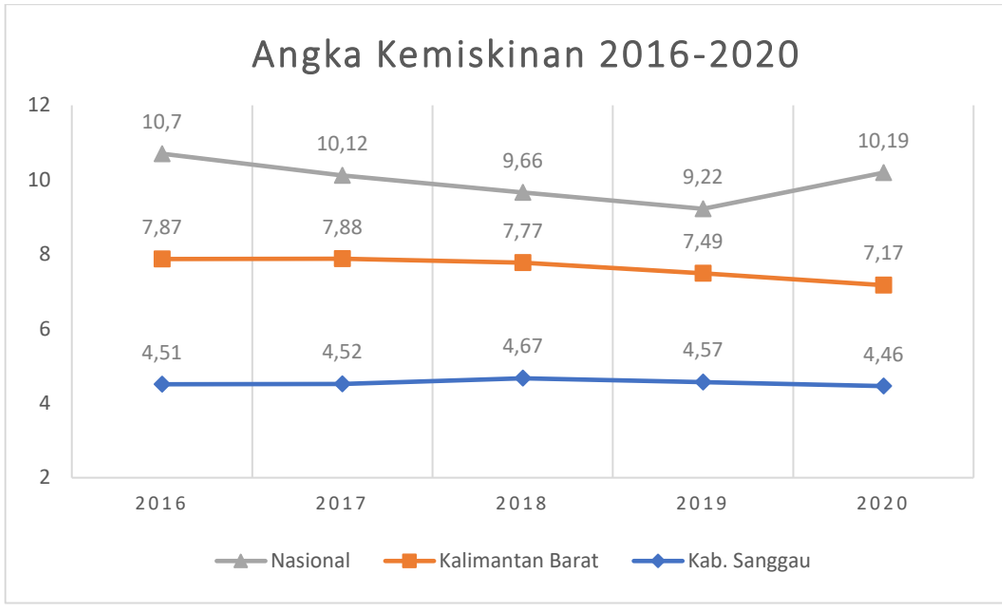

Gambar 2. 16
Angka Kemiskinan Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada aspek kemiskinan dijabarkan terkait indeks kedalaman kemiskinan yang digunakan untuk mengetahui ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selain itu, terdapat juga indeks keparahan kemiskinan yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut merupakan data indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 23
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Sanggau 2016-2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2016	0,74	0,16
2017	0,49	0,09
2018	0,51	0,09
2019	0,48	0,09
2020	0,82	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Ekonomi Nasional Maret

Berdasarkan uraian di atas, indeks kedalaman kemiskinan setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2020 indeks kemiskinan meningkat tinggi dari 0,48 menjadi 0,82. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Kabupaten Sanggau jauh dari rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari 0,09 menjadi 0,21. Hal ini menunjukkan terjadinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Sanggau. secara keseluruhan kondisi kemiskinan di Kabupaten Sanggau masih perlu mendapatkan perhatian serius dari *stakeholders.* Dalam hal ini pemerintah daerah perlu mengedepankan langkah- langkah strategis yang mendukung penanggulangan kemiskinan masyarakat Sanggau secara menyeluruh. Mengacu pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sanggau tahun 2021, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sanggau merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Sosial Nomor 1. Skenario alternatif penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan dalam KLHS Kabupaten Sanggau terurai dalam 9 (Sembilan) isu strategis diantaranya yaitu:

1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Alternatif skenarionya adalah menurunkan garis kemiskin sebanyak 0,25% tiap tahunnya hingga pada tahun 2024 menjadi 6,5%. Rekomendasi yang diberikan diantaranya:
   a. Peningkatan ruas jalan kabupaten
   b. Peningkatan ruas jalan IKK
   c. Pemeliharaan ruas jalan provinsi
2. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Rekomendasi yang diberikan diantaranya:
   a. Penambahan kuota BPJS daerah
   b. Pemutakhiran data penduduk miskin

3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Rekomendasi yang diberikan diantaranya:
   a. Pengembangan PDAM agar memiliki UPT di setiap kecamatan
   b. Melakukan pemetaan sumber air potensial
   c. Mengembangkan dan penerapan teknologi pengelolaan air bersih
4. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Rekomendasi yang diberikan adalah penambahan anggaran program dalam renstra OPD terkait untuk mendukung program BPJS daerah.

2.2.3 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran terbuka tersebut, batas bawah usia yang digunakan 15 tahun dan pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja. Adapun data tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut;

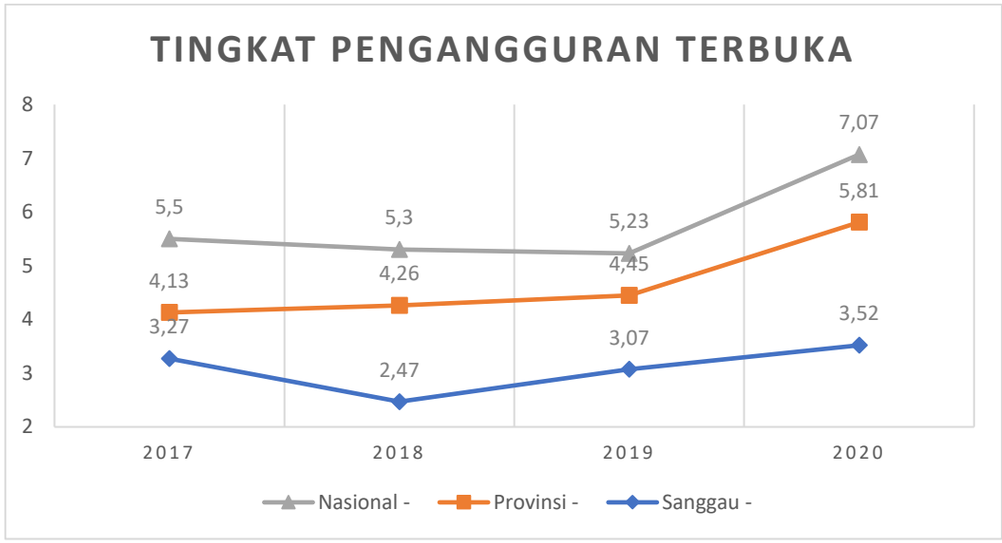

Gambar 2. 17
Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan mulai dari dari tahun 2018. Hal tersebut mengakibatkan perlunya fokus penanganan oleh pemerintah terhadap isu pengangguran di Kabupaten Sanggau. Adapun terkait ketenagakerjaan tahun 2020 di Kabupaten Sanggau sebagai berikut;

Tabel 2. 24
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Sanggau Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	**158508**	**92319**	**250827**
Bekerja	152143	89844	241987
Pengangguran Terbuka	6365	2475	8840
Bukan Angkatan Kerja	**25651**	**79929**	**105580**
Sekolah	11099	13166	24265
Mengurus Rumah Tangga	4917	61928	66845
Lainnya	9635	4835	14470
Jumlah	**184159**	**172248**	**356407**

Sumber: Sanggau Dalam Angka 2021

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa

besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur perekonomian Kabupaten Sanggau didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu: 1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) Industri pengolahan dan 3) Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 32,10 persen (angka ini meningkat dari 30,6 persen tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,33 (turun dari 19,58 persen di 2016), disusul oleh lapangan pertambangan dan penggalian sebesar 10,96 persen (naik dari 8,27 persen di 2016). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,35 persen (turun dari 12,08 persen di 2016) dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,64 persen.

Tabel 2. 25
Distribusi Presentase Produk Domestik Resgional Bruto Kabupaten Sanggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,6	30,22	30,22	29,42	32,10
B	Pertambangan dan Penggalian	8,27	8,99	9,44	9,81	10,96
C	Industri Pengolahan	19,58	19,36	18,53	17,88	17,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,52	6,39	6,36	6,86	6,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,08	11,8	11,62	11,74	10,35
H	Transportasi dan Pergudangan	1,48	1,45	1,46	1,59	1,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	1,84	1,87	1,93	1,45

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
J	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,64	3,88	4,07	4,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	1,85	1,91	1,86	1,64
L	Real Estat	2,73	2,67	2,69	2,68	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,28	0,29	0,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,56	6,75	7,01	7,04	6,64
P	Jasa Pendidikan	2,88	2,74	2,69	2,73	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,34	1,32	1,36	1,58
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,63	0,62	0,64	0,67	0,45
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pertambangan dan Penggalian; mengalami peningkatan peranan. Sementara, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; industri pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peranannya mengalami penurunan. Adapun yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan pada sektor pertambangan dan penggalian diharapkan dapat berlangsung dengan mengedepankan konsep berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi bukti adanya keberhasilan terhadap capaian pada fokus pembangunan RPJMD sebelumnnya dimana sektor tersebut menjadi fokus dikarenakan tidak seimbangnya antara potensi dengan hasil yang diharapkan.

Perekonomian Sanggau pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah 0,70 persen, sedangkan dibanding tahun 2019 sebesar 3,89%. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada bulan Maret 2020 dan hingga saat ini masih berlangsung merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Sanggau namun di seluruh Indonesia bahkan dunia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau disajikan dalam gambar 2.19 berikut.

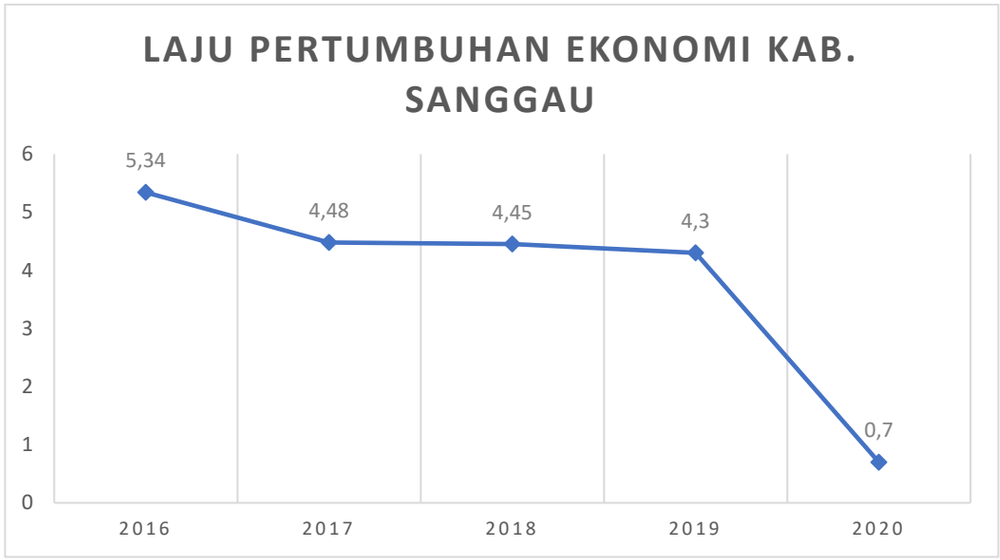

Gambar 2. 18
Pertumbuhan Ekonomi Sanggau Tahun 2016-2020
Sumber: Sanggau Dalam Angka 2021

Terjadinya penurunan pertumbuhan di beberapa sektor mengakibatkan laju pertumbuhan mengalami perlambatan, terdapat 11 dari 17 sektor lapangan usaha yang mengalami perlambatan dengan 3 sektor yang mengalami penurunan tertinggi antara lain; 1) Penyediaan akomodasi dan makan minum, 2) Jasa lainnya, dan 3) Transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut dapat dikatakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun terdapat juga beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan dengan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan karena sektor tersebut menjadi sektor yang sangat berperan penting pada masa pandemi covid-19 ini, adapun 3 sektor yang mengalami peningkatan tertinggi antara lain; 1) Jasa Kesehatan, 2) Pengadaan Listrik dan Gas, 3) Pertambangan dan Penggalian. Secara singkat berikut uraian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tiap sector lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 2. 26
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menuurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,64	2,22	5,61	5,44	6,22
B	Pertambangan dan Penggalian	12,89	13,27	9,05	4,98	13,66
C	Industri Pengolahan	3,03	2,85	0,12	0,77	-2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,25	6,70	3,11	5,53	14,92

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	0,06	12,77	4,53	1,88
F	Konstruksi	9,93	4,04	0,52	3,87	-7,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	3,86	3,39	4,65	-12,29
H	Transportasi dan Pergudangan	4,20	4,40	4,90	7,48	-13,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,04	6,48	4,04	6,91	-25,69
J	Informasi dan Komunikasi	10,16	17,05	10,81	6,84	7,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,42	8,75	7,23	-0,22	-0,26
L	Real Estat	3,70	2,74	0,92	1,71	1,21
M,N	Jasa Perusahaan	7,60	3,84	3,83	3,80	-5,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,94	6,99	4,99	0,09	2,06
P	Jasa Pendidikan	1,74	1,71	2,06	1,22	-6,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,57	4,05	3,55	2,39	17,87
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,45	4,62	5,45	7,82	-20,35
Produk Domestik Regional Bruto		**5,34**	**4,48**	**4,45**	**4,30**	**0,70**

** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau

Mengacu pada tabel diatas mengenai laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha (persen) periode tahun 2016-2020, terpotret beberapa hal yang tentunya dapat dioptimalkan serta dimaksimalkan menjadi potensi yang sangat luar biasa dalam memajukan daerah dan memulihkan perekonomian menjadi lebih baik dalam rangka mensejahterakan rakyat. Untuk itu, sejumlah lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif serta lapangan usaha yang mengalami penurunan akibat pandemic covid-19 tersebut tetap perlu mendapatkan prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran selama 3 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan perlu mendukung pengembangan lapangan usaha potensial sehingga pembangunan daerah kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pembangunan daerah Kabupaten Sanggau perlu mendukung potensi sumber daya dan sektor unggulan Kabupaten Sanggau seperti sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sanggau, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dirumuskan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Persentase cakupan layanan sanitasi) Nomor 8 yang terdiri dari isu strategis, alternatif skenario, dan rekomendasi. Terdapat 3 (tiga) isu strategis strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan KLHS Kabupaten Sanggau tahun 2021.

Isu strategis yang pertama yaitu, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Berdasarkan isu tersebut, alternatif skenario yang dijalankan yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja. Sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Rekomendasi Jangka Pendek
   a. Menyusun masterplan ekonomi daerah
   b. Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
   c. Pembinaan kemampuan Teknologi Informasi industri
2. Rekomendasi Jangka Menengah
   a. Peningkatan kemampuan Teknologi Informasi industri
3. Rekomendasi Jangka Panjang
   a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
   b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas IPTEK
   c. Menyelenggarakan bimbingan dalam peningkatan kemampuan teknis

Isu strategi yang kedua yaitu pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Berdasarkan isu tersebut, alternatif skenario yang dijalankan yaitu pelatihan dan pembekalan bagi angkatan kerja. Sementara itu, rekomendasi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Jangka Pendek:
   a. Menyusun database angkatan kerja
   b. Melakukan perencanaan pengembangan ekonomi
   c. Memberikan pelatihan dan peningkatan kemampuan angkatan kerja
   d. Menyiapkan calon angkatan kerja memasuki dunia kerja
   e. Bekerjasama dengan perusahaan dan daerah lain dalam penyaluran tenaga kerja
2. Jangka Menengah:
   a. Perencanaan ekonomi
   b. Peningkatan kesempatan kerja
   c. Peningkatan kemampuan Teknologi Informasi
3. Jangka Panjang:
   a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
   b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas IPTEK
   c. Menyelenggarakan bimbingan dalam peningkatan kemampuan teknis

Isu strategi yang ketiga yaitu pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Berdasarkan isu tersebut, alternatif skenario yang dijalankan yaitu peningkatan sarana prasarana wisata. Adapun rekomendasi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Jangka Pendek:
   Meningkatkan aktivitas promosi wisata daerah
2. Jangka Menengah:
   a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
   b. Membuat kegiatan wisata tahunan
3. Jangka Panjang:
   Meningkatkan kualitas pariwisata daerah

2.2.5 Pendapatan per Kapita

PDRB perkapita merupakan suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah.

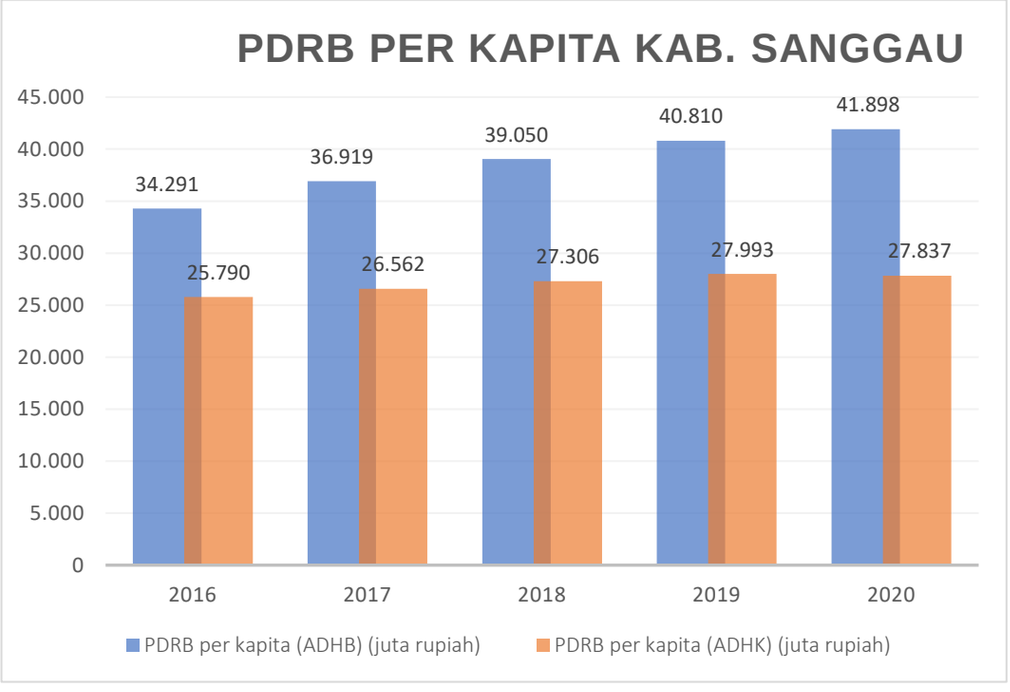

Gambar 2. 19
PDRB Per Kapita Berdasarkan ADHB dan ADHK (ribu rupiah) di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2020
Sumber: Sanggau Dalam Angka 2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sangau, dilihat berdasarkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harka Konstan (ADHK) dan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagai indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara umum mengalami perbaikan setiap tahunnya. PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2016 sebesar Rp 25.790 ribu dan terus meningkat hingga mencapai level Rp 27.837 juta pada tahun 2020. Sejalan dengan hal ini, PDRB per kapita ADHB juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan hingga tahun 2020 mencapai Rp 41.898 juta.

2.2.6 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukan ketimpangan semakin tinggi.

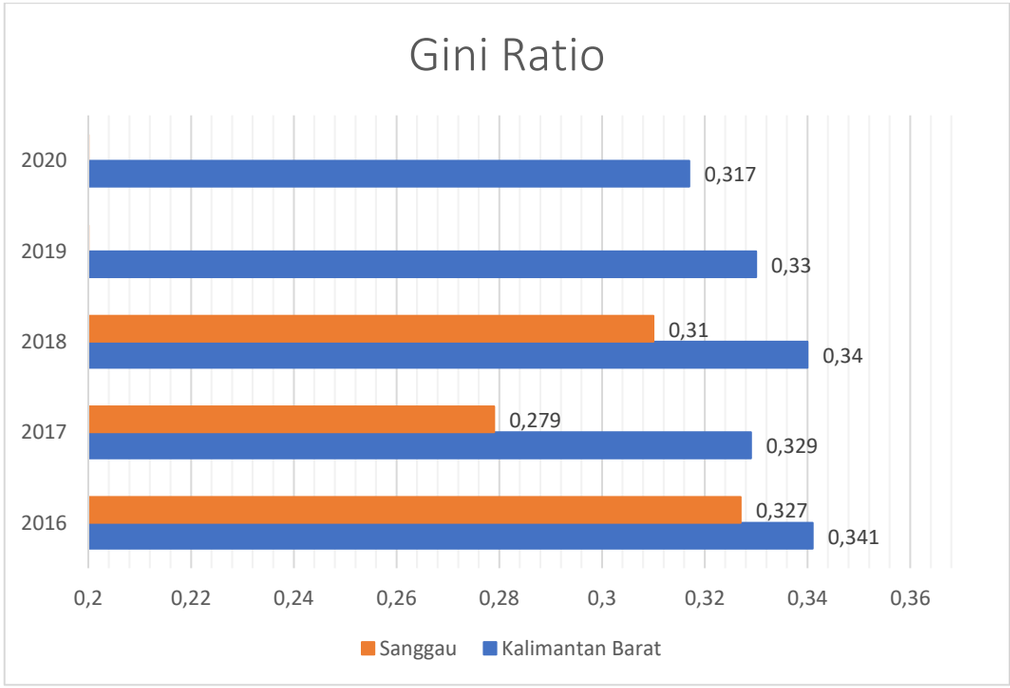

Gambar 2. 20
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar diatas, ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sanggau masih berada di bawah nilai ketimpangan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kategori ketimpangan yang terjadi masih masuk kategori ketimpangan rendah, namun hal yang wajib menjadi perhatian adalah naiknya Gini Ratio pada tahun 2017-2018 di Kabupaten Sanggau.

2.3 Urusan Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Pendidikan

Usaha pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain serta nonfisik seperti tersedianya tenaga pengajar, dan lain-lain. Pada tahun 2020 jumlah sekolah kategori Sekolah Dasar sebanyak 475 sekolah yang terdiri dari 467 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta. Sedangkan untuk jumlah guru pada SD dengan jumlah 3.683 orang yang terdiri dari 3.576 orang untuk sekolah negeri dan 107 orang untuk sekolah swasta.

Tabel 2. 27
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
TK Negeri	6	25	205	6	25	210	7	26	227	7	20	1.965	7	22	174
TK Swasta	44	185	2.306	43	207	2.704	47	218	2.405	50	161	157	48	186	1.839
Total TK	50	210	2.511	49	232	2.914	54	244	2.632	57	181	2.122	55	208	2.013
SD Negeri	467	2.325	53.129	468	1.148	53.190	468	1.148	53.190	467	3.440	51.218	467	3.576	51.056
SD Swasta	7	1.271	1.654	7	55	1.797	7	55	1.797	8	105	1.831	8	107	1.857
Total SD	474	3.596	54.783	475	1.203	54.987	475	1.203	54.987	475	3.545	53.049	475	3.683	52.913
SMP Negeri	89	582	17.185	89	1.003	17.052	89	1.003	17.052	94	1.089	16.888	94	1.142	17.016
SMP Swasta	27	547	3.755	28	228	2.738	28	228	2.738	31	242	3.472	28	233	3.507
Total SMP	116	1.129	20.940	117	0,2020833	19.790	117	1.231	19.790	125	1.331	20.360	122	1.375	20.523
SMA Negeri	16	215	6.763	16	328	5.388	16	328	5.388	18	386	7.543	19	396	7.801
SMA Swasta	9	130	1.803	9	84	1.969	9	84	1.969	10	110	1.765	10	107	1.719
Total SMA	25	345	8.566	25	412	7.357	25	412	7.357	28	496	9.308	29	503	9.520
SMK Negeri	5	64	2.160	5	120	2.090	5	120	2.090	-	-	-	6	157	3.252
SMK Swasta	10	148	2.746	10	126	2.696	10	126	2.696	-	-	-	12	170	3.825
Total SMK	25	345	8.566	25	412	7.357	25	412	7.357	-	-	-	18	327	7.077
RA Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RA Swasta	8	40	494	8	45	575	8	45	575	-	-	-	-	-	-
Total Raudhatul Athfal (RA)	8	40	494	8	45	575	8	45	575	9	39	407	9	50	563
MI Negeri	1	37	811	1	38	799	1	38	799	-	-	-	1	41	711
MI Swasta	7	54	1.242	7	54	1.236	7	54	1.236	-	-	-	7	87	1.774
Total Madrasah Ibtidaiyah (MI)	8	91	2.053	8	92	2.035	8	92	2.035	8	106	2.086	8	128	2.485
MTS Negeri	2	37	567	2	38	637	2	38	637	-	-	-	3	32	978
MTS Swasta	7	92	722	7	92	687	7	92	687	-	-	-	8	108	526

Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
Total Madrasah Tsanawiyah (MTS)	9	129	1.289	9	130	1.324	9	130	1.324	12	146	1.441	11	140	1.504
MA Negeri	1	16	318	1	15	374	1	15	374	1	25	368	1	14	340
MA Swasta	2	35	134	2	35	134	2	35	134	3	31	167	3	39	201
Total Madrasah Aliyah (MA)	3	51	452	3	50	508	3	50	508	4	56	535	4	53	541

Kinerja pembangunan pendidikan menjadi barometer dalam aspek pelayanan umum. Sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang semakin baik 2020, maka tidak heran jika pembangunan pendidikan di Kabupaten Sanggau pada tingkatan anak didik dan pendidik mengalami perkembangan yang cukup baik.

Tabel 2. 28
Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	**Angka Partisipasi Kasar (APK):**				
1.1	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10,79	11,85	23,44	Tidak tercapai
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	110,7	110,83	115,56	Tidak tercapai
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	92,17	91,66	97,55	Tidak tercapai
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,24	95,2	94,1	Terlampaui
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65,27	61,84	67,13	Tidak tercapai
2.	**Angka Putus Sekolah:**				
2.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,37	0,10	0,03	Terlampaui
2.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,69	0,21	0,07	Terlampaui
3.	**Angka Kelulusan:**				Tercapai
3.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	96,57	98,15	95,75	Terlampaui
3.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	106,5	98,53	94,66	Terlampaui
4.	**Angka Melanjutkan (AM):**				

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
4.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	81,89	88,02	88,57	Tidak tercapai
4.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,51	86,95	83,71	Terlampaui
5	**Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :**				
5.1.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI	1:104	1:104	1:97	Tidak tercapai
5.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	1:104	1:164	1:105	Terlampaui
6.	**Rasio guru terhadap muris sekolah pendidikan dasar :**				
6.1.	Rasio guru terhadap muris sekolah pendidikan dasar SD/MI	1:16	1:17	1:15	Terlampaui
6.2.	Rasio guru terhadap muris sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	1:19	1:18	1:17	Terlampaui
7.	**Rasio guru/murid per kelas rata-rata :**				
7.1.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI	1:18	1:18	1:18	Tercapai
7.2.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SMP/MTs	1:26	1:26	1:28	Tidak tercapai
8.	**Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**	3.288	3.174	3637	Tidak tercapai
9.	**Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara**	70,00	70,00	70,00	Tercapai

Berdasarkan pada tabel di atas, walaupun ketersediaan guru dan tenaga pendidikan sudah memenuhi kualifikasi, tetapi masih perlu di tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas guru/tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu masih terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai targetnya, seperti Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B,

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI, Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SMP/MTs, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Kinerja pembangunan urusan pendidikan, ada 8 indikator yang tidak tercapai : secara capaian kinerja masih tergolong baik, hanya saja perlu di tingkatkan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan. permasalahan yang terjadi dikarenakan masih kurangnya sarana pembelajaran dan tenaga pengajar di tingkat sekolah SD/SMP/SMA, pembangunan sekolah/PAUD baru dan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik, penambahan SDM pengajar serta sebaran tenaga pengajar yang merata.

2. Kesehatan

Aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan. Berbagai jenis pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau, yaitu RSUD Tipe B, RS Swasta, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, Posyandu Mandiri, Balai Kesehatan Masyarakat dan Pos Kesehatan Desa. Dengan demikian rincian jumlah pusat kesehatan Kabupaten Sanggau dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 29
Jumlah Pusat Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sanggau
Tahun 2016-2020

Jenis Pusat Pelayanan Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
RS Swasta	2	2	2	2	2
RS Pemerintah	2	2	2	2	2
Puskesmas Non Rawat Inap	3	3	3	3	2
Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	17
Puskesmas Pembantu	90	90	90	93	94
Posyandu	536	536	536	612	612

Posyandu Pratama	128	128	102	118	118
Posyandu Madya	225	225	250	260	260
Posyandu Purnama	166	166	203	210	210
Posyandu Mandiri	29	29	20	22	22
Pos Kesehatan Desa	158	163	171	171	172

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Tabel 2.29 dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan Rumah Sakit dari 2 Rumah Sakit pada tahun 2016 hingga menjadi 4 Rumah Sakit pada tahun 2020 (RSUD M.Th Djaman, RSU Parindu, RSUD Temenggung Gergaji dan RSU Sentra Medika) dan penambahan Pos Kesehatan Desa dari 158 Poskesdes pada tahun 2016 menjadi 172 Poskesdes pada tahun 2020 dengan demikian dari 163 desa sudah mendapat pelayanan kesehatan.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan jumlah, terutama pada dokter umum, bidan, perawat. Jumlah tenaga kesehatan paling banyak di Kabupaten Sanggau adalah perawat. Jumlah perawat pada tahun 2016 sebanyak 393 orang, di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 512 orang. Selain dilihat dari jumlah pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga kerja, urusan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sanggau juga dapat dilihat dari jumlah rasio posyandu, poskesdes, puskesmas, poliklinik, pustu, rumah sakit, dokter, dan tenaga paramedik yang jumlahnya terus meningkat. Peran pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki jaminan kesehatan juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk yang telah memiliki kartu sehat yang pada tahun 2017 telah mencapai 30,46% meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Secara lebih jelas, pembangunan urusan kesehatan Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2020

Jenis Pusat Pelayanan Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum	41	42	56	62	66
Dokter Spesialis	10	22	24	30	35
Dokter Gigi	8	8	13	10	11

Jenis Pusat Pelayanan Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bidan	267	267	370	317	343
Perawat	369	394	519	512	534
Apoteker	4	9	14	14	14
Teknis Kefarmasian	26	33	24	26	25
Tenaga Psikologi Klinis	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau

Tabel 2. 31
Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,03	7,06	4,69	Tidak tercapai
2.	Angka kelangsungan hidup bayi	8.096	8.066	10.133	Tidak tercapai
3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	0,12	0,1	4,69	Terlampaui
4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,07	12,9	4,69	Tidak tercapai
5.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	172,92	136,4	65,13	Tidak tercapai
6.	Rasio posyandu per satuan balita per 100.000 penduduk	13,20	14,61	114,47	Tidak tercapai
7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk /100.000 penduduk	0,82	0,82	1,03	Tidak tercapai
8.	Rasio dokter per satuan penduduk	11,52	11,52	12,34	Tidak tercapai
9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	106,56	106,56	112,52	Tidak tercapai
10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	71,19	100	Tidak tercapai
11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	77,36	81,41	81,24	Terlampaui
12.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100	100	90	Terlampaui
13.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
	pasien masyarakat miskin				
14.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	Tercapai
15.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	Tercapai
16.	Persentase ketersediaan Puskesmas di wilayah perbatasan antarnegara	100	100	100	Tercapai
17.	Persentase ketersediaan Pustu di wilayah perbatasan antarnegara	40	40	40	Tercapai
18.	Persentase ketersediaan Puskesmas dan Pustu di wilayah perbatasan antarnegara	53,33	53,33	70	Tidak tercapai
19.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk / 100.000 penduduk:				
19.1	Rasio puskesmas per satuan penduduk / 100.000 penduduk	3,94	3,88	3,94	Tidak tercapai
19.2	Rasio pustu per satuan penduduk / 100.000 penduduk	19,34	19,01	19,34	Tidak tercapai
20.	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	89,50	88,7	80	Terlampaui
21.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	Tercapai
22.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86,2	65	80	Tidak tercapai
23.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	Tercapai
24.	Cakupan penemuan dan penanganan	109	65	70	Tidak tercapai

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
	penderita penyakit TBC BTA				
25.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	843	529	225	Tidak tercapai
26.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,227	0,25	0,16	Tidak tercapai
27.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	65	100	Tidak tercapai
28.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	96,97	97	85	Terlampaui
29.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	Tercapai
30.	Penderita diare yang ditangani	11.835	11.835	11.835	Tercapai
31.	Angka kejadian malaria	2	0	100	Tidak tercapai
32.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	Tercapai
33.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	80	Tidak tercapai
34.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	85	Tidak tercapai
35.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,011	0,003	<0,5	Terlampaui
36.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	100	Tidak tercapai
37.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	1656	1874	1900	Tidak tercapai
38.	Cakupan kunjungan bayi	77,69	78,07	84,80	Tidak tercapai
39.	Cakupan puskesmas	100	100	100	Tercapai

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
40.	Cakupan pembantu puskesmas	55,03	55,03	57,67	Tidak tercapai
41.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	79,55	87,41	79,78	Terlampaui
42.	Cakupan pelayanan nifas	77,19	84,87	76,71	Terlampaui
43.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	45,35	36,03	80,88	Tidak tercapai
44.	Cakupan pelayanan anak balita	60,94	60,03	69,04	Tidak tercapai
45.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	90	100	52,28	Terlampaui
46.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	44,39	50,95	76	Tidak tercapai
47.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	98469 Jiwa	98469 Jiwa	3960 jiwa	Terlampaui

Kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Sanggau setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Sanggau terbebas dari permasalahan. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya 23 indikator dari 47 target indikator dalam kinerja pembangunan kesehatan seperti kurangnya aksesbilitas dan kualitas sarana, prasarana serta pelayanan kesehatan dasar masih belum merata di semua wilayah, kurangnya SDM kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan seperti melakukan pengecekan rutin, imuniasasi dan lain sebagainya. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap penanganan penyakit menular maupun tidak menular menjadi terkendala. Terlebih lagi terbatasnya tenaga kesehatan yang ada menjadi kendala tersendiri untuk penanganan masalah kesehatan secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Sanggau perlu meningkatkan pola hidup sehat agar terhindar dari permasalahan kesehatan serta perlu dukungan dari berbagai pihak dalam

melengkapi sarana dan prasarana kesehatan maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja bidang pekerjaan umum pada tahun 2020 di Kabupaten Sanggau mengalami perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kerja pada setiap indikator dengan interpretasi rata rata terlampaui, namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih tidak tercapai. Sebagai contoh presentase proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2019 sebesar 45,98%, dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu menjadi 40,75%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Namun demikian pada tahun 2019-2020 dilihat dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 7.555 Ha menjadi 7.891 Ha serta melampaui standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan semakin baiknya aliran keluar masuknya air sehingga kemungkinan bencana bajir terminimalisir. Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan status penetapan irigasi data kewenangan

Kabupaten Sanggau, DIR di Kabupaten Sanggau terdapat sebanyak 80 kawasan dengan luas 9.599 Ha.

Tabel 2. 32
Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
A.	**Pekerjaan Umum**				
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	45,98	40,75	47,58	Belum Terlampaui
2.	Persentase jalan kabupaten dan jalan non status dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di wilayah perbatasan antarnegara	62,84	67,99	47,58	Terlampaui
3.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	7.555	7.891	7.631	Terlampaui
4.	Panjang jaringan jalan Kabupaten dengan	356,92	346,88	476,49	Belum Terlampaui

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
	kondisi baik dan sedang (km)				
5.	Persentase desa yang tidak bisa dilalui kendaran roda empat atau lebih	15,98	0,59	2,60	Terlampaui
6.	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	0,0445	0,0585	0,061	Belum Terlampaui
7.	Rasio panjang jaringan jalan kabupaten dengan jumlah penduduk	0,21	0,21	1,99	Belum Terlampaui
8.	Pengendalian daya rusak air terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak (%)	-	17,38	18,8	Belum Terlampaui
9.	Ketersedian layanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap (%)	100	100	100	Terlampaui
10.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	78,31	81,80	79,1	Terlampaui
B.	**Penataan Ruang**				
1.	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	Terpenuhi
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	221,52	221,52	3,9	Terlampaui
3.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,014	0,014	0,016	Tidak tercapai

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi rumah layak huni terus meningkat setiap tahunnya yang dapat dilihat dari angka rasio rumah layak huni, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,1338 dan pada tahun 2020 menjadi 0,1478. Selain itu rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk memiliki nilai yang terlampaui dari standar yang di tentukan.

Tabel 2. 33
Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Rasio rumah layak huni	0,1338	0,1478	0,1343	Terlampaui
2.	Rasio permukiman layak huni	n.a	0,975	0,55	Terlampaui
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,52	75,51	53,73	Terlampaui
4.	Persentase cakupan layanan air bersih (PDAM)	45,2	75,05	48,45	Terlampaui
5.	Persentase cakupan layanan sanitasi	60,72	61,16		
6.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	4,15	4,15	1,71	Terlampaui
7.	Persentase areal lingkungan pemukiman kumuh	0,0074	0,00541	0,0074	Tidak tercapai

Berdasarkan dari data tabel di atas belum tersedianya database tentang rumah secara lengkap dan masih perlu di lengkapi dan dilakukannya pendataan lagi. Dalam membangun sebuah perumahan ataupun permukiman perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar lingkungan permukiman kumuh tidak mengalami peningkatan bahkan akan mengalami penurunan. Selain itu bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum juga masih terbatas.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Perkembangan pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3, penegakan perda, persentase penanganan bencana, serta jumlah unit pemadam kebakaran per kecamatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun kinerja pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat rata-rata menunjukkan hal yang positif. Namun demikian hal ini perlu terus dioptimalkan pencapaiannya.

Tabel 2. 34
Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Konflik sosial (jumlah)	0	0	0	Tercapai
2.	Indeks ketentraman dan ketertiban	75	111,54	80	Terlampaui
3.	Indeks kerukunan umat beragama	**n.a**	65	65	Tercapai
4.	Tingkat waktu tanggap *(response time)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	80	64,71	90	Tidak tercapai
5.	Persentase penegakan (PERDA)	80	62,5	85	Tidak tercapai
6.	Cakupan konflik SARA yang ditangani			100	Tidak tercapai
7.	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	3,55	13,02	5,92	Terlampaui
8.	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakan Perda/Perkada	80	100	85	Terlampaui
9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	77	109,9	80	Terlampaui
10.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	113	100	Terlampaui
11.	Persentase kesepakatan/ rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	100	100	100	Terlampaui

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
12.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	0	0	0	Terlampaui
13.	Persentase desa/kelurahan rawan bencana	37,26	27,81	36,69	Tidak tercapai
14.	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100	100	100	Tercapai
15.	Persentase Ormas yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	97,37	95	95	Tercapai
16.	Persentase Ormas yang dibina	100	100	100	Tercapai
17.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan	100	100	100	Tercapai
18.	Ketersedian SOP penanganan Bencana Daerah (%)	60	-	100	Terlampaui

6. Sosial

Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Sanggau dilihat dari faktor pemberdayaan sosial yang meliputi, jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, jumlah PMKS yang tertangani, dan jumlah fasilitasi rumah ibadah. Ketiga faktor tersebut telah menunjukkan perkembangan yang baik setiap tahunnya. Walaupun demikian, permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan adanya persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, dan persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Upaya secara komprehensif melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) yang merupakan tim yang melibatkan

lintas sektor dan lintas progam dalam rangka penanggulangan kemiskinan, serta Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sidompu, rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH), terintegrasi dengan Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyediaan panti sosial / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang bekerja sama dengan rumah sakit serta puskesmas, dalam rangka penanganan masalah sosial.

Tabel 2. 35
Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Persentase PMKS Yang Tertangani	99,20	99,85	96,9	Terlampaui
2.	Persentase PMKS Yang Difasilitasi	99,20	100	100	Tercapai
3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	4,31	23,05	23,05	Tercapai
4.	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	100	100	100	Tercapai
5.	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	98,00	98,10	60	Terlampaui

Sumber data olah: DinsosP3AKB

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pencari kerja yang di tempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020, Adapun interpretasi capaian kinerja pada indicator tersebut telah melampuai standar yang telah di tetapkan. Selain itu besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun sebelumnya sehingga jumlah

pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 75% dari total jumlah pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 36
Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	Terpenuhi
2.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	206	218	60	Terlampaui
3.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	24	21	16	Tidak tercapai
4.	Keselamatan dan perlindungan	n/a	n/a	n/a	Data Kewenangan Provinsi
5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	50%	76,60%	50%	Terlampaui
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16	0	64	Tidak tercapai
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	16	Tidak tercapai
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	12	Tidak tercapai

Penanganan permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Sanggau masih terdapat hambatan, salah satu faktor penyebabnya yaitu ketersedian tenaga kerja yang belum memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kondisi tersebut terjadi karena belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Selain itu, hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan masih belum

harmonis. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini manakala dikorelasikan dengan kondisi jumlah pegawai negeri sipil tentunya lebih variatif. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Sanggau masih didominasi oleh laki laki. Adapun jumlah pegawai negeri sipil di lingkungaan pemerintahan pada tahun 2020 berjumlah 4805 yang terdiri dari 2295 orang perempuan dan 2510 orang laki laki, atau 47% dari total PNS di Kabupaten Sanggau merupakan perempuan. Oleh karena itu, secara sederhana dapat diuraikan bahwa posisi pemberdayaan perempuan secara faktual belum sepenuhnya. Hal ini terurai dalam data bahwa posisi perempuan masih sedikit jika dibandingkan dengan porsi laki–laki. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dirinci Menurut Jabatan/Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 37
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci Menurut Jabatan/Jenis Kelamin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020

Jabatan	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/A (Juru Muda)	1	3	4
I/B (Juru Muda Tingkat I)	5	1	6
I/C (Juru)	10	1	11
I/D (Juru Tingkat 1)	17	2	19
Total Golongan I	**33**	**7**	**40**
II/A (Pengatur Muda)	59	11	70
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	76	20	96
II/C (Pengatur)	123	74	197
II/D (Pengatur Tingkat I)	198	134	332
Total Golongan II	**456**	**239**	**695**
III/A (Penata Muda)	307	403	710
III/B (Penata Muda Tingkat I)	418	515	933
III/C (Penata)	289	330	619
III/D (Penata Tingkat I)	389	301	690
Total Golongan III	**1403**	**1549**	**2952**
IV/A (Pembina)	544	478	1022

Jabatan	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/B (Pembina Tingkat I)	55	21	76
IV/C (Pembina Utama Muda)	17	1	18
IV/D (Pembina Utama Madya)	2	-	2
IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Total Golongan IV	618	500	1118
Jumlah	**2510**	**2295**	**4805**

Sumber : Sanggau Dalam Angka, 2021

Selain itu pemberdayaan perempuan juga terkait dengan isu gender. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat kondisi gender adalah indeks pembangunan gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

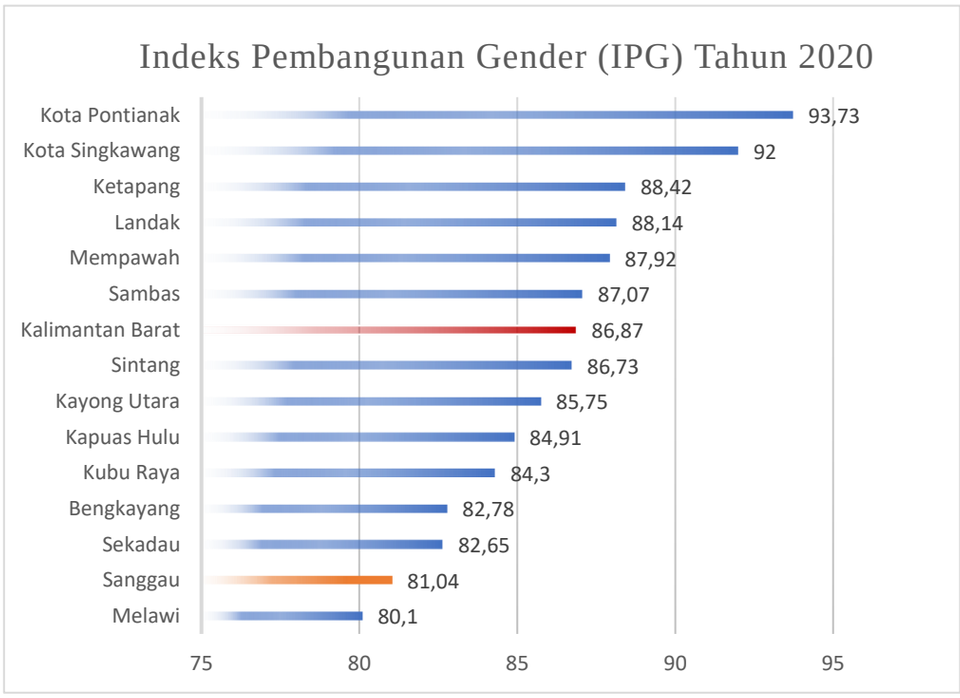

Gambar 2. 21
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Kalimantan Barat
Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IPG Kabupaten Sanggau berada di posisi 2 terbawah sebelum Kabupaten Melawi

dengan nilai IPG sebesar 81,04 dan berada jauh dibawah nilai IPG Kalimantan Barat sebesar 86,87. Hal tersebut menandakan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki laki di Kabupaten Sanggau masih tinggi.

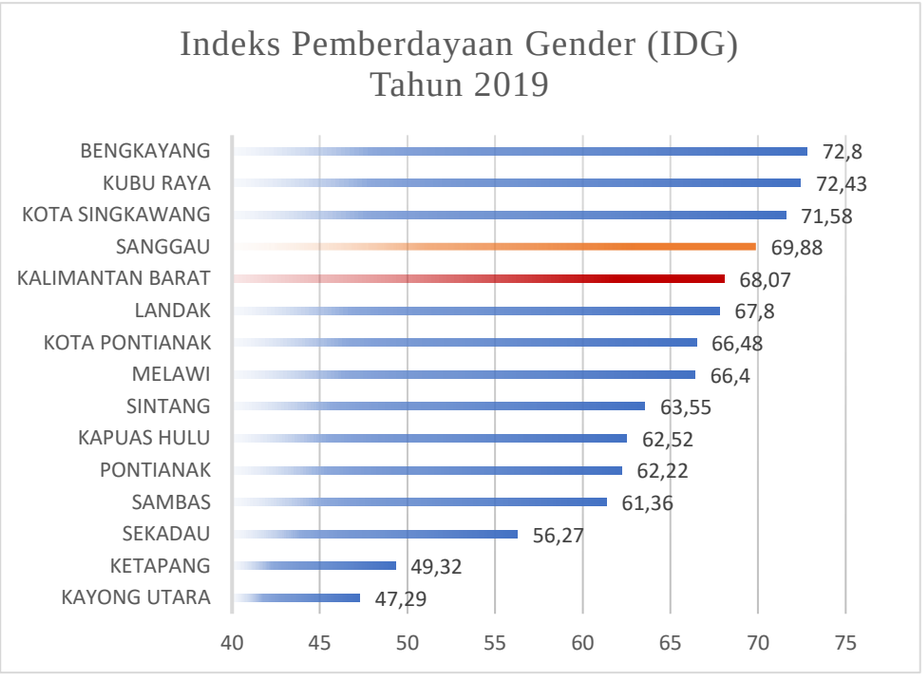

Gambar 2. 22
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kab/Kota di Kalimantan Barat
Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2021

Sementara itu, nilai IDG Kabupaten Sanggau merupakan salah satu yang terbesar di Kalimantan Barat dan memiliki nilai IDG diatas nilai IDG Kalimantan Barat. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Sanggau terbilang baik dengan dilibatkannya perempuan di berbagai aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan pembangunan lainnya. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dilihat dari proporsi posisi perempuan pada jabatan struktural sebagai Aparatur Sipil Negara, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas dan komprehensif.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sanggau tahun 2021 memuat isu strategis, skenario alternatif, dan rekomendasi kebijakan pemberdayaan perempuan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 5 KLHS Kabupaten

Sanggau tahun 2021. Beberapa isu strategis, skenario alternatif, dan rekomendasi kebijakan diantaranya yaitu:

I. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Alternatif skenarionya adalah memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan terhadap anak. Rekomendasi yang diberikan diantaranya:

   Jangka Pendek:

   a. Mensosialisasikan hukum tentang perlindungan anak
   b. Membentuk badan khusus pelaporan kekerasan terhadap anak
   c. Melakukan advokasi atas kasus kejahatan terhadap anak
   d. Pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan terhadap anak

   Jangka Menengah:

   Merumuskan kebijakan perlindungan anak dan perempuan,

   Jangka Panjang:

   Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan

II. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Alternatif skenarionya adalah Meningkatkan peran perempuan dalam berpartisipasi dalam dunia politik. Rekomendasi yang diberikan diantaranya:

   Jangka Pendek:

   Menjamin keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk setiap Partai Politik

   Jangka Menengah:

   a. Memberikan pelatihan dan pendidikan politik bagi kaum perempuan
   b. Meningkatkan dan memberikan peran yang lebih kepada perempuan dalam partai politik

   Jangka Panjang:

   Peningkatan Pemberdayaan perempuan

III. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Alternatif skenarionya adalah Melaksanakan edukasi sanitasi layak kepada masyarakat. Rekomendasi yang diberikan diantaranya:

Jangka Pendek:

a. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin
b. Memfasilitasi pembangunan sarpras dasar pemukiman berbasis masyarakat
c. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup sehat
d. Pengembangan teknologi air limbah

Jangka Menengah:

a. Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
b. Pemberdayaan komunitas masyarakat sehat
c. Menciptakan lingkungan perumahan sehat

Jangka Panjang:

a. Peningkatan pelayanan dasar berbasis masyarakat
b. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar untuk seluruh kalangan terutama masyarakat miskin dan rentan

Tabel 2. 38
Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	61,35	81,04	61,35	Terlampaui
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,55	69,88	80,55	Tidak tercapai
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	86,14	86,55	81,55	Tercapai
4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,04	30,04	30,06	Tidak tercapai
5.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,50	17,50	17,5	Tercapai
6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,00	10,00	10	Tercapai
7.	Rasio KDRT	0,23	0,02	0,02	Tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
8.	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD	96,21	99,24	96,21	Terlampaui
9.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	60,67	95,42	60,67	Terlampaui
10.	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	38,67	94,42	38,67	Terlampaui
11.	Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi	2,14	2,14	Tercapai	Terlampaui
12.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0,71	1,40	0,71	Terlampaui
13.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	0,39	0,39	0,39	Tercapai
14.	Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya	Tidak tercapai
15.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	Tercapai
16.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Tercapai
17.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	Tercapai
18.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	Tercapai
19.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	Tercapai
20.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	100	100	100	Tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
	mendapatkan layanan bantuan hukum				
21.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	Tercapai
22.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	Tercapai

3. Pangan

Berdasarkan tabel kinerja pembangunan urusan pangan tahun 2019-2020, diketahui bahwa perlunya perhatian khusus pemerintah terhadap pengelolaan desa/kelurahan aman dan rawan pangan. Hal tersebut dapat terlihat dari data jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kondisi sebaliknya juga terjadi pada desa/kelurahan aman pangan yang ikut mengalami penurunan.

Tabel 2. 39
Kinerja Pembangunan Urusan Pangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita				
a.	Energi perkapita	3,965,49	2589	4.005	Tidak tercapai
b.	Protein perkapita	74,24	69	74,98	Tidak tercapai
2.	Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Pangan	30	44	29	Tidak tercapai
a.	Sangat rentan	11	11	10	Tidak tercapai
b.	Rentan	19	33	19	Tidak tercapai
3.	Jumlah Desa/ Kelurahan aman Pangan	139	125	140	Tidak tercapai
a.	Aman	37	65	38	Terlampaui
b.	Sangat aman	102	60	102	Tidak tercapai

4. Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020 masih terdapat

banyak indikator yang perlu dilakukan pendataan kembali agar dapat terlihat interpretasi yang dihasilkan.

Tabel 2. 40
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Pertumbuhan kenaikan kepemilikan, Hak Milik tanah masyarakat (%)	n.a	n.a	20	n.a
2.	Luas wilayah pengakuan hutan adat (Ha)	n.a	n.a	3.022,09	n.a
3.	Penyelesaian kasus tanah Negara	n.a	57,15	66,67	Tidak tercapai
4.	Penyelesaian izin lokasi	n.a	100	100	Tercapai

Beberapa permasalahan terkait pertanahan di Kabupaten Sanggau yaitu belum optimalnya penguasaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum dan belum optimalnya pemberdayaan dan pengakuan ha katas tanah masyarakat.

5. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan dalam urusan lingkungan di Kabupaten Sanggau mengalami perkembangan yang cukup baik dalam beberapa hal pada tahun 2019-2020.

Tabel 2. 41
Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,40	60,11	60,30	Tidak tercapai
2.	Indeks kualitas air	48,18	50,00	49,02	Terlampaui
3.	Indeks kualitas udara	91,14	92,03	93,66	Tidak tercapai
4.	Indeks Tutupan Lahan	44,02	43,75	43,75	Tercapai
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	15,50	15,74%	19,50%	Tidak tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100%	20,87%	58,00%	Tidak tercapai
7.	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak tercapai
8.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak tercapai
9.	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD)	0	0	0	Tercapai
10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak tercapai
11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	100%	100%	100%	Tercapai
12.	Presentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	20,50	21,00%	29,90%	Tidak tercapai

Secara umum kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau sudah menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Namun demikian masih ada yang harus diperhatikan terutama karena terjadi penurunan daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air yang jika dibiarkan dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat. Belum optimalnya pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3 juga menjadi permasalahan lingkungan yang belum bisa diatasi secara maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah juga masih harus ditingkatkan. Dukungan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai harus lebih dioptimalkan.

Tabel 2. 42
Timbulan Sampah di Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2020 (m³)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020
Toba	27	27	27	27
Meliau	28,4	28,4	28,4	28,4
Kapuas	30.1	30.1	30.1	30.1
Mukok	35,08	35,08	35,08	35,08
Jangkang	104,9	104,9	104,9	104,9
Bonti	110,2	110,2	110,2	110,2
Parindu	117.2	117.2	117.2	117.2
Tayan Hilir	137,18	137,18	137,18	137,18
Balai	50,1	52,6	52,6	52,6
Tayan Hulu	75,4	55,9	55,9	55,9
Kembayan	59,4	65	65	65
Beduai	24,1	79,2	79,2	79,2
Noyan	22,2	84,1	84,1	84,1
Sekayam	65,7	103,75	103,75	103,75
Entikong	36,8	62,4	62,4	62,4
Jumlah	**950,2**	66,3	66,3	66,3
Rata-Rata (%)	**63,35**	78,54	78,54	78,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

Tabel 2. 43
Volume Sampah Terangkut di Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2020 (m³)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020
Toba	1,50	1,80	2,00	2,00
Meliau	14,30	15,00	16,00	16,00
Kapuas	77,10	78,60	80,10	107,00
Mukok	-	-	-	-
Jangkang	1,00	1,50	2,00	2,00
Bonti	-	-	-	-
Parindu	10,10	11,00	12,00	12,00
Tayan Hilir	11,00	11,20	11,40	12,00
Balai	3,00	3,00	3,60	4,00
Tayan Hulu	10,00	10,60	11,00	12,00
Kembayan	4,00	4,50	4,50	5,00
Beduai	1,00	1,20	1,50	2,00
Noyan	-	-	-	-
Sekayam	3,00	3,80	4,00	4,00
Entikong	8,20	8,20	8,40	9,00
Jumlah	**144,20**	**150,40**	**156,50**	**187,00**
Rata-Rata (%)	**12,02**	**12,53**	**13,04**	**15,58**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

Volume sampah di Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 mencapai1.279,03 M³ dengan rata-rata sampah 85,27 M³. Namun terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau yang belum

mendapatkan bantuan kendaraan pengangkut sampah, pada tahun 2020 terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mukok, Kecamatan Bonti dan Kecamatan Noyan yang belum menerima kendaraan pengangkut sampah, sehingga volume persampahan di daerah tersebut belum tercover pada data tahun 2020 sebagai berikut.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan catatan sipil adalah hal yang penting karena hasil kinerja dari urusan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan dan catatan sipil akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan - kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara strategis ditopang oleh data seperti e-KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi sangat dibutuhkan guna mendukung pengoptimalan pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau yang memiliki e-KTP semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2017 sebanyak 221.308 orang menjadi 294.926 orang di tahun 2020. Secara lebih jelas mengenai jumlah penduduk berdasarkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sanggau Tahun 2017-2020

Jenis administrasi	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Penduduk Memiliki E-KTP (jiwa)	221.308	263.801	282.296	294.926
Penduduk Belum Memiliki E-KTP (jiwa)	96.964	85.999	68.198	60.155
Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran (jiwa)	98.650	128.265	164.010	169.493
Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran (jiwa)	383.850	357.864	323.303	315.703
Penduduk Memiliki Kartu Keluarga (KK)	119.350	119.154	124.238	131.422
Pemduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga (KK)	28.255	12.091	15.548	12.528
Penduduk Memiliki Akta Nikah (dokumen)	25.197	28.108	31.697	78.248
Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah (dokumen)	208.551	203.151	199.814	155.100
Penduduk Memiliki Akta Perceraian (dokumen)	528	n.a	n.a	n.a
Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian (dokumen)	6.377 dokumen	n.a	n.a	n.a

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tertib administrasi, maka jika dilihat berdasarkan persentase juga tidak jauh berbeda. Capaian kerja di dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, yaitu persentase kepemilikan e-KTP dan persentase kepemilikan KK di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 45
Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dari pelayanan pendaftaran penduduk (%)	61.08	62,7	67,67	Tidak tercapai
2.	Cakupan kepemilikan dokumen catatan sipil (%)	22	75,6	44,12	Terlampaui

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
3.	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	92,7	97,68	90	Terlampaui
4.	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18	65,8	76,42	70	Terlampaui
5.	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	89	93	100	Tidak tercapai
6.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	25,76	13,02	Terlampaui
7.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Tercapai
8.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sanggau masih harus ditingkatkan kembali, Beberapa permasalahan terkait kinerja pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi apabila masyarakatnya turut berpartisipasi dalam suatu kelompok binaan/usaha yang dianggap berhasil. Kelompok binaan/usaha dianggap berhasil apabila kelompok tersebut menjadi agen perubahan dan pembangunan. Selain itu, kelompok tersebut dapat menjadi subjek, yaitu motor penggerak perubahan.

Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten sanggau mengalami perkembangan yang baik, dilihat dari indikator- indikator yang mengalami kenaikan selama periode 2019 dan 2020 terdapat 5 dari total 14 indikator yang tidak tercapai yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46
Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	3.067	3,55	11,66	Tidak tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
2.	Persentase tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	55,82	67,5	65,6	Terlampaui
3.	Rata-rata jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	1	1	1	Tercapai
4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	0,48	17,79	56,00	Tidak tercapai
5.	Persentase Desa dengan administrasi kategori baik	55,82	51,53	65,6	Tidak tercapai
6.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA)	2	2	1	Terlampaui
7.	Rata-rata jumlah Bumdes yang terbentuk	0,44	0,5	0,54	Tidak tercapai
8.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,49	0,59	0,59	Tercapai
9.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	804	1723	16	Terlampaui
10.	Persentase Posyandu aktif	43,48	15,88	45	Tidak tercapai
11.	Rata-rata jumlah Bumdes yang terbentuk	0,44	0,5	0,5	Tercapai
12.	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	59	68	65,6	Terlampaui
13.	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	1	1	1	Tercapai

Untuk meningkatkan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sanggau maka upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu, pengoptimalan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa yang dapat didukung oleh peningkatan kualitas kelembagaan dan aparatur desa. Selain itu, pengoptimalan kinerja pengelolaan keuangan Desa juga harus ditingkatkan yang harus memperhatikan keakuratan *database* desa. Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan dengan melaksanakan program keluarga berencana yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Terlihat bahwa jumlah pasangan usia subur peserta KB dan pasangan usia subur belum mengikuti KB di Kabupaten Sanggau di mulai sejak tahun 2014–2018 mengalami penurunan, sedangkan untuk pasangan usia subur belum mengikuti KB pada tahun 2017 naik sebanyak 22.383 dan di tahun 2018 menurun menjadi 19.313. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan bahwa pasangan usia subur peserta keluarga berencana mengalami penurunan begitu juga pasangan usia subur yang belum mengikuti program keluarga berencana angkanya juga mengalami penurunan. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pasangan yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu, partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB masih rendah, sarana dan prasarana pendukung program KB masih belum memadai, dan belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.

Tabel 2. 47
Jumlah Pasangan Usia Subur yang Sudah dan Belum Mengikuti KB di Kabupaten Sanggau Tahun 2016-2018

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
Pasangan Usia Subur Peserta KB	86.733	87.369	86.326
Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB	22.661	22.383	19.313

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 48
Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1,54	1,66	Terlampaui
2.	Total Fertility Rate	2,24	2,60	2,23	Terlampaui
3.	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	50,00	60,00	60	Tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
4.	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	50,00	30,00	60	Tidak tercapai
5.	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	Tercapai
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	5	Tidak tercapai
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	10	0	Terlampaui
8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,70	2,65	2,67	Terlampaui
9.	Ratio Akseptor	63,73	81,26	66,23	Terlampaui
10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	63,73	81,26	66,23	Terlampaui
11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	89,77	34,42	86,9	Terlampaui
12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	6,39	3,80	6,07	Terlampaui
13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,02	19,00	9,74	Tidak tercapai
14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,93	66,93	12,26	Terlampaui
15.	Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76,24	80,77	76,74	Terlampaui
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	53,84	80,00	53,84	Terlampaui
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,00	80,00	75	Terlampaui
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	75,00	80,00	75	Terlampaui

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	2	Tidak tercapai
20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100	100	100	Tercapai
21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	13,00	19,00	20	Tidak tercapai
22.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	169	169	169	Tercapai
23.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	80,00	80,00	80	Tercapai
24.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	66,67	18,18	66,69	Tidak tercapai
25.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	64,00	0,00	66	Tidak tercapai
26.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	Tercapai
27.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80,00	100	80	Terlampaui
28.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	80,00	80,00	80	Tercapai
29.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,76	0,76	0,76	Tercapai

9. Perhubungan

Kinerja pembangunan dalam urusan perhubungan di Kabupaten Sanggau mengalami perkembangan yang cukup baik dalam beberapa hal selama periode 2016-2020. Hal ini terlihat dari

persentase terminal tipe C yang berkondisi baik selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2016-2020).

Tabel 2. 49
Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat	85,50	81,5	75	Terlampaui
2.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	269.361	73.122	242.810	Tidak tercapai
3.	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan kondisi baik	45,11	49,11	38	Terlampaui
4.	Persentase kendaraan laik jalan	74,22	44,40	86,7	Tidak tercapai
5.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	11	11	26	Tidak tercapai
6.	Persentase layanan angkutan darat	0,063	0,22	12	Tidak tercapai
7.	Rasio ijin trayek	1:6187	1:7129	0,045	Terlampaui
8.	Jumlah uji KIR angkutan umum	210	202	60	Terlampaui
9.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	61	62,31	13,48	Terlampaui
10.	Pemasangan rambu-rambu	65,48	73,19	550	Tidak tercapai
11.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	223369	56540	242.910	Tidak tercapai
12.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	45.992	16.582	5.875	Terlampaui

10. Komunikasi dan Informatika

Capaian kerja kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan dan penurunan dalam beberapa aspeknya. Jika dilihat dari jumlah BTS provider telekomunikasi yang terfasilitasi dan rasio wartel/warnet tiap tahunnya, terjadi peningkatan dari tahun 2016-2020. Dalam pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan seperti jumlah

perangkat daerah yang menggunakan aplikasi *e-government* dan jumlah desa *broadband* juga mengalami peningkatan

Tabel 2. 50
Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,36	2,30	1,7	Terlampaui
2.	Persentase layanan telekomunikasi	65,3	66,65	61,92	Terlampaui
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	40	72,73	46	Terlampaui
4.	Persentase e-Government terintegrasi	6,90	50,00	13,79	Terlampaui

Meskipun pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan, namun pengimplementasian *e*-government ini masih belum optimal. Selain itu, permasalahan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sanggau yaitu masih adanya keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta belum terjangkaunya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Persentase koperasi aktif yang pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya di angka 59,95% dibanding tahun sebelumnya yaitu 57,8%. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan animo masyarakat Kabupaten Sanggau untuk sektor Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Tabel 2. 51
Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Presentase koperasi aktif	57,8	59,95	59,64	Terlampaui

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
2.	Peningkatan status usaha mikro menjadi usaha kecil	2	3	3	Tercapai
3.	Jumlah usaha mikro aktif	5.621	5.624	5.621	Terlampaui
4.	Persentase usaha mikro	94,9	96,36	95,35	Terlampaui
5.	Pertumbuhan koperasi aktif	4,0	8,0	7,0	Terlampaui
6.	Jumlah usaha kecil	262	272	231	Terlampaui
7.	Jumlah usaha menengah	43	43	43	Tercapai

12. Penanaman Modal

Secara garis besar perkembangan urusan penanaman modal di Kabupaten Sanggau cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada investasi PMA sektor primer di tahun 2017-2020, dimana investasi tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan sektor primer, sektor sekunder sempat tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan investasi pada tahun 2017-2018, pada tahun 2019 tidak ada perusahaan yang melakukan penambahan investasi dan baru di tahun 2020 terjadi penambahan investasi lagi. Adapun jumlah penanaman modal asing di Kabupaten Sanggau disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 52
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
Kabupaten Sanggau (US$ ribu)

Tahun	Jenis Investasi	
	Investasi Sektor Primer	Investasi Sektor Sekunder
2016	23.828	5.271
2017	729,2	28.280
2018	1.040	735
2019	12.150	0
2020	28.468	33.744,8

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Selain itu, kondisi realisasi investasi PMA Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut;

Tabel 2. 53
Kondisi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
Kabupaten Sanggau

Kabupaten / Kota	Realisasi Tahun 2020	
	Jumlah Proyek PMA	Realisasi Investasi Proyek PMA (US$ ribu)
Sambas	24	8,975.00
Bengkayang	10	107,472.00
Landak	60	8,281.00
Mempawah	55	150,000.00
Sanggau	**92**	**62,375.00**
Ketapang	409	301,732.00
Sintang	-	-
Kapuas Hulu	70	18,854.00
Sekadau	18	5,416.00
Melawi	23	19,133.00
Kayong Utara	-	-
Kubu Raya	61	75,537.00
Kota Pontianak	70	1,478.00
Kota Singkawang	4	11.00
Kalimantan Barat	**896**	**759,264.00**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Selanjutnya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kabupaten Sanggau mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2020, PMDN mengalami penurunan nilai realisasi. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung.

Tabel 2. 54
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kabupaten Sanggau

Kab/Kota	Realisasi Investasi PMDN Kalimantan Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sambas	928.783	1.154.041	355.494	400.474	339.415
Bengkayang	4.512.610	4.512.610	135.866	316.713	913.796
Landak	2.008.475	4.703.678	1.189.331	176.210	122.761
Mempawah	3.690.495	5.982.129	352.010	378.527	4.476.489
Sanggau	**4.485.120**	**7.481.136**	**602.454**	**947.710**	**323.452**
Ketapang	6.502.895	7.279.009	693.986	771.943	833.104
Sintang	5.273.439	6.432.156	688.510	2.191.190	449.873
Kapuas Hulu	7.753.023	8.294.432	469.318	464.386	930.266
Sekadau	1.392.147	1.732.644	798.986	556.382	207.711
Melawi	2.559	61.673	29.688	575.601	45.156

Kab/Kota	Realisasi Investasi PMDN Kalimantan Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kayong Utara	186.000	186.000	-	120.593	-
Kubu Raya	3.096.429	4.302.965	983.442	743.641	451.570
Kota Pontianak	455.631	512.766	278.661	51.294	161.937
Kota Singkawang	96.179	111.451	13.639	1.170	941
Kalimantan Barat	**40.383.786**	**52.746.691**	**6.591.384**	**7.695.834**	**9.256.471**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau

Dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal, beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan bagi para investor. Meskipun jika faktor lain seperti kenyamanan, infrastruktur, dan promosi investasi sudah dilakukan, akan tetapi jika perizinan masih menjadi masalah utama bagi para investor, maka hal tersebut harus segera diatasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat peraturan yang jelas mengenai insentif investasi. Dengan dibentuknya peraturan yang jelas tentu dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat menarik minat investor serta mampu bersaing dengan daerah lain.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tabel capaian kinerja dibawah ini, diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang mengalami perkembangan capaian, yaitu persentase wirausaha muda dan persentase organisasi pemuda yang aktif. Adapun capaian kinerja pada bidang kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

Tabel 2. *6*
Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Persentase wirausaha muda	4	11	11	Tercapai
2.	Jumlah prestasi olahraga	5	0	6	Tidak tercapai
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	41	50,79	50,79	Tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
4.	Jumlah atlet berprestasi	7	1	13	Tidak tercapai
5.	Jumlah juri/wasit yang bersertifikasi (org)	30	30	30	Tercapai
6.	Cakupan pembinaan atlet muda	16	0	21	Tidak tercapai

Perkembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sanggau telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah organisasi maupun jumlah kegiatan. Namun demikian masih perlu terus dilakukan pembinaan dan pengembangan pada sektor organisasi kepemudaan. Pengelolaan kegiatan baik kepemudaan maupun olahraga harus dikembangkan melalui pembinaan yang tepat serta meningkatkan pengelolaan manajemen organisasi.

14. Kebudayaan

Jumlah budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 26 budaya, dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan jumlah budaya yang dilestarikan, pelestarian cagar budaya seperti halnya benda, situs dan kawasan cagar budaya jumlahnya juga terus meningkat hingga pada tahun 2020 terdapat 30 cagar budaya yang dilestarikan.

Sementara itu, untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sanggau juga menunjukkan peningkatan hingga pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6 festival telah dilaksanakan. Sarana prasarana penunjang penyelenggaraan kesenian tradisional masih terus berkembang meskipun jika dilihat dari jumlah sanggar seninya mengalami penurunan. Namun demikian, sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Sanggau jumlahnya terus bertambah hingga pada tahun 2020 tercatat sebanyak 40 sarana seni dan budaya telah terselenggara.

Tabel 2. 55
Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		

1.	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	96	100	20	Terlampaui
2.	Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	100	127	60,00	Terlampaui
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan	81	75	100	Tidak tercapai
4.	Benda, situs, kepurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	27	30	52,63	Tidak tercapai
5.	Persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya	48	75	25,77	Terlampaui

Melihat pembangunan urusan kebudayaan yang jika dilihat dari perkembangan jumlahnya cenderung lambat meskipun mengalami peningkatan, maka perlu adanya upaya pelestarian nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya melalui penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan sejarah. Untuk menunjang kegiatan tersebut tentu diperlukan sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang memadai serta menguatkan pemberdayaan lembaga budaya lokal. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga kedepannya tinggal melakukan kegiatan promosi untuk mengenalkan ciri khas Kabupaten Sanggau melalui pembangunan kebudayaan.

15. Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembinaan perpustakaan di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan menunjukkan perkembangan positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah perpustakaan yang pada tahun 2017 terdapat 198 perpustakaan. Sejalan dengan peningkatan jumlah perpustakaan yang ada, maka dari itu jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia juga bertambah. Tercatat pada tahun

2020 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 1.656 orang dan koleksi bukunya mencapai 34.995 buku.

Tabel 2. 56
Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	1.897	1.656	3.000	Terlampaui
2.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1.939	1.990	3.000	Terlampaui
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.535	34.995	100	Terlampaui
4.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1:756	1:796	1,366666667	Terlampaui
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	487.663	488.123	70.005	Terlampaui
6.	Jumlah perpustakaan, tenaga teknis, dan penilaian yang memiliki sertifikat	182	182	40	Terlampaui

Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tentu peran serta perpustakaan harus tetap dijaga. Peran serta masyarakat dalam menjaga eksistensi perpustakaan tentu menjadi faktor utama. Oleh karena itu peningkatan minat baca harus lebih ditingkatkan. Untuk dapat memacu minat baca masyarakat tentu pemerintah daerah telah mengupayakan peningkatan pelayanan perpustakaan baik melalui peningkatan sarana prasarana pendukung maupun pengelolaan manajemen perpustakaan yang baik. Sehingga diharapkan kedepannya minat baca masyarakat Kabupaten Sanggau semakin meningkat.

16. Kearsipan

Penyelenggaraan pembangunan urusan kearsipan di Kabupaten Sanggau secara umum dari tahun ke tahun menunjukkan pola positif yang dapat dilihat pada sektor pengelola arsip. Pengelolaan

arsip secara baku dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan meskipun dari tahun 2015-2017 cenderung stagnan di angka 80%. Pengelolaan arsip secara baku yang cenderung stagnan dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah yang disebabkan sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip di Kabupaten Sanggau masih belum representatif. Oleh karena itu, pengoptimalan sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip yang representatif menjadi faktor penting guna menunjang pembangunan urusan kearsipan di Kabupaten Sanggau.

Tabel 2. 57
Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Persentase pengelolaan arsip pola baru	5	11,6	10	Terlampaui
2.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	81	85	85	Tercapai
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	120	120	163	Tidak tercapai

17. Statistik

Tabel 2. 58
Kinerja Pembangunan Urusan Statistik di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Cakupan data statistik sektoral Kabupaten Sanggau dalam satu data	36	49,12	100	Tidak tercapai
2.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sektoral yang komprehensif dan akurat	100	100	100	Tercapai
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Tercapai
4.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Tercapai

5.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Tercapai

18. Persandian

Tabel 2. 59
Kinerja Pembangunan Urusan Persandian di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Non level	Level I	Level I	Tercapai
2.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	2,32	12	Tidak tercapai

2.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama berasal dari budidaya perikanan. Sebaliknya konsumsi ikan per kapita masih tergolong rendah yaitu sebesar 38 Kg/perkapita selama tahun 2020.

Tabel 2. 60
Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sanggau tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Produksi perikanan (ton)	12.850	8.154,8	8.155	Tidak tercapai
2.	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36	38	38	Tercapai
3.	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	1.335,10	1.700,2	1.676,50	Terlampaui

2. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Sanggau dikelompokan ke dalam beberapa kategori yaitu objek wisata budaya, cagar alam,

pertanian, alam, sejarah, religi, kuliner dan objek wisata buatan. Setiap tahunnya kunjungan wisata ke Kabupaten Sanggau selalu mengalami peningkatan kunjungan, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini berdampak pada makin banyaknya objek wisata baru yang dibuka, dan bukan tidak mungkin akan terus bertambah setiap tahunnya melihat dari melimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu, dampak yang terjadi adalah dibangunnya beberapa infrastruktur yang mendukung pariwisata seperti hotel berbintang yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Tentu jika pariwisata terus meningkat dan diikuti menjamurnya fasilitas pendukung seperti hotel, restoran dan sebagainya, maka sektor pariwisata akan menjadi sektor yang menjanjikan bagi Kabupaten Sanggau. Namun saat ini kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah dan fluktuatif, hal ini dikarenakan belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, serta adanya pandemi covid-19 yang semakin membuat sector ini memiliki penurunan dalam memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Sanggau

Adapun kinerja pembangunan urusan Pariwisata di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut;

Tabel 2. 61
Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Pertumbuhan kunjungan wisata	26	42,8	42,8	Tercapai
2.	Kunjungan pariwisata	26.499	79.786	75.000	Terlampaui
3.	Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	Terlampaui
4.	PAD sektor pariwisata (juta rupiah)	118.764.000	101.152.000	112.560.000	Tidak tercapai

Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam sektor pariwisata di Kabupaten Sanggau diantaranya ialah belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata yang berbasis

kearifan lokal yang menjadi ciri atau identitas dari Kabupaten Sanggau itu sendiri. Lalu kedua adalah belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pada destinasi wisata sehingga menurunkan daya tarik dari destinasi wisata tersebut. Serta ketiga adalah belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.

3. Pertanian

Sumbangan sektor pertanian melalui subsektor perkebunan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Sanggau masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Produksi padi di Kabupaten Sanggau tahun 2019 sebesar 85.131,76 ton sedangkan pada tahun 2020 sebesar 65.962,88 ton atau menurun sebanyak 19.168,88 ton. Hal ini dikarenakan luas lahan sawah mengalami penurunan menyesuaikan luas lahan baku sawah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Surat Keputusan Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 sehingga berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Jenis lahan sawah di Kabupaten Sanggau dibedakan menjadi lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa pasang surut dan lahan sawah rawa lebak.

Tahun 2017 luas lahan sawah beririgasi seluas 18.810 hektar dan pada tahun 2020 seluas 13.792 hektar, tadah hujan 2017 seluas 30.609 hektar dan pada tahun 2020 seluas 19.167 hektar. Selain lahan sawah tersebut, terdapat lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Sanggau. Lahan pertanian bukan sawah tersebut antara lain pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma, penggembalaan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Luas lahan kering/huma tahun 2017 adalah 63.115 hektar, pada tahun 2020 seluas 62.352 hektar dan luas lahan kering tegal/kebun tahun 2017 adalah 55.769 hektar dan di tahun 2020 seluas 65.715 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pembangunan urusan pertanian di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	22,57	27,34	26,71	Terlampaui
2.	Produksi sektor pertanian (ton)	238,27	272,76	226,49	Terlampaui
	Produktifitas tanaman perkebunan :				
3.	Kelapa Sawit	14,72	13,68	10,07	Terlampaui
4.	Karet	0,89	1,04	0,93	Terlampaui
5.	Lada	0,97	1,37	1,06	Terlampaui
6.	Kopi	0,42	0,34	0,77	Tidak tercapai
7.	Pertumbuhan populasi ternak	5,06	9,00	10,5	Tidak tercapai

Meskipun produksi terus meningkat, namun terjadi penurunan kontribusi pada PDRB Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah disektor pertanian. Salah satu masalah yang terjadi adalah menurunnya mutu hasil produksi pertanian, dan kurang optimalnya produktivitas pertanian. Selain itu, masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Kemudian rendahnya daya saing produk pertanian lokal di pasaran dan juga belum terbangunnya sistem pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi merupakan salah satu komponen yang penting dalam hidup. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak menggantungkan pada sumber energi, salah satunya adalah listrik. Di Kabupaten Sanggau, sebaran layanan listrik belum merata dan belum menjangkau semua daerah. Presentase rumah tangga yang telah teraliri listrik pada tahun 2020 sebasar 80,79%

dan melampaui standar yang telah ditentukan yaitu sebesar 75,4%. Adapun jika dilihat secara historis, kelistrikan dalam 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Tabel 2. 63
Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Presentase rumah tangga pengguna listrik	75,62	80,79	75,4	Terlampaui
2.	Persentase rumah tangga pengguna listrik di wilayah perbatasan antar negara	68,50	79,66	70,45	Terlampaui
3.	Rasio ketersediaan daya listrik (MW)	42,21	94,4	42,21	Terlampaui

Selain masalah yang ada berupa rumah tangga yang belum teraliri listrik, juga masih terdapat beberapa masalah lain diantaranya optimalisasi distribusi energi yang masih kurang, dan juga belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan air tanah.

5. Perdagangan

Letak geografis Kabupaten Sanggau cukup strategis karena memiliki akses langsung ke luar negeri (Malaysia) melalui pos lintas batas negara di Entikong, sehingga pengembangan sektor perdagangan merupakan salah satu langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan tingginya volume ekspor yaitu 48.630.378,94 ton/m^3 pada tahun 2020 dengan nilai ekspor mencapai 63.104.293,28 US$. Kondisi ini menjadi peluang positif bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka formulasi kebijakan. Volume dan nilai ekspor komoditi hasil industri di Kabupaten Sanggau tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 64
Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Hasil Industri di Kabupaten Sanggau

Tahun	Volume Ekspor (ton/m3)	Nilai Ekspor (US$)

2016	140.060.770	84.012.799
2017	106.399.570	63.277.074
2018	306.311.570	220.006.074
2019	80.794,1981	110.789,3121
2020	48.630.378,94	63.104.293,28

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

Sementara itu jika dilihat pada segi sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pelaku usaha informal di Kabupaten Sanggau sudah mulai dilakukan dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan satu usaha positif yang dilakukan oleh pemerintah dan manfaatnya langsung dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang juga terus meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi para pelaku sektor perdagangan, antara lain adalah infrastruktur yang belum sepenuhnya dibenahi dengan baik, harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang belum terkendali, dan masih terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Selain itu, dari sisi regulasi juga masih terkendala pada belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Tabel 2. 65
Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Ekspor bersih perdagangan (US $)	48.630.378,9	63.104.293,0	88.162.789,80	Tidak tercapai
2.	Cakupan bina Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) (%)	91,86	91,59	45	Terlampaui
3.	Ketersediaan sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik (%)	32,00	32,00	35,71	Tidak tercapai

6. Perindustrian

Pendataan industri di Kabupaten Sanggau hanya sebatas pada industri kecil dan industri sedang saja. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pendataan untuk industri besar merupakan wewenang provinsi. Industri di Kabupaten Sanggau sebagian besar bergerak di bidang industri kecil, terutama bidang industri pengolahan pangan dan industri pengolahan kayu. Berdasarkan data industri kecil nonformal industri terbanyak di Kabupaten Sanggau tahun 2020 adalah industri makanan dan Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya masing-masing pada tahun 2020 sebanyak 273 unit dan 108 unit. Namun demikian, pada industri makanan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, karena pada tahun 2019 hanya mencapai 234 unit dan meningkat menjadi 100 unit di tahun 2019. Peningkatan ini tentunya berdampak pada semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri tersebut. Banyaknya usaha, jumlah tenaga kerja dan nilai investasi pada industri kecil nonformal menurut jenisnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 66
Banyaknya Usaha, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi pada Industri Kecil Non Formal Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		Jumlah Tenaga Kerja	
	2019	2020	2019	2020
Industri Makanan	234	273	468	541
Industri Minuman	20	23	38	43
Industri Tekstil	9	9	55	54
Industri Pakaian Jadi	13	14	17	20
Industri Kulit,barang dari kulit dan alas kaki	1	1	8	8
Industri kayu, barang dari kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	100	108	291	318
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2	3	7	10
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	1	3	3

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		Jumlah Tenaga Kerja	
	2019	2020	2019	2020
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6	8	34	33
Industri Barang Galian Bukan Logam	28	26	85	79
Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	38	36	103	95
Industri Furnitur	41	34	144	110
Industri Pengolahan lainnya	7	11	49	56
Total	**500**	**547**	**1.303**	**1.370**

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020

Sedangkan berdasarkan data industri kecil formal industri terbanyak di kabupaten Sanggau tahun 2020 adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya dan industri minuman masing-masing pada tahun sebanyak 76 unit.

Namun demikian pada industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan, karena pada tahun 2019 hanya mencapai 76 unit dan tetap sama menjadi 76 unit di tahun 2020. Peningkatan ini tentunya berdampak pada semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri tersebut dari 423 orang pada tahun 2019 menjadi 424 orang pada tahun 2020. Banyaknya usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi pada industri kecil formal menurut jenisnya di Kabupaten Sanggau tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 67
Banyaknya Usaha, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi pada Industri Kecil Formal Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	2019	2020	2019	2020
Industri Makanan	36	62	125	218
Industri Minuman	54	60	188	202
Industri Tekstil	12	11	41	33
Industri Pakaian Jadi	44	57	105	129
Industri kayu, barang dari kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	76	76	423	424
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	49	49	245	225

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	2019	2020	2019	2020
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	2	3	13
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6	5	22	18
Industri Barang Galian Bukan Logam	14	11	45	39
Industri Logam Dasar	-	-	-	-
Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	25	25	86	87
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	-	-
Industri Peralatan Listrik	1	1	5	5
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	-	-	-	-
Industri Alat Angkutan Lainnya	-	-	-	-
Industri Furnitur	26	33	94	116
Industri Pengolahan lainnya	20	20	41	41
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	11	12	28	23
Total	**376**	**426**	**1.455**	**1.587**

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. 68
Banyaknya Usaha, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi pada Industri Menengah Menurut Jenisnya di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	2019	2020	2019	2020
Industri Makanan	2	4	92	83
Industri Minuman	1	1	25	30
Industri kayu, barang dari kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	3	4	82	92
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3	3	63	63
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	1	200	5
Industri Barang Galian Bukan Logam	-	-	-	-
Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-	-
Industri Pengolahan lainnya	-	1	-	25
Total	**10**	**14**	**462**	**298**

Sumber : Kabupaten Sanggau Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2. 69
Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Pertumbuhan industri	6,14	11,80	6,14	Terlampaui
2.	Persentase jenis produk IKM potensial yang menembus pasar luar daerah	2,33	5,53	2,33	Terlampaui
3.	Jumlah industri yang mendapat bantuan Pemerintah Daerah	18	222	18	Terlampaui
4.	Jumlah kemitraan antara IKM dengan industri besar	4	23	4	Terlampaui

7. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan sebuah program yang dirintis oleh pemerintah dalam rangka mengurangi kepadatan pada kota kota besar di Indonesia dan dipindahkan ke daerah dengan penduduk yang masih sedikit dengan harapan dapat mendapatkan hidup yang lebih layak di daerah tujuan transmigrasi tersebut. Selain itu tentunya dengan kompetensi yang dibawa dari kota dengan persaingan yang lebih ketat, diharapkan kompetensi tersebut dapat dikembangkan dan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah tujuan transmigrasi tersebut

Tabel 2. 70
Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Cakupan transmigran lokal yang dibina	100	100	79,34	Terlampaui

Permasalahan yang dihadapi dalam transmigrasi antara lain adalah terbatasnya cadangan lahan yang sesuai tata ruang untuk dialokasikan sebagai kawasan hunian dan kawasan pendukung lain untuk transmigran. Selain itu, pembinaan kepada transmigran perlu dioptimalkan.

2.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Unsur Perencanaan (BAPPEDA)

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ketersediaan dokumen perecanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya:Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2. 71
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Tingkat konsistensi antardokumen perencanaan	93,645	95,5	100	Tidak tercapai
2.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	87,29	92,08	100	Tidak tercapai
3.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	98,92	100	Tidak tercapai
4.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	Tercapai
5.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Tercapai
6.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Tercapai
7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Tercapai
8.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Tercapai

2. Unsur Keuangan (BPKAD)

Tabel 2. 72
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Keuangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2.	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	Tercapai
3.	Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	60	60	50	Terlampaui
4.	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tercapai
5.	Persentase SILPA terhadap APBD	10,27	13,53	8,13	Terlampaui
6.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	Tercapai
7.	Presentase belanja pendidikan (20%)	26,57	27,36	20	Terlampaui
8.	Presentase belanja kesehatan (10%)	14,41	14,81	10	Terlampaui
9.	Persentase belanja langsung terhadap APBD	43,61	43,73	25	Terlampaui
10.	Persentase belanja tidak langsung terhadap APBD	45,22	56,27	25	Terlampaui
11.	Penatausahaan Aset Daerah (Tertib Administrasi dan Fisik)	Tertib	Tertib	Tertib	Tercapai
12.	Proporsi PAD terhadap APBD	7,39	8,06	6,1	Terlampaui
13.	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,11	7,94	6,21	Terlampaui
14.	Bagi hasil kabupaten dan desa	0,23	0,25	0,2	Terlampaui

3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2. 73
Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		

1.	Indeks profesionalitas ASN	12	47,75	76	Tidak tercapai
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	16	8	60	Tidak tercapai
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	37,42	38,28	62,75	Tidak tercapai

4. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitaian dan pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 74
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	77,78	100	Tidak tercapai
2.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100	100	100	Tercapai
	Penerapan SIDa:				
4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	60	75	62,2	Terlampaui

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Tabel 2. 75
Capaian Indikator Sekretariat Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Predikat akuntabilitas kinerja	C	C	CC	Tidak tercapai
2.	Kategori nilai LPPD	3,0036	Belum rilis	3,1200	Belum rilis

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,28491	0,00207	Terlampaui
4.	Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	100	100	100	Tercapai
5.	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui e-procurement	95,8	100	100	Tercapai
6.	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	60	60	60	Tercapai
7.	Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan	99,11		16,17	Tidak tercapai
8.	Level kematangan (self asessment) Layanan Pengadaan pemerintah daerah]	Level 3	Level 3	Level 4	Tidak tercapai
9.	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	100	100	100	Tercapai

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tabel 2. 76
Capaian Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Tingkat fasilitasi pelayanan sesuai ketugasan Sekretariat DPRD	83,02	139,62	100	Terlampaui
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	ada	ada	ada	Tercapai
3.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda,	ada	ada	ada	Tercapai

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
	dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)				
4.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	Tercapai

2.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Audit Kinerja dan Keuangan

b. Review Kinerja dan Keuangan

c. Pemantauan Kinerja dan Keuangan

d. Evaluasi Kinerja dan Keuangan

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

a. Audit Kenerja dan Keuangan

b. Review Kinerja dan Keuangan

c. Pemantauan Kinerja dan Keuangan

d. Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tabel 2. 77
Capaian Indikator Urusan Pengawasan di Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 2	Terlampaui
2.	Presentase tindak lanjut temuan	62,02	87,38	86	Terlampaui
3.	Persentase pelanggaran pegawai	0,00	0,00	0,1	Terlampaui
4.	Nilai kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2 dengan catatan	Terlampaui

2.3.6 Unsur Kewilayahan

Tabel 2. 78
Capaian Indikator Urusan Kewilayahan di Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja		Standar	Interpretasi
		2019	2020		
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	90,00	93,00	95	Terlampaui
2.	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	97,00	100	100	Tercapai
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	70,00	72,00	70	Terlampaui

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bias dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Di samping itu, kemudahan distribusi barang-barang logistik karena infrastruktur transportasi yang memadai juga berdampak positif dalam mengendalikan inflasi harga barang. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat, laut, dan udara yang memadai memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah daripada daerah yang infrastrukturtransportasinya masih tertinggal.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi,

telekomunikasi dan sarana dan prasarana pemukiman. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau Tahun 2014–2034, tujuan penataan ruang adalah terwujudnya pemanfaatan ruang kabupaten yang aman, nyaman, dan produktif dengan memperhatikan keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan melalui pengembangan industri, perdagangan dan jasa skala regional, pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau meliputi struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi:

1. **Sistem Pusat-pusat Kegiatan, terdiri atas:**
   a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dikembangkan di Kota Entikong.
   b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dikembangkan di Kota Sanggau dan Entikong.
   c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dikembangkan di kota Balai Karangan, Tayan, Sosok, Kembayan dan Pusat Damai.
   d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dikembangkan di kota Batang Tarang, Beduai, Bonti, Balai Sebut, Kedukul dan Meliau.
   e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dikembangkan di kota Teraju dan Noyan.
2. **Sistem Jaringan Transportasi**

   Sistem jaringan transportasi di suatu wilayah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah tersebut. Selain itu juga ikut menentukan cepat tidaknya alur informasi dan sirkulasi manusia maupun barang. Sistem transportasi di wilayah Kabupaten Sanggau yang ditinjau dari sistem transportasi darat dan air (sungai).

   Pengembangan prasarana transportasi ini diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan dan alur sungai guna membuka keterisoliran daerah dan mendukung jalur-jalur transportasi untuk mengembangkan aksesibilitas antar wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk membuka daerah-daerah khususnya di daerah pedalaman, terisolir, terpencil dan tertinggal, serta daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga dan negara

tetangga. Adapun dalam pembangunan dan pengembangan sistem transportasi wilayah ini dibagi dalam 2 (dua) lingkup yakni lingkup internal dan eksternal. Pengembangan sistem transportasi dalam lingkup internal diarahkan untuk :

a. Mewujudkan dan meningkatkan keserasian antar wilayah di kabupaten, terutama antar daerah permukiman dan daerah pusat kegiatan seperti kawasan perdagangan, pemerintahan, pertambangan, pariwisata serta industri;

b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pusat kegiatan sebagai area terbangun dan wilayah penyangga (hinterland) dalam hal ini kawasan hutan lindung dan hutan produksi;

c. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara wilayah-wilayah produksi yang memiliki akses sulit bahkan terisolasi dengan pusat-pusat aktivitas yang ada;

d. Memperlancar kegiatan distribusi barang serta meningkatkan mobilitas penduduk;

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana pendukung sistem transportasi wilayah untuk mendukung pelayanan aktifitas transportasi baik pergerakan internal maupun eksternal.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang serasi antara wilayah di Kabupaten Sanggau, maka pengembangan sistem transportasi dalam lingkup eksternal, antara lain:

a. Mengembangkan sistem interaksi antar wilayah, baik antar kecamatan maupun dengan antar wilayah di luar kabupaten seperti dengan negara tetangga (Negara Malaysia) maupun dengan kabupaten-kabupaten lain;

b. Mendukung kegiatan perdagangan eksternal khususnya dengan wilayah- wilayah sekitarnya

c. Menunjang pengembangan sektor-sektor kegiatan strategis di Kabupaten Sanggau, yaitu sektor pertanian, industri, pertambangan dan pariwisata.

I. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Arahan pengembangan jaringan darat dalam masa rencana adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Arteri Primer

1. Ruas Jalan Batas Kabupaten Landak – Sosok – Tanjung;
2. Ruas Jalan Tanjung – Kembayan;
3. Ruas Jalan Kembayan – Balai Karangan;
4. Ruas Jalan Balai Karangan – Entikong;
5. Ruas Jalan Entikong – Batas Serawak;
6. Ruas Jalan Tanjung – Batas Kota Sanggau;
7. Ruas Jalan Sudirman (Kota Sanggau);
8. Ruas Jalan Ahmad Yani (Kota Sanggau);
9. Ruas Jalan R.E. Martadinata (Kota Sanggau);
10. Ruas Jalan Batas Kota Sanggau – Batas Kabupaten Sekadau;
11. Ruas Jalan Batas Kota Pontianak – Tayan;
12. Ruas Jalan Tayan – Sosok;
13. Ruas Jalan Tayan – Teraju; dan
14. Ruas Jalan Teraju – Batas Kabupaten Ketapang.

b. Jaringan Kolektor Primer

1. Ruas Jalan Balai Karangan – Secangkul (Batas Kabupaten Sintang);
2. Ruas Jalan Entikong – Batas Kabupaten Bengkayang;
3. Ruas Jalan Muara Ilai – Batas Kabupaten Landak;
4. Ruas Jalan Kembayan – Balai Sebut – Batas Kabupaten Sekadau; dan
5. Ruas Jalan Bodok (Pusat Damai) – Meliau.

c. Jaringan Jalan Lokal Primer

1. Ruas Jalan Semuntai – Kedukul – SP 3 Kecamatan Mukok – Balai Sebut (Kecamatan Jangkang);
2. Ruas Jalan Bodok – Bonti – Bantai;
3. Ruas Jalan Sei.Ranas – Lintang – Penyelimau – Sei.Buayan;
4. Ruas Jalan Meliau – Tayan;
5. Ruas Jalan Simpang Embaong – Sei.Batu;
6. Ruas Jalan Sosok – Engkasan – Sebuduh;

7. Ruas Jalan Simpang Sanjan – Mengkiang – Terati – SP 4;
8. Ruas Jalan Pasir Putih – Semoncol – Makkawing;
9. Ruas Jalan Sejuah – Noyan – Lubuk Sabuk;
10. Ruas Jalan Balai Karangan – Keladang Dua – Setogor – Empoto;
11. Ruas Jalan Embaong – Sanggau Permai – Segole – Penyeladi (Ring Road Kota Sanggau);
12. Ruas Jalan Merau – Nyari (Batas Kabupaten Landak);
13. Ruas Jalan Simpang Pak Mayam (Subah) – Pal 20 Kabupaten Landak
14. Ruas Jalan Batang Tarang (Empirang Ujung) – Batas Kabupaten Landak;
15. Ruas Jalan Sei. Buayan – Pampang Dua – Kunyil – Teraju;
16. Ruas Jalan Meliau – Sei. Mayam;
17. Ruas Jalan Sei. Mawang – Empaong – Sei. Jaman – Emberas – Melugai Cempedak;
18. Ruas Jalan Tj. Kapuas (Segole) – Entakai – Selampung – SP.4;
19. Ruas Jalan Bonti – Tg. Boyok – Muara Ronai – Terati;
20. Ruas Jalan SP.36 Kedukul – Batas Kabupaten Sekadau;
21. Ruas Jalan Dalam Kota Sanggau :
    - Jalan Gajah Mada;
    - Jalan H. Agus Salim;
    - Jalan Yos Sudarso;
    - Jalan K.H. Dewantara;
    - Jalan Kartini;
    - Jalan Kapuas;
    - Jalan Sekayam;
    - Jalan Gunung Bentuang;
    - Jalan Bukit Ruan;
    - Jalan H. Abbas;
    - Jalan Mustafa Sulaiman Siregar;
    - Jalan H. Gusti;
    - Jalan Anggrek;
    - Jalan Akses Komplek Perkantoran (Kel. Bunut).
22. Ruas Jalan Dalam Kota Balai Karangan :

- Jalan Temenggung Gergaji.

23. Ruas Jalan Dalam Kota Batang Tarang :
    - Jalan Busuliung.
24. Ruas Jalan Dalam Kota Entikong :
    - Jalan Lingkar BDC

Pengembangan jaringan jalan darat di atas diiringi dengan:

a. Pengembangan Jalan Strategis Nasional
    1. Nanga Badau – Nanga Merakai – Sekayam - Entikong – Jagoi babang - Aruk – Temajuk (Paloh) yang merupakan rencana jaringan jalan paralel perbatasan;
    2. Batas Negara-Entikong dan Balai Karangan-Tanjung; dan
    3. Tayan – Sosok– Simpang Tanjung - Kembayan – Beduai – Balai Karangan – Entikong – Perbatasan Sarawak;
b. Pengembangan enam kawasan lintas batas negara (gerbang darat internasional) yakni di Entikong (Sanggau), Nanga Badau (Kapuas Hulu), Jagoi Babang (Bengkayang), Aruk (Sambas), Jasa (Sintang), dan Temajuk (Sambas; untuk pariwisata Temajuk—Melano).

c. Peningkatan dan pembangunan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas antar-wilayah;

d. Peningkatan kualitas jembatan diantaranya :
    1. Pembangunan jembatan Sungai Kapuas yang menghubungkan Tayan – Piasak – Toba yang merupakan bagian dari pengembangan jalur Poros Selatan menuju Kalimantan Tengah;

    2. Peningkatan kualitas jembatan, diarahkan pada perbaikan terhadap beberapa jembatan dengan kondisi rusak, meliputi;

    3. Peningkatan kualitas/perbaikan pada jembatan beton/batu/bata di Kecamatan Jangkang (1 unit).

    4. Peningkatan kualitas/perbaikan pada jembatan kayu/bambu di Kecamatan Kapuas (4 unit), Tayan Hilir

(16 unit), Sekayam (4 unit), Kembayan (2 unit), Jangkang (6 unit), Beduai (2 unit) dan Entikong (12 unit).

5. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas pada jembatan; Sei Setingkas, Jalan Alternatif Malan, depan Kantor Camat Mukok, Sungai Engkode dan jembatan gantung Kedukul.

e. Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:

1. Pengembangan kawasan lintas batas negara (gerbang darat internasional) yakni di Entikong (Sanggau) berupa pengembangan terminal Angkutan Lintas Batas Negara dan trayek Angkutan Lintas Batas Negara dari Pontianak – Entikong – Kuching (Malaysia) dan Pontianak – Entikong – Bandar Seri Begawan (Brunei Darrusalam);

2. Pengembangan terminal tipe B di Entikong, Sanggau, Sosok dan Tayan;

3. Pengembangan terminal tipe C di Bodok (Kecamatan Parindu), Kembayan (Kecamatan Kembayan), Balai Karangan (Kecamatan Sekayam), Batang Tarang (Kecamatan Balai), Meliau (Kecamatan Meliau), Balai Sebut (Kecamatan Jangkang), Bonti (Kecamatan Bonti) dan Teraju (Kecamatan Toba);

4. Pengembangan terminal khusus barang (dry port) di Entikong;

5. Peningkatan Jembatan timbang di Sosok;

6. Peningkatan Unit pengujian kendaraan bermotor di Sanggau; dan

7. Pengembangan terminal khusus barang di Tayan.

II. Sistem Transportasi Sungai

Selain jaringan jalan, pada sistem transportasi darat juga terdapat transportasi penyeberangan dan pelayaran sungai. terdapat integrasi antara jenis transportasi dalam sistem

transportasi darat yakni antara transportasi jalan, sungai/danau dan kereta api (masih rencana). diharapkan dapat menghubungkan wilayah-wilayah berpotensi untuk dikembangkan serta berdampak pada daya dukung terhadap sektor-sektor strategis (pertanian, kehutanan, perdagangan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri).

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan akan lebih diprioritaskan pada sistem jaringan prasarana transportasi sungai yang akan dikembangkan di Sungai Kapuas yang terdiri dari :

a. Dermaga Sungai Kapuas;

b. Pelabuhan penyeberangan terdiri dari:
   1. Tayan – Piasak;
   2. Sungai Mayam – Buayan; dan
   3. Sungai Ranas – Tanjung Kapuas;

c. Pengembangan pelabuhan atau dermaga khusus untuk pengangkutan bauksit di Kecamatan Tayan Hilir; dan

d. Pengembangan Pelabuhan atau Dermaga Sungai Khusus penunjang Kawasan Industri Hilir Kelapa Sawit di Tayan.

Selain itu, pengembangan sistem transportasi sungai juga perlu diarahkan pada pengembangan prasarana dan sarana transportasi sungai bagi daerah yang belum terlayani/terjangkau oleh sistem transportasi jalan darat, seperti:

a. Pengembangan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang diarahkan untuk dikembangkan dalam masa rencana adalah penyeberangan Ferry Tayan-Teraju Sanggau.

b. Pengembangan prasarana dan sarana penyeberangan antara Tayan – Piasak.

c. Pembangunan dermaga di setiap tempat persinggahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sungai dan pembangunan prasarana penunjang lainnya.

d. Peningkatan armada dan frekuensi pelayaran sungai.

e. Pembangunan dermaga untuk armada barang di Kawasan Industri Tayan dan sedang berlangsung pembangunan dermaga Sungai Ranas.

III. Sistem Jaringan Perkerataapian

Rencana jaringan kereta api sesuai dengan arahan dari RTRW Provinsi Kalimantan Barat meliputi jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jalur kereta api umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang direncanakan terdiri dari:

a. Jalur rel kereta api Lintas Timur yang menghubungkan Pontianak – Ngabang -Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau – Kalimantan Timur;
b. Jalur rel kereta api Lintas Selatan yang menghubungkan Sosok – Tayan – Nanga Tayap – batas Kalteng; dan
c. Jalur rel kereta api Lintas Tengah yang menghubungkan Pontianak – Tayan. Khusus untuk pengembangan prasarana perkeretaapian di Kabupaten Sanggau berupa stasiun kereta api di Sanggau dan Tayan.

IV. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara yang dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Sanggau meliputi:

a. Tatanan kebandarudaraan; dan
b. Ruang udara untuk penerbangan.

Dalam merencanakan tatanan kebandarudaraan dilakukan dengan :

a. Pengembangan bandar udara yang melayani penerbangan perintis di Entikong dan Sanggau; dan
b. Pengembangan hellyport di Entikong.

Penentuan lokasi bandar udara yang melayani penerbangan perintis akan ditetapkan setelah dilakukan kajian kelayakan lokasi, sedangkan untuk merencanakan ruang udara untuk penerbangan meliputi Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP), yang diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya,** meliputi:

I. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan, Minyak dan Gas Bumi

a. Pengembangan potensi pembangkit listrik yang direncanakan dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Sanggau meliputi:
   1. Pengembangan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) bersumber dari BBM di Kota Sanggau
   2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sei Batu Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Tayan Hilir
   3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) di Tayan;
   4. Pengembangan energi baru terbarukan dengan potensi energi air yang bersumber riam-riam yang tersebar di seluruh kecamatan (PLTMH);

b. Rencana Sistem Jaringan Transmisi Listrik seperti jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:
   1. Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Pontianak, Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang hingga Nanga Pinoh;
   2. Jaringan Transmisi Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten

c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi jalur Natuna (Provinsi Kepulauan Riau)-Tanjung Api (Kabupaten Sambas)-Pontianak-Tayan (Kabupaten Sanggau)- Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah).

II. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Pengembangan sumber air bersih untuk kegiatan permukiman meliputi pembangunan dan pengembangan
b. prasarana air bersih perkotaan di Kecamatan Kapuas, Bonti, Noyan, Mukok, Jangkang, Tayan Hilir, Toba, Kembayan, Meliau, Balai, Entikong, Sekayam, Beduai, Parindu, dan

Tayang Hulu. Sedangkan pembangunan dan pengembangan prasarana air bersih di desa-desa yang sasarannya pada desa potensi air baku dengan populasi penduduk yang cukup padat.

c. Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi di wilayah pengamat pengairan yaitu pengamat perairan Kapuas, Balai dan Sekayam serta di kawasan perbatasan, yang dipadukan dengan pengembangan daerah rawa untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan meliputi Daerah Irigasi Merowi di Lini II perbatasan dan Daerah Irigasi Pedesaan di wilayah Entikong, Sekayam, Beduai, Noyan, dan Kembayan.

III. Rencana Sistem Jaringan Pos dan Telekomunikasi

Pengembangan prasarana pos dan telekomunikasi diarahkan sebagai berikut:

a. Pembangunan stasiun microwave digital ke semua ibukota kecamatan
b. Pembangunan stasiun rural, terutama pada pusat desa yang letaknya terisolir, terpencil dan terbelakang, atau pusat desa yang memerlukan waktu tempuh yang relatif lama untuk mencapainya. Peningkatan pelayanan pos pada kawasan perbatasan dengan Sarawak (Kecamatan Sekayam dan Entikong), serta wilayah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi (Tayan Hilir, Toba, Meliau)

IV. Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

a. Pengembangan sistem jaringan drainase diarahkan pada kawasan perkotaan khususnya Kota Sanggau, dan ibukota kecamatan lainnya
b. Pembangunan staisun klimatologi akan dilaksanakan di Kecamatan Kapuas, Entikong, dan Tayan

Kondisi infrastruktur di daerah dapat dilihat dari beberapa indikator infrastruktur, diantaranya kondisi jalan mantap, air minum, sanitasi, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi yang merupakan komponen pembentuk indeks infrastruktur.

I. Kondisi Jalan Mantap

Kondisi jalan mantap, yaitu ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (PP No. 34 Tahun 2006). Semakin baik kondisi jalan di suatu daerah, maka biaya untuk melakukan kegiatan perekonomian akan semakin rendah. Jalan kondisi baik dengan permukaan berupa aspal ataupun beton merupakan kondisi ideal yang diharapkan guna mendukung kelancaran akses kendaraan, orang dan barang. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Sanggau dapat dilihat dari jenis permukaan jalan dan kondisi jalan.

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Sanggau diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu aspal, perkerasan beton, kerikil dan tanah/belum tembus. Pada tahun 2020, jenis permukaan jalan di Kabupaten Sanggau didominasi oleh jalan dengan jenis permukaan kerikil sepanjang 294,24 km dan jenis jalan dengan permukaan aspal sepanjang 478,488 km. Jenis permukaan jalan berupa tanah dan kerikil harus segera ditingkatkan kualitas permukaannya agar mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas. Dari kurun waktu 2016-2020 panjang jalan di Kabupaten Sanggau menurut jenis permukaannya mengalamu fluktuasi setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 79
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Aspal	359,01	368,694	402,942	309,545	242,950
Perkerasan Beton	0,00	21,283	19,493	20,829	25,837
Kerikil	196,62	120,823	172,500	317,156	478,488
Tanah / Belum Tembus	318,89	490,640	406,505	354,560	254,165

Sumber : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, 2020

Jembatan merupakan hal yang sangat penting guna mendukung kelancaran akses antar - wilayah di Kabupaten Sanggau mengingat topografi Kabupaten Sanggau yang dilewati oleh sungai–sungai besar dan kecil. Sedangkan jumlah jembatan dan kondisi berdasarkan administrasi pemerintahan pada tahun 2020 sebanyak 672 unit jembatan. Jumlah Jembatan dan

Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan dirincikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 80
Jumlah Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Sanggau (unit)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Baik	145	150	241	373	326
Kondisi Sedang	109	109	116	62	44
Kondisi Rusak Ringan	22	22	49	94	111
Kondisi Rusak Berat	16	11	5	141	191
Jumlah Total	**292**	**292**	**411**	**670**	**672**

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau

II. Air Minum

Pengelolaan air bersih di Kabupaten Sanggau yang dikelola oleh BUMD PD. Tirta Pancur Aji dengan memanfaatkan sumber air utama dari sungai dan mata air pegunungan (tabel 2.84). Jumlah pelanggan yang memanfaatkan air tersebut pada tahun 2020 sebanyak 13.383 pelanggan, sedangkan jumlah air yang disalurkan terus meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tahun 2016 jumlah air yang disalurkan sebanyak 2.143.178 m3 dan pada tahun 2016 bertambah hingga mencapai 5.257.038 m3. Jumlah pelanggan, air yang disalurkan (m^3), dan nilainya (Rp), dalam 5 (lima) tahun (Rp) pada BUMD PD. Tirta Pancur Aji disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan, Nilainya, dan Pengeluaran Total dalam Satu Tahun pada BUMD PD. Tirta Pancur Aji

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan	11.103	11.177	13.892	13.204	13.383
Air Disalurkan (m^3)	2.143.178	2.215.596	1.482.083	4.873.801	5.257.038
Nilai (Rp)	7.910.569.250	8.354.819.600	5.671.049.850	12.250.822	12.953.025.050

Sumber: PDAM Tirta Pancur Aji Kab. Sanggau

III. Sanitasi

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (Badan Pusat Statistika, 2020).

Tabel 2. 82
Jumlah Rumah Tangga Akses Sanitasi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah RT Akses Jamban Sehat Permanen	3019	5465	6826	6.925	6.467
2.	Jumlah RT Akses Jamban Sehat Semi Permanen	47757	50950	58181	62.035	71.462
3.	Jumlah RT Akses Masih Numpang ke MCK	2042	2633	2957	3.626	2.523
4.	Jumlah RT masih BABS	88195	76330	62382	58.611	46.660
5.	Jumlah RT akses Jamban Sehat	52818	59048	67964	79375	83474

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sanggau

IV. Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri, baik untuk penerangan maupun sebagai penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Berdasarkan tabel 2.86, menunjukkan terdapat 4 jenis pembangkit listrik di Kabupaten Sanggau yaitu PLTU/Uap, PLTD/Diesel, PLTMH/Air Mini dan PLTS/Surya. Produksi daya listrik terbanyak berasal dari pembangkit listrik PLTU/Uap sebesar 80.267.950 kw pada tahun 2020. Produksi daya listrik PLTS/Surya paling rendah diantara jenis pembangkit listrik lainnya. Produksi daya listrik PLTS/Surya pada tahun 2020 sebesar 135 kwp. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 2. 83
Jumlah Produksi Daya Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit Listrik di Kabupaten Sanggau

Jenis Pembangkit Listrik	2016	2017	2018	2019	2020
PLTU/Uap (kw)	2 x 7.000	2 x 7.000	2x 7.000	53.397.880	80.267.950
PLTD/Diesel (kw)	37.225	40.947	40.947	76.504.194	50.243.373
PLTMH/Air (kw)	1.228	1.228	1077	1.247	1.247

PLTS/Surya (kwp)	75	175	195	135	135

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau

Berdasarkan distribusi daya listrik, distribusi terbesar adalah PLTD/Diesel sebesar 14.000 kw pada tahun 2020, sedangkan terendah adalah PLTS/Surya dengan daya sebesar 135 kwp pada tahun 2020. Jumlah distribusi daya listrik berdasarkan jenis pembangkit listrik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84
Jumlah Distribusi Daya Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit Listrik di Kabupaten Sanggau

Jenis Pembangkit Listrik	2016	2017	2018	2019	2020
PLTU/Diesel (kw)	31.641	34.805	34.805	14.000	14.000
PLTMH/Air (kw)	1.159,2	1.159,2	1.159,2	1.122	1.122
PLTS/Surya (kwp)	72	157,2	175,5	135	135

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Distribusi saluran listrik di Kabupaten Sanggau masih belum merata. Asumsi tersebut didasarkan pada data jumlah desa yang belum mendapatkan saluran listrik desa di Kabupaten Sanggau yang belum mendapatkan saluran listrik pada tahun 2018 adalah sebanyak 30 desa. Tahun 2019 sebanyak 28 desa dan tahun 2020 berkurang menjadi 21 desa yang belum mendapatkan saluran listrik.

Tabel 2. 85
Jumlah Desa Belum Mendapatkan Saluran Listrik dan Desa Mendapatkan Saluran Listrik Terbatas Waktu di Kabupaten Sanggau

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Desa Belum Mendapatkan Saluran Listrik	34	31	30	28	21
Desa Mendapatkan Saluran Listrik Terbatas Waktu	11	11	8	8	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau

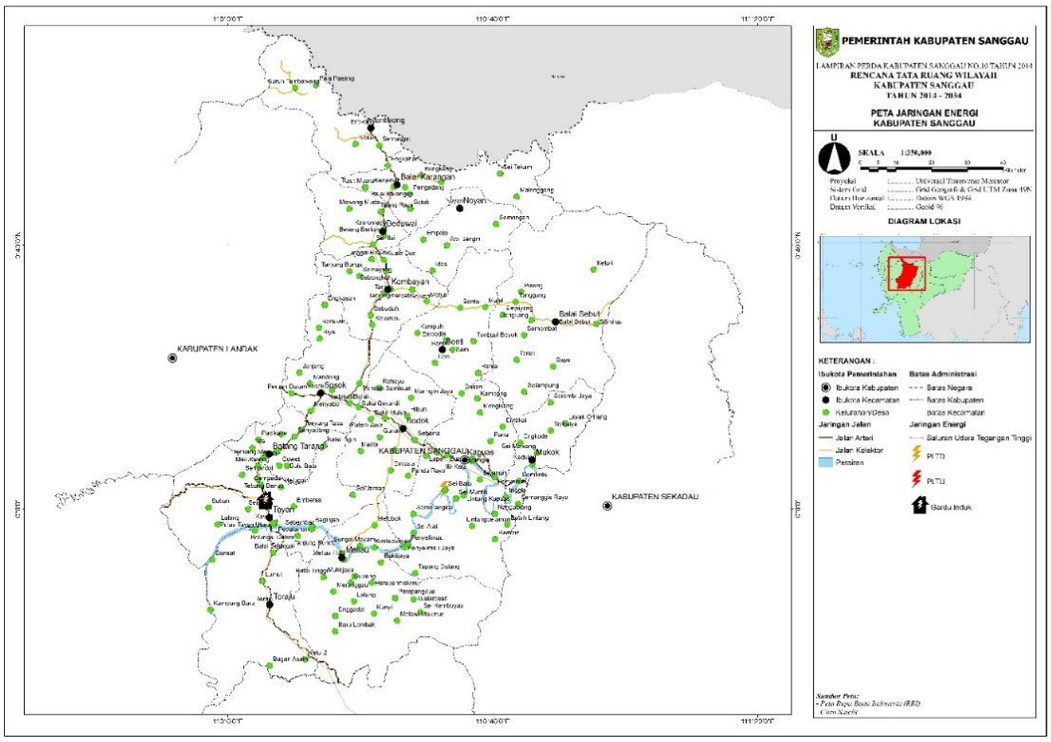

Gambar 2. 23 Peta Jaringan Listrik Kabupaten Sanggau
Sumber: RTRW Kabupaten Sanggau Tahun 2014–2034

V. Jaringan Komunikasi

Teknologi di bidang komunikasi yang semakin berkembang menuntut tersedianya layanan telepon seluler termasuk di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau memiliki 167 unit tower BTS (Base Transceiver Station), dengan 79 provider. Layanan telepon kabel dibedakan menjadi tiga yaitu sambungan rumah tangga, sambungan perkantoran, dan sambungan swasta/dunia usaha. Tahun 2020 layanan telepon kabel dengan jenis yang paling banyak digunakan adalah layanan sambungan rumah tangga sebesar 9.193 ss. Sedangkan terendah adalah layanan telepon kabel jenis sambungan perkantoran sebesar 217 ss. Layanan telpon kabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 86
Layanan Telpon Kabel di Kabupaten Sanggau

Uraian	2017	2018	2019	2020
Sambungan Rumah Tangga	5.842 ss	5.842 ss	5.842 ss	9193 ss
Sambungan Perkantoran	212 ss	212 ss	212 ss	217 ss

Sambungan Swasta/Dunia Usaha	1.262 ss	1.262 ss	1.262 ss	1406 ss

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau

Jumlah kantor pos di Kabupaten Sanggau sebanyak 13 unit dan jumlah kantor pos pembantu sebanyak 8 unit. Wilayah Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 memiliki stasiun radio pemerintah sebanyak 2 stasiun yang merupakan stasiun radio milik pemerintah, stasiun televisi pemerintah dan stasiun televisi swasta masing-masing sebanyak 1 stasiun dan sebanyak 14 stasiun. Selain itu, di Kabupaten Sanggau terdapat media cetak, yang terdiri dari surat kabar nasional dan lokal. Adapun penyebaran surat kabra pada tahun 2020 hanya dari surat kabar lokal, dimana terdapat 15 kecamatan yang terdapat sebaran surat kabar lokal.

Tabel 2. 87
Jumlah Layanan Media Elektronik dan Media Cetak di Kabupaten Sanggau

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Stasiun Radio Pemerintah (stasiun)	2	3	3	2	2
Stasiun Radio Swasta (stasiun)	3	3	1	0	0
Stasiun Televisi Pemerintah (stasiun)	-	1	1	1	1
Stasiun Televisi Swasta (stasiun)	-	14	14	14	14
Surat Kabar Nasional (kecamatan)	-	2	2	0	0
Surat kabar Lokal (kecamatan)	-	16	17	15	15

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau

2.4.2 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Indicator yang digunakan dalam melihat capaian pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau yaitu melalui indeks desa membangun.

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan

Kawasan Perdesaan. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda.

Tabel 2. 88
Jumlah Status Desa Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa Berdasarkan Status Desa					Total Desa	Rata-rata IDM
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal		
Toba	1	1	1	4	0	7	0,630
Meliau	0	8	11	0	0	19	0,701
Kapuas	0	4	16	0	0	20	0,653
Mukok	0	1	5	3	0	9	0,616
Jangkang	0	0	1	4	0	5	0,630
Bonti	0	0	2	7	0	9	0,574
Parindu	1	4	8	1	0	14	0,702
Tayan Hilir	1	2	6	6	0	15	0,645
Balai	0	1	8	3	0	12	0,628
Tayan Hulu	1	0	5	5	0	11	0,614
Kembayan	2	0	5	4	0	11	0,628
Beduai	0	0	4	1	0	5	0,638
Noyan	0	0	2	3	0	5	0,597
Sekayam	2	3	4	1	0	10	0,732
Entikong	0	1	2	2	0	5	0,618
Kab. Sanggau	**8**	**25**	**80**	**44**	**0**	**157**	**0,640**

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kalimantan Barat

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 44 Desa Tertinggal, 80 Desa Berkembang, 25 Desa Maju, dan 8 Desa Mandiri di Kabupaten Sanggau. Adapun rata-rata status desa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sanggau yaitu masuk ke dalam kategori Desa Berkembang kecuali Kecamatan Bonti yang masih berada di kategori Desa Tertinggal dengan jumlah Desa Tertinggal sebanyak 7 Desa dan Desa Berkembang sebanyak 2 Desa, sedangkan Kecamatan Sekayam masuk dalam kategori Desa Maju dengan terdiri dari 2 Desa Mandiri, 3 Desa Maju, 4 Desa Berkembang, dan 1 Desa Tertinggal.

Tabel 2. 89
Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Rata-rata IDM	Klasifikasi Berdasarkan Status Desa
Toba	0,630	Berkembang
Meliau	0,701	Berkembang
Kapuas	0,653	Berkembang
Mukok	0,616	Berkembang
Jangkang	0,630	Berkembang
Bonti	0,574	Tertinggal
Parindu	0,702	Berkembang
Tayan Hilir	0,645	Berkembang
Balai	0,628	Berkembang
Tayan Hulu	0,614	Berkembang
Kembayan	0,628	Berkembang
Beduai	0,638	Berkembang
Noyan	0,597	Tertinggal
Sekayam	0,732	Maju
Entikong	0,618	Berkembang
Kab. Sanggau	**0,640**	**Berkembang**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau

2.5 Kejadian Luar Biasa Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 **(**Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat *Covid-19*) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.Kabupaten Sanggau sendiri sudah mengalami pandemi *Covid-19*, akibat dari pandemi ini banyak kegiatan pemerintah daerah terhambat dan juga perlunya penanganan khusus dalam bidang kesehatan untuk mengembalikan situasi agar kegiatan pemerintah daerah berjalan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2020 yang mana dimulainya pandemi Covid-19 Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan yang paling signifikan pada bulan oktober hingga November dan turun pada bulan November-Desember. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kasus yang signifikan pada bulan februari-maret.

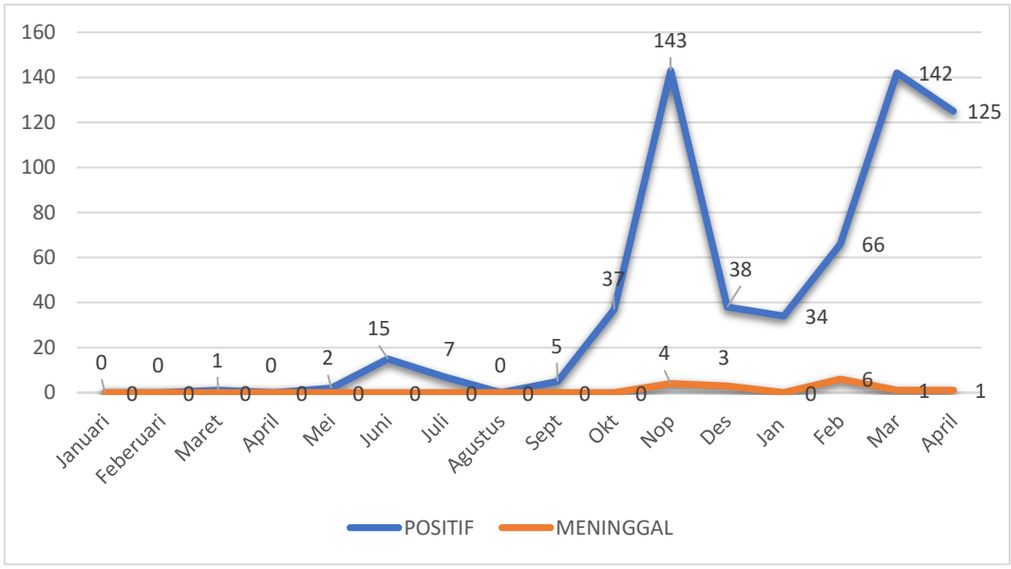

Gambar 2. 24 Tren Kasus Covid-19 Kabupaten Sanggau
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, bahwa saat ini Kabupaten Sanggau berada dalam zona kuning atau resiko rendah *Covid-19*. Hingga saait ini total angka terkonfirmasi *Covid-19* tahun 2021 di Kabupaten Sanggau sebanyak 401 orang, yang dalam proses penyembuhan atau masa isolasi sebanyak 17 orang yang menunggu hasil swab sebanyak 168 orang. Maka dari itu masyarakat Kabupaten Sanggau harus mengurangi melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun ke dalam negeri. Perlunya melakukan pencegahan *Covid-19* dengan melakukan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Dengan melakukan pencegahan terhadap *Covid-19* dapat mengurangi terjadinya penyebaran *Covid-19*.

2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal atau yang lebih dikenal dengan SPM merupakan kebijakan pemerintah yang digulirkan bersamaan dengan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kelancaran dan ketertiban urusan pemerintahan selanjutnya pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM, dalam hal ini diperlukannya kpprdinasi sebagaimana dimaksud meliputi, penerapan, pemantuauan dan evaluasi SPM dan penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

Pembangunan Daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial serta

beberapa prioritaslainnya. Penerapan SPM dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait, diwujudkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kabupaten Sanggau mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penerapan 6 (enam) bidang SPM dikelompokkan ke dalam 2 (dua) periode pelaksanaan, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020, serta Tahun 2021 sampai Tahun 2024. Hal ini disebabkan nomenklatur program berbeda pada tahun-tahun tersebut. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 sampai Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 90
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD
Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	
			2020	
(1)	(2)	(3)	Target	Capaian
SPM PENDIDIKAN				
1.	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs(	100%	100%
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	1,11%
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	25,8%
SPM KESEHATAN				
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	41,75%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	34,96%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	38,77%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,08%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	50,00%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	50,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2020	
(1)	(2)	(3)	Target	Capaian
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	32,07%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	50,00%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	50,00 %
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	50,07 %
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	50,01 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus).	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	50,00 %
SPM PEKERJAAN UMUM				
1.	Penyediaan Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	45,93%	75,04%
2.	Penyediaan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	42,06%	61,15%
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	53,73%	56,14%
2.	Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2020	
(1)	(2)	(3)	Target	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperroleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	80%
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	- Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	17,60 %
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100 %
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

2.7 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Kabupaten Sanggau kini memasuki tahap IV pada Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah RPJPD 2005-2025 Kabupaten Sanggau, pada tahap iniupaya menjadikan Kabupaten Sanggau Maju dan Terdepan terus dijalankan.Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Sanggau 2019-2024 tetap harus memperhatikan prioritaspembangunan pada RPJPD 2005-2025 dengan Visi "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sanggau Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Demokratis Berbasis Agro Industri dan Sebagai Beranda Terdepan Negara**" ditetapkan pula tema pembangunan pada RPJPD tahap IV Kabupaten Sanggau yaitu "Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, sejahtera, demokratis sebagai beranda depan Negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagai cermin dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Melalui tema tersebut maka ditetapkan sasaran pembangunan pada RPJPD IV sebagai landasan guna memulai tahapan perencanaan jangka Panjang selanjutnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmupengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.
2. Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
5. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga diseluruh wilayah Kabupaten Sanggau.

6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah.
7. Berkembangnya sektor pertanian yang erbasis pada komoditas pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
8. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memenuhi unsur-unsur utama sebagai berikut:
   a. meningkatnya partisipasi masyarakat;
   b. tegaknya supremasi hukum;
   c. meningkatnya transparansi;
   d. peduli pada *stakeholders*;
   e. berorientasi pada konsensus;
   f. meningkatnya kesetaraan;
   g. meningkatnya efektivitas dan efisiensi;
   h. meningkatnya akuntabilitas; dan
   i. mempunyai visi strategis.
10. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif

Adapun kebijakan yang ditempuh guna mancapau sasaran pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Menciptakan daerah pusat pertumbuhan baru
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kabupaten.
5. Meningkatkan pemanfaatan analisis dampak lingkungan untuk memulai proyek baru

Upaya merealisasikan visi besar tersebut tentunya perlu berjalan beriringan dengan target pemerintah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional, utamanya dalam merealisasikan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan, oleh karena itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau 2019-2024 ini disusun guna mengharmoniskan kebijaka daerah agar tetap menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagau prinsip dalam pembuatan kebijakan, rencana maupun program.

Apabila dikategorikan kedalam 4 pilar utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum serta tata kelola, maka program tersebut terlihat sesuai dengan data pada tabel berikut.

Tabel 2. 91
Kanalisasi Program Pemerintah Daerah 2019-2024

Pilar TPB Indonesia		Program Pemerintah Daerah	
No	**Pilar**	**No**	**Program**
1	Pilar Sosial	1	Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) yang lebih berkualitas disertai dengan peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan nyaman
		2	Memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan tinggi.
		3	Meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang berbekal IPTEK
		4	Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun
		5	Melanjutkan program Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin dan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
		6	Melanjutkan program beasiswa perguruan tinggi
		7	Menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah
2	Pilar Lingkungan	8	Menyediakan tempat layanan publik yang nyaman dan humanis
		9	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
		10	Mengelola sumber daya alam dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan
		11	Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pertambangan
		12	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
		13	Menyediakan tempat layanan publik yang nyaman dan humanis
		14	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
3	Pilar Ekonomi	15	Melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase

Pilar TPB Indonesia		Program Pemerintah Daerah	
No	**Pilar**	**No**	**Program**
		16	Melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama pemerintah dan swasta/masyarakat.
		17	Melanjutkan pembangunan pasar tradisional yang berkualitas di setiap kecamatan
		18	Melanjutkan pembangunan dan meningkatkan infrastruktur obyek wisata potensial dalam upaya mendukung wisata alam
		19	Meningkatkan fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta (corporate Sosial Responsibility) dalam bidang kesehatan masyarakat serta memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan tinggi
		20	Meningkatkan partisipasi pihak swasta (corporate Sosial Responsibility) dalam pendanaan pendidikan
		21	Melanjutkan pengembangan wilayah strategis untuk membangun pusat–pusat pertumbuhan ekonomi baru
		22	Melanjutkan peningkatan bantuan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.
		23	Melanjutkan bantuan permodalan, pembinaan dan jumlah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dan koperasi serta menyediakan tempat berusaha yang layak
		24	Meningkatkan fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta (corporate Sosial Responsibility) dalam permodalan dan pembinaan UMKMK (usaha mikro, kecil dan menengah& koperasi)
		25	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil dan menguasai teknologi
		26	Mengembangkan kurikulum pendidikan keterampilan yang berbasis pada potensi daerah yang ada sehingga lulusan sekolah lanjutan atas dapat dengan mudah diserap oleh lapangan kerja yang ada
		27	Melanjutkan pembangunan infrastruktur, dengan mengutamakan pembangunan jalan desa, antar desa dan antar kecamatan.
		28	Melanjutkan pembangunan wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta
4	Pilar Hukum dan Tata Kelola	29	Melanjutkan peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur sebagai pelayan masyarakat serta pembenahan sistem manajemen pemerintahan daerah dengan memperhatikan teknologi
		30	Penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman
		31	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
		32	Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan administrasi kependudukan dan perizinan
		33	Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komperhensif

Pilar TPB Indonesia		Program Pemerintah Daerah	
No	**Pilar**	**No**	**Program**
		34	Melanjutkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan lahan
		35	Melanjutkan peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur sebagai pelayan masyarakat serta pembenahan system manajemen pemerintahan daerah dengan memperhatikan teknologi

2.8 Integerasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD ke dalam RPJMD

Tabel 2. 92
Tabel Integerasi KLHS RPJMD ke dalam Perubahan RPJMD

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik					
Tata Kelola Kelembagaan	16.6.1 (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Reformasi Birokrasi	a. Sistem informasi keuangan dan aset tetap daerah harus terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah sebagai upaya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran APBD. b. Penguatan Lembaga inspektorat daerah c. Penyusunan SOP pelayanan publik di setiap OPD d. Promosi ASN melalui mekanisme lelang jabatan yang transparan dan kredibel	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
					Opini BPK
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			e. Penyusunan renstra OPD sesuai dengan RPJMD dan rekomendasi KLHS RPJMD f. Pengusulan review tata ruang kepada KemenLHK untuk mengeluarkan permukiman, aset masyarakat dan fasilitas umum dari kawasan hutan		
	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Peningkatan infrastruktur dan sarana dasar	a. Meningkatan kualitas dan aksesibilitas media informasi *online* (website dan media sosial) OPD untuk penyebaran informasi kepada masyarakat b. Penguatan OPD bidang kearsipan daerah untuk mengkompilasi seluruh data dari semua OPD c. Penguatan OPD bidang tata ruang untuk mengkompilasi pemetaan dari semua OPD.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE
Misi 2 : Melanjutkan Peningkatkan Pembangunan Infrastruktur					
	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	- Pengentasan kesenjangan sosial	a. Peningkatan ruas jalan kabupaten b. Peningkatan ruas jalan IKK	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Cakupan kecamatan terhubung jaringan jalan

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
	nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	- Peningkatan infrastruktur	c. Pemeliharaan ruas jalan provinsi di kabupaten	Meningkatnya kualitas transportasi	Waktu tempuh ibu kota kecamatan menuju ibu kota kabupaten
				Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio rumah layak huni
	6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak.	Peningkatan infrastruktur dan sarana dasar	a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan b. Memetakan potensi sumber air bersih c. Mengembangkan teknologi pengolahan air bersih d. Pengembangan PDAM agar memiliki UPT di setiap kecamatan e. Melakukan pemetaan sumber air potensial f. Mengembangkan dan penerapan teknologi pengolahan air bersih	Meningkatnya akses air bersih	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan penyandang disabilitas	Peningkatan infrastruktur dan sarana dasar	a. Review tata ruang perkotaan b. Penambahan RTH di kawasan perkotaan c. Pembuatan dokumen RDTR	Meningkatnya kepatuhan terhadap penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			kawasan perkotaan d. Penetapan perda RDTR kawasan perkotaan e. Penertiban bangunan sesuai perda RDTR kawasan perkotaan.		
	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (RBI) 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekoonomi langsung akibat bencana 13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mitigasi bencana	a. Pembuatan masterplan drainase perkotaan b. Revitalisasi pembangunan drainase berdasarkan masterplan drainase perkotaan c. Menyusun dokumen kajian strategi pengurangan resiko bencana Kabupaten Sanggau d. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana e. Pemerintah daerah berkerja sama dengan dunia usaha melalui MoU untuk melakukan normalisasi dan pendalaman sungai-sungai yang memiliki ppotensi banjir f. Pemerintah daerah berkerja sama dengan dunia usaha melalui MoU untuk menyediakan	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	Angka Korban Bencana

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			fasilitas tanggap bencana kebakaran di setiap desa g. Penyusunan masterplan sistem irigasi lahan gambut sebagai mitigasi bencana kabut asap		
Misi 3 : Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Memiliki Daya Saing					
Pendidikan	4.1.1. (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (b)Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun 4.2.2. (a) Angka partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pengentasan kesenjangan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	a. Pemetaan data kebutuhan sarana dan prasarana serta sebaran tenaga kesehatan b. Peningkatan dan penambahan sarnaa dan prasarana kesehatan c. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan d. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah seperti lembaga kursus, balai latihan kerja, dll.	Meningkatnya akses pendidikan	Indeks Pendidikan
					Rata-rata nilai UN
				Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan prestasi olahraga (indikator)
Kesehatan	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan	- Pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar	a. Pemetaan data kebutuhan sarana dan prasarana serta sebaran tenaga kesehatan b. Peningkatan dan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
				Menurunnya kasus	

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
	terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 3.1.2(a) Persentase perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan 3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk 3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan 3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	- Pengentasan kesenjangan sosial pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	penambahan sarana dan prasarana kesehatan c. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan	COVID-19	
Kesenjangan sosial dan kesetaraan gender	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana / KB yang tidak terpenuhi).	Pengentasan kesenjangan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	a. Pemerintah daerah melalui OPD terkait mengadakan seminar terkait keterlibatan perempuan dalam sektor pemerintaan, swasta, dan NGO. b. Pemberian dukungan dan bantuan bagi organisasi dalam rangka pengembangan organisasi pemberdayaan perempuan seperti PKK, KWT, Puan Sanggau, dll.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			c. Membangun sarana pelatihan wirausaha khususnya bagi ibuibu rumah tangga.		
Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan					
				Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase desa mandiri
				Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri
Misi 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat					
Ekonomi	8.1.1.(a) PDB per kapita. 2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) 2.3.2 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat 2.a.1 Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian	- Peningkatan infrastruktur, sarana, dan penguatan kelembagaan penunjang ekonomi - Peningkatan PAD melalui BUMD dan target pajak – retribusi	a. Meningkatkan penjualan produk lokal, baik dari sektor pertanian maupun perikanan, ke daerahdaerah yang memiliki potensi investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. b. Mengoptimalkan peran sektor jasa seperti jasa perbankan, jasa transportasi, jasa properti, dan jasa pariwisata. c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi sektor riil seperti pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
				Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya realisasi penanaman modal.	Persentase peningkatan realisasi PMDN
					Persentase peningkatan realisasi PMA
				Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
		- Sinergitas dunia usaha	dan pemanfaatan hasil hutan non kayu. d. Pemetaan data untuk kebutuhan sarana IKM, UKM, UMKM e. Pengadaan sarana bagi IKM, UKM, dan UMKM f. Pemetaan produk unggulan di setiap kecamatan. g. Peningkatan nilai jual produk unggulan daerah melalui pengembangan teknologi pengemasan, pengalengan, dan pengawetan serta hilirisasi produk unggulan daerah. h. Membentuk BUMD dan Bumdes untuk mengakomodir produk unggulan daerah i. Mewajibkan pembangunan di sektor pariwisata untuk memiliki masterplan penataan objek wisata terlebih dahulu j. Membangun tourist information center k. Pemerintah daerah berkerja	terhadap perekonomian	
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
				Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
				Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
				Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat
					Persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah
				Menurunnya penganggu ran	Tingkat Pengangguran Terbuka

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			sama dengan dunia usaha melalui MoU untuk memberikan jaminan serapan tenaga kerja lokal di setiap investasi yagn masuk di daerah l. Pemerintah daerah berkerja sama dengan dunia usaha melalui MoU untuk memberikan jaminan keterlibatan investor dalam pembangunan daerah. m. Pemerintah daerah berkerja sama dengan dunia usaha melalui MoU untuk memberikan jaminan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan oleh investor. n. Pemetaan data kebutuhan sarana dan prasarana pertanian. o. Pemetaan daerah irigasi prioritas p. Mewajibkan agar setiap pembangunan daerah irigasi dilengkapi dengan masterplan daerah irigasi.		

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			q. Penunjukkan daerah irigasi potensial untuk dijadikan daerah irigasi percontohan. r. Penunjukkan daerah pertanian potensial untuk dijadikan daerah pertanian percontohan. s. Membentuk BUMD dan Bumdes untuk mengakomodir produk hasil pertanian, seperti produk tanaman pangan, tanaman holtikultura, produk perkebunan, produk perikanan budidaya, dan ternak. t. Peningkatan nilai jual produk hasil pertanian melalui pengembangan teknologi pengemasan, pengalengan, pengawetan serta hilirisasi industri produk hasil pertanian, seperti produk tanaman pangan, tanaman holtikultura, produk perkebunan, produk perikanan		

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			budidaya, dan ternak.		
Misi 6 : Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Sanggau					
Lingkungan	15.9.1(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 15.a.1 Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	- Perlindungan ekosistem - Penetapan dan penegakan peraturan daerah	a. Mengkaji ulang perencanaan pembangunan, khusunya wilayah pembangunan yang besinggungan dengan kawasan hutan b. Penyusunan masterplan sistem irigasi lahan gambut sebagai mitigasi bencana kabut asap c. Relokasi pemukiman di bantaran sungai d. Permusan, penetapan, dan penegakkan perda terkait pelarangan eksploitasi SDA secara illegal e. Pengembangan ekowisata dalam rangka pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati. f. Analisis tingkat sedimentasi pada sungaisungai yang berpotensi banjir g. Peninjauan kembali perizinan di kawasan yang	Meningkatnya kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

KLHS RPJMD				Integerasi dalam RPJMD	
Bidang	**Indikator TPB Belum Tercapai**	**Isu Strategis KLHS**	**Rekomendasi**	**Saran**	**Indikator Sasaran**
			memiliki nilai konservasi tinggi h. Pemerintah daerah berkerja sama dengan dunia usaha melalui MoU untuk memberikan jaminan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan.		
	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pengelolaan Persampahan, Limbah, dan Polusi	Pembuatan masterplan rencana pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Volume sampah tertangani

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019-2024

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap pembangunan daerah yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk melihat kemampuan keuangan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2016-2020), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Gambaran ini kemudian akan dijadikan sebagai patokan/dasar dalam memproyeksikan pendanaan daerah pada periode yang akan datang (2019-2024).

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau. Berikut proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, tepat guna, dan berorientasi pada value for money. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah; aspek belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung; dan aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Segala pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pendanaan dari Pemerintah Pusat yang disebut sebagai dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada kurun waktu 2015–2019 secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,33%. Rata-rata pertumbuhan dari Lain-lain pendapatan yang sah menjadi komponen tertinggi penyumbang pertumbuhan pendapatan dalam kurun waktu tersebut yakni sebesar 18,90%, disusul oleh pendapatan asli daerah sebesar 8,11% dan dana perimbangan sebesar 7,79%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rata-rata pertumbuhan belanja tahun 2015-2019 sebesar 8,87%. Hal ini menyebabkan terus terjadinya defisit anggaran setiap tahunnya. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. (291.474.789.530,28). Peningkatan terbesar dalam belanja terjadi pada kurun waktu 2015-2016 pada komponen belanja barang jasa sebesar Rp. 56.177.157.345,54 dan belanja modal sebesar Rp. 164.624.054.438,69. Ditahun mendatang, upaya ini perlu terus ditingkatkan agar alokasi belanja pemerintah dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Apabila anggaran diperkirakan defisit, maka harus dicari sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dan sebaliknya, apabila terjadi surplus anggaran, maka surplus tersebut harus dimanfaatkan melalui pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2017 senilai Rp. 291.474.789.530,28. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini terealisasi karena Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi ini, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha perusahaan daerah.

Selengkapnya komposisi pendapatan dan belanja Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1. 1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015–2020

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumb (%)
1.	**PENDAPATAN**	**1.138.019.505.150,48**	**1.291.870.964.684,71**	**1.439.630.663.762,80**	**1.576.477.454.803,48**	**1.598.515.624.669,37**	**1.669.032.922.969,00**	**1.559.705.025.944,87**	**9,33**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**76.122.440.091,86**	**77.084.184.177,04**	**85.929.679.700,00**	**150.765.041.509,48**	**100.372.973.804,37**	**107.002.973.518,00**	**108.769.250.913,78**	**8,11**
1.1.1.	Pajak Daerah	23.682.948.659,00	23.919.314.120,00	27.875.322.660,00	29.260.256.000,00	33.052.017.275,00	37.568.000.000,00	35.971.950.000,00	11,73
1.1.2.	Retribusi Daerah	20.348.351.373,00	5.545.380.536,00	4.619.135.200,00	6.196.911.650,00	5.998.629.300,00	6.660.437.890,00	5.986.570.666,00	(13,45)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.126.401.064,86	5.335.828.361,04	5.859.728.692,00	5.766.826.637,00	6.995.265.545,00	7.358.167.256,00	8.951.660.139,00	8,71
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	26.964.738.995,00	42.283.661.160,00	47.575.493.148,00	109.541.047.222,48	54.327.061.684,37	55.416.368.372,00	57.859.070.108,78	21,10
1.2	**Dana Perimbangan**	**905.883.445.767,62**	**977.291.522.735,00**	**1.167.037.818.673,00**	**1.228.484.990.945,00**	**1.229.632.399.650,00**	**1.258.545.668.350,00**	**1.074.212.685.817,00**	7,79
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi hasil Bukan Pajak	68.478.358.767,62	103.549.674.735,00	62.136.428.673,00	68.059.372.945,00	96.254.694.925,00	82.409.793.000,00	112.086.390.991,00	4,07
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	740.610.477.000,00	760.206.338.000,00	831.737.641.000,00	824.217.941.000,00	824.217.941.000,00	843.057.919.000,00	750.488.162.000,00	2,77
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	96.794.610.000,00	113.535.510.000,00	273.163.749.000,00	336.207.677.000,00	309.159.763.725,00	333.077.956.350,00	211.638.132.826,00	48,82
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**156.013.619.291,00**	**237.495.257.772,67**	**186.663.165.389,80**	**197.227.422.349,00**	**268.510.251.215,00**	**303.484.281.101,00**	**376.723.089.214,09**	18,90
1.3.1.	Hibah	-	0,00	0,00	0,00	59.251.000.000,00	58.166.600.000,00	80.654.300.000,00	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.516.212.291,00	58.930.084.772,67	62.752.722.389,80	59.685.385.349,00	53.029.733.215,00	78.325.856.301,00	80.106.481.803,09	25,38
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86.466.207.000,00	115.709.328.000,00	0,00	0,00	0,00	163.779.930.000,00	-	17,88
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya		17.381.200.000,00	16.931.200.000,00	0,00	0,00	3.211.894.800,00	4.909.420.411,00	-

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumb (%)
1.3.6.	Pendapatan lainnya	35.031.200.000,00	45.474.645.000,00	106.979.243.000,00	137.542.037.000,00	156.229.518.000,00	-	211.052.887.000,00	(20,00)
2.	**BELANJA**	**1.194.856.420.184,56**	**1.417.749.385.285,37**	**1.731.105.453.293,08**	**1.657.775.070.236,67**	**1.663.968.163.711,25**	**1.790.810.143.479,74**	**1.741.553.864.591,68**	**9,98**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**654.212.919.640,56**	**783.377.984.376,74**	**875.932.840.690,22**	**838.118.284.117,98**	**884.126.717.073,89**	**940.922.127.511,32**	**1.033.595.730.799,15**	8,77
2.1.1.	Belanja Pegawai	582.260.971.061,00	624.567.294.835,74	640.075.944.254,22	568.465.627.650,98	565.717.859.040,89	644.674.742.978,32	592.060.895.529,00	2,14
2.1.2.	Belanja Bunga	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	27.326.200.000,00	18.347.075.000,00	31.762.610.000,00	36.924.012.992,00	83.754.257.017,00	43.187.800.000,00	40.569.518.700,00	11,61
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	275.000.000,00	1.328.101.550,00	1.476.538.050,00	1.458.101.550,00	1.500.000.000,00	4.337.000.000,00	5.333.500.000,00	295,42
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	4.904.395.531,56	4.122.540.390,00	4.122.540.390,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	(3,38)
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	38.446.353.048,00	132.012.972.601,00	196.995.207.996,00	223.694.254.171,00	221.817.778.971,00	243.620.859.795,00	250.483.148.832,00	106,73
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	7.260.534.291,00	1.025.436.984,00	141.072.379.984,15	0,51
2.2	**Belanja Langsung**	**540.643.500.544,00**	**634.371.400.908,63**	**855.172.612.602,86**	**819.656.786.118,69**	**779.841.446.637,36**	**849.888.015.968,42**	**707.958.133.792,53**	**11,44**
2.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.813.823.156,00	374.840.781.334,63	431.017.938.680,17	469.953.381.972,69	467.334.110.412,28	519.705.979.710,92	513.500.080.981,03	7,73
2.2.3.	Belanja Modal	290.829.677.388,00	259.530.619.574,00	424.154.673.922,69	349.703.404.146,00	312.507.336.225,08	330.182.036.257,50	194.458.052.811,50	5,44
	Total Surplus / (Defisit)	**(56.836.915.034,08)**	**(125.878.420.600,66)**	**(291.474.789.530,28)**	**(81.297.615.433,19)**	**(65.452.539.041,88)**	**(121.777.220.510,74)**	**(181.848.838.646,81)**	
3.	**PEMBIAYAAN**	**56.836.915.034,08**	**125.878.420.600,66**	**291.474.789.530,28**	**81.297.615.433,19**	**65.452.539.041,88**	**121.777.220.510,74**	**181.848.838.646,81**	**(0,65)**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	64.836.915.034,08	134.487.246.357,66	300.974.789.530,28	152.822.502.340,61	76.952.539.041,88	135.277.220.510,74	183.848.838.646,81	0,12
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00	8.608.825.757,00	9.500.000.000,00	71.524.886.907,42	11.500.000.000,00	13.500.000.000,00	2.000.000.000,00	11,36

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 3.1.2

Tabel 3. 1. 2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2015-2020

No	Uraian	Pertumbuhan (%)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	**Aset**	**4,35**	**10,11**	**9,86**	**9,69**	**12,93**	**3,14**	**8,35**
1.1	**Aset Lancar**	**114,79**	**-44,69**	**-33,67**	**81,67**	**56,26**	**0,91**	**29,21**
1.1.2	Kas	125,22	-48,30	-50,28	74,85	45,45	2,05	24,83
1.1.3	Piutang	77,61	-36,04	-29,84	124,13	15,24	-55,54	15,93
	Beban dibayar dimuka	-	28,91	-72,83	-11,33	56,02	37,33	6,35
1.1.4	Persediaan	21,67	26,75	182,82	76,74	107,97	19,40	72,56
	Investasi Jangka Panjang	**7,42**	**15,76**	**28,27**	**18,78**	**18,56**	**2,32**	**15,18**
	Investasi Non Permanen Lainnya	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Pertumbuhan (%)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,17	15,76	28,27	18,78	18,56	2,32	17,31
1.2	**Aset Tetap**	**-9,51**	**23,06**	**14,47**	**5,03**	**8,06**	**3,62**	**7,46**
1.2.1	Tanah	-0,14	0,04	24,41	0,01	6,29	11,76	7,06
1.2.2	Peralatan dan Mesin	10,15	16,56	11,79	10,40	6,80	9,18	10,81
1.2.3	Gedung dan Bangunan	4,39	9,65	2,05	11,55	11,63	8,46	7,96
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,24	20,58	17,84	10,09	9,52	3,44	10,95
1.2.5	Aset tetap Lainnya	8,84	47,96	14,29	14,18	8,03	6,83	16,69
1.2.6	Kontruksi dalam Pengerjaan	-60,61	566,09	-8,44	-42,27	80,60	-14,76	86,77
	Akumulasi Penyusutan	29,73	6,94	10,05	13,83	12,31	10,57	13,90
1.3	**Aset Lainnya**	**308,15**	**29,73**	**3,04**	**-1,14**	**5,38**	**0,05**	**57,53**
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran			0,00	0,00			0,00
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah			0,00	0,00			0,00
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua			0,00	0,00			0,00
1.3.4.	Aset tak berwujud	-49,29	-21,60	-32,36	-36,51	-10,48	2,68	-24,59
	Aset lain-lain	924,93	34,11	4,80	0,00	5,70	0,00	161,59
	Jumlah Aset Daerah	**4,28**	**9,98**	**9,41**	**12,79**	**12,93**	**3,14**	**8,75**
2.	**Kewajiban**	**3,89**	**411,15**	**-65,34**	**-33,01**	**31,28**	**-11,55**	**56,07**
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**	**-75,97**	**2380,08**	**-73,72**	**1,57**	**31,28**	**-11,55**	**375,28**
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	-46,31	30,15	-83,72	-16,65
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah			0,00	0,00			0,00
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka			0,00	0,00			0,00
	Utang Beban	-	428,59	-24,83	-22,57	51,19	-13,40	69,83
	Utang Jangka Pendek lainnya	-100,00	14.572.783	-87,00	39,52	13,98	-9,31	2428773,44
	Kewajiban Jangka Panjang	**278,90**	**-18,85**	**-9,44**	**-100,00**			**25,10**
	Utang Jangka Panjang lainnya	**278,90**	**-18,85**	**-9,44**	**-100,00**			**25,10**
3.	**Ekuitas Dana**	**4,35**	**7,28**	**12,38**	**10,13**	**12,82**	**3,25**	**8,37**
3.1.	**Ekuitas Dana Lancar**	**126,70**	**-60,74**	**-16,92**	**92,27**	**58,01**	**1,63**	**33,49**
3.1.1.	SILPA	123,91	-49,27	-49,64	75,79	35,91	9,47	24,36
3.1.2.	Cadangan piutang	77,61	-36,04	-29,84	124,13	15,24	-55,54	15,93
3.1.3.	Cadangan persediaan	21,67	26,75	182,82	76,74	107,97	19,40	72,56
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-75,97	2380,08	-73,75	1,63	31,28	-11,50	375,29

No	Uraian	Pertumbuhan (%)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Pendapatan yang ditangguhkan	-100,00		-100,00				-33,33
	Ekuitas Dana Lancar lainnya					1023,77	-88,38	155,90
3.2.	**Ekuitas Dana Investasi**	**-7,45**	**23,35**	**14,59**	**5,65**	**8,33**	**3,48**	**7,99**
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	7,42	15,76	28,27	18,78	18,56	2,32	15,18
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	-9,51	23,06	14,47	5,03	8,06	3,62	7,46
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	308,15	29,73	3,04	-1,14	5,38	0,05	57,53
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Panjang	278,90	-18,85	-9,44	-100,00			25,10
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**4,35**	**10,11**	**9,86**	**9,69**	**12,93**	**3,14**	**8,35**

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021 (diolah)

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam jangka waktu 2015–2020 jumlah aset mengalami peningkatan dengan jumlah yang variatif masing-masing; 4,35 persen; 10,11 persen; 9,86 persen; 9,69 persen, 12,93 persen dan 3,14 persen. Di tahun 2015, aset mengalami peningkatan terendah dibandingkan tahun lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kewajiban pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Dijelaskan secara per pos, Aset Lancar mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2015–2020 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 29,21 persen. Pos Investasi Jangka Panjang mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) rata-rata sebesar 15,18 persen per tahun. Peningkatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12,93 persen. Sama seperti Aset Lancar, Aset

Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengalami fluktuasi pada tahun 2015-2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,31 persen. Adapun aset Lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata yang signifikan, yakni 57,53 persen per tahun dengan pertumbuahan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 308,15 persen.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 56,07 persen per tahun. Pos kewajiban pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek sendiri terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.Kewajiban Jangka Panjang sendiri terdiri dari Utang Jangka Panjang lainnya.

Selama kurun waktu 2015–2020, ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau meningkat secara rata-rata sebesar 8,37 persen per tahun. Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mulai menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sehingga ekuitas dihitung berdasarkan penyesuaian yang melibatkan perhitungan ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Perhitungan disajikan dengan obyek rekening terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Penyesuaian saldo awal Neraca, ekuitas disajikan dengan objek rekening terdiri dari ekuitas, ekuitas Perubahan SAL dan Ekuitas Dikonsolidasikan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa serta transfer atar- daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan keuangan daerah tentunya memiliki korelasi dengan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian diperlukan inventarisasi kembali dalam rangka akselerasi sumber daya di daerah yang berpotensi memberikan tambahan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kebijakan penganggaran implementasi pembangunan di Kabupaten Sanggau ditujukan dalam rangka pemecahan masalah yang penting dan mendesak sehingga menjadi isu strategis pertumbuhan ekonomi denga tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan dan pemukiman serta penanggulangan kemiskinan.

3.2.1 Proporsi Penyusunan Anggaran

Penggunaan anggaran idealnya dapat mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional secara kualitatif dan kuantitatif sehingga akan semakin jelas akuntabilitas pungutan sumber pendapatan daerah oleh pemerintah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan publik. Dengan kata lain dapat diuraikan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas perencanaan anggaran agar terlihat efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran pelayanan publik.

Selama periode tahun 2014-2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah yaitu Belanja Daerah dan Pembiayaan engeluaran Daerah adalah sebesar 38,56%. Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp644.674.742.978,72, hal ini terjadi karena adanya kenaikan gaji pegawai yang merupakan dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat, kenaikan gaji berkala, promosi pegawai dan kenaikan pangkat. Adapun belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp1.804.310.143.479,74. Hal ini terjadi karena adanya penyertaan modal investasi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2. 1
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aaparatur
Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

NO	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	2014	582.260.971.061,00	1.202.856.420.184,56	48,41%
2	2015	624.567.294.835,74	1.426.358.211.042,37	43,79%
3	2016	640.075.944.254,22	1.740.605.453.293,08	36,77%
4	2017	568.465.627.650,98	1.729.299.957.144,09	32,87%
5	2018	565.717.859.040,89	1.675.468.163.711,25	33,76%
6	2019	644.674.742.978,32	1.804.310.143.479,74	35,73%
7	2020	592.060.895.529,00	1.503.979.878.268,87	39,37%
Rata-Rata				**38,67%**

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayan dapat berasal diantaranya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi dan transfer dana cadangan. Defisit adalah posisi dimana jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayan daerah melebihi pendapatan daerah. Pada tahun 2016 fsn 2017, pembiayaan yang dikeluarkan untuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dibanding realisasi pendapatan daerah. Adapun pada tahun 2014 dan 2015 serta tahun 2018 dan 2019 realiasasi pendapatan daerah lebih besar dibanding belanja daerah dan pengeluaran. Untuk lenih jelasanya terkait defisit riil anggaran Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 3. 2. 2
Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

No	Uraian (Rp. dalam Milyar)	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.145,515	1.248,862	1.325,818	1.524,433	1.570,853	1.652,656	1.521,389
	dikurangi Realisasi :							
2	Belanja Daerah	1.069,821	1.075,436	1.465,480	1.535,397	1.500,873	1.590,584	1.501,979
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,000	5,796	8,500	64,896	11,500	13,500	2,000
	Defisit Riil	69,694	167,631	148,162	75,860	58,480	48,572	17,409

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021 (diolah)

Komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 berupa sisa lebih Silpa tahun anggaran sebelumnya terbesar terdapat pada tahun 2015 yaitu 301.225,912 juta. Adapun sisa Silpa terkecil terdapat pada tahun 2017 sebesar 76.952,539 juta yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2. 3
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019

No	Uraian (Rp. dalam Juta)	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	134.530,179	301.225,912	152.812,853	76.952,539	135.277,221	183.848,839	201.515,599
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021

Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran daerah dalam kurun waktu 2014–2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.6 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah Silpa terbesar terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah Silpa sebanyak 183,849 Miliar pada tahun 2019. Adapun pertumbuhan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Sanggau dalam pelampauan penerimaan PAD terbesar yaitu sebanyak 12,66% dari Silpa pada tahun 2018.

Tabel 3. 2. 4
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2020

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	134.530.178.577,95		301.225.911.951,54		152.812.852.540,61		76.952.539.041,88		135.277.220.510,74		183.848.838.646,81		201.515.599.578,21	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	6.270.810.834,07	4,66	6.626.744.521,22	2,20	7.396.904.500,36	4,84	1.152.712.932,58	1,50	17.124.993.790,95	12,66	10.491.388.698,44	5,71	9.154.732.279,67	4,54
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	6.555.497.430,38	4,87	1.186.265.043,85	0,39	0,00	0,00	98.720.314.297,81	128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.535.320.000,00	1,38	1.325.536.988,00	0,66
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 202

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2019-2024

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu, belanja daerah juga diproyeksikan meningkat dengan prediksi anggaran defisit dan menurun setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaataan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kebijakan Kabupaten Sanggau di tahun mendatang sebagai berikut:

1. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*.
2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.

4. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja.
5. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
6. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Kabupaten Sanggau dengan OPD Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
8. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sanggau akan mengurangi Belanja Pegawai berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran.
2. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Daerah.

Adapun kondisi kerangka keuangan pada tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Sanggau yang telah teralisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3. 1
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Pertumbuhan	2019	2020
		%	(Rp)	(Rp)
1.	**PENDAPATAN**	(4,43)	**1.591.953.858.704,44**	**1.521.389.474.959,45**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	0,37	**117.494.362.216,44**	**117.923.983.193,45**
1.1.1.	Pajak Daerah	(0,52)	37.940.170.772,68	37.741.516.556,92
1.1.2.	Retribusi Daerah	(6,56)	7.024.429.803,00	6.563.317.980,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	21,66	7.358.167.256,00	8.951.660.139,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	(0,77)	65.171.594.384,76	64.667.488.517,53
1.2.	**Pendapatan Transfer**	(15,87)	**1.230.087.538.181,00**	**1.034.853.982.849,00**
1.2.1.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	4,44	65.617.896.527,00	68.529.913.236,00
1.2.2.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	(11,25)	841.905.919.000,00	747.178.578.000,00
1.2.3.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK)	(32,06)	322.563.722.654,00	219.145.491.613,00
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	50,84	**244.371.958.307,00**	**368.611.508.917,00**
1.3.3.	Dana Darurat			0,00
1.3.4.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	(4,91)	77.380.133.507,00	73.578.784.929,00
1.3.5.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(100,00)	163.779.930.000,00	-
1.3.6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	(37,73)	3.211.894.800,00	2.000.000.000,00
1.3.7.	Pendapatan Hibah	-	-	82.305.861.588,00
1.3.7.	Pendapatan lainnya	-	0,00	210.726.862.400,00
2.	**BELANJA**		**1.590.584.160.568,37**	**1.501.979.878.268,87**
	Belanja Operasi			
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	4,44	**810.979.272.596,00**	**847.009.272.611,00**
2.1.1.	Belanja Pegawai	(7,02)	516.893.524.379,00	480.620.994.098,00
2.1.2.	Belanja Bunga			0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi			0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	(16,71)	42.763.150.000,00	35.616.350.500,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	26,52	4.069.000.000,00	5.147.934.850,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	0,04	4.059.248.400,00	4.060.970.000,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	2,88	243.110.050.755,00	250.115.441.695,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	84.654,89	84.299.062,00	71.447.581.468,00
2.2	**Belanja Langsung**	(15,99)	**779.604.887.972,37**	**654.970.605.657,87**
2.2.1.	Belanja Pegawai			

No	Uraian	Pertumbuhan %	2019 (Rp)	2020 (Rp)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	(0,33)	466.620.292.183,37	465.099.629.107,95
2.2.3.	Belanja Modal	(39,34)	312.984.595.789,00	189.870.976.549,92
	Belanja Transfer			
	Total Surplus / (Defisit)	1.317,07	**1.369.698.136,07**	**19.409.596.690,58**
3.	**PEMBIAYAAN**	49,54	**121.777.220.510,74**	**182.106.002.887,63**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	36,10	135.277.220.510,74	184.106.002.887,63
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	(85,19)	13.500.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021

Adapun proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sanggau pada tahun 2021-2024 sebagai berikut.

Tabel 3. 3. 2
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2024

No	Uraian	Realisasi P APBD	Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.	**PENDAPATAN**	**1.540.524.125.226,00**	**1.616.017.834.693,00**	**1.644.837.191.310,57**	**1.658.990.780.769,19**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**118.769.956.375,00**	**139.486.702.092,00**	**114.107.476.012,00**	**117.977.448.679,00**
4.1.01	Pajak Daerah	39.495.160.000,00	59.803.778.000,00	41.793.966.900,00	43.883.665.245,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.672.775.770,00	7.021.405.530,00	7.706.851.883,00	7.913.942.120,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.513.457.389,00	10.000.000.000,00	6.995.265.545,00	6.995.265.545,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	63.088.563.216,00	62.661.518.562,00	57.611.391.684,00	59.184.575.769,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.335.689.258.851,00**	**1.409.521.344.601,00**	**1.418.095.555.698,57**	**1.427.233.593.694,19**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.249.720.934.815,00**	**1.359.453.047.688,00**	**1.367.526.575.816,44**	**1.375.653.234.214,42**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.082.863.496.815,00**	**1.192.595.609.688,00**	**1.199.000.563.436,44**	**1.205.441.961.710,62**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	102.607.210.000,00	88.395.140.000	89.279.091.400,00	90.171.882.314,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	740.408.943.000,00	864.353.125.873	868.674.891.502,37	873.018.265.959,88
4.2.01.01.03	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	131.481.938.000,00	131.481.938.000,00	132.139.347.690,00	132.800.044.428,45
4.2.01.01.04	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	108.365.405.815,00	108.365.405.815,00	108.907.232.844,08	109.451.769.008,30
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**7.519.190.000,00**	**7.519.190.000,00**	**7.594.381.900,00**	**7.670.325.719,00**
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	7.519.190.000,00	7.519.190.000,00	7.594.381.900,00	7.670.325.719,00
4.2.01.05	**Dana Desa**	**159.338.248.000,00**	**159.338.248.000,00**	**160.931.630.480,00**	**162.540.946.784,80**
4.2.01.05.01	Dana Desa	159.338.248.000,00	159.338.248.000,00	160.931.630.480,00	162.540.946.784,80
4.2.02.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**85.968.324.036,00**	**50.068.296.913,00**	**50.568.979.882,13**	**51.580.359.479,77**

No	Uraian	Realisasi P APBD	Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.2.02.01.	**Pendapatan Bagi Hasil**	**82.598.324.036,00**	50.068.296.913,00	50.568.979.882,13	51.580.359.479,77
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	82.598.324.036,00	50.068.296.913,00	50.568.979.882,13	51.580.359.479,77
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**3.370.000.000,00**	**-**	**1.000.000.000,00**	**1.020.000.000,00**
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.370.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.020.000.000,00
4.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**86.064.910.000,00**	**67.009.788.000,00**	**112.634.159.600,00**	**113.779.738.396,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.886.000.000,00	1.886.000.000,00	1.923.720.000,00	1.962.194.400,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.886.000.000,00	1.886.000.000,00	1.923.720.000,00	1.962.194.400,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.886.000.000,00	1.886.000.000,00	1.923.720.000,00	1.962.194.400,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	83.178.910.000,00	65.123.788.000	110.710.439.600	111.817.543.996
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	83.178.910.000,00	65.123.788.000	110.710.439.600,00	111.817.543.996,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	83.178.910.000,00	65.123.788.000	110.710.439.600,00	111.817.543.996,00
5	**BELANJA**	**1.729.539.724.804,00**	**1.738.517.393.631,00**	**1.756.991.005.367,93**	**1.763.515.780.641,05**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.253.402.333.138,00**	**1.266.241.099.352,00**	**1.279.574.808.138,14**	**1.281.215.922.186,87**
5.1.01	Belanja Pegawai	609.228.906.670,00	695.156.043.262,00	709.059.164.127,24	723.240.347.409,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.195.010.336,00	535.250.708.090,00	540.603.215.170,90	529.791.150.867,48
5.1.05	Belanja Hibah	29.705.416.132,00	34.890.348.000,00	28.958.988.840,00	27.221.449.509,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.273.000.000,00	944.000.000,00	953.440.000,00	962.974.400,00
5.2	**Belanja Modal**	**219.228.446.602,00**	**200.622.652.817,00**	**202.628.879.345,17**	**204.655.168.138,62**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	76.564.205.766,00	62.761.298.646,00	63.388.911.632,46	64.022.800.748,78
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.044.535.492,00	67.575.155.173,00	68.250.906.724,73	68.933.415.791,98
5.2.04	Balanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.215.126.361,00	66.717.780.911,00	67.384.958.720,11	68.058.808.307,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.404.578.983,00	3.568.418.087,00	3.604.102.267,87	3.640.143.290,55

No	Uraian	Realisasi P APBD	Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.3	**Belanja Tidak terduga**	**8.186.018.156,00**	**10.428.500.200,00**	**10.949.925.210,00**	**11.168.923.714,20**
5.3.01	Belanja Tidak terduga	8.186.018.156,00	10.428.500.200,00	10.949.925.210,00	11.497.421.470,50
5.4	**Belanja Transfer**	**248.722.926.908,00**	**261.225.141.262,00**	**263.837.392.674,62**	**266.475.766.601,37**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.076.287.754,00	6.682.518.353,00	6.749.343.536,53	6.816.836.971,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.646.639.154,00	254.542.622.909,00	257.088.049.138,09	259.658.929.629,47
	Total Surplus / (Defisit)	**(189.015.599.578,00)**	**(122.499.558.938,00)**	**(112.153.814.057,36)**	**(104.524.999.871,86)**
6	**PEMBIAYAAN**	**189.015.599.578,00**	**122.499.558.938,00**	**112.153.814.057,36**	**104.524.999.871,86**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**201.515.599.578,00**	**144.999.558.938,00**	**126.153.814.057,36**	**118.524.999.871,86**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	201.515.599.578,00	144.999.558.938,00	126.153.814.057,36	118.524.999.871,86
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**12.500.000.000,00**	**22.500.000.000,00**	**14.000.000.000,00**	**14.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal daerah	12.500.000.000,00	22.500.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
	Bembiayaan Netto	**189.015.599.578,00**	**122.499.558.938,00**	**112.153.814.057,36**	**104.524.999.871,86**

Sumber : BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kabupaten Sanggau, 2021 (diolah)

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Adapun proyeksi kapasitas riil keuangan Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. 3
Proyeksi Kapasitas Rill Kempuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau

No	Uraian	Realisasi / Proyeksi				
		2020*	2021**	2022***	2023***	2024***
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.518.940.972.559,45	1.523.255.585.904,00	1.616.017.834.693,00	1.644.837.191.310,57	1.658.990.780.769,19
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	183.848.838.646,81	145.078.587.987,00	144.999.558.938,00	126.153.814.057,36	118.524.999.871,86
Total Penerimaan		**1.702.789.811.206,26**	**1.668.334.173.891,00**	**1.761.017.393.631,00**	**1.770.991.005.367,93**	**1.777.515.780.641,05**
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung	844.444.870.211,00	892.460.307.349,00	1.002.644.032.724,00	1.013.758.910.851,86	1.029.397.959.391,25
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	11.000.000.000,00	22.500.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**856.344.940.995,26**	**764.873.866.542,00**	**735.873.360.907,00**	**743.232.094.516,07**	**734.117.821.249,80**

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021 (diolah)
Keterangan : * : Sudah realisasi
** : Struktur APBD tahun 2021 dalam SIPD
*** : Hasil proyeksi

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Hal ini berdasarkan Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah yang belum terakomodir pada Prioritas Pertama. Sedangkan Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk pada Prioritas I dan Prioritas II.

Tabel 3. 10
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kempuan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	**856.344.940.995**	**764.873.866.542**	**735.873.360.907**	**743.232.094.516**	**734.117.821.250**
II	**Prioritas I**	**97.443.452.953,00**	**107.436.637.373,00**	**118.796.028.138,80**	**119.528.121.904,19**	**120.266.169.007,68**
	Belanja BLUD	27.914.465.800	29.755.916.143	39000310023	39390313123	39784216255
	Belanja JKN	11.362.387.153	12.556.933.230	14671930116	14818649417	14966835911
	Belanja BOS	58.166.600.000	65.123.788.000,00	65.123.788.000,00	65.319.159.364,00	65.515.116.842,09
III	**Prioritas II**	**667.833.309.477**	**604.842.250.835**	**567.711.146.147**	**562.137.460.727**	**564.761.728.862**
	Program Pencapaian Visi dan Misi	667.833.309.477	604.842.250.835	567.711.146.147	562.137.460.727	564.761.728.862
IV	**Prioritas III**	**91.068.178.565**	**52.594.978.334**	**49.366.186.621**	**48.881.518.324**	**49.109.715.553**
	Program Penyelenggaraan Urusan Lainnya	91.068.178.565	52.594.978.334	49.366.186.621	48.881.518.324	49.109.715.553

Sumber : BPKAD Kabupaten Sanggau, 2021 (diolah)
Keterangan : * : Sudah realisasi
** : Struktur APBD tahun 2021 dalam SIPD
*** : Hasil proyeksi

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019-2024

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di daerah tersebut.

Permasalahan pembangunan pada umumnya disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan pembangunan yang terjadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam analisis internal ini diuraikan juga mengenai pengalaman akan permasalahan dan menjadi isu strategis sehingga dapat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Sanggau. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Sanggau, yaitu:

Kekuatan *(Strengths)*

a. Posisi strategis Kabupaten Sanggau yang terletak pada jalur utama trans Kalimantan poros tengah, dialiri Sungai Kapuas dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur);
b. Berkembangnya lembaga pembiayaan mikro seperti Perbankan, *Credit Union* (CU) dan Koperasi sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat;
c. Kondisi masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;
d. Banyaknya investasi yang telah ditanamkan di Kabupaten Sanggau;
e. Memiliki potensi sumber daya alam; dan
f. Adanya kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Kelemahan *(Weaknesses)*

a. Terbatasnya infrastruktur dasar;
b. Kualitas sumber daya manusia yang rendah;
c. Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman;
d. Topografi wilayah Kabupaten Sanggau yang sangat luas dan berbukit-bukit dan memiliki lebih dari 4 tipe kemiringan lereng yang bervariasi dari 0-2 persen hingga >40 persen;
e. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas; dan
f. Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparatur.

Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang yang tidak termanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Beberapa peluang dan ancaman Kabupaten Sanggau, yaitu:

Peluang *(Opportunities)*

a. Adanya kerjasama antara dua negara yaitu Malaysia-Indonesia melalui Sosek Malindo;
b. Adanya jaminan kepastian hukum;
c. Terbukanya peluang pasar yang besar bagi produk daerah;
d. Adanya reformasi birokrasi;
e. Kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara; dan
f. Kabupaten Sanggau merupakan daerah yang masuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Ancaman *(Threat)*

a. Adanya dampak globalisasi dan arus informasi yang bersifat negatif yang semakin sulit dibendung;
b. Munculnya dampak pemanasan *global (global warming)* akibat pengelolaan lingkungan yang belum optimal;
c. Krisis ekonomi global yang masih berkepanjangan; dan
d. Kesenjangan sosial ekonomi dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur,

sehingga Kabupaten Sanggau merupakan wilayah terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai permasalahan terkait aspek geostrategis tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan agenda pembangunannya. Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2014-2019 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Untuk itu, pada bagian atau tahapan perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sanggau dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek seperti aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing sebagai berikut.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Permasalahan utama pelaksanaan Indeks Pembangunan Manusia yaitu, Angka Harapan Hidup Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 sebesar 71,42 tahun di atas AHH Provinsi Kalimantan Barat yaitu 70,69 tahun, namun masih berada di bawah AHH Nasional yaitu 71,47 tahun. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 7,15 tahun di bawah RLS Provinsi Kalimantan Barat 7,37 tahun dan RLS Nasional 8,48 tahun dikarenakan rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya mencapai satu SMP/SLTP sederajat. Harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 11,57 tahun di bawah HLS Provinsi Kalimantan Barat 12,60 tahun dan RLS Nasional 12,95 tahun, serta menurunnya pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Sanggau akibat terjadinya bencana non alam yaitu pandemi covid-19. Hal tersebut juga selaras dengan terjadinya penurunan pengeluaran per kapita dari tingkat nasional bahkan provinsi.

4.1.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sanggau memang mengalami penururan selama 2 tahun terakhir, namun masih terdapat permasalahan kemiskinan yang harus segera ditangani. Permasalahan kemiskinan yang masih ditemui di Kabupaten Sanggau yaitu, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial terutama di wilayah perdesaaan dan perbatasan, meningkatnya angka putus sekolah SD, SMP, dan SMA, meningkatnya angka kematian balita, terbatasnya pemenuhan infrastruktur dasar, masih banyaknya desa 3T, terbatasnya keuangan daerah, adanya dampak dari wabah penyakit covid-19, redahnya keahlian/skill yang dimiliki pencari pekerjaan, adanya pendatang pencari kerja dari luar wilayah dapat menimbulkan daya saing terhadap pencari kerja di Kabupaten Sanggau, semakin banyak produk yang masuk dari luar wilayah Kabupaten Sanggau dan kebocoran modal ke luar (*regional leakage*).

4.1.1.3 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran terbuka tersebut, batas bawah usia yang digunakan 15 tahun dan pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja. Permasalahan pengangguran di Kabupaten Sanggau disebabkan karena, belum meluasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sanggau, belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru, ketersedian tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

4.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Permasalahan utama pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau salah satunya adalah peningkatan sektor pertambangan yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar. Permasalahan pada penurunan perekonomian juga dikarenakan terjadinya bencana non alam hampir diseluruh wilayah di tiap negara yaitu pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini di Kabupaten Sanggau menyebabkan banyak dilakukan pemotongan anggaran yang menyebabkan pengurangan kegiatan pembangunan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Sanggau saja, bahkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan angka minus.

4.1.1.5 Pendapatan Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sangau, dilihat berdasarkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagai indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara umum mengalami perbaikan setiap tahunnya. PDRB per kapita ADHB mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan hingga tahun 2020 mencapai Rp 41.898 ribu. Adapun PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2016 sebesar Rp 25.790 ribu dan terus meningkat hingga mencapai level Rp 27.837 ribu pada tahun 2020. Namun terdapat penurunan nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Sanggau yaitu Rp.27.993.000 pada tahun 2019 menjadi Rp.27.837.000 pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan, namun kondisi ini harus segera ditindak lanjuti agar penurunan yang terjadi tidak berlanjut hingga ketahun-tahun berikutnya.

4.1.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sanggau masih masuk kategori ketimpangan rendah yang dilihat dari rasio gini. Namun hal yang wajib menjadi perhatian adalah naiknya rasio gini di Kabupaten Sanggau pada tahun 2017-2018 di Kabupaten Sanggau, perlu dilakukannya berbagai upaya untuk menggiring rasio gini di Kabupaten Sanggau mendekati angka nol yang menunjukkan tidak adanya ketimpangan atau terdapat pemerataan ekonomi.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1 Urusan Wajib

4.1.2.1.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pendidikan adalah:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan;
b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar;
c. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan informal dan nonformal;
d. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; dan
e. Masih rencahnya Angka Putus Sekolah.

2. Kesehatan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kesehatan adalah:

a. Masih belum selarasnya penerapan dan penjaminan standar mutu serta akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta;
b. Belum terfasilitasinya dengan optimal akses paradigma sehat masyarakat melalui upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta;
c. Belum Optimalnya Sediaan Farmasi dan Alkes, Permasalahan E-catalog, Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas, Penggunaan Obat Rasional, Kemandirian Obat dan Alat Kesehatan;
d. Masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta buruknya kondisi kesehatan lingkungan;

e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia di bidang kesehatan;
f. Belum tercapai peningkatan kelas Rumah Sakit dari Kelas C ke Kelas B;
g. Belum tercapai Predikat Akreditasi Paripurna Rumah Sakit;
h. Belum maksimal capaian angka Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
i. Belum maksimal capaian angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit;
j. Bertambahnya Beban Rumah Sakit dengan adanya Pandemi Covid-19; dan
k. Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat belum optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

a. Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air dan energi belum memadai;
b. Masih rendahnya persentase panjang jaringan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang), yaitu sebesar 40,75%;
c. Masih terdapat 22 desa tertinggal yang disebabkan oleh masih belum terbukanya wilayah desa dan belum baiknya kualitas/kondisi jalan desa;
d. Masih rendahnya persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, yaitu sebesar 79,19%;
e. Belum optimal tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenang an kabupaten, yaitu hanya sebesar 80%;
f. Belum terpenuhinya penyedia an air baku di daerah miskin dan tertinggal, perbatasan, Kawasan industri, dan Kawasan strategis;
g. Masih sering terjadi banjir pada daerah potensi rawan bencana, panjangnya wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor, serta abrasi tinggi yang menyebabkan kerusakan tebing sungai;

h. Belum optimalnya ketersedia an data, pengelolaan informasi publik, serta pelaporan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat;
i. Rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian;
j. Penyelenggaraan dan inven tarisasi pengelolaan aset/ BMD belum dilakukan optimal, terutama aset infrastruktur;
k. Jumlah/kuantitas dan kualitas (kompetensi dan kapa sitas) SDM/aparatur masih kurang. Akibatnya beban kerja pembangunan infra-struktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut;
l. Belum ada publikasi yang intensif terhadap capaian kinerja pembangunan infrastruktur;
m. Pekerjaan administrasi perkantoran maupun teknis lapangan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang layak dan memadai; dan
n. Belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan yang sesuai dengan RTRW.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah:

a. Belum tersedianya *database* tentang rumah;
b. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
o. Terbatasnya bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
c. Belum optimalnya penanggulangan bencana daerah;

d. Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; dan
e. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

6. Sosial

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

a. Belum optimalnya/masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat;
c. Belum tersedianya shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar; dan
d. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

4.1.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama pelaksanaan urusan tenaga kerja adalah:

a. Belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan;
b. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
c. Ketersedian tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; dan
d. Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
b. Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait Perlindugan Khusus Anak;
c. Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpilah;

d. Belum semua OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa memahami Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
e. Perencanaan dan Penganggaran belum berbasis responsif gender;
f. Masih lemahnya kemandirian perempuan di bidang ekonomi;
g. Masih banyak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/ Trafficking; dan
h. Belum optimalnya penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pangan adalah:

a. Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan local masih kurang;
b. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga dan akses pangan masyarakat;
c. Pengawasan keamanan pangan belum optimal; dan
d. Belum mandiri pangan.

4. Pertanahan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pertanahan adalah:

a. Belum optimalnya penguasaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum; dan
b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pelaksanaan urusan lingkungan hidup adalah:

a. Menurunnya daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air;
b. Belum optimalnya pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3;
c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah secara mandiri; dan
d. Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah belum memadai.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

a. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan; dan
b. Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah:

a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
b. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa;
c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan Desa;
d. Belum akuratnya *database* desa;
e. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat; dan
f. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
c. Masih rendahnya Kualitas SDM PKB dilapangan serta tingkat pemahaman kader tentang tupoksinya; dan
d. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perhubungan adalah:

a. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perhubungan; dan
b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah:

a. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
b. Belum optimalnya implementasi e-government; dan
c. Belum terjangkaunya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan utama pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah:

a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pembina dan pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro; dan
b. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

12. Penanaman Modal

Permasalahan utama pelaksanaan urusan penanaman modal adalah:

a. Belum optimalnya investasi di Kabupaten Sanggau; dan
b. Belum optimalnya pelayanan perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

a. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda, kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi kepemudaan; dan
b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi serta organisasi olahraga;

14. Statistik

Permasalahan utama pelaksanaan urusan statistik adalah belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung kebijakan satu data.

15. Persandian

Permasalahan utama pelaksanaan urusan persandian adalah:

a. Belum maksimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah; dan
b. Belum terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

16. Kebudayaan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kebudayaan adalah:

a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat serta kearifan budaya lokal;
b. Belum optimalnya upaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilainilai budaya;
c. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga budaya lokal;
d. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kesejarahan; dan
e. Sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang belum memadai.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perpustakaan adalah:

a. Rendahnya minat baca dan kunjungan ke Perpustakaan/taman bacaan masyarakat;
b. Sarana dan prasarana perpustakaan yang ada belum memadai; dan
c. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.

18. Kearsipan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kearsipan adalah:

a. Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah; dan
b. Sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip belum representatif.

4.1.2.2 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah:

a. Produksi dan produktivitas perikanan budidaya belum optimal; dan

b. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat.

2. Pariwisata

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pariwisata adalah:

a. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal;
b. Sarana dan prasarana destinasi pariwisata belum memadai; dan
c. Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Pertanian

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pertanian adalah:

a. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian :
   - Produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian belum optimal;
   - Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas;
   - Belum terbangunnya sistem pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah.
b. Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah.

4. Kehutanan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kehutanan adalah belum adanya penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA).

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan utama pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

a. Masih banyak rumah tangga yang belum berlistrik;
b. Belum optimalnya distribusi energi ke masyarakat; dan
c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan air tanah.

6. Perdagangan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perdagangan adalah:

a. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar;
b. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
c. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan

d. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

7. Perindustrian

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perindustrian adalah:

a. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah; dan
b. Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

8. Transmigrasi

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Transmigrasi adalah:

a. Keterbatasan pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi sesuai tata ruang; dan
b. Belum optimalnya pembinaan kepada transmigran.

4.1.2.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perencanaan adalah:

a. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah; dan
b. Belum efektifnya pengelolaan Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Keuangan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan keuangan adalah:

a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sanggau masih rendah atau tingkat ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi; dan
c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah:

a. Urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, belum didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang proporsional;

b. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan
c. Belum optimalnya kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan adalah:

a. Masih rendahnya diseminasi hasil-hasil penelitian; dan
b. Masih rendahnya pengembangan inovasi dan teknologi.

5. Pengawasan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan inspektorat adalah kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi

6. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah adalah:

a. Belum optimalnya implementasi *Good Governance;*
b. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
c. Belum optimalnya transparansi informasi dan pelayanan publik;
d. Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal; dan
e. Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah daerah.

7. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD adalah:

a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan terhadap pimpinan maupun anggota DPRD; dan
b. Sarana dan prasarana kesekretariatan belum memadai.

8. Kewilayahan

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Adapun permasalahan utama di kecamatan secara umum yaitu:

a. Terbatasnya sarana pelayanan;

b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Belum terbangunnya aplikasi pendaftaran organisasi masyarakat;
b. Belum optimalnya pendidikan politik pada masyarakat;
c. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan rasa kebangsaan;
d. Kurangnya kesadaran dampak negative dari penyalahgunaan narkoba;
e. Potensi konflik sosial.

4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

4.1.3.1 Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Ada beberapa maalah infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Sanggau diantaranya adalah kondisi beberapa jalan di Kabupaten Sanggau masih belum baik terutama di desa tertinggal masih ada jalan yang belum beraspal atau dalam kondisi buruk, beberapa jembatan masih dalam kondisi rusak dan belum baik, belum adanya pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Sanggau, belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi Kabupaten Sanggau.

Selain permasalahan transportasi, terdapat beberapa masalah pada sistem jaringan prasaranaenergi/kelistrikan, minyak dan gas bumi yaitu masih kurangnya sumber kebutuhan listrik di Kabupaten Sanggau sehingga masih ada desa-desa yang belum teraliri listrik. Terdapat permasalahan sumber daya air di Kabupaten sanggau yaitu belum maksimalnya sarana dan prasarana penyedia air bersih untuk kegiatan permukiman berupa pembangunan dan pengembangan.

Adapun permasalahan pos dan telekomunikasi berupa belum adanya stasiun microwave disetiap ibukota kecamatan dan belum adanya stasiun rural terutama pada pusat desa yang letaknya terisolir, terpencil dan terbelakang serta terdapat masalah lainnya yaitu sistem jaringan drainase Kabupaten Sanggau masih dalam kondisi belum baik.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis Kabupaten Sanggau yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1 Telaah Isu Internasional

1. **Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)**

   Isu global kelanjutan dari *Millenial Development Goals* (MDG's) yaitu *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's/MDG's menjadi salah satu tolok ukur atau indikator pembangunan yang sepantasnya diterapkan di setiap lini pembangunan di masing-masing daerah, begitu juga dengan Kabupaten Sanggau. Di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) ini terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2030, antara lain:

   a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk;
   b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;

c. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
d. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
e. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
f. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
g. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
h. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
i. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi
j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
k. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
l. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
n. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
o. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
p. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;

q. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menjad pedoman/arah kebijakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

2. Situasi Geo-Politik dan Geo-Ekonomi Tahun 2020-2024

Kondisi geo-politik dunia masih diliputi ketidakstabilan politik di berbagai belahan dunia, seperti konflik di Timur Tengah, penarikan kesepakatan nuklir Iran-AS dan Rusia-AS, situasi politik pra/pasca pemilu di sejumlah negara, dampak *Brexit*, dan konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Jepang. Situasi geo-politik akan membebani geoekonomi, sehingga proyeksi tahun 2020-2024 tidak akan berbeda jauh dengan kondisi di sepanjang 2018.

Geo-ekonomi dibayangi oleh sejumlah risiko yang *upside risk* dan *downside risk*. *Upside risks* adalah permintaan global yang meningkat sehingga mengakselerasi produktivitas dan investasi di samping kebijakan moneter dan fiskal yang cenderung akomodatif juga menjadi faktor yang mempengaruhi. *Downside risks* adalah risiko geo-politik, kebijakan fiskal ekspansif Amerika Serikat yang dikucurkan saat perekonomian sedang membaik bersifat *pro-cyclical* sehingga memberikan tekanan inflasi, kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang *inward-looking,* kenaikan harga minyak, persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China yang berefek kepada perang dagang. Kondisi geo-ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian ekonomi dunia dan cenderung melambat sebagai dampak kondisi geo-politik dunia yang labil. KEI yang selama ini banyak diikuti oleh Indonesia seakan tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dampak geo-politik tersebut.

Untuk itu, performa ekonomi Indonesia harus terus ditingkatkan pada masa mendatang, di antaranya dengan meningkatkan nilai ekspor ke pasar non tradisional. Perang Dagang AS-China akan mempengaruhi rantai pasok global di sejumlah sektor industri. Pemerintah Indonesia segera memetakan industry AS yang akan merelokasi dari China demikian juga sebaliknya. Sejumlah industri AS sudah direlokasi dari China ke sejumlah negara ASEAN, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Relokasi industri ini adalah FDI bagi Indonesia sehingga akan menyehatkan Neraca Pembayaran Indonesia. Di samping pengaruh geo-politik global, perkembangan geo-ekonomi gobal dipengaruhi juga oleh perubahan blok kerjasama perdagangan dunia atau mega *Free Trade Area* (FTA) seperti *Transatlantic Trade and Investment Partnership*(TTIP), *Trans-PasificPartnership*(TPP), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan *Comprehensive Progresive Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) atau TPP 11.

3. Perdagangan Bebas

Konstelasi dunia saat ini mengarah pada perdagangan bebas, dengan harapan dapat terwujud kesejahteraan semua negara secara bersama-sama. Sampai tahun 2018, kerjasama Indonesia di Forum Internasional yang *Signed and in Effect* sebanyak 9 FTA sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kerjasama Indonesia di Forum Internasional

Seluruh FTA	Status	Tahun
ASEAN Free Area	*Signed and in Effect*	1993
ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement	*Signed and in Effect*	2005
ASEAN-[Republic of] Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement	*Signed and in Effect*	2007
Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement	*Signed and in Effect*	2008
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	*Signed and in Effect*	2008
ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement	*Signed and in Effect*	2010
ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement	*Signed and in Effect*	2010

Seluruh FTA	Status	Tahun
Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries	*Signed and in Effect*	2011
Pakistan-Indonesia Free Trade Agreement	*Signed and in Effect*	2013
AEC(*Asean Economic Community*	*Signed and in Effect*	2016

Sumber: ARICDatabase Oktober 2018

FTA dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perdagangan antarnegara, sehingga perdagangan internasional diantara kedua negara tersebut diharapkan dapat berjalan lebih dinamis. Namun demikian, perdagangan bebas tersebut jika tidak diantisipasi akan memiliki dampak negatif terhadap pembangunan Indonesia, seperti halnya *ASEAN Community*. Memasuki tahun awal tahun 2016, AEC(*Asean Economic Community*) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai dijalankan. Masyarakat Ekonomi Asean merupakan bentuk kerjasama antar anggota negara–negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Melalui MEA terjadi pemberlakukan perdagangan bebas (*free trade*) di kawasan ASEAN.

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, maka persaingan usaha di kawasan ASEAN akan semakin sengit. Untuk itu beberapa persyaratan umum harus dimiliki sebuah negara supaya produk barang dan jasa bersaing antara negara ASEAN. Salah satu factor pendukungnya beberapa diantaranya sektor tenaga kerja yang dituntut memiliki profesionalitas dan siap bersaing dengan tenaga kerja dari Negara serumpun yang masuk dalam anggota MEA. Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan hingga saat ini ialah meningkatkan motivasi anak bangsa dalam berkarya dan beraktivitas dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN sekaligus menjadi masalah yang perlu untuk dicarikan solusinya sehingga menjadi isu strategis, diantaranya:

a. Tenaga kerja professional

   Diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN menuntut kualitas tenaga kerja dengan standar yang tinggi. Hal tersebut berimplikasi agar setiap penduduk khususnya yang telah

masuk dalam usia kerja harus mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Dengan menerapkan hal tersebut, nantinya akan menghasil sumber daya manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan berkualitas.

b. Produk yang unggul dan bernilai tambah tinggi

Selain kualitas sumberdaya manusia, komoditas yang dipasarkan juga harus mampu bersaing dengan produk yang dihasilkan kompetitor lain dan memiliki nilai jual sehingga ketika memasuki proses pemasaran memiliki daya tarik konsumen untuk membelinya.

c. Lingkungan yang kondusif

Faktor lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu aspek yang memiliki peranan penting ialah lingkungan sosial. Terjaganya lingkungan sosial yang kondusif akan menciptakan masyarakat yang aman dan tentram sehingga akan memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan perekonomian pada suatu negara.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena pergeseran kondisi iklim secara global dalam jangka panjang. Adapun perubahan iklim yang dimaksud menyangkut suhu, curah hujan dan intensitas angin. Adapun penyebab dari perubahan iklim ialah adanya pemanasan global yang berakibat pada peningkatan suhu dunia yang pada gilirannya menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global juga banyak disebabkan oleh padatnya aktivitas manusia dalam melepaskan polusi yang kemudian terperangkap di atmosfer. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut banyak menggunakan bahan bakar dan fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi.

Polusi yang dihasilkan mengandung bahan utama Karbondioksida dan bahan lain seperi metana, nitrous oxide, senyawa organik volatil, ozon, dan klorofluorokarbon. Dampak nyata dari efek perubahan iklim saat ini sudah sering terjadi dan menimbulkan efek yang dahsyat. Beberapa diantaranya ialah bencana alam

seperti banjir, badai, kenaikan permukaan air laut dan peningkatan suhu (kekeringan).

Berbagai bencana tersebut nantinya akan berimbas pada kesehatan manusia, kualitas udara, pertanian dan persediaan manusia, hutan, ekosistem, daerah pantai, dan kualitas sumber daya air. Melihat begitu kompleksnya efek yang dihasilkan, maka setiap institusi maupun perorangan harus mengambil peran dalam antisipasi terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut juga mencakup wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai *stakeholder* untuk mengatur aktivitas pembangunan melalui perencanaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

5. **Kemajuan Teknologi Informasi (Ekonomi Digital Menuju Revolusi Industri 4.0)**

   Isu inovasi digital termasuk ekonomi digital dan *Financial Technology* (FinTech) menjadi fokus isu di forum ASEAN. Seluruh anggota ASEAN menyadari saat ini tengah terjadi Revolusi Industri keempat (*industry revolution4.0*), yang ditandai dengan meningkatnya peran *cyber physical systems*, *internet* dan *network* dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi internet dan *network* memberikan manfaat pada efisiensi biaya dan waktu, serta memperluas inklusivitas masyarakat dalam mengakses sumber produksi dan jalur distribusi.

   Ekosistem ekonomi digital saat ini terus berkembang. Laporan yang dipublikasikan *Google Temasek SEA e-Conomy Spotlight* memperkirakan bahwa Indonesia memiliki 215 juta pengguna internet pada tahun 2020, hampir setengah dari pengguna internet di Asia Tenggara pada tahun 2020. Fakta ini menjadi alasan mengapa ekonomi digital tumbuh signifikan, terutama perusahaan rintisan (*startup*) bidang *e-commerce*, Lembaga keuangan digital (*financial technology/fintech*), dan layanan *on-demand*.

   Minat orang Indonesia berbelanja lewat *e-commerce* pada Hari Online Nasional (Harbolnas) 11-13 Desember 2017 mencapai Rp4,7 triliun, naik Rp1,4 triliun dari 2016. Pertumbuhan tertinggi aktivitas belanja ternyata di luar Jawa (82%). Harbolnas 2018 ini diprediksi akan mampu mencapi nilai transaksi sekitar Rp7 triliun. Hadirnya ekonomi digital dapat menjadi sarana mengembangkan

usaha, menghadirkan peluang baru bagi berbagai industri terkait, dan membuka peluang lapangan kerja. Pengembangan ekonomi digital membutuhkan dukungan peningkatan infrastruktur, kecepatan internet, dan ketersediaan sumberdaya manusia. Apabila hal ini dapat disediakan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan, maka akan menambah jumlah UMKM yang berbisnis dari *offline* menjadi *online.* Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital akan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan omzet. Dalam konteks perekonomian makro, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital akan mendorong capaian pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Inilah konsep pembangunan inklusif Indonesia.

Ekonomi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, pada tahun 2017 kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat 4 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,61 persen, dan tahun 2018 diperkirakan mencapai 10 persen (Sayekti, 2018). Berdasarkan Laporan *Oxford Economics* tahun 2016, setiap 1 persen peningkatan penetrasi *mobile* diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta USD kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. Namun pada sisi lain, perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan kompetisi dengan pelaku ekonomi tradisional dan juga menciptakan sumber risiko baru bagi perekonomian, yaitu *cyber risk* dan semakin rentannya perekonomian suatu negara terhadap *spillover* dari negara lainnya. BI sebagai *Co-Chair* SLC menyampaikan *overview* mengenai *Digital Innovation and Global Economy* terkait dampaknya pada 4 sektor utama, yaitu

a. *real economy*;
b. *financial services*;
c. *central bank business*;dan
d. *cross border transaction*

Ekonomi digital membawa perekonomian dunia ke arah formasi *connectivity, e-commerce, big data* ekonomi dan *artificial intelligent.* Hampir seluruh sektor prioritas perlindungan konsumen Indonesia

terpengaruhi oleh kehadiran ekonomi digital, yaitu sektor perumahan, listrik dan gas, obat dan pangan, *e-commerce,* jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi, layanan kesehatan, dan sektor barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Untuk itu, lalu lintas data elektronik transaksi perlu segera memperoleh pengaturan yang memadai, terutama pada pengaturan perlindungan data pribadi, sistem transaksi elektronik, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, kebijakan *road map e-commerce*, dan pengaturan dan implementasi 12 agenda Fintech IMF/World Bank di Bali pada bulan Oktober 2018.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dampak positif hadirnya ekonomi digital, namun disisi lain perlu mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan, terutama pada masyarakat yang memiliki keterampilan yang rendah di bidang TIK, UKM yang belum mampu menerapkan sistem teknologi dan informasi, dan keamanan data serta perlindungan konsumen.

4.2.2 Telaah Isu / Kebijakan Nasional

1. Fokus RPJMN 2020-2024 (Arahan RPJP Nasional 2005-2025)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan

Gambar 4. 1
Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024
Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Gambar 4. 2
7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024
Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Dengan bertema dan Agenda Pembangunan "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Bekesinambungan" dari tema tersebut terdapat 7 agenda Pembanguna RPJMN IV Tahun 2020-2024, berikut uraian 7 agenda pembangunan RPJMN ;

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomiuntuk Pertumbuhan yang Berkualitas, peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipicuuntuk tumbuh kebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
   1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemetaan, pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasr dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapatdilakukan melalui:
   1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
   2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
   3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
   4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
   5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanandasar secara merata

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter malalui:
   1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
   2. Peningkatan pelaksanaan perlindungan sosial
   3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
   4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
   5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
   6. Pengentasan kemiskinan
   7. Peningkatan produktivitas dan daya saing

d. Revolusi Mental dan Pembanguna Kebudayaan, revolusi mental sebagai gerakan kebudyaaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
   1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan
   2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan
   3. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasu beragama dan meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas

i. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar, perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomianserta mendorong pemertaan pembangunan nasional. Pemerintah indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
   1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah

2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan
3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
4. Rehabilitasi saranan dan prasarana yang sudah tidak efisien
5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur

j. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan memlalui kebijakan:
   1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
   3. Pembangunan rendah karbon

k. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan teus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
   2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil
   3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
   4. Mempermudah akses terhdap keadilan dan sistem anti korupsi
   5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, polapola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000)

secara nasional. Disamping itu, juga diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;

9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertipikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat.
11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; serta peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui:
   a. operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
   b. pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.
2. Strategi pemerataan melalui:
   a. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan
   b. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Gambar 4. 3
Strategi Pertumbuhan dan Pemertaan Wilayah
Sumber : Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll; pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah:

a. Pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll;

pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan

b. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk: pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya: KI Batulicin, KI Ketapang, KI Buluminung, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Tanah Kuning, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Destinasi Potensial Singkawang-Sentarum, Destinasi Potensial Derawan, serta kawasan lainnya yang Major Project pada wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Major Project Pengembangan Kawasan Metropolitan, yaitu pengembangan wilayah Metropolitan Banjarmasin untuk mengurangi kesenjangan antara KBI dan KTI; (2) Major Project Pengembangan Kota Baru, yaitu pengembangan kota baru PKW Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan; (3) Major Project Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Paloh-Aruk dan Nunukan, termasuk ekonomi kawasan di sekitarnya. Selain itu, guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana

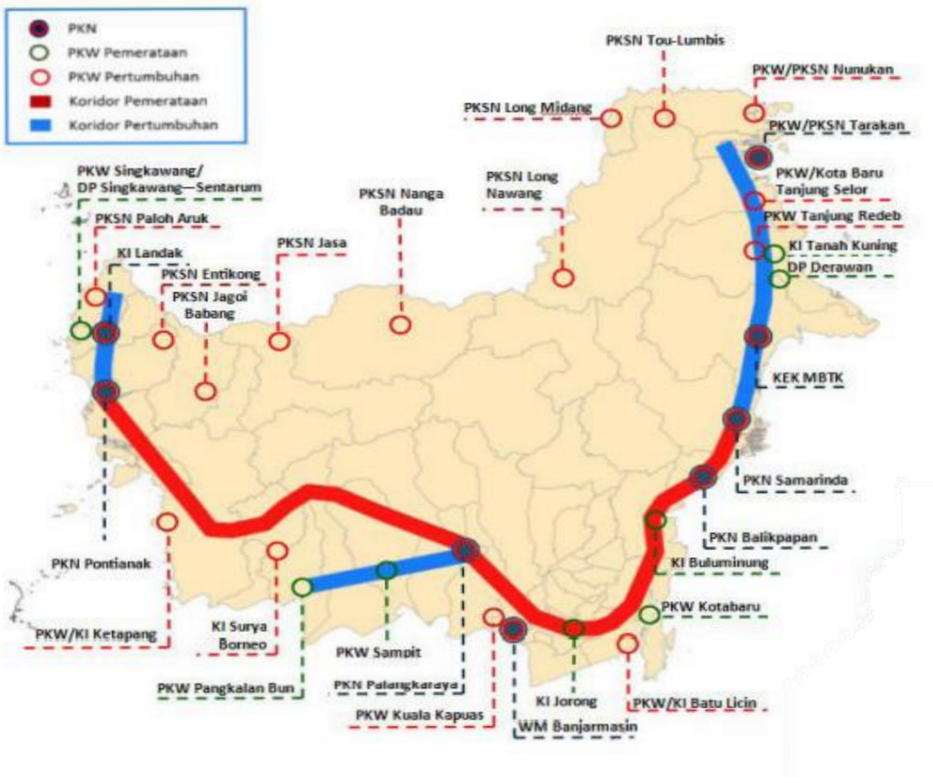

Gambar 4. 4
Peta Pusat Pertumbuhan Kalimantan Barat
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

3. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implikasi diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pada peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya

manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

4.2.3 Telaah Isu / Kebijakan Kabupaten Sanggau

Isu strategis daerah Provinsi dan Kabupaten merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Sanggau dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Sanggau antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dan RPJPD Kabupaten SanggauTahun 2005-2025.

1. **RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**

   Kabupaten Sanggau merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten Sanggau harus sinergi. Untuk itu, untuk mewujudkan sinergitas tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau tetap mengacu pada misi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

   a. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar dapat menjadi tempat

mendarat jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

b. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsipprinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

c. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

e. **Mewujudkan masyarakat yang tertib,** yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

f. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan,** yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2. RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025

Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah dituang RPJPD Kabupaten Sanggau 2005-2025, serta menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan (sustainable development), RPJMD Tahun 2019-2024 yang merupakan RPJMD IV, mengusung tema **"Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagai cermin dari Negara Kesatuan Republik Indonesia".**

RPJMD Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD IV dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah dituang RPJPD Kabupaten Sanggau 2005-2025. Untuk itu, RPJMD Tahun 2019-2024 tetap mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu:

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.
b. Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
c. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
d. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.

e. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
f. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah.
g. Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
h. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.
i. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang memenuhi unsur-unsur utama sebagai berikut:
    1. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
    2. Tegaknya supremasi hukum;
    3. Meningkatnya transparansi;
    4. Peduli pada stakeholders;
    5. Berorientasi pada konsensus;
    6. Meningkatnya kesetaraan;
    7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi;
    8. Meningkatnya akuntabilitas; dan
    9. Mempunyai visi strategis.
j. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

4.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Sanggau dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sanggau

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

KLHS RPJMD Kabupaten Sanggau memuat hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan daerah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hasil analisis terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sanggau yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan alternatif proyeksi, baik tanpa upaya tambahan maupun dengan upaya tambahan guna merealisasikan TPB sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sanggau

Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau dirumuskan pada TPB No. 8 yang terdiri dari isu strategis, alternatif skenario, dan rekomendasi. Terdapat 3 (tiga) isu strategis strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan KLHS Kabupaten Sanggau tahun 2018.

Isu strategis yang pertama yaitu, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Berdasarkan isu tersebut, alternatif skenario yang dijalankan yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja. Sedangkan untuk rekomendasi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

a. Rekomendasi Jangka Pendek
    1. Menyusun masterplan ekonomi daerah
    2. Menyusun perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

3. Pembinaan kemampuan IT industri

b. Rekomendasi Jangka Menengah
   1. Peningkatan kemampuan IT industri

c. Rekomendasi Jangka Panjang
   1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
   2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas IPTEK
   3. Menyelenggarakan bimbingan dalam peningkatan kemampuan teknis

Isu strategi yang kedua yaitu pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Berdasarkan isu tersebut, alternatif skenario yang dijalankan yaitu pelatihan dan pembekalan bagi angkatan kerja. Sementara itu, rekomendasi yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

a. Jangka Pendek:
   1. Menyusun database angkatan kerja
   2. Melakukan perencanaan pengembangan ekonomi

4.2.5 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Sanggau

Mengacu pada analisis terhadap kondisi daerah, isu global, nasional dan provinsi maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Sanggau yang dianggap layak dan relevan untuk dimasukkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019– 2024, sebagai berikut:

1. Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah disamping faktor modal dan teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber kekuatan bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui hasil produktivitas dari peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Pemerintah Kabupaten Sanggau masih fokus pada kualitas pendidikan yang ada saat ini, meskipun berdasarkan data Mean Years of Schooling (MYS) atau rata-rata lama sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan

selama Tahun 2016-2020, akan tetapi masih berada di bawah angka MYS Nasional tetapi mengalami peningkatan dengan MYS Provinsi Kalimantan Barat. MYS Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 7,15 tahun di bawah Nasional 8,10 tahun, untuk perbandingan dengan MYS Provinsi Kalimantan Barat 7,05 Tahun dan MYS Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 7,15 . Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya hampir mencapai kelas satu SLTP sederajat. Sedangkan Expected Years of Schooling (EYS) atau harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau baru mencapai 11,57 Tahun, di bawah EYS Provinsi Kalimantan Barat 12,60 tahun dan EYS Nasional 12,95 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Sanggau diharapkan dapat bersekolah hingga mencapai kelas dua SLTA sederajat.

2. Kualitas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkomitmen untuk meningkatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan. Walaupun jika dilihat dari jenis pusat pelayanan kesehatan, di Kabupaten Sanggau sudah tersedia RSUD Tipe B, RS Swasta, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Balai Kesehatan Masyarakat dan Pos Kesehatan Desa serta Posyandu Pratama, Madya, Purnama, maupun Posyandu Mandiri. Akan tetapi, dari aspek kualitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan. Sedangkan berdasarkan data bahwa untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan jumlah, terutama pada dokter umum, bidan, perawat. Jumlah tenaga kesehatan paling banyak di Kabupaten Sanggau adalah perawat, tetapi ada beberapa tenaga kesehatan yang mengalami penurunan jumlah yaitu dokter gigi, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan dan nutrisionis. Jumlah tenaga kesehatan berimplikasi terhadap rasio jumlah penduduk dan jumlah rumah sakit. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, agar jumlah tenaga kesehatan setiap waktu

posisinya ideal antara tenaga yang dibutuhkan dengan pelayanan yang diberikan.

3. Kualitas Infrastruktur

Jalan kondisi baik dengan permukaan berupa aspal ataupun beton merupakan kondisi ideal yang diharapakan guna mendukung kelancaran akses kendaraan, orang dan barang. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa terdapat pertambahan jalan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Realisasi persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 meningkat dari 77,44 km menjadi 45,08 km dari tahun 2018. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang meningkat selaras dengan jalan dengan kondisi rusak berat yang justru mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Jembatan merupakan hal yang sangat penting guna mendukung kelancaran akses antarwilayah di Kabupaten Sanggau mengingat topografi Kabupaten Sanggau yang dilewati oleh sungai-sungai besar dan kecil. Sedangkan jumlah jembatan dan kondisi berdasarkan administrasi pemerintahan sebanyak 292 unit jembatan di Kabupaten Sanggau. Jumlah jembatan dalam kondisi baik bertambah sebanyak 5 unit, dari 145 unit di tahun 2016 menjadi 150 unit pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan/pemeliharaan jembatan yang kondisi rusak berat oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebanyak 5 unit di tahun 2016. Untuk persentase jembatan dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan menjadi 49,14% di tahun 2017, sedangkan jaringan irigasi kondisi baik mengalami peningkatan, dari 72,14% menjadi 74,88% di tahun 2017.

Untuk distribusi saluran listrik di Kabupaten Sanggau masih belum merata. Asumsi tersebut didasarkan pada data jumlah desa yang belum mendapatkan saluran listrik Desa di Kabupaten Sanggau yang belum mendapatkan saluran listrik pada tahun 2016 adalah sebanyak 34 desa, tahun 2017 sebanyak 32 Desa dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 30 desa yang belum mendapatkan saluran listrik. Selain itu, terdapat 10 desa yang mendapatkan saluran listrik namun dengan waktu yang terbatas.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai "poverty is pronounced deprivation in well-being" yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, semakin banyak barang yang dikonsumsi berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang. Tingkat kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi). Kemampuan akses sumber daya yang tersedia ini dapat diukur melalui jumlah pendapatan ataupun pengeluaran seseorang.

Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Selain itu indikator kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan dalam memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan data, bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau tahun 2020 adalah 346.983 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 471.200 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berjumlah 21,16 ribu jiwa atau sekitar 4,46 persen dari jumlah penduduk pada tahun yang sam. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan mulai dari dari tahun 2018 sebesar 1,05 dari 3,52 persen pada tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan perlunya fokus penanganan oleh pemerintah terhadap isu pengangguran di Kabupaten Sanggau.

5. Kualitas Pelayanan Sosial dan Gender

Persentase penduduk yang memilik kartu sehat mengalami peningkatan dari tahun 2017, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin tinggi dalam memberikan akses layanan kesehatan terutama layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau. Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Tahun 2014 – 2017 berjumlah 12.000 orang tiap tahunnya berdasarkan kuota kesepakatan antara Pemerintah Kab. Sanggau dengan BPJS Kesehatan (BPJS Cabang Sintang) hal ini menyesuaikan anggaran Jamkesda yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah peserta PBI Jamkesda sampai dengan bulan Desember 2018 dari 12.000 menjadi 13.247 peserta PBI. Lebih lanjut di tahun 2019 terjadi penambahan peserta sebanyak 374 sehingga menjadi 13. 621 peserta PBI yang dibiayai oleh APBD. Tahun 2020 kembali mengalami penambahan jumlah peserta PBI menjadi 14.000 orang peserta. Dari aspek kehidupan sosial masyarakat, persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai 4,32%. Jumlah ini menurun dari tahun 2016 yang mencapai 5,31%. Sedangkan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

6. Wilayah Perbatasan dan Kawasan Strategis

Pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan yang menggambarkan kondisi umum Indonesia, melalui percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat. Selain itu, pengembangan kawasan strategis dilakukan dengan mengacu pada kawasan strategis yang telah ditetapkan secara

nasional dan memperhatikan kawasan strategis yang ditetapkan oleh provinsi maupun kabupaten. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini kewenangan pengelolaan perbatasan berada pada pemerintah pusat. Namun demikian pemerintah daerah juga dituntut dapat berbuat dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan yang berada di wilayah perbatasan. Setiap gerak langkah pembangunan yang dilaksanakan tentu akan berdampak kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu adanya integrasi antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sehingga dapat membuat suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan.

7. Good Governance, Penegakan Regulasi dan Penguatan Reformasi Birokrasi

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 memberikan indikasi kuat perubahan arah kebijakan dan pendekatan reformasi birokrasi nasional. Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah pembentukan infrastruktur birokrasi nasional yang ditandai dengan terbitnya sejumlah undang-undang (UU) fundamental aparatur negara beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berangkat dari 7 program prioritas dalam RPJMN tahun 2019-2024 salah satunya yaitu meningkatkan Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dimana negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Arah kebijakan dapat berupa penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan, penerapan open government, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, penerapan

manajemen aparatur sipil negara, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan ini ditempuh untuk menciptakan birokrasi yang berbasis kinerja (performance-based bureaucracy). Sehingga reformasi pada birokrasi pemerintah daerah juga harus sejalan dengan gagasan dalam RPJMN 2019-2024 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Gagasan tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pemulihan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sejak gelombang besar desentralisasi dimulai pada Tahun 2001, sebagian besar urusan pelayanan publik sehari-hari diatur dan diurus oleh aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu, relevansi prioritasi reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menjadi semakin tinggi, ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

8. Pengelolaan dan Pemanfaaatan Sumber Daya Alam Yang Memperhatikan Keselarasan Dengan Lingkungan Hidup

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan

dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang.

Ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum, sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Walaupun demikian, usaha pemanfaatan sumber daya alam tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan Sumber daya alam, mutlak dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan, tetapi dilakukan dengan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

9. Pandemi Covid-19

Terjadinya kejadian luar biasa di seluruh wilayah yaitu wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun di daerah menunjukkan perkembangan meningkat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk

dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.

Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau dari 6 (enam) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini ditegaskan kembali dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2021 yang merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19, dimana ada 2 (dua) agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun kedua pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Sanggau Maju dan Terdepan. Sehingga prioritas pembangunan dari 6 (enam) prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD menjadi 7 (tujuh).

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan daerah akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran/IKU, serta indikator IKK tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini. Hubungan antara arah Pembangunan RPJMD dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah sesuai Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Hubungan Arah Pembangunan RPJMD dan Isu Strategis
Tahun 2019-2024

Arahan RPJMD IV (2019-2024)	Isu Strategis Kabupaten Sanggau
1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil dan sejahterasebagai beranda depan Negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan yang lestari. 2. Pengembangan sumber daya manusia,pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, meningkatnya kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari	1. Kualitas pendidikan 2. Kualitas kesehatan 3. Kualitas infrastruktur 4. Kemiskinan dan pengangguran 5. Kualitas pelayanan sosial dan gender 6. Wilayah perbatasan dan kawasan strategis 7. *Good Governance,* penegakan regulasi dan penguatan reformasi birokrasi 8. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup 9. Bencana pandemi *Covid-19*

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai "**Rumah Kita**" untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan "**Bekerja dengan Hati**" serta semangat "***Dompu***" dan "**Gotong Royong**". Sanggau yang maju dan terdepan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya "merdeka". Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu penguatan kepada setiap pemangku kepentingan semangat patriotisme "**SABANG MERAH"** (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) *Brand Images,* yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

5.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 merupakan implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu :

> Sanggau Maju dan Terdepan

Maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

Terdepan, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana

dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:

1 Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2 Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi

kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua bidang pembangunan.

3 Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi yang selaras dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusisosial karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat. Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan maka reforma agraria yang dapat meningkatkan legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan basis perhutanan sosial mutlak dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Kabupaten Sanggau akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sanggau untuk maju dan terdepan. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, Tangguh, dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi.

4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultansi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

5 Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia yang berkualitas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten Sanggau adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

7 Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

8 Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau

yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sanggau, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau sampai dengan tahun 2024.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau Periode 2019-2024 selain sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, juga dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur

penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 (sembilan) tujuan dan 26 (dua puluh enam) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau disajikan pada Tabel 5.1.

Pada Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 terdapat 8 misi kepala daerah yang ingin dicapai. Dari 8 (delapan) misi kepala daerah, terdapat 2 (dua) misi yang dapat dikelompokkan menjadi satu dikarenakan terdapat kesamaan tujuan misi yaitu pada misi ke 1 dan misi ke 8. Adapun misi ke 1 yaitu membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun misi ke 8 yaitu meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Persamaan pada kedua misi tersebut yaitu pada indikator tujuan yang sama-sama mencantumkan indeks infrastruktur sehingga akan dilakukan pengelompokkan misi 1 dan misi 8 dengan tidak menghilangkan salah satu dari kedua misi tersebut.

Selain dilakukan pengelompokkan misi, pada perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 juga dilakukan beberapa perubahan pada indikator tujuan, indikator sasaran serta perubahan target capaian kinerja Kabupaten Sanggau pada tahun 2021-2024. Dilakukannya perubahan ini didasarkan oleh penyesuaian dengan peraturan dan pedoman terbaru serta isu permasalahan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sanggau sehingga dilakukannya perubahan-perubahan tersebut.

Tabel 5.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

Visi: Sanggau Maju dan Terdepan

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
1.	Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	**Misi 1** Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan **Misi 8** Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	**Tujuan 1.1** Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur		**Indeks Infrastruktur**	35,64	63,88	34,64	41,74	43,50	45,17	46,42	46,42
				Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	35,64	47,58	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75	44,75
					Persentase Jalan Poros Desa dan Perkotaan dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	57,71	58,98	59,35	60,19	61,03	61,87	62,71	62,71
					Persentase Kemantapan Jalan di wilayah perbatasan antar negara	45,98	47,58	68,16	49,18	50,78	52,38	53,98	53,98
					Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat	85,50	75,00	81,50					
					Persentase Prasarana perhubungan darat				65,00	76,00	86,00	92,00	92,00
					Persentase layanan telekomunikasi	65,30	61,92	66,65	66,82	66,90	67,00	67,02	67,02
				Sasaran 1.1.2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	Rasio rumah layak huni	0,77054	0,1343	0,77143	0,1348	0,1353	0,1359	0,1363	0,1363
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	75,62	75,40	80,79					
					Rasio permukiman layak huni	N/A	0,55	0,975					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	15,50	80	15,74					
				Sasaran 1.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara	Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara	62,84	53,00	67,99	49,18	50,78	52,38	53,98	53,98
			Tujuan 1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	59,40	60,30	60,11	60,50	60,54	60,58	60,66	60,66
				Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	48,18	49,02	50,00	50,02	50,52	51,02	51,52	51,52
					Indeks kualitas udara	91,14	93,66	92,03	93,67	93,68	93,69	93,70	93,70
				Sasaran 1.2.2 Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan	44,02	43,75	43,75	43,47	43,20	42,92	42,74	42,74
				Sasaran 1.2.3 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Bermartabat dan Berdaya Saing		**Tujuan 2.1** Terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas		**Indeks Pembangunan Manusia**	65,67	66,10	65,77	66,33	66,85	67,23	67,75	67,75
				Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	99,21	99,45	N/A					
					Harapan lama sekolah	11,56	11,97	11,57	11,67	11,77	11,87	11,97	11,97
					Rata-rata lama sekolah	6,95	7,16	7,15	7,15	7,21	7,27	7,33	7,33
					Jumlah pengunjung perpustakaan	1.897	3000	1.656					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
				Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	71,35	70,94	71,42	72,03	72,64	73,26	73,88	73,88
					Jumlah prestasi olahraga	5	6	0					
					Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1,66	1,54	1.34	1,32	1,30	1,28	1,28
				Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	99,2	96,9	99,85	96,97	96,97	96,97	96,97	96,97
					Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	8.410		8.245	8.381	8.518	8.654	8.791	8.791
				Sasaran 2.1.4 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80,55	61,35	69,88					
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	61,35	80,55	81,04	81,11	81,23	81,34	81,47	81,47
3	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal		**Tujuan 3.1** Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat		**1. Pertumbuhan ekonomi**	4,3	5,23	0,7	3,54	3,62	3,71	3,79	3,79
					2. Indeks Gini	0,33	0,314	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
					3. Angka Kemiskinan	4,57	4,26	4,46	4,36	4,26	4,16	4,07	4,07
					4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,07	3,23	3,52	3,21	3,20	3,20	3,20	3,20
					5. Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	40,810		41,898	44,557	46,345	48,132	49,920	49,92
				Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	2,77	2,96	2,85					
					Kontribusi sektor pertanian (tanaman hortikultura) terhadap PDRB	0,7	0,58	0,72					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
					Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0,49	0,46	0,5					
					Kontribusi sektor pertanian (perkebunan) terhadap PDRB	21,32	5,57	21,35					
					Kontribusi sektor pertanian (peternakan) terhadap PDRB	1,45	1,54	1,47					
					Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	5.646.388		6.405.029	6.911.466	7.457.947	8.047.637	8.683.953	8.683.953
					Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19,38	0,2	19,32	19,27	19.22	19.18	19,18	19,18
					Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,1	17,69	12,13	12,15	12,18	12,2	12,2	12,2
					Persentase koperasi aktif	58,87	57,8	59,64					
					Peningkatan status usaha mikro menjadi usaha kecil	2	2	3					
					Pertumbuhan kunjungan wisata	261	42,8	42,8					
					Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	370.550		288.397	292.973	297.621	302.342	307.139	307.139
					Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	7.555	7631	7.891					
				Sasaran 3.1.2 Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.juta)	8.798.929,29	8.518.573,60	8.679.019,91					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
					Pertumbuhan investasi PMDN	8,5		9,00	8,85	5,00	5,50	5,50	5,50
				Sasaran 3.1.3 Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,89	3,23	2,68					**Menjadi indikator tujuan**
					Tingkat partisipasi angkatan kerja				68,31	67,55	66,79	66,02	66,02
					Persentase wirausaha muda	4	11	11					
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,23		0,27	0,3	0,33	0,37	0,4	0,4
				Sasaran 3.1.4 Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah	Pertumbuhan kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat	0	20	10					
					Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Luas wilayah pengakuan hutan adat (ha)	2.840,0	3.022,09	2.840,0					
				Sasaran 3.1.5 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,2	73,6	71,6					
					Penguatan cadangan pangan	80	80	180					
					Indeks Ketahanan Pangan	73,63		78,2	80,63	82,50	84,04	85,45	85,45
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik		4.1. Terwujudnya kualitas tata kelola		**Indeks Reformasi Birokrasi**	48,14	70	50,03	52	57	61	66	66
				Sasaran 4.1.1 Meningkatnya	Predikat akuntabilitas kinerja	C	CC	C					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
			pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik	akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	47,41		50,60	50	57	66	71	71
					Kategori Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi					
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0036		3,0036	3,1200	3,2200	3,4000	3,4200	3,4200
					Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	Level 3	3,00	3,30	3,60	3,90	3,90
					Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	93,645	100	95,5					
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	77,8					
					Persentase pengelolaan arsip pola baru	5	10	10					
					Cakupan data statistik sektoral Kabupaten Sanggau dalam satu data	36	100	49					
					Tingkat fasilitasi pelayanan sesuai ketugasan Sekretariat DPRD	83,02	100	100,00					
				Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,10	6,21	7,75	7,06	7,06	7,06	5,59	5,59
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,778		1,035	1,167	1,170	1,385	1,585	1,585

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
				Sasaran 4.1.3 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks profesionalitas ASN	12	76,00	47,75					
					Rasio ASN	0,011		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
				Sasaran 4.1.4 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,36	1,70	2,03	2,05	2,10	2,30	2,40	2,40
					Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Non Level	Level I	Level I					
					Indeks kepuasan masyarakat	88,74	80,00	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
5.	Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmonis, Religius, Berbudaya dan Demokratis		5.1. Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang tertib, tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya		**Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi**	96	20	100					
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	n/a	65,00	65,00	69,00	72,00	75,00	80,00	80,00
				Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya dalam perilaku kehidupan sehari hari yang produktif bagi pengembangan daerah	Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	100,00	60,00	127,00					
					Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	96	20	100					
				Sasaran 5.1.1 Meningkatnya	Cakupan konflik SARA yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
				kualitas kehidupan sosial beragama	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,00207	0,28491	0,00205	0,00203	0,00201	0,00199	0,00199
6.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		6.1 Terwujudnya kapastian dan penegakan supremasi hukum, serta perlindungan masyarakat		**Konflik Sosial (jumlah)**	0	0	0					
					Indeks ketentraman dan Ketertiban	84,15	80	84,88	88,22	90,72	94,05	94,05	94,05
				Sasaran 6.1.1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketentraman dan Ketertiban	84,15	80	84,88					
				Sasaran 6.1.1 Meningkatnya ketentraman masyarakat	Indeks Ketentraman Masyarakat (IKM)	89,80		83,57	91,45	91,45	93,10	93,10	93,10
				Sasaran 6.1.2 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase penegakan PERDA dan PERKADA	80	85	62,5					
				Sasaran 6.1.2 Meningkatnya Ketertiban Umum	Indeks Ketertiban Umum (IKU)	78,50		86,20	85,00	90,00	95,00	95,00	95,00
				Sasaran 6.1.3 Meningkatnya kualitas	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	3,55	5,92	13,02					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
				kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase penanganan bencana daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
					Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	90	64,71					
7.	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan		7.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang optimal		**Jumlah desa mandiri**	8	19	8					
					Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6181		0,6441	0,66272	0,67072	0,67889	0,68943	0,68943
				Sasaran 7.1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	3,067	11,66	3,55					
				Sasaran 7.1.1 Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Ketahanan Sosial	0,7315		0,7623	0,7843	0,7938	0,8034	0,8159	0,8159
					Indeks Ketahanan Ekonomi	0,4959		0,5168	0,5317	0,5381	0,5447	0,5531	0,5531
					Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	0,6270		0,6534	0,6723	0,6804	0,6887	0,6994	0,6994
				Sasaran 7.1.2 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	59	65,6	68	75,5	85,3	95,1	100	100
8.	Meningkatkan Percepatan Pembangunan		8.1. Terwujudnya peningkatan		**Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara**		53,00	85,01					

No	MISI	Penggabungan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian Perubahan RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
						Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
	Wilayah Perbatasam yang Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat		sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara	**Sasaran 8.1.1** Meningkatnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antarnegara	Persentase rumah tangga pengguna listrik di wilayah perbatasan antarnegara	68,5	70,45	79,66					
					Persentase jalan kabupaten dan jalan non status dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di wilayah perbatasan antarnegara	62,84	47,58	80,03					
					Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara	70	70	75					
					Persentase ketersediaan Puskesmas dan Pustu di wilayah perbatasan antarnegara	53,33	70	53,33					

BAB VI
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019-2024

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (empat) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan daerah lima tahunan ke-4 dari RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Sanggau yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera sebagai beranda depan negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya

kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari. Pada perubahan RPJMD Sanggau tahun 2019-2024, pembangunan daerah periode 2019-2024 juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, meningkatnya kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, serta penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari.

Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum; terciptanya rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Pembangunan pendidikan dilakukan sebagai kelanjutan program pembangunan pada tahap sebelumnya dengan terus meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; semakin meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal iptek.

Pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks kesehatan (umur harapan hidup). Hal ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau dengan didukung oleh teknologi, terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdaya guna, terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin meningkat.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah. Pengembangan sektor jasa dan perdagangan semakin ditingkatkan sebagai optimalisasi potensi daerah menuju Kabupaten Sanggau yang berdaya saing tinggi. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ini diarahkan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana dan prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum, demokrasi dan budaya politik yang seimbang, ketentraman dan ketertiban semakin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Pembangunan infrastruktur daerah pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, lebih diarahkan pada pemeliharaan dan pemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai dan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Pengembangan infrastruktur yang potensial, ditandai oleh:

1. adanya pengembangan infrastruktur transportasi pada wilayah yang pertumbuhannya cukup pesat;
2. meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dengan memanfaatkan energi alternatif/energi terbaharukan; dan
3. meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi baik untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan informasi lainnya.

Pembangunan bidang penataan ruang diarahkan dalam rangka terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan capaian perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan terciptanya keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan

melalui partisipasi stakeholders dan penegakan aturan. Pada tahap ini, diharapkan Kabupaten Sanggau sudah berkembang menjadi daerah yang maju dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, dan pada tahun 2025 yang merupakan tahun terakhir RPJPD dan RPJMD ke-4 Kabupaten Sanggau, sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD dan RPJPD tahap berikutnya.

Adapun pilihan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Sanggau

VISI : SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
MISI 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		
1.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	1.1.1. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar
	1.1.2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	
1.2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	1.2.1. Meningkatnya kualitas air dan udara	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan
	1.2.2. Meningkatnya tutupan lahan	
	1.2.3. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 2: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing		
2.1. Terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas	2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
	2.1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga
	2.1.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS
	2.1.4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah
MISI 3: Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal		
3.1. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir
	3.1.2. Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan kualitas layanan investasi
	3.1.3. Menurunnya angka pengangguran	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak
	3.1.4. Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah	Peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat

VISI : SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
	3.1.5. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat
MISI 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		
4.1. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan public	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
	4.1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
	4.1.3. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	
	4.1.4. Meningkatnya kualitas layanan publik	
MISI 5: Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis		
5.1. Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang tertib, tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya	5.1.1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama
MISI 6: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat		
6.1. Terwujudnya kapastian dan penegakan supremasi hukum, serta perlindungan masyarakat	6.1.1. Meningkatnya ketentraman masyarakat	Peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat
	6.1.2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum
	6.1.3. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Penguatan sistem dan manajemen bencana daerah
MISI 7: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan		
7.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang optimal	7.1.1. Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
	7.1.2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa
MISI 8: Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat		
8.1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara	8.1.1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antarnegara	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan sebagai instrumen untuk menentukan program prioritas yang hendak diimplementasikan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Sanggau setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Melalui arah kebijakan, kondisi ideal kebijakan mulai dari tahapan perencanaan hingga sampai pada tahapan pelaporan terwujud siklus yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan **Sanggau menjadi rumah kita bersama yang bermartabat menuju Sanggau Maju dan Terdepan**. Tema pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam Tabel 6.2:

Gambar 6. 1
Tema Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024

Berdasarkan tema di atas maka arah kebijakan dijabarkan lebih lanjut dalam tabel waktu sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Dengan adanya penentuan horizon waktu maka susunan arah kebijakan secara logis akan dilaksanakan secara bertahap dimana suatu arah kebijakan dapat mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan pada periode RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 6. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sanggau 2019-2024

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Membangun dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas meliputi pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, perhubungan darat, dan telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni yang memenuhi komponen kelayakan terhadap sanitasi, air bersih dan listrik berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
2	Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup		√	√			
		Menanggulangi kerusakan, rehabilitasi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√
		Menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√
3	Penegakan rencana tata ruang melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang	Menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang		√	√	√		
		Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√	√
4	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan minat sekolah sejak dini dengan penyediaan 1 PAUD 1 Dusun		√	√	√		
		Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan literasi melalui budaya kegemaran membaca melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan taman bacaan		√	√	√	√	
5	Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan Tipe B, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya.	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	kesehatan yang berkualitas dan pengembangan budaya berolahraga	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya secara merata	√	√	√	√	√	
		Memperkuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	√	√	√			
		Mengembangkan budaya berolahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan prestasi olahraga		√	√	√		
6	Peningkatan efektifitas penanganan PMKS	Meningkatkan ketersediaan data PMKS terpilah yang valid dan komprehensif	√	√				
		Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan	√	√	√	√	√	√
7	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang		√	√	√	√	√
		Meningkatkan pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, ekspoitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya		√	√	√	√	√
8	Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah		√	√	√	√	
		Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir		√	√	√	√	
		Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
		Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif		√	√	√		
		Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil		√	√	√	√	√
		Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah			√	√	√	
		Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata		√	√	√		
9	Peningkatan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan ketersediaan data potensi investasi yang valid dan *up to date*	√	√	√	√	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dan kualitas layanan investasi	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memberi kepastian peruntukan lahan yang diinginkan calon investor sesuai dengan rencana penggunaan lahan	√	√	√	√		
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada calon investor melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu	√	√	√	√	√	√
10	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi serta peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha		√	√	√	√	√
		Meningkatkan informasi pasar kerja yang andal	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan kualitas pemuda dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi untuk menumbuhkan wirausaha muda	√	√	√			
11	Peningkatan fasilitasi legalisasi tanah masyarakat	Fasilitasi proses sertifkasi hak atas tanah masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan, untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan		√	√	√		
		Meningkatkan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat			√	√	√	√
		Meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha masyarakat dengan basis perhutanan sosial dan kemitraan			√	√	√	√
12	Peningkatan sistem ketahanan pangan mandiri dan berkelanjutan serta perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat	Mengingkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan penganekaragaman, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan		√	√	√	√	√
13	Penguatan implementasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas	Memperkuat manajemen kualitas layanan dan penerapan inovasi dalam pelayanan publik, antara lain pembentukan Mal Pelayanan Publik dan Sentra Pelayanan Pemberdayaan Terpadu	√	√	√	√	√	√
		Mendorong percepatan pembangunan kecamatan, melalui: (1) prakarsa pemekaran kecamatan, (2) prakarsa pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dan (3) prakarsa pengembangan kecamatan sebagai: (a) pusat data dan informasi, (b) pusat pelayanan dasar, (c) pusat pemberdayaan masyarakat,		√	√	√		

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(d) pusat inovasi dan kewirausahaan, (e) pusat pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta (f) pusat pertumbuhan ekonomi						
		Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan sistem manajemen kinerja yang efektif, andal, dan didukung dengan implementasi sistem integritas yang mapan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat proses (tatalaksana) dan tepat struktur		√	√			
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang andal, efektif dan akuntabel	√	√	√	√	√	√
		Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi dalam bentuk integrasi portal pelayanan publik (misalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan, pengaduan pelayanan publik, dan sebagainya) dan integrasi portal pelayanan administrasi pemerintahan (misalnya kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kearsipan, dan sebagainya)			√	√	√	√
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah			√	√	√	√
		Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya serta penyediaan sarana dan prasarana.		√	√	√	√	
14	Peningkatan toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama	Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama bagi para pemeluknya	√	√	√	√	√	√
		Optimalisasi fungsi Forum Kerukunan Umat Beragaman (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman	√	√	√	√	√	√
15	Peningkatan upaya pencegahan dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan manajemen dan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	√	√	√	√	√	√
16	Peningkatan kesadaran dan peran	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif		√	√	√		

No	Strategi	Arah Kebijakan	Pemetaan Waktu					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	serta masyarakat dalam penegakan hukum	menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.						
17	Penguatan sistem dan manajemen bencana daerah	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana		√	√	√	√	√
		Memantapkan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh masyarakat		√	√	√	√	√
18	Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan mengedepankan budaya gotong rotong	√	√	√	√	√	√
		Optimalisasi peran BUMDes menuju desa mandiri		√	√	√		
		Prakarsa pemekaran desa		√	√	√		
19	Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan kecakapan aparatur pemerintahan desa dalam pengadministrasian data desa, perencanaan pembangunan desa, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa	√	√	√			
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa	√	√	√	√	√	√
20	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara melalui pendekatan kesejahteraan	Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pengelola perbatasan antarnegara dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar	√	√	√	√	√	√

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2019-2024. Prioritas pembangunan daerah harus mengacu baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global; Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM; Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai

nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

VISI

> ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian"***

MISI

Gambar 6. 2
Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020-2024

Berkaitan dengan 5 (lima) arahan utama Presiden tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan

nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan teransformasi pelayanan publik

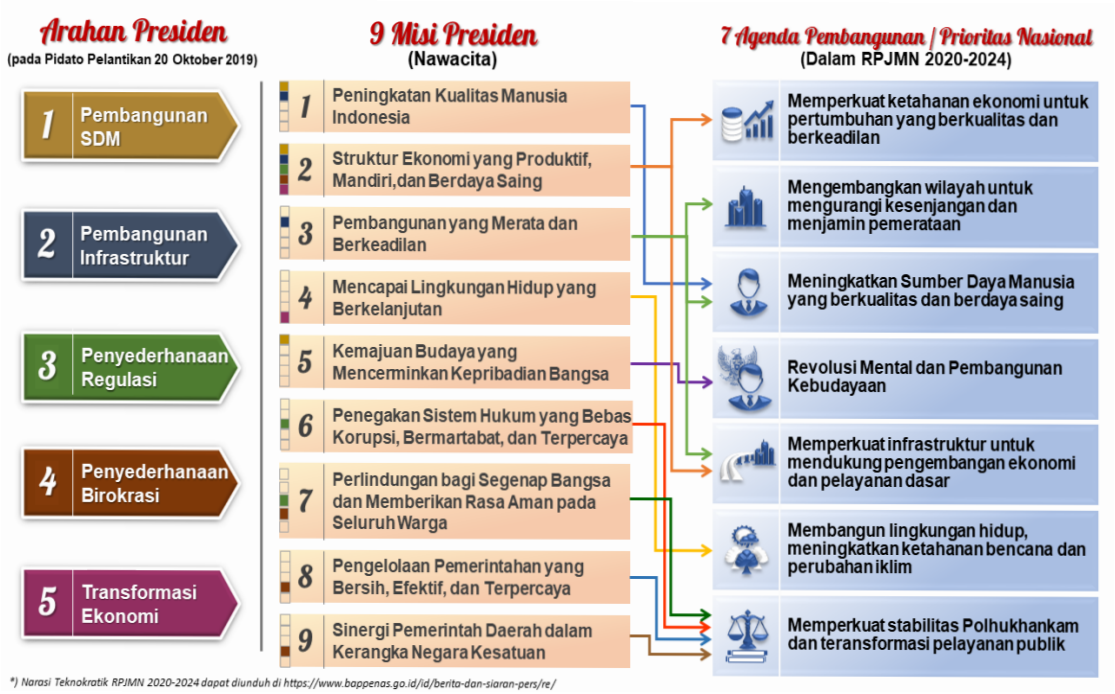

Gambar 6. 3
Arahan dan Misi Presiden serta Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimaksud maka dirumuskan Prioritas Pembangunan yang berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, agenda prioritas yang akan dilaksanakan, untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan pada lima tahun kedepan, terdapat 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan;
4. Meningkatnya kualitas SDM;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah; dan
6. Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Terdapat 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 meliputi:

Gambar 6. 4
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2024

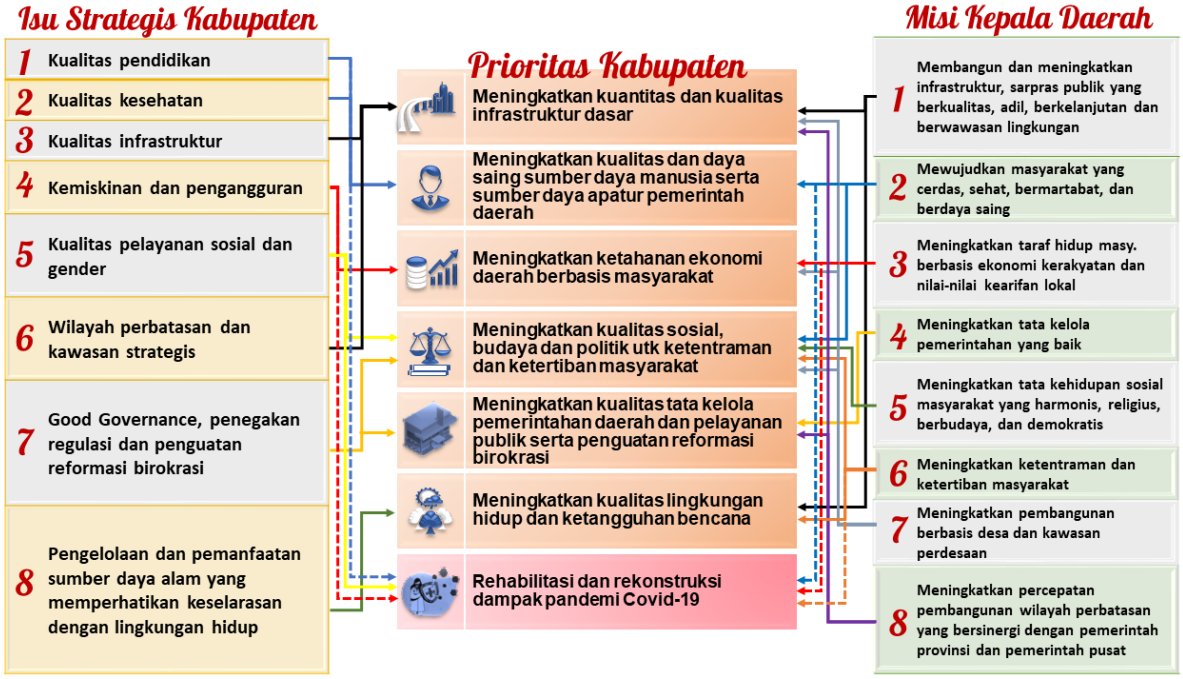

Gambar 6. 5
Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis dan Misi Kepala Daerah

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Program Pengembangan Perumahan
   - Program Kawasan Permukiman
   - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
   - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)
   - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

c. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
   - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   - Program Pengelolaan Pelayaran

d. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan informatika
   - Program Informasi dan Komunikasi Publik
   - Program Aplikasi Informatika

e. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
   - Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
   - Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
   - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya apatur pemerintah daerah

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
   - Program Pengelolaan Pendidikan
   - Program Pengembangan Kurikulum
   - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   - Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
   - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

e. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

f. Kepegawaian
- Program Kepegawaian Daerah

g. Pendidikan dan Pelatihan
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

h. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- Program Perencanaan Tenaga Kerja

3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis masyarakat

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
   - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   - Program Penanganan Kerawanan Pangan
   - Program Pengawasan Keamanan Pangan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
   - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
   - Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
   - Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
   - Program Penetapan Tanah Ulayat
   - rogram Pengelolaan Tanah Kosong
   - Program Penatagunaan Tanah

d. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   - Program Pengembangan UMKM

e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
   - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   - Program Promosi Penanaman Modal
   - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

f. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
   - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

j. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

k. Sekretariat Daerah
- Program Perekonomian dan Pembangunan

4. Meningkatkan kualitas sosial, budaya dan politik untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat

a. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

b. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

d. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

e. Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik serta penguatan reformasi birokrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Program Pengelolaan Izin Lokasi
- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

c. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

d. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
   - Program Pelayanan Penanaman Modal
   - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

e. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
   - Program Perizinan Usaha Pertanian

f. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
   - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

g. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
   - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

h. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Program Pendaftaran Penduduk
   - Program Pencatatan Sipil
   - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Program Pengelolaan Profil Kependudukan

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Program Penataan Desa
   - Program Peningkatan Kerjasama Desa
   - Program Administrasi Pemerintahan Desa
   - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

j. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
   - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

k. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
   - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

l. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
   - Program Pembinaan Perpustakaan
   - Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
   - Program Pengelolaan Arsip
   - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   - Program Perizinan Penggunaan Arsip

m. Sekretariat Daerah

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

n. Sekretariat DPRD
   - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

o. Perencanaan
   - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

p. Keuangan
   - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

q. Penelitian dan Pengembangan
   - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

r. Pengelolaan Perbatasan
   - Program Pengelolaan Perbatasan

s. Inspektorat Daerah
   - Program Penyelenggaraan Pengawasan
   - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

t. Kecamatan
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik daerah yang memiliki risiko bencana sedang ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah di dalam Perubahan RPJMD 2019-2024.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   - Program Penanggulangan Bencana
   - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

b. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
   - Program Penanganan Bencana

c. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
   - Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   - Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
   - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   - Program Pengelolaan Persampahan

7. Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi Covid-19

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
   - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Program Penanganan Kerawanan Pangan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

d. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
   - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

e. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
   - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

f. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

g. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
   - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

h. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   - Program Penanggulangan Bencana

i. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
   - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   - Program Penanganan Bencana

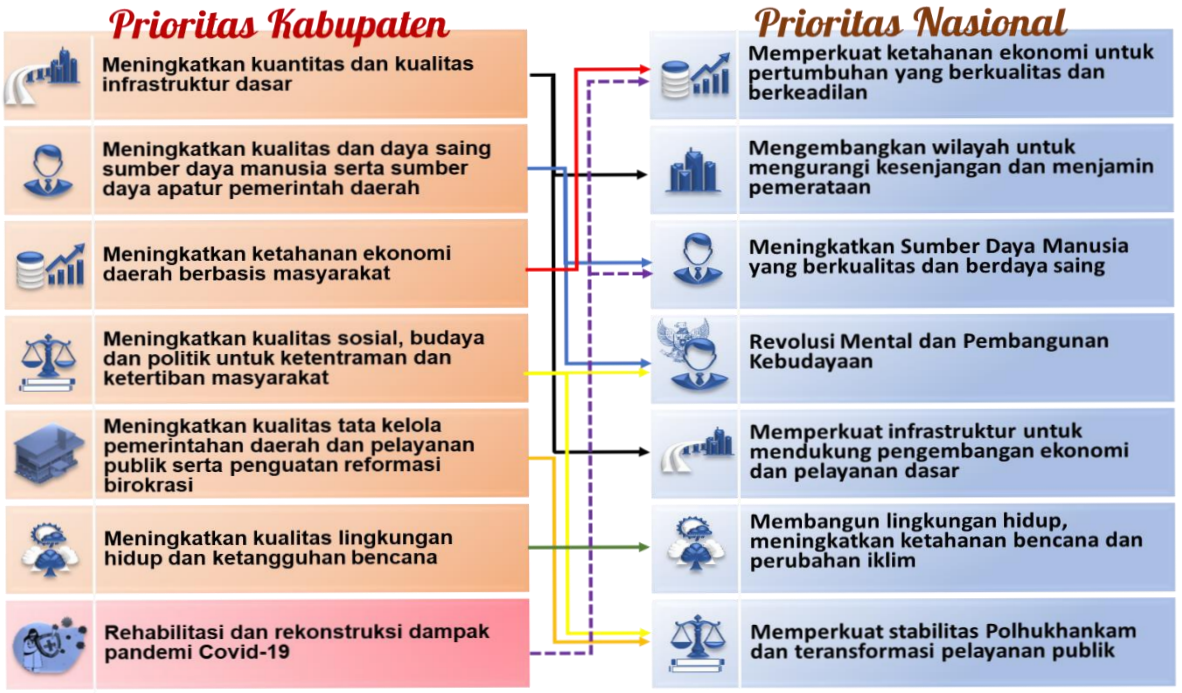

Gambar 6. 6
Hubungan Prioritas Kabupaten Sanggau dengan Prioritas Nasional

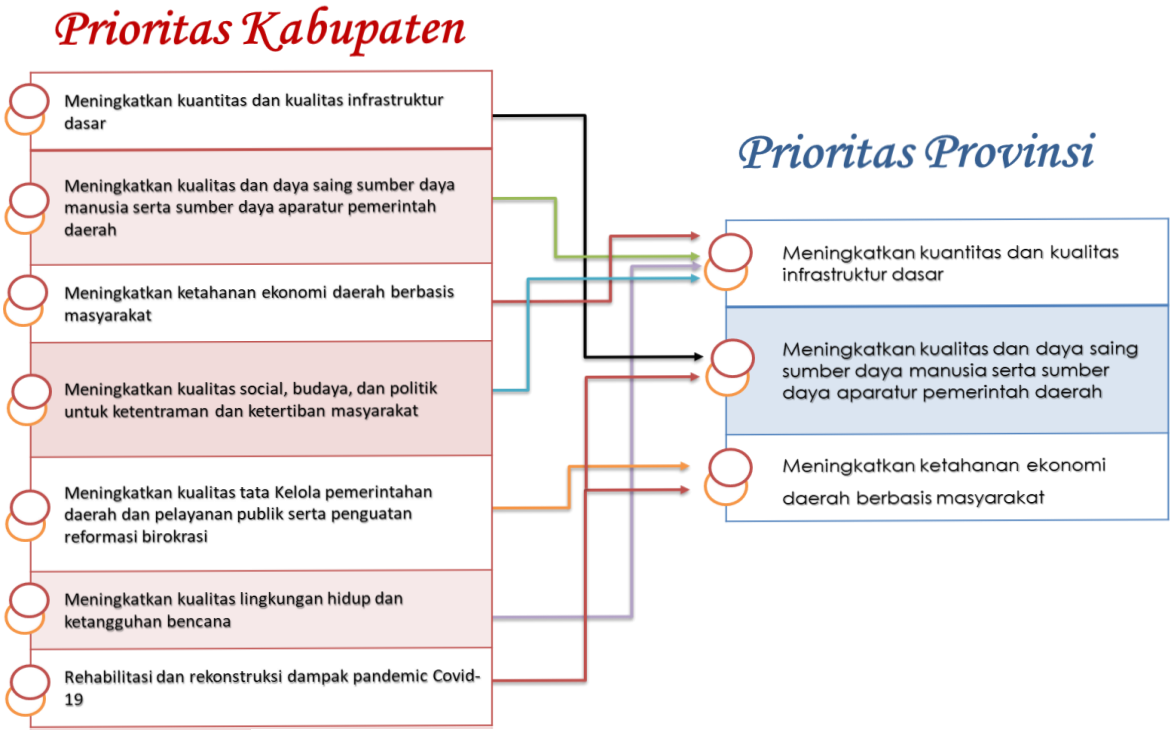

Gambar 6. 7
Hubungan Prioritas Kabupaten Sanggau dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Barat

6.4. Program Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama lima tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu akhir periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode 2019-2024. Penyajian daftar program pembangunan daerah berdasarkan sasaran, agar dapat terpetakan bahwa setiap sasaran dilaksanakan atau akan dicapai dengan program apa saja. Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Sanggau dikelompokkan kedalam 2 (dua) periode pelaksanaan, yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020, dan Tahun 2021 sampai Tahun 2024. Hal ini disebabkan nomenklatur program berbeda pada tahun-tahun tersebut. Program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif Kabupaten Sanggau disajikan pada Tabel 6.4. dengan dan Tabel 6.5.

Tabel 6. 4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sanggau Tahun 2020

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)
	Misi 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan							
	Tujuan 1.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur	n.a	63	63,81			
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	45.98	47.58	40.75			
		Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat	70	75	85.50		648,625,785	
		Persentase layanan telekomunikasi	58.61	61.92	61.92		2,917,744,818	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik	4.5	6.5	0	4,330,000,000	0	DBM SDA
		DAK Penugasan			0	13,453,494,000	0	
		DAK Reguler			0	28,856,635,000	0	
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik	4.5	6.5	7.73	5,984,152,954	38,088,266,066.50	DBM SDA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi sedang	39.88	41.88	33.01			DBM SDA
		Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi rusak ringan	41.46	39.46	47.08			DBM SDA
		Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi rusak berat	14.16	12.16	12.17			DBM SDA
	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi sedang yang di rehabilitasi/ pelihara	39.88	41.88	33.01	28,092,823,288	4,787,433,922	DBM SDA
		Persentase jalan dan jembatan kondisi rusak ringan yang di rehabilitasi/ pelihara	41.46	39.46	47.08			DBM SDA
	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persentase perbaikan jalan dan jembatan pada kondisi tanggap darurat	100	100	0	300,000,000	0	DBM SDA
	Program Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu	Jalan perkotaan dan kawasan tertentu yang dipelihara (km)	2	2	1.57	1,300,417,776	8089158324	DBM SDA
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil (orang)	275	335	305	375,896,186	162,926,178.00	DBM SDA
		Persentase ketersediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60	100	100			DBM SDA
	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan Umum	Ketersediaan data infrastruktur pekerjaan umum (%)	0	100	100	499,380,790	334,909,790.00	DBM SDA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Ketersediaan dokumen analisa biaya dan HPS PU (%)	0	100	100			DBM SDA
		Ketersediaan dokumen mutu kontruksi (%)	0	100	100			DBM SDA
		Ketersediaan dokumen laporan realisasi fisik infrastruktur PU (%)	0	100	100			DBM SDA
	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase ketersediaan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		55	0	150,000,000	0	DBM SDA
	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase pengamanan jalan dan jembatan potensi longsor	0	10	0	1,797,419,676	0	DBM SDA
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Ketersediaan informasi/data base jalan dan jembatan (%)	100	100	100	649,315,725	832,834,550.00	DBM SDA
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana pemeliharaan jalan (%)	100	100	100	1,645,049,496	361,722,660.00	DBM SDA
		Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kebinamargaan (%)	60	65				DBM SDA
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketersediaan dokumen perencanaan fasilitas perhubungan (%)	100	100		430,294,210		DISHUB
		DAK Afirmasi				2,152,500,000		DISHUB
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase dermaga kondisi baik	15	30		100,000,000		DISHUB
		Persentase halte kondisi baik	44	44				DISHUB
		Persentase terminal yang berfungsi	46	46				DISHUB

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Ketersediaan dermaga (%)	18	18				DISHUB
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio ijin trayek	1:2.128	1:2.128		788,305,000		DISHUB
		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang)	224,247	242,910				
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (ton)	5,800	5,875				
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang diuji kelaikan	73.5	70.68		409,808,400		DISHUB
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	Rasio rumah layak huni	0.1338	0.1343				
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	73.2	75.4	80.8			
		Rasio permukiman layak huni	N/A	0.55				
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	70	80				
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	60	65		513,214,040		DPCKTRP
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	75	80				DPCKTRP
		DAK Afirmasi				3,068,809,000		DPCKTRP
	Program Pengembangan Energi, Sumber Daya Mineral	Ketersediaan penerangan jalan umum (%)	44.64	55.33	-	2,570,863,050	2,836,922,250	DPMPTSP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	dan Air Tanah	Persentase ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi	100	100	100		81,153,400	DPMPTSP
		Ketersediaan informasi sumber daya mineral dan air tanah (%)	100	100	100		81,732,800	DPMPTSP
	Program pengelolaan areal pemakaman	Ketersediaan areal pemakaman yang representatif	0	6.7	4.15	1,250,000,000	382,705,362.00	DPCKTRP
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih	41.06	43.67		5,718,428,000		DPCKTRP
		Persentase rumah tangga bersanitasi	47.17	48.48				DPCKTRP
		DAK Reguler				3,461,328,000		DPCKTRP
		DAK Penugasan				3,400,000,000		DPCKTRP
		DAK Afirmasi				2,000,000,000		DPCKTRP
	Program pembangunan infrastruktur permukiman perdesaaan	Presentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pedesaan	35.25	48.2		29,386,810,000		DPCKTRP
		Persentase jalan/gertak lingkungan pedesaan yang terbangun	51.94	61.39				DPCKTRP
		DAK Reguler				2,019,779,000		DPCKTRP
	Program pengendalian banjir	Persentase penanganan kali/ saluran sebagai pengendali banjir	42	48.5	46.73	6,400,000,000	6,173,019,250.00	DBM SDA
	Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	29.29	35.64		8,394,200,000		DPCKTRP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	28.6	29.9		875,000,000		DINAS LH
	Tujuan 1.2. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n.a	60.3	60.11			
	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	47.27	49.02	50.00		254,332,200.00	
		Indeks kualitas udara	93.65	93.66	92.03			
	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	44.02	43.75				
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani	100	100	100.00	192,736,000	254,332,200.00	DINAS LH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	100	100	100.00	100,000,000	54,756,340.00	DINAS LH
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase cakupan RTH yang terkelola dengan baik	100	100	100.00	528,000,000	382,906,750.00	DINAS LH
	Sasaran 1.2.3. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	0	0.66				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen RDTR (%)	0	6.67		601,976,180		DPCKTRP
		Ketersediaan dokumen RTBL (%)	0	4.76				
	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah bangunan gedung bersertifikat laik fungsi	0	0		91,003,180		DPCKTRP
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian tata ruang Daerah (%)	100	100		403,405,190		DPCKTRP
	Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing							
	Tujuan 2.1. Terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	65.5	66.1	65.77			
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	99.34	99.45				
		Harapan lama sekolah	11.75	11.97				
		Rata-rata lama sekolah	7.04	7.16				
		Jumlah pengunjung perpustakaan	85,954	3,000	1.656	0		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ketersediaan PAUD/dusun	18.84	20.35		4,187,000,000		DISDIKBUD
		DAK Non Fisik				106,800,000		DISDIKBUD
	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	114.45	115.56		80,719,842,000		DISDIKBUD
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	96.94	97.55				DISDIKBUD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	81.62	82.1				DISDIKBUD
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	82.83	83.67				DISDIKBUD
		DAK SD				16,744,916,748		DISDIKBUD
		DAK SMP				15,286,896,000		DISDIKBUD
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terbentuk dan aktif	57.14	71.43		195,100,000		DISDIKBUD
						1,427,357,000		
		Tingkat kelulusan peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (%)	100	100				DISDIKBUD
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	86.65	89.32		0		DISDIKBUD
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	89.81	91.85				DISDIKBUD
		Persentase Guru SD/MI yang bersertifikasi	80.49	83.28				DISDIKBUD
		Persentase Guru SMP/MTs yang bersertifikasi	70.83	75				DISDIKBUD
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Ketersediaan layanan sistem informasi data pendidikan (%)	100	100		1,281,570,001		DISDIKBUD
		Ketersediaan dokumen perencanaaan dan pelaporan bidang pendidikan (%)	100	100				DISDIKBUD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	3,000	3,000	1.656	308,378,000	165.282.000	DKP
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	78,905	100	100		10.000.000	DKP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Tinggi	Jumlah penerima beasiswa utusan daerah (orang)	909	123		6,780,204,756		SETDA
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	70.84	70.94				
		Jumlah prestasi olahraga	4	6				
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	90	90	90	328,261,000	239,335,500	DINKES
		DAK Reguler				6,267,485,000	4,557,431,000	DINKES
		DAK Non Fisik				6,267,485,000	4,152,109,000	DINKES
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	0.09	0.5	0.5	9,900,357,875	15,109,066,831	DINKES
		DAK Non Fisik				20,557,000,000	23,128,341,000	DINKES
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan	60.57	67	67	174,801,000	50,619,000	DINKES
		Persentase rekomendasi hasil POM yang ditindaklanjuti	100	100	100			DINKES
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	77.79	80	80	324,369,415	94,789,375	DINKES
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	90	441,475,700	35,632,500	DINKES
		DAK Penugasan				700,757,000		DINKES
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa ber ODF	3	3	3	164,509,750	78,840,000	DINKES
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) (%)	60	70	80	3,643,244,770	904,020,450	DINKES
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.0045	0.5	<0,5			DINKES
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000	94	225	225			DINKES

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		penduduk)						
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100			DINKES
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	12	19	19	903,280,100		DINKES
		Persentase pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi standar	20	75	80	268,644,500		RSUD M.TH. DJAMAN
		DAK Non Fisik				4,563,997,000		DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	99,654,950		DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%)	90	100	0	5,084,500,000		RSUD M.TH. DJAMAN
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas yang refresentatif	63.16	73.68	100	3,739,281,538	1,894,483,780	DINKES
		Persentase Pustu sesuai standar	46.15	50.55	68.13			DINKES
		Jumlah Poskesdes	167	167	167			DINKES
		DAK Reguler				3,799,000,000	9,875,990,000	DINKES
		DAK Penugasan				575,173,000	1,246,366,000	DINKES
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kelas Rumah Sakit M.Th. Djaman	C	C	C	1,663,640,350		RSUD M.TH. DJAMAN
		DAK Penugasan			C	46,994,890,000		RSUD M.TH. DJAMAN
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	90	90	90	1,557,554,220		RSUD M.TH. DJAMAN

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan dan divaksinasi sesuai standar	100	100	100	119,947,500	95,887,500	DINKES
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70.36	76.29	100	143,368,000	75,359,500	DINKES
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	58.3	66.7	100	225,328,000		DINKES
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	76.72	79.78	79.78	90,508,500		DINKES
		Cakupan pelayanan nifas (%)	70.89	76.71	76.71			DINKES
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	76.1	80.88	80.88			DINKES
		DAK Non Fisik				3,563,000,000		DINKES
	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Temenggung Gergaji	Kelas Rumah Sakit Temenggung Gergaji	D-	D-	D	1,195,529,556	2,090,670,337	DINKES
	Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Peserta JKN yang terlayani	100	100	100	10,075,526,788		DINKES
	Program Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	63.73	66.23	77.61	387,000,000	4,296,785,497	DINSOSP3AKB
		DAK Reguler				1,356,036,000	5,438,241,850	DINSOSP3AKB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan remaja yang mengikuti advokasi KIE (%)	0.21	0.42	1.96	275,665,800	22,005,000	DINSOSP3AKB
	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peserta KB MKJP	12.33	2.87	10.29	300,000,000	159,283,410	DINSOSP3AKB
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	27.63	22.37	30.65	115,000,000	26,021,100	DINSOSP3AKB

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	100	100		92,292,000		DISPORAPAR
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase atlet muda yang dibina	6	21		890,000,000		DISPORAPAR
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Gedung olahraga milik pemerintah Daerah yang representatif	40	60		1,030,000,000		DISPORAPAR
	Sasaran 2.1.3. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	96.3	96.9	99.23			
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	96.3	96.9	99.23	548,577,698		DINSOSP3AKB
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	100	100	553,042,000	523,577,750	DINSOSP3AKB
	Program pembinaan para penyandang disabilitas, ODGJ dan trauma	Persentase penyandang disabilitas dan trauma yang tertangani	100	100	100	213,482,000	51,274,650	DINSOSP3AKB
		Persentase ODGJ yang difasilitasi	100	100	100		357,744,050	DINSOSP3AKB
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	100	100	100	225,000,000	116,914,000	DINSOSP3AKB
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejateraan Sosial yang dibina	25	25	6	160,000,000	66,120,000	DINSOSP3AKB
	Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	4.31	23.05	164	466,000,000	4,320,000,000	DINSOSP3AKB
	Sasaran 2.1.4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	61.35	10.22		644,897,290	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n/a	80.55	13.42			
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	15.98	32.54	4.14	265,000,000	61,203,900	DINSOSP3AKB
		Rasio KDRT	0.235	0.0221	0,004			DINSOSP3AKB
		Rasio Traficking	0.004	0.004	0.001			DINSOSP3AKB
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	511,538,000	104,245,800	DINSOSP3AKB
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100	100	100	1,290,691,700	644,897,290	DINSOSP3AKB
	Misi 3: Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal							
	Tujuan 3.1. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	5.11	5.23	0.71			
		Indeks gini	0.314	0.314	0.31			
		Angka Kemiskinan	4.35	4.26	4.46			
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	2.77	2.85	2.59			
		Kontribusi sektor pertanian (tanaman hortikultura) terhadap PDRB	0.7	0.72	0.57			
		Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0.49	0.5	0.47			
		Kontribusi sektor pertanian (perkebunan) terhadap PDRB	21.32	21.35	25.48		1,626,522,275	
		Kontribusi sektor pertanian (peternakan) terhadap PDRB	1.45	1.47	1.38		1,680,246,400	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19.38	19.32				
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12.1	12.13				
		Persentase koperasi aktif	58.87	59.64	59.95			
		Peningkatan status usaha mikro menjadi usaha kecil	2	3	3			
		Pertumbuhan kunjungan wisata	26.1	42.8				
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	7,555	7,631	7601		5,996,085,530	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok petani kebun yang bermitra dengan perusahan	1.13	3.39	3.95	95,000,000	25,000,000	DISBUNNAK
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang dibina	100	100	100		45,800,000	DISBUNNAK
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Pertumbuhan produksi tanaman pangan utama (%)	3.2	3.04	-4.80	8,563,196,829	6,235,329,579	DKPTPHP
		DAK Reguler				2,307,000,000	1,668,050,000	
	Program peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Persentase kecamatan yang terfasilitasi prasarana dan sarana pasar tani produk lokal daerah amatan	0	20	13.33	367,100,000	238,113,500	DKPTPHP
		Nilai investasi perkebunan (juta Rp.)	9,295,070	9,305,810	6,064,603	138,000,000	34379250	DISBUNNAK
		Nilai investasi peternakan (juta Rp.)	101,458	101,938	115,372		69336000	DISBUNNAK
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian	14	31.2	26.51	648,200,000	79,070,000	DKPTPHP
	Program peningkatan produksi pertanian	Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (Cabe)	0	10	11	1,430,000,000	672,313,282	DKPTPHP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Cakupan bina kelompok petani (%) dari 1.709 kelompok tani	73.5	73.9	61.85	574,800,200	1,054,834,357	DKPTPHP
		DAK Reguler				1,387,724,000		DKPTPHP
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Bebas Penyakit Ternak (%)	100	100	109.38	516,000,000	1,254,068,400	DISBUNNAK
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peternak yang di bina	55	60	106.67	100,000,000	84,018,000	DISBUNNAK
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase tanaman perkebunan yang dikembangkan	76.15	80.13	95.05	1,077,540,000	517,290,525	DISBUNNAK
		Persentase tanaman perkebunan yang diremajakan	5.13	5.43	10.62			DISBUNNAK
		Persentase ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan	30	40	220.4			DISBUNNAK
		Persentase penerapan ISPO dan RSPO	29.03	35.04	110.47			DISBUNNAK
		Persentase usaha perkebunan yang dibina	100	100	100			DISBUNNAK
	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Rata-rata kadar kering karet (%)	40	44	44	138,500,000	109398500	DISBUNNAK
	Program Evaluasi dan Pengendalian Perkebunan dan Peternakan	Ketersediaan data dan laporan (%)	100	100	100	225,000,000	80880000	DISBUNNAK
	Program pengembangan budidaya perikanan	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8.3	2.1	4.72	655,200,000	758,144,650	DKPTPHP
	Program pengembangan perikanan tangkap	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6.2	6	27.3	148,000,000	119,058,000	DKPTPHP
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kelompok nelayan yang dibina	8.57	14.29	18.91	285,000,000	108,425,000	DKPTPHP
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Persentase sarana budidaya pada kawasan air tawar yang difasilitasi	9.9	22.2	22.2	709,360,000		DKPTPHP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat perikanan	Persentase sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan yang terfasilitasi melalui DAK	12	17.3	17.3	835,317,000		DKPTPHP
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang dibina	25.5	27	11,8	619,031,375	453,368,052	DISPERINDAG KOP & UM
		Persentase industri kecil berstatus formal	46.7	50	23,22			DISPERINDAG KOP & UM
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Ketersediaan data UDKM	100	100	43.00	247,815,325	154,396,326	DISPERINDAG KOP & UM
		Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	1.97	11.84	99.7			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase SVLK yang difasilitasi	3.85	3.85	7.69	132,925,150	29,023,250	DISPERINDAG KOP & UM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Daya tampung pasar tehadap pedagang (%)	85.61	88.02	96.00	1,393,400,300	526,189,580	DISPERINDAG KOP & UM
		Ketersediaan data alat UTTP (%)	100	100	45.43			
		Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	4	5	7			
		DAK Penugasan				3,400,000,000		
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina (%)	100	100	100	100,000,000	75,470,000	DISPERINDAG KOP & UM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi yang dibina	16.71	33.42	34.69	50,000,000	27,394,300	DISPERINDAG KOP & UM
		Persentase koperasi sehat	15	17	19			DISPERINDAG KOP & UM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Usaha Mikro yang dibina	19	22	25	71,043,100	115,191,100	DISPERINDAG KOP & UM
		DAK Non Fisik				358,000,000	473,246,288	DISPERINDAG KOP & UM

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase event promosi pariwisata yang dikuti	41	50		350,000,000		DISPORAPAR
		DAK Non Fisik				58,580,000		DISPORAPAR
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	54	66		305,000,000		DISPORAPAR
		DAK Reguler				2,811,348,000		DISPORAPAR
		DAK Non Fisik				250,000,000		DISPORAPAR
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	45.68	55.17		212,000,000		DISPORAPAR
		DAK Non Fisik				250,000,000		DISPORAPAR
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi terpelihara (m)	61,492	76,592	79,525	9,696,389,000	5,996,085,530.00	DBM SDA
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	78.71	79.1	79.185		5,996,085,530.00	
		DAK Penugasan				8,279,789,000		
	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti	80	82.4		117,851,475		SETDA
	Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Nilai kinerja BUMD	48.6	49		274,417,867		SETDA
	Program Peningkatan Perekonomian Daerah	Persentase rekomendasi bidang perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	85.71	86		447,269,472		SETDA
		Persentase keikutsertaan Pemerintah daerah pada agenda promosi	62.5	63				SETDA
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.juta)	7,851,219.91	8,518,573.60	8,679,019.91			DPMPTSP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	80	80	98	621,818,100	196,248,150	DPMPTSP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu	85	85	85	758,777,700	501,220,150	DPMPTSP
		Persentase layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100			DPMPTSP
	Sasaran 3.1.3. Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.25	3.23				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase wirausaha muda	10	11				DISPORAPAR
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	16	64		125,252,500		DISNAKERTRANS
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap, dan mandiri/perusahaan	12	12		217,248,200		DISNAKERTRANS
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang ditangani	100	100		417,628,300		DISNAKERTRANS
		Persentase hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.	100	100				DISNAKERTRANS
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Presentase calon transmigran yang ditempatkan	79.34	79.34		356,618,800		DISNAKERTRANS
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase wirausaha muda yang dibina dan di fasilitasi	10	11		76,000,000		DISPORAPAR
	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah	Pertumbuhan kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat	0	20				
		Luas wilayah pengakuan hutan adat (ha)	2,840	3,022.09				
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepemilikan hak tanah oleh masyarakat yang difasilitasi	0	20		4,981,570,969		DPCKTRP
		Persentase tanah pemerintah daerah yang disertifikasi	95.38	97.71				DPCKTRP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Sasaran 3.1.5. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72.9	73.6	71.6			
		Penguatan cadangan pangan	80	80	180			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	Ketersediaan pangan utama	119,771	127,760	183,604	2,961,750,500	2409370138	DKPTPHP
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100			DKPTPHP
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
	Tujuan 4.1. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	70	50,03			
	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat akuntabilitas kinerja	C	CC	CC			
		Kategori nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi			
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3		*118,250,000*	
		Tingkat konsistensi antardokumen perencanaan	100	100	100			
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100			
		Persentase pengelolaan arsip pola baru	N/A	10	55		0	
		Cakupan data statistik sektoral Kabupaten Sanggau dalam satu data	61.29	100	100			
		Tingkat fasilitasi pelayanan sesuai ketugasan Sekretariat DPRD	100	100	100		89,452,362,730	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Cakupan pendampingan penyusunan LAKIP (%)	100	100	100	150,000,000	750,000,000	SETDA
	Program pembinaan pelaksanaan pembangunan	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah	60	70	100	490,000,000	2,450,000,000	SETDA
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Layanan Kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	100	100	4,705,300,618	23,526,503,090	SETDA
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang terfasilitasi	100	100	90	2,032,039,227	3,350,632,372	SETDA
		Ketersediaan informasi produk hukum daerah (%)	100	100	90			SETDA
		Persentase perkara Perdata dan TUN Pemerintah daerah yang difasilitasi	100	100	80			SETDA
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Ketersediaan data pendukung LPPD dan LKPJ	100	100	100	3,510,392,400	17,551,962,000	SETDA
		Jumlah perayaan hari besar nasional dan daerah yang difasilitasi	4	4	4			SETDA
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dimekarkan	0	0	2			SETDA
		Persentase penetapan dan penegasan segmen batas wilayah administrasi antar daerah	0	33.33	100			SETDA
		Persentase penetapan dan penegasan segmen batas wilayah administrasi antar kecamatan	28	44	100			SETDA
		Persentase penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi kelurahan	0	100	100			SETDA
		Ketersediaan data dan informasi pembakuan nama	0	20	100			SETDA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		rupa bumi unsur warisan budaya dan fasilitas umum (%)						
	Program Peningkatan Kehumasan Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di dokumentasikan	100	100	100	1,782,830,457	8,914,152,285	SETDA
	Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah	Persentase layanan keprotokolan	100	100	100	3,316,249,180	16,581,245,900	SETDA
	Program pengadaan barang / jasa	Persentase layanan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan arsip dokumen hasil tender/seleksi	100	100	100	2,903,134,970	14,515,674,850	SETDA
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar daerah yang difasilitasi	100	100	100	445,372,000	2,226,860,000	SETDA
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja	22.77	26.79	26.79	4,338,008,000	21,690,040,000	INSPEKTORAT
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat auditor dan P2UPD Pratama	76.47	82.35	100	466,800,000	2,334,000,000	INSPEKTORAT
		Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat auditor dan P2UPD Pratama ke Muda	0	42.86	70			INSPEKTORAT
		Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat auditor Muda ke Madya	0	0	50			INSPEKTORAT
		Persentase Aparatur Pengawas mengikuti Diklat Keahlian/ Keterampilan/ Substansi	58.82	82.35	100			INSPEKTORAT
	Program penataaan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP pada level 3	0	13.95	100	61,580,000	307,900,000	INSPEKTORAT

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (%)	100	100	100	1,585,201,688	7,926,008,440	BAPPEDA
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi tersusun dengan baik	100	100	100	962,825,500	4,814,127,500	BAPPEDA
	Program perencanaan sosial budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya tersusun dengan baik	100	100	100	918,454,000	4,592,270,000	BAPPEDA
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam tersusun dengan baik	100	100	100	1,631,031,170	8,155,155,850	BAPPEDA
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	316,419,500	1,582,097,500	BAPPEDA
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	41.86	62.2	100			BAPPEDA
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip sesuai standar	0	18.6	100	168,000,000	840,000,000	DKP
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5,224	1,000	10,224	241,146,000	1,205,730,000	DKP
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip	10	15	35	42,060,000	210,300,000	DKP
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pelayanan informasi arsip	30	40	80	60,000,000	300,000,000	DKP
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi (%)	85	100	100	265,797,150	1,328,985,750	DISKOMINFO
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase layanan dan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	100	100	15,530,558,563	77,652,792,815	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan dokumen dan publikasi kegiatan Pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD (%)	100	100	100	450,406,500	2,252,032,500	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase kerjasama dengan Media massa	45.45	45.45	45.45			SEKRETARIAT DPRD
	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase penyelesaian dokumen anggaran tepat waktu	100	100	100	1,064,643,808	5,323,219,040	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase penyelesaian hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah tepat waktu	100	100	100			SEKRETARIAT DPRD
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan informasi Peraturan Perundang-undangan (%)	100	100	100	199,013,675	995,068,375	SEKRETARIAT DPRD
	Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah/Umum	Tingkat ketersediaan gedung kantor pemerintah yang representatif	47.73	56.82	100	25,964,668,000	129,823,340,000	DPCKTRP
		Tingkat ketersediaan rumah adat kecamatan	6.7	10.7	54.5			DPCKTRP
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	165,000,000	825,000,000	DISDIKBUD
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DISDIKBUD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DISDIKBUD
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan (%)	100	100	100	56,773,550	283,867,750	DINKES
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Kesehatan (%)	100	100	100			DINKES
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Kesehatan (%)	100	100	100			DINKES
		Ketersediaan dokumen perencanaan RSUD M.Th.	100	100	100	45,644,000	228,220,000	RSUD M.TH. DJAMAN

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Djaman (%)						
		Ketersediaan laporan kinerja RSUD M.Th. Djaman (%)	100	100	100			RSUD M.TH. DJAMAN
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset RSUD M.Th. Djaman (%)	100	100	100			RSUD M.TH. DJAMAN
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	163,661,200	818,306,000	DBM SDA
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DBM SDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DBM SDA
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	64,822,750	324,113,750	DPCKTRP
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DPCKTRP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DPCKTRP
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan BPBD (%)	100	100	100	0	120,000,000	BPBD
		Ketersediaan laporan kinerja BPBD (%)	100	100	100			BPBD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset BPBD (%)	100	100	100			BPBD
		Ketersediaan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100	100	100	0	120,000,000	SATPOL PP
		Ketersediaan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100	100	100			SATPOL PP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Satuan Polisi Pamong	100	100	100			SATPOL PP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Praja (%)						
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (%)	100	100	100	32,715,950	112,715,950	KANTOR KESBANGPOL
		Ketersediaan laporan kinerja Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (%)	100	100	100			KANTOR KESBANGPOL
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (%)	100	100	100			KANTOR KESBANGPOL
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	38,000,000	158,000,000	DINSOSP3AKB
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DINSOSP3AKB
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DINSOSP3AKB
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	44,459,950		DISNAKERTRANS
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DISNAKERTRANS
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DISNAKERTRANS
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	0	120,000,000	DINAS LH
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100	100			DINAS LH
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100	100			DINAS LH
	Program peningkatan dan pengembangan capaian	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	50,011,000	103,070,500	DISDUKCAPIL

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100		93940000	DISDUKCAPIL
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100		99000000	DISDUKCAPIL
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (%)	100	100	100	0	120,000,000	DPMPEMDES
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (%)	100	100	100			DPMPEMDES
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (%)	100	100	100			DPMPEMDES
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	22,439,100	142,439,100	DISHUB
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DISHUB
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DISHUB
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	20,179,000	140,179,000	DISKOMINFO
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DISKOMINFO
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DISKOMINFO
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas PMPTSP (%)	100	100	100	0	120,000,000	DPMPTSP
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas PMPTSP (%)	100	100	100			DPMPTSP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas PMPTSP (%)	100	100	100			DPMPTSP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100	100	0	120,000,000	DISPORAPAR
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100	100			DISPORAPAR
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100	100			DISPORAPAR
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100		7,500,000	127,500,000	DKP
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DKP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DKP
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	100	100	100	60,000,000	180,000,000	DISBUNNAK
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	100	100	100			DISBUNNAK
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	100	100	100			DISBUNNAK
		Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (%)	100	100	100	100,000,000	220,000,000	DKPTPHP
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (%)	100	100	100			DKPTPHP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,	100	100	100			DKPTPHP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Hortikultura dan Perikanan (%)						
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	45,000,000	165,000,000	DISPERINDAG KOP & UM
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			DISPERINDAG KOP & UM
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			DISPERINDAG KOP & UM
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan sekretariat daerah (%)	100	100	100	872,964,500	4,364,822,500	SETDA
		Ketersediaan laporan kinerja sekretariat daerah (%)	100	100	100			SETDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset sekretariat daerah (%)	100	100	100			SETDA
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Sanggau (%)	100	100	100	0	120,000,000	INSPEKTORAT
		Ketersediaan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Sanggau (%)	100	100	100			INSPEKTORAT
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Inspektorat Kabupaten Sanggau (%)	100	100	100			INSPEKTORAT
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	12,636,725	132,636,725	BAPPEDA
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			BAPPEDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			BAPPEDA
	Program peningkatan dan pengembangan capaian	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	100	425,550,000	1,825,550,000	BPKAD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100			BPKAD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100	100			BPKAD
		Ketersediaan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	0	120,000,000	BAPENDA
		Ketersediaan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100			BAPENDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Badan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100			BAPENDA
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan BKPSDM (%)	100	100	100	0	120,000,000	BKPSDM
		Ketersediaan laporan kinerja BKPSDM (%)	100	100	100			BKPSDM
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset BKPSDM (%)	100	100	100			BKPSDM
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan sekretariat DPRD (%)	100	100	100	95,000,000	475,000,000	SEKRETARIAT DPRD
		Ketersediaan laporan kinerja sekretariat DPRD (%)	100	100	100			SEKRETARIAT DPRD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset sekretariat DPRD (%)	100	100	100			SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan Kapuas (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN KAPUAS
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan Kapuas (%)	100	100	100			KECAMATAN KAPUAS
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan Kapuas (%)	100	100	100			KECAMATAN KAPUAS

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN SEKAYAM
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN SEKAYAM
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN SEKAYAM
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN TAYAN HILIR
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN TAYAN HILIR
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN TAYAN HILIR
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN TAYAN HULU
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN TAYAN HULU
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN TAYAN HULU
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN MELIAU
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN MELIAU
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN MELIAU
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN KEMBAYAN
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN KEMBAYAN
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN KEMBAYAN
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN ENTIKONG

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN ENTIKONG
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN ENTIKONG
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN PARINDU
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN PARINDU
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN PARINDU
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN MUKOK
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN MUKOK
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN MUKOK
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN BONTI
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN BONTI
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN BONTI
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN BALAI
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN BALAI
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN BALAI
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN BEDUAI
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN BEDUAI

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN BEDUAI
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN JANGKANG
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN JANGKANG
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN JANGKANG
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN TOBA
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN TOBA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN TOBA
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	100	0	80,000,000	KECAMATAN NOYAN
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN NOYAN
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100	100			KECAMATAN NOYAN
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP			
		Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	6.24	6.21	5.59			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja keuangan yang tepat waktu	100	100	100	3,721,012,967	18,605,064,835	BPKAD
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan tepat waktu	100	100	100	7,835,465,127	39,177,325,635	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100	100	100			

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		dan perubahan APBD						
		Persentase Aset Daerah yang sudah Terinventarisir secara baik	60	60	70			
	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak	14.7	15.44	100	3,733,147,950	18,665,739,750	BAPENDA
	Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks profesionalitas ASN	75	76	80			
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi	55	60	80	5,980,342,487	29,901,712,435	BKPSDM
	Program Penyelenggaraan Mutasi, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Aparatur	Persentase pemetaan jabatan	85	95	95	1,774,062,492	8,870,312,460	BKPSDM
		Rata-rata kinerja aparatur	Baik	Baik	Baik			BKPSDM
	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Ketersediaan ASN (%)	63.35	62.62	61.39	1,162,488,129	5,812,440,645	BKPSDM
		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	80	85	95			BKPSDM
		Persentase ketersediaan data kepegawaian/ ASN yang valid dan akurat	80	85	100			BKPSDM
	Program perencanaan kebutuhan ASN	Kebutuhan formasi ASN yang diusulkan (%)	24.74	20.66	20.66	182,000,000	910,000,000	SETDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	1.19	2.04	10.92	195,855,000	1,179,275,000	DISDIKBUD
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur RSUD M.Th. Djaman yang mengikuti diklat formal	0	38.36	100	500,650,000	1,310,650,000	RSUD M.TH. DJAMAN

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	20	30	100	243,477,000	1,217,385,000	DBM SDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat formal	0	83.33	100	209,540,000	712,436,000	SATPOL PP
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	21.88	100	70,000,000	320,000,000	DPMPEMDES
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	72.41	100	80,447,000	160,447,000	DISHUB
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	14.29	100	74,000,000	494,000,000	DISPERINDAG KOP & UM
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	28.57	100	53,590,000	187,565,000	DPMPTSP
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan yang mengikuti diklat formal	0	48.98	100	208,460,000	425,605,000	DISBUNNAK
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Sekretariat Daerah yang mengikuti diklat formal	0	15.17	84.14	260,140,000	1,260,140,000	SETDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal	0	16.22	91.89	57,000,000	337,000,000	BAPPEDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur BPKAD yang mengikuti diklat formal	0	26.27	97.78	50,000,000	238,994,000	BPKAD
		Persentase aparatur Badan Pendapatan Daerah yang mengikuti diklat formal	0	17.95	17.95	75,000,000		BAPENDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti diklat formal	0	13.79	96.55	34,142,000	238,994,000	SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas pendidikan	baik	baik	baik	0	123,200,000	DISDIKBUD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kesehatan	baik	baik	baik	0	963,200,000	DINKES
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur RSUD M.Th. Djaman	baik	baik	baik	0	628,600,000	RSUD M.TH. DJAMAN
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	baik	baik	baik	69,388,800	155,488,800	DBM SDA
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	baik	baik	baik	0	89,600,000	DPCKTRP
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BPBD	baik	baik	baik	21,450,000	107,250,000	BPBD
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	baik	baik	baik	231,632,000	694,896,000	SATPOL PP
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik	baik	baik	baik	23,065,000	115,325,000	KANTOR KESBANGPOL
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana	baik	baik	baik	45,000,000	116,400,000	DINSOSP3AKB
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	baik	baik	baik	24,750,000	97,550,000	DISNAKERTRANS
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	baik	baik	baik	204,400,000	525,700,000	DKPTPHP
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Lingkungan Hidup	baik	baik	baik	76,000,000	153,700,000	DINAS LH
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kependudukan	baik	baik	baik	0	72,800,000	DISDUKCAPIL

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		dan Pencatatan Sipil						
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	baik	baik	baik	74,250,000	141,450,000	DPMPEMDES
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perhubungan	baik	baik	baik	56,000,000	168,000,000	DISHUB
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kominfo	baik	baik	baik	22,550,000	95,350,000	DISKOMINFO
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	baik	baik	baik	0	137,200,000	DISPERINDAG KOP & UM
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas PMPTSP	baik	baik	baik	47,250,000	106,050,000	DPMPTSP
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	baik	baik	baik	18,500,000	92,500,000	DISPORAPAR
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	baik	baik	baik	0	61,600,000	DKP
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan	baik	baik	baik	21,000,000	158,200,000	DISBUNNAK
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Sekretariat Daerah	baik	baik	baik	210,800,000	1,054,000,000	SETDA
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Inspektorat Kabupaten Sanggau	baik	baik	baik	23,400,000	118,600,000	INSPEKTORAT
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BAPPEDA	baik	baik	baik	20,938,000	124,538,000	BAPPEDA
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BPKAD	baik	baik	baik	37,600,000	242,000,000	BPKAD
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BAPENDA	baik	baik	baik	45,000,000	225,000,000	BAPENDA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BKPSDM	baik	baik	baik	44,100,000	200,900,000	BKPSDM
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur sekretatriat DPRD	baik	baik	baik	646,850,000	2,754,250,000	SEKRETARIAT DPRD
		Ketersediaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (%)	100	100	100			SEKRETARIAT DPRD
	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Kecamatan	baik	baik	baik	0	148,400,000	KECAMATAN KAPUAS
			baik	baik	baik	0	53,200,000	KECAMATAN SEKAYAM
			baik	baik	baik	12,600,000	63,000,000	KECAMATAN TAYAN HILIR
			baik	baik	baik	15,000,000	75,000,000	KECAMATAN TAYAN HULU
			baik	baik	baik	10,500,000	52,500,000	KECAMATAN MELIAU
			baik	baik	baik	0	64,400,000	KECAMATAN KEMBAYAN
			baik	baik	baik	14,300,000	71,500,000	KECAMATAN ENTIKONG
			baik	baik	baik	13,200,000	66,000,000	KECAMATAN PARINDU
			baik	baik	baik	8,000,000	40,000,000	KECAMATAN MUKOK
			baik	baik	baik	11,050,000	55,250,000	KECAMATAN BONTI
			baik	baik	baik	7,500,000	37,500,000	KECAMATAN BALAI
			baik	baik	baik	22,100,000	110,500,000	KECAMATAN BEDUAI
			baik	baik	baik	17,850,000	89,250,000	KECAMATAN JANGKANG

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
			baik	baik	baik	11,200,000	56,000,000	KECAMATAN TOBA
			baik	baik	baik	0	28,000,000	KECAMATAN NOYAN
	Sasaran 4.1.4. Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	1.7	2.7	0		
		Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Level I	Level I	Level III	0		
		Indeks kepuasan masyarakat	75	80	85	0		
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang tertangani tepat waktu	100	100	100	1,968,951,615	757,032,400	DISKOMINFO
		Ketersediaan informasi publik (%)	100	100	100			DISKOMINFO
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)	100	100	100	416,156,414	2,080,782,070	DISKOMINFO
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	102,447,607	512,238,035	DISKOMINFO
		Persentase insiden informasi yang dapat ditangani/ dipulihkan	58	65	100		0	DISKOMINFO
	Program Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Baik	Baik	Sangat Baik	980,000,000	4,900,000,000	SETDA
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan data kependudukan	100	100	100	1,904,087,500	9,520,437,500	DISDUKCAPIL
		Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	23.81	64.29	100		61,867,500	DISDUKCAPIL
		Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	85.47	90	100		946,230,000	DISDUKCAPIL

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97.77	100	100		198,000,000	DISDUKCAPIL
		Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18	65	70	100		207,050,000	DISDUKCAPIL
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	13.02	65.09		29,000,000	DISDUKCAPIL
		DAK Non Fisik				1,526,447,000	7,632,235,000	DISDUKCAPIL
	Program Pelayanan Prima	Persentase pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100	100	100	29,900,000	149,500,000	KECAMATAN KAPUAS
			100	100	100	39,500,000	197,500,000	KECAMATAN SEKAYAM
			100	100	100	18,018,000	90,090,000	KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100	100	15,770,000	78,850,000	KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100	100	27,345,000	136,725,000	KECAMATAN MELIAU
			100	100	100	29,700,000	148,500,000	KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100	100	33,555,000	167,775,000	KECAMATAN ENTIKONG
			100	100	100	13,200,000	66,000,000	KECAMATAN PARINDU
			100	100	100	36,900,000	184,500,000	KECAMATAN MUKOK
			100	100	100	25,060,000	125,300,000	KECAMATAN BONTI
			100	100	100	23,400,000	117,000,000	KECAMATAN BALAI
			100	100	100	26,100,000	130,500,000	KECAMATAN BEDUAI

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
			100	100	100	27,106,125	135,530,625	KECAMATAN JANGKANG
			100	100	100	26,275,000	131,375,000	KECAMATAN TOBA
			100	100	100	37,800,000	189,000,000	KECAMATAN NOYAN
	Misi 5: Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya dan demokratis							
	Tujuan 5.1. Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang tertib, tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	n.a	20	100			
		Indeks kerukunan umat beragama	n.a	60	65.00			
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya dalam perilaku kehidupan sehari hari yang produktif bagi pengembangan daerah	Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	50	60				
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Festival seni dan budaya yang diselenggarakan	7	8		3,834,260,000		DISDIKBUD
		Persentase lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	100	100				DISDIKBUD
	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	100	100		205,000,000		DINSOSP3AKB
	Sasaran 5.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Cakupan konflik SARA yang ditangani	100	100				
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.00209	0.00207				
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi	100	100	100	417,936,330	2,089,681,650	KANTOR KESBANGPOL

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam pertemuan forum-forum pembauran kebangsaan	900	1,050	100		2,089,681,650	KANTOR KESBANGPOL
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan FKUB yang difasilitasi	100	100	100	149,999,850	749,999,250	KANTOR KESBANGPOL
		Jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam pertemuan forum-forum kerukunan umat beragama	900	1,050	100		749,999,250	KANTOR KESBANGPOL
	Program Kewaspadaan Dini	Cakupan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang difasilitasi	100	100	100	442,264,776	749,999,250	KANTOR KESBANGPOL
		Cakupan kegiatan Tim Tepadu Penanganan Konflik SARA yang difasilitasi	100	100	100		749,999,250	KANTOR KESBANGPOL
	Program pendidikan politik masyarakat	Partai politik yang difasilitasi	10	12		245,788,460		KANTOR KESBANGPOL
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan (orang)	750	1,000		1,443,000,000		DISPORAPAR
	Program Fasilitasi kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu pemerintah daerah	18.83	35		3,286,474,765		SETDA
		Persentase peserta ibadah haji dan ziarah rohani yang di fasilitasi	100	100				SETDA
		Jumlah penerima bantuan sosial tidak terencana	60	20				SETDA
	Misi 6: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat							
	Tujuan 6.1. Terwujudnya kapastian dan penegakan supremasi hukum, serta perlindungan masyarakat	Konflik sosial (Jumlah)		0	0			

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Sasaran 6.1.1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketentraman dan Ketertiban	75	80				
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyakit masyarakat (pekat) yang ditangani	80	80		269,615,300		SATPOL PP
	Sasaran 6.1.2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase penegakan PERDA dan PERKADA	80	85				
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	75	80		831,185,350		SATPOL PP
	Sasaran 6.1.3. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	3.55	5.92	9.47			
		Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80	90				
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana	100	100	100	861,988,750		BPBD
		Persentase pelayanan pemulihan pasca bencana	100	100				BPBD
	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase ketersediaan pokmas peduli bencana di desa/kel rawan bencana	8.7	14.49		504,321,500		BPBD
		Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10.14	20.29				BPBD
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	75	75		1,241,933,950		SATPOL PP

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Persentase Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditanggulangi	100	100		1,000,000,000		BPBD
	Misi 7: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan							
	Tujuan 7.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang optimal	Jumlah Desa Mandiri	6	19	8			
	Sasaran 7.1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	3.68	11.66	4.29			
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jalan poros desa yang dibangun (km)	60	60	33.227	29,800,310,064	27,408,456,314.00	DBM SDA
		Jalan poros desa yang dipelihara (km)	10	10	0.47			DBM SDA
		Jembatan perdesaan yang dibangun (m)	300	300	349.5			DBM SDA
		Jembatan perdesaan desa yang dipelihara (m)	200	200	61			DBM SDA
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaaN	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	55.82	65.64	25,66	783,894,500	298,014,900	DPMPEMDES
		Persentase MHA yang dibina	100	100	100			DPMPEMDES
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Bumdes aktif dibina	41.1	50.31	50,31	402,768,300	106,735,900	DPMPEMDES
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan masyarakat desa (%)	30.67	42.94	42,94	515,913,800	135,797,800	DPMPEMDES
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase PKK aktif dibina	72.46	77.89	77,89	100,143,600	47,665,600	DPMPEMDES
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase satuan kelompok masyarakat di Kecamatan Kapuas yang dibina	100	100		283,125,060		KECAMATAN KAPUAS

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Kapuas yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN KAPUAS
		Persentase desa fokus di Kecamatan Sekayam yang dibina	100	100		77,496,000		KECAMATAN SEKAYAM
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Sekayam yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN SEKAYAM
		Persentase desa fokus di Kecamatan Tayan Hilir yang dibina	100	100		27,182,000		KECAMATAN TAYAN HILIR
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Tayan Hilir yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN TAYAN HILIR
		Persentase desa fokus di Kecamatan Tayan Hulu yang dibina	100	100		50,000,000		KECAMATAN TAYAN HULU
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Tayan Hulu yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN TAYAN HULU
		Persentase desa fokus di Kecamatan Meliau yang dibina	100	100		63,300,000		KECAMATAN MELIAU
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Meliau yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN MELIAU
		Persentase desa fokus di Kecamatan Kembayan yang dibina	100	100		40,000,000		KECAMATAN KEMBAYAN
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Kembayan yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN KEMBAYAN
		Persentase desa di Kecamatan Entikong yang dibina	100	100		27,993,970		KECAMATAN ENTIKONG
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Entikong yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN ENTIKONG

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Persentase desa fokus di Kecamatan Parindu yang dibina	100	100		15,000,000		KECAMATAN PARINDU
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Parindu yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN PARINDU
		Persentase desa fokus di Kecamatan Mukok yang dibina	100	100		50,500,000		KECAMATAN MUKOK
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Mukok yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN MUKOK
		Persentase desa di Kecamatan Bonti yang dibina	100	100		77,750,000		KECAMATAN BONTI
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Bonti yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN BONTI
		Persentase desa fokus di Kecamatan Balai yang dibina	100	100		40,000,000		KECAMATAN BALAI
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Balai yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN BALAI
		Persentase desa fokus di Kecamatan Beduai yang dibina	100	100		55,225,000		KECAMATAN BEDUAI
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Beduai yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN BEDUAI
		Persentase desa fokus di Kecamatan Jangkang yang dibina	100	100		84,962,000		KECAMATAN JANGKANG
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Jangkang yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN JANGKANG
		Persentase desa di Kecamatan Toba yang dibina	100	100		62,846,000		KECAMATAN TOBA
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Toba yang	100	100				KECAMATAN TOBA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		difasilitasi						
		Persentase desa fokus di Kecamatan Noyan yang dibina	100	100		44,750,000		KECAMATAN NOYAN
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Noyan yang difasilitasi						KECAMATAN NOYAN
	Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100	100		6,873,120,000		KECAMATAN KAPUAS
		Persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang difasilitasi	100	100				KECAMATAN KAPUAS
	Sasaran 7.1.2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	55.82	65.6				
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti diklat	65	70	0	966,433,400	329,199,000	DPMPEMDES
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kinerja Pengelolaan keuangan desa kategori baik	100	100	100	498,575,600	273,616,100	DPMPEMDES
	Program Penataan Desa	Persentase desa yang tertata	25.77	33.13	33.13	515,890,200	240,074,200	DPMPEMDES
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pengelolaan keuangan desa yang difasilitasi	100	100		52,100,000		KECAMATAN KAPUAS
			100	100		78,324,000		KECAMATAN SEKAYAM
			100	100		63,486,000		KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100		30,000,000		KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100		97,470,000		KECAMATAN MELIAU

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
			100	100		54,468,000		KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100		20,000,000		KECAMATAN ENTIKONG
			100	100		74,770,000		KECAMATAN PARINDU
			100	100		35,000,000		KECAMATAN MUKOK
			100	100		59,980,000		KECAMATAN BONTI
			100	100		10,000,000		KECAMATAN BALAI
			100	100		43,220,000		KECAMATAN BEDUAI
			100	100		42,000,000		KECAMATAN JANGKANG
			0	0		0		KECAMATAN TOBA
			100	100		36,000,000		KECAMATAN NOYAN
	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan kecamatan (%)	100	100		30,331,942		KECAMATAN KAPUAS
			100	100		34,946,000		KECAMATAN SEKAYAM
			100	100		40,512,400		KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100		54,695,000		KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100		37,878,000		KECAMATAN MELIAU
			100	100		25,142,000		KECAMATAN KEMBAYAN

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
			100	100		23,330,000		KECAMATAN ENTIKONG
			100	100		52,514,500		KECAMATAN PARINDU
			100	100		70,000,000		KECAMATAN MUKOK
			100	100		25,000,000		KECAMATAN BONTI
			100	100		32,556,000		KECAMATAN BALAI
			100	100		55,000,000		KECAMATAN BEDUAI
			100	100		35,792,000		KECAMATAN JANGKANG
			100	100		50,509,698		KECAMATAN TOBA
			100	100		34,360,000		KECAMATAN NOYAN
	Misi 8: Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat							
	Tujuan 8.1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara	Indeks Infrastruktur wilayah perbatasan antarnegara	n.a	53	85.01			
	Sasaran 8.1.1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antarnegara	Persentase rumah tangga pengguna listrik di wilayah perbatasan antarnegara	68.4	70.45	80.79			
		Persentase jalan kabupaten dan jalan non status dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di wilayah perbatasan antarnegara	N/A 60	47.58 70				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja		Pendanaan (Rp.)		
				target	realisasi	Target	Realisasi	
		Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara	24					
		Persentase ketersediaan Puskesmas dan Pustu di wilayah perbatasan antarnegara	66.67	70	53.33			
	Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi	100	100		281,764,000		SETDA

Tabel 6. 5
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sanggau Tahun 2021-2024

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Misi 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan													
			Misi 8: Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat													
			Tujuan 1.1. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	**Indeks Infrastruktur**	**35,64**	**41,74**		**43,50**		**45,17**		**46,42**		**46,42**		
			Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	35,64	41,75		42,75		43,75		44,75		44,75		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Persentase Jalan Poros Desa dan Perkotaan dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	57,71	60,19		61,03		61,87		62,71		62,71		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Persentase Kemantapan Jalan di wilayah perbatasan antar negara	45,98	49,18		50,78		52,38		53,98		53,98		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Persentase Prasarana perhubungan darat	n/a	65,00		76,00		86,00		92,00		92,00		Dinas Perhubungan
				Persentase layanan telekomunikasi	65,30	65,00		76,00		86,00		92,00		92,00		Dinas Komunikasi dan Informasi
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan kabupaten dibangun/dipelihara	4,50%	8,50%	68.844.383.823	10,50%	68.087.966.036	12,50%	70.130.605.017	14,50%	72.234.523.168	14,50%	279.297.478.044	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jalan dan Jembatan Desa yang di bangun/dipelihara	60,00%	60,00%	48.783.492.192	60,00%	44.181.429.481	60,00%	45.506.872.365	60,00%	46.872.078.536	60,00%	185.343.872.575	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik	29,29%	41,99%	4.249.522.984	48,33%	4.493.154.466	54,68%	4.627.949.100	61,03%	4.766.787.573	61,03%	18.137.414.123	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas sarana umum layak	48,00%	60,00%	14.759.743.182	62,00%	19.751.320.977	65,00%	20.343.860.606	67,00%	20.954.176.424	67,00%	75.809.101.190	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik	44,00%	47,00%	7.964.743.692	52,00%	5.612.148.036	53,00%	5.780.512.477	55,00%	5.953.927.851	55,00%	25.311.332.056	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga kondisi baik	15,00%	40,00%	595.128.745	50,00%	567.697.265	55,00%	584.728.183	60,00%	602.270.028	60,00%	2.349.824.221	Dinas Perhubungan
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Ketersediaan informasi publik (%)	100%	100%	1.897.565.196	100%	753.061.035	100%	775.652.866	100%	798.922.452	100%	4.225.201.549	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)	100%	100%	2.172.537.000	100%	2.180.961.167	100%	2.246.390.002	100%	2.313.781.702	100%	8.913.669.871	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi	100%	100%	974.853.600	100%	985.985.185	100%	1.015.564.741	100%	1.046.031.683	100%	4.022.435.208	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)												
			Sasaran 1.1.2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	Rasio rumah layak huni	0,7705	0,1348		0,1353		0,1359		0,1363		0,1363		Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang dibangun dan dipelihara	60,00%	60,00%	15.659.493.000	60,00%	16.746.027.640	60,00%	17.248.408.469	60,00%	17.765.860.723	60,00%	67.419.789.832	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih	41,06%	46,17%	12.872.159.082	48,59%	17.545.770.935	50,90%	18.072.144.063	53,13%	18.614.308.385	53,13%	67.104.382.465	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan area pelayanaan sampah	n/a	n.a	0	32,40%	1.797.778.126	35,64%	1.851.711.470	39,20%	1.907.262.814	39,20%	5.556.752.410	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	47,17%	50,12%	4.475.950.171	51,50%	6.336.065.467	52,83%	6.526.147.431	54,09%	6.721.931.854	54,09%	24.060.094.923	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan/gertak lingkungan yang terbangun	51,94%	69,82%	22.925.278.751	77,32%	25.121.616.812	83,93%	25.875.265.316	89,75%	26.651.523.276	89,75%	100.573.684.155	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif	47,73%	65,91%	16.076.352.800	77,27%	15.104.588.835	88,64%	15.557.726.500	100%	16.024.458.295	100%	62.763.126.430	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perumahan	100%	100%	421.962.000	100%	294.164.120	100%	302.989.044	100%	312.078.715	100%	1.331.193.879	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	60,00%	70,00%	1.842.408.000	75,00%	0	80,00%	1.916.104.320	85,00%	1.973.587.450	85,00%	5.732.099.770	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
			Sasaran 1.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara	Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara	62,84	49,18		50,78		52,38		53,98		53,98		
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi	100%	100%	240.130.500	100%	232.215.635	100%	239.182.104	100%	246.357.567	100%	957.885.806	Sekretariat Daerah
			Tujuan 1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,40	60,50		60,54		60,58		60,66		60,66		Dinas Lingkungan Hidup
			Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	48,18	50,02		50,52		51,02		51,52		51,52		Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas udara	91,14	93,67		93,68		93,69		93,70		93,70		Dinas Lingkungan Hidup
			Sasaran 1.2.2 Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan	44,02	43,47		43,20		42,92		42,74		42,74		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup(%)	0%	100%	450.000.000	100%	472.500.000	100%	486.675.000	100%	501.275.250	100%	1.910.450.250	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	919.940.700	100%	630.725.786	100%	649.647.560	100%	669.136.986	100%	2.869.451.032	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	100%	1.678.925.668	100%	1.772.547.743	100%	1.825.724.175	100%	1.880.495.901	100%	7.157.693.487	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani	100%	100%	12.781.000	100%	27.924.568	100%	28.762.305	100%	29.625.174	100%	99.093.047	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100%	100%	166.308.800	100%	145.965.104	100%	150.344.057	100%	154.854.379	100%	617.472.340	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA	0%	100%	25.798.200	100%	25.000.148	100%	25.750.152	100%	26.522.657	100%	103.071.157	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pelaksama PPLH yang diberikan penghargaan	100%	100%	125.554.621	100%	101.318.971	100%	104.358.540	100%	107.489.296	100%	438.721.428	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	100%	100%	36.871.000	100%	40.859.760	100%	42.085.553	100%	43.348.119	100%	163.164.432	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	28,60%	31,10%	2.485.826.000	32,40%	2.505.671.348	33,60%	2.580.841.488	34,90%	2.658.266.733	34,90%	10.230.605.570	Dinas Lingkungan Hidup
			Sasaran 1.2.3 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Lingkungan Hidup
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian tata ruang (%)	100%	100%	688.587.000	100%	1.026.098.827	100%	1.056.881.792	100%	1.088.588.246	100%	3.860.155.864	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
			Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing													
			Tujuan 2.1 Terwujudnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang berkualitas	**Indeks Pembangunan Manusia**	65,67	66,33		66,85		67,23		67,75		67,75		
			Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	11,56	11,67		11,77		11,87		11,97		11,97		
				Rata-rata lama sekolah	6,95	7,15		7,21		7,27		7,33		7,33		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan layanan pendidikan dasar	100%	100%	124.990.601.323	100%	118.701.765.992	100%	122.262.818.972	100%	125.930.703.541	100%	491.885.889.828	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	n.a	n.a	0	n.a	0	100%	300.000.000	100%	200.000.000	60%	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	n.a	n.a	0	n.a	0	55%	100.000.000	60%	100.000.000	60%	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi pendidikan (%)	n.a	n.a	0	n.a	0	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	270.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan bahasa dan sastra yang difasilitasi	n.a	n.a	0	n.a	0	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	170.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase penggunaan koleksi perpustakaan daerah	10,00%	15,00%	771.209.300	15,00%	767.511.058	20,00%	790.536.390	20,00%	814.252.481	100%	3.143.509.229	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5.224	n/a	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka harapan hidup	71,35	72,03		72,64		73,26		73,88		73,88		
				Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1.34		1.32		1.3		1,28		1,28		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	0,09 point	0,50 point	132.130.841.532	0,50 point	129.070.164.823	0,50 point	132.942.269.768	0,50 point	136.930.537.861	0,50 point	531.073.813.983	Dinas Kesehatan
							3.534.957.567		14.555.341.532		14.992.001.778		15.441.761.831		48.524.062.708	RSUD M. Th. Djaman
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi	20,00%	30,00%	387.624.000	35,00%	16.719.827.065	40,00%	17.221.421.877	45,00%	17.738.064.533	45,00%	52.066.937.475	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	90,00%	90,00%	701.570.400	90,00%	241.304.250	90,00%	248.543.378	90,00%	255.999.679	90,00%	1.447.417.706	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	77,79%	80,00%	1.395.355.832	80,00%	1.564.419.859	80,00%	1.611.352.455	80,00%	1.659.693.028	80,00%	6.230.821.174	Dinas Kesehatan
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.26 point	2.24 point	183.701.800	2.22 point	113.945.876	2.20 point	117.364.252	2.18 point	120.885.180	2.18 point	535.897.108	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	63,73%	68,73%	5.869.004.500	71,23%	4.823.138.731	73,73%	4.967.832.893	76,23%	5.116.867.880	76,23%	20.776.844.004	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	27,63%	56,57%	149.118.200	71,04%	1.068.471.866	85,51%	1.100.526.022	100%	1.133.541.803	100%	3.451.657.891	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	100%	100%	3.130.653.926	100%	1.714.960.711	100%	1.766.409.532	100%	1.819.401.818	100%	8.431.425.988	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sasaran 2.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	99,20	96,97		96,97		96,97		96,97		96,97		
				Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	8.410	8.381		8.518		8.654		8.791		8.791		
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejateraan Sosial yang dibina	25,00%	55,00%	439.972.100	70,00%	194.436.899	85,00%	200.270.006	100%	206.278.106	100%	1.040.957.111	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	57.468.800	100%	29.999.906	100%	30.899.903	100%	31.826.900	100%	150.195.509	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	1.841.560.200	100%	1.354.999.503	100%	1.395.649.488	100%	1.437.518.973	100%	6.029.728.164	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	96,30%	97,00%	2.023.730.600	97,45%	1.106.894.847	97,75%	1.140.101.692	98,20%	1.174.304.743	98,20%	5.445.031.883	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/non alam tertangani	100%	100%	115.375.000	100%	128.048.548	100%	131.890.004	100%	135.846.705	100%	511.160.257	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	100%	100%	263.800.000	100%	59.862.335	100%	61.658.205	100%	63.507.951	100%	448.828.491	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Sasaran 2.1.4 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	61,35	81,11		81,23		81,34		81,47		81,47		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100%	100%	1.485.248.700	100%	1.658.487.415	100%	1.708.242.037	100%	1.759.489.299	100%	6.611.467.451	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	144.486.000	100%	121.925.517	100%	125.583.283	100%	129.350.781	100%	521.345.580	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (%)	100%	100%	55.321.100	100%	87.942.592	100%	90.580.870	100%	93.298.296	100%	327.142.858	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	15,98%	49,11%	189.725.400	66,27%	186.544.175	83,43%	192.140.500	100%	197.904.715	100%	766.314.791	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak	100%	100%	212.854.000	100%	225.833.796	100%	232.608.810	100%	239.587.074	100%	910.883.680	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Misi 3: Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal													
			Tujuan 3.1 Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	**Pertumbuhan ekonomi**	4,30	3,54		3,62		3,71		3,79		3,79		
				Indeks Gini	0,33	0,31		0,31		0,30		0,30		0,30		
				Angka Kemiskinan	4,57	4,36		4,26		4,16		4,07		4,07		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,07	3,21		3,20		3,20		3,20		3,20		
				Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	40,810	44,557		46,345		48,132		49,920		49,920		
			Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	5.646.388	6.911.466		7.457.947		8.047.637		8.683.953		8.683.953		
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19,38	19,27		19,22		19,18		19,18		19,18		
				Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,10	12,15		12,18		12,20		12,20		12,20		
				Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	370.550	292.973		297.621		302.342		307.139		307.139		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan utama(%)	7,39%	7,39%	100.000.000	7,39%	105.000.000	7,39%	110.250.000	7,39%	115.762.500	7,39%	431.012.500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (%)	0,00%	10,50%	397.858.000	10,80%	417.750.900	11,10%	438.638.445	11,40%	460.570.367	11,40%	1.714.817.712	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase tanaman perkebunan yang diremajakan	5,13%	5,73%	269.597.600	6,03%	283.077.480	6,33%	297.231.354	6,63%	312.092.922	6,63%	1.161.999.356	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase peternak yang dibina	55,00%	70,00%	2.328.143.000	80,00%	2.444.550.150	90,00%	2.566.777.658	100%	2.695.116.540	100%	10.034.587.348	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Ketersediaan prasarana pertanian (%)	3,20%	4,03%	17.553.565.833	4,03%	10.789.675.479	4,03%	11.113.365.743	4,03%	11.446.766.716	4,03%	50.903.373.771	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase tanaman perkebunan yang dikembangkan	76,15%	84,11%	2.254.071.610	88,09%	2.366.775.191	92,07%	2.485.113.950	96,05%	2.609.369.648	96,05%	9.715.330.399	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Bebas Penyakit Ternak (%)	100%	100%	1.158.928.000	100%	470.380.960	100%	484.492.389	100%	499.027.160	100%	2.612.828.509	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	8,00%	8,00%	258.837.900	8,00%	271.779.795	8,00%	279.933.189	8,00%	288.331.185	8,00%	1.098.882.068	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	123.394.400	100%	129.564.120	100%	133.451.044	100%	137.454.575	100%	523.864.139	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase penerapan ISPO dan RSPO	29,03	41,90%	255.074.400	48,39%	98.734.170	54,84%	101.696.195	61,29%	104.747.081	61,29%	560.251.846	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian	14,00%	48,40%	1.892.276.100	65,60%	2.386.889.905	82,80%	2.458.496.602	100%	2.532.251.500	100%	9.269.914.107	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase kelompok petani kebun yang bermitra dengan perusahaan	1,13%	5,65%	383.542.400	7,91%	404.919.372	10,17%	417.066.953	12,43%	429.578.962	12,43%	1.635.107.687	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6,20%	7,00%	432.635.700	8,00%	236.175.367	9,00%	243.260.628	10,00%	250.558.447	10,00%	1.162.630.142	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8,30%	2,30%	1.834.330.340	2,58%	1.208.816.929	2,84%	1.245.081.437	3,12%	1.282.433.880	3,12%	5.570.662.586	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)	8,57%	17,14%	222.777.700	20,00%	146.177.217	22,86%	150.562.534	17,14%	155.079.410	17,14%	674.596.860	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase gudang yg teregistrasi	33,64%	48,60%	31.477.900	56,07%	10.279.528	63,55%	10.587.914	71,03%	10.905.551	71,03%	63.250.893	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya tampung pasar tehadap pedagang (%)	85,61%	90,43%	351.827.300	95,45%	225.991.193	95,26%	232.770.929	97,67%	239.754.057	97,67%	1.050.343.478	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersedian informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	150.500.000	100%	58.556.640	100%	60.313.339	100%	62.122.739	100%	331.492.719	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	3,00%	3,00%	63.110.600	3,00%	16.905.319	3,00%	17.412.479	3,00%	17.934.853	3,00%	115.363.250	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	1,97%	26,64%	93.493.300	41,44%	97.364.404	56,24%	100.285.336	71,04%	103.293.896	71,04%	394.436.936	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Ketersediaan data UDKM	100%	100%	33.274.800	100%	13.519.208	100%	13.924.784	100%	14.342.528	100%	75.061.320	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	5.463.644.666	100%	165.875.787	100%	170.852.061	100%	175.977.622	100%	5.976.350.136	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang dibina	25,50%	30,00%	113.088.300	32,00%	37.828.596	35,00%	38.963.454	35,00%	40.132.357	35,00%	230.012.707	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri	100%	100%	136.846.200	100%	61.803.217	100%	63.657.314	100%	65.567.033	100%	327.873.763	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina	16,71%	50,13%	184.576.700	66,84%	133.273.487	83,55%	137.271.692	100%	141.389.842	100%	596.511.721	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	15,34	24,54	0	25,77	0	26,99	50.000.000	28,22	50.000.000	28,22%	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku usaha mikro terlatih	2,52%	4,50%	442.387.300	7,50%	390.302.170	10,00%	402.011.235	12,50%	414.071.572	12,50%	1.648.772.277	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang didampingi/dibina	n/a	n/a	0	n/a	0	2,66	50.000.000	3,42	50.000.000	3,42	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina	19,00%	22,00%	50.512.800	24,00%	16.312.442	25,00%	16.801.815	30,00%	17.305.870	30,00%	100.932.927	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	0,17	n/a	0	n/a	0	0,32	25.000.000	0,35	25.000.000	0,35	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	54,00%	66,00%	688.589.777	74,00%	469.979.758	80,00%	484.079.151	90,00%	498.601.525	90,00%	2.141.250.211	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi pariwisata daerah	41,00%	58,33%	214.903.500	66,66%	158.701.820	66,66%	163.462.875	75,00%	168.366.761	75,00%	705.434.955	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase fasilitasi HaKI ekonomi kreatif	n/a	n/a	0	10,00%	50000000	20,00%	51500000	30,00%	53045000	30,00%	154.545.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	45,68%	55,17%	102.853.600	60,34%	349.999.326	60,34%	360.499.306	65,51%	371.314.285	65,51%	1.184.666.517	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100%	100%	2.420.401.790	100%	2.451.561.181	100%	2.525.108.016	100%	2.600.861.257	100%	9.997.932.244	Sekretariat Daerah
			Sasaran 3.1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi PMDN	8,50	8,85		5,00		5,50		5,50		5,50		
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ketersedian informasi penanaman modal	100%	100%	87.433.000	100%	35.096.810	100%	36.149.714	100%	37.234.206	100%	195.913.730	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi nilai invesatsi	100%	100%	224.186.800	100%	181.856.838	100%	187.312.543	100%	192.931.919	100%	786.288.101	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu	85,00%	90,00%	449.208.000	90,00%	366.591.002	95,00%	377.588.732	100%	388.916.394	100%	1.582.304.128	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	80,00%	80,00%	434.703.000	80,00%	335.105.879	85,00%	345.159.055	85,00%	355.513.827	85,00%	1.470.481.761	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi	100%	100%	78.060.200	100%	21.945.598	100%	22.603.966	100%	23.282.085	100%	145.891.849	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Sasaran 3.1.3 Menurunnya angka pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,31	68,31		67,55		66,79		66,02		66,02		
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,23%	0,30%		0,33%		0,37%		0,40%		0,40%		
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	16,00%	64,00%	241.284.504	64,00%	158.294.775	64,00%	163.043.618	64,00%	167.934.927	64,00%	730.557.824	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap, dan mandiri/perusahaan	12,00%	42,00%	137.619.000	48,00%	89.337.537	53,00%	92.017.663	64,00%	94.778.193	64,00%	413.752.393	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial tertangani	100%	100%	375.013.200	100%	299.687.518	100%	308.678.144	100%	317.938.488	100%	1.301.317.349	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Ketersedian Rencana Kawasan Transmigrasi	100%	100%	237.808.500	100%	108.475.922	100%	111.730.200	100%	115.082.106	100%	573.096.727	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi yang dibina	100%	100%	47.191.500	100%	39.826.980	100%	41.021.789	100%	42.252.443	100%	170.292.712	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan wirausaha muda yang dibina	100%	100%	1.192.155.290	100%	1.124.166.074	100%	1.157.891.056	100%	1.192.627.788	100%	4.666.840.208	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Sasaran 3.1.4 Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20,00%	20,00%	88.715.200	20,00%	69.550.836	20,00%	71.637.361	20,00%	73.786.482	20,00%	303.689.879	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi	0,00%	20,00%	369.077.200	20,00%	77.732.888	20,00%	80.064.875	20,00%	82.466.821	20,00%	609.341.784	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat	95,38%	97,71%	1.470.201.500	100%	552.495.032	100%	569.069.883	100%	586.141.979	100%	3.177.908.394	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
			Sasaran 3.1.5 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	73,63	80,63		82,5		84,04		85,45		85,45		
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Lumbung Pangan (%)	12,88%	13,49%	629.466.482	14,11%	50.390.318	14,72%	51.902.028	15,33%	53.459.088	15,33%	785.217.916	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan utama	104,60%	106,69%	1.064.958.300	108,82%	726.123.972	110,99%	747.907.691	113,21%	770.344.922	113,21%	3.309.334.885	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase daearah rawan pangan	0,00%	0,00%	125.209.000	0,00%	260.704.815	0,00%	268.525.959	0,00%	276.581.738	0,00%	931.021.513	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	100%	100%	56.418.200	100%	141.207.796	100%	145.444.030	100%	149.807.351	100%	492.877.377	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
			Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik													
			Tujuan 4.1. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan transparan dalam memberikan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	48,14	52		57		61		66		66		
			Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	47,41	50		57		66		71		71		
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0036	3,1200		3,2200		3,4000		3,4200		3,4200		
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	3,00		3,30		3,60		3,90		3,90		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	27.654.636.200	100%	31.794.424.273	100%	32.748.257.001	100%	33.730.704.711	100%	125.928.022.185	Sekretariat Daerah
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	321.003.406.602	100%	373.184.701.318	100%	384.380.242.358	100%	395.911.649.628	100%	1.474.479.999.906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kesehatan	100%	100%	125.950.784.959	100%	133.762.563.804	100%	137.775.440.718	100%	141.908.703.940	100%	539.397.493.421	Dinas Kesehatan & RSUD M. Th Djaman
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	11.061.486.397	100%	10.714.530.968	100%	11.035.966.897	100%	11.367.045.904	100%	44.179.030.166	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan	100%	100%	5.938.855.313	100%	5.549.940.779	100%	5.716.439.002	100%	5.887.932.172	100%	23.093.167.267	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100%	100%	6.940.910.354	100%	6.380.981.067	100%	6.572.410.499	100%	6.769.582.814	100%	26.663.884.734	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana	100%	100%	3.896.528.474	100%	3.605.374.076	100%	3.713.535.298	100%	3.824.941.357	100%	15.040.379.206	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	6.753.040.321	100%	6.211.411.984	100%	6.397.754.344	100%	6.589.686.974	100%	25.951.893.622	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100%	4.413.445.068	100%	4.226.818.061	100%	4.353.622.603	100%	4.484.231.281	100%	17.478.117.013	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan pangan, perikanan serta pertanian	100%	100%	16.085.744.635	100%	18.687.211.455	100%	19.247.827.799	100%	19.825.262.633	100%	73.846.046.521	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup	100%	100%	6.974.527.332	100%	6.847.211.780	100%	7.052.628.133	100%	7.264.206.977	100%	28.138.574.223	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	5.543.637.896	100%	6.809.052.080	100%	7.013.323.642	100%	7.223.723.352	100%	26.589.736.970	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	100%	5.195.175.220	100%	7.239.226.822	100%	7.456.403.627	100%	7.680.095.735	100%	27.570.901.404	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan	100%	100%	9.220.775.415	100%	8.575.999.246	100%	8.833.279.223	100%	9.098.277.600	100%	35.728.331.484	Dinas Perhubungan
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	100%	100%	5.842.572.655	100%	4.532.444.246	100%	4.668.417.573	100%	4.808.470.101	100%	19.851.904.575	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	100%	100%	5.984.772.178	100%	5.593.981.972	100%	5.761.801.431	100%	5.934.655.474	100%	23.275.211.055	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan penanaman	100%	100%	6.354.700.339	100%	5.699.816.842	100%	5.870.811.347	100%	6.046.935.688	100%	23.972.264.216	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				modal, dan pelayanan terpadu satu pintu												
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	100%	100%	4.840.017.169	100%	4.558.326.605	100%	4.695.076.403	100%	4.835.928.695	100%	18.929.348.872	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	381.050.100	100%	400.102.605	100%	412.105.683	100%	424.468.854	100%	1.617.727.242	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan	100%	100%	4.414.810.603	100%	3.884.054.058	100%	4.000.575.680	100%	4.120.592.950	100%	16.420.033.291	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan pertanian	100%	100%	8.047.191.754	100%	8.812.276.445	100%	9.076.644.738	100%	9.348.944.081	100%	35.285.057.018	Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan	100%	100%	44.372.465.134	100%	38.179.031.696	100%	39.324.402.647	100%	40.504.134.726	100%	162.380.034.203	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik yang disampaikan kepada kepala daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi terhadap isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang disampaikan kepada kepala daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi terhadap isu strategis bidang kemasyarakatan, dan sumber daya manusia yang disampaikan kepada kepala daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang Pemerintahan bidang urusan Sekretariat DPRD	100%	100%	33.912.854.188	100%	34.585.366.684	100%	35.622.927.685	100%	36.691.615.515	100%	140.812.764.072	Sekretariat DPRD
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti	100%	100%	2.075.948.240	100%	2.386.859.680	100%	2.667.465.470	100%	2.953.489.434	100%	10.083.762.824	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	100%	1.233.321.183	100%	1.155.017.634	100%	1.855.017.634	100%	2.851.126.800	100%	7.094.483.251	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tersusun dengan baik	100%	100%	440.330.430	100%	297.984.823	100%	497.984.823	100%	597.984.823	100%	1.834.284.899	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik	100%	100%	665.099.924	100%	794.070.292	100%	894.070.292	100%	994.070.292	100%	3.347.310.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tersusun dengan baik	100%	100%	479.973.921	100%	267.230.531	100%	467.230.531	100%	567.230.531	100%	1.781.665.514	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan	100%	100%	6.065.759.323	100%	6.431.661.990	100%	6.624.611.850	100%	6.823.350.205	100%	25.945.383.368	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan	100%	100%	10.611.386.629	100%	8.818.448.727	100%	9.083.002.189	100%	9.355.492.254	100%	37.868.329.799	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah	100%	100%	8.877.545.005	100%	9.621.930.457	100%	9.910.588.371	100%	10.207.906.022	100%	38.617.969.855	Badan Pendapatan Daerah
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang urusan pemerintahan bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	11.783.341.945	100%	23.083.590.021	100%	23.776.097.722	100%	24.489.380.653	100%	83.132.410.341	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat Daerah	100%	100%	6.660.568.902	100%	6.255.343.574	100%	6.443.003.881	100%	6.636.293.998	100%	25.995.210.355	Inspektorat
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	7.679.846.377	100%	7.332.175.422	100%	7.552.140.685	100%	7.778.704.905	100%	30.342.867.389	Kecamatan Kapuas
					100%	100%	2.721.882.929	100%	2.606.713.140	100%	2.684.914.534	100%	2.765.461.970	100%	10.778.972.573	Kecamatan Mukok
					100%	100%	2.189.711.432	100%	2.176.296.812	100%	2.241.585.716	100%	2.308.833.288	100%	8.916.427.248	Kecamatan Noyan
					100%	100%	3.258.859.830	100%	3.145.903.984	100%	3.240.281.104	100%	3.337.489.537	100%	12.982.534.454	Kecamatan Jangkang
					100%	100%	2.910.552.424	100%	2.788.039.829	100%	2.871.681.024	100%	2.957.831.455	100%	11.528.104.731	Kecamatan Bonti
					100%	100%	2.518.111.574	100%	2.408.154.910	100%	2.480.399.557	100%	2.554.811.544	100%	9.961.477.585	Kecamatan Beduai
					100%	100%	3.025.174.974	100%	2.903.977.286	100%	2.991.096.605	100%	3.080.829.503	100%	12.001.078.367	Kecamatan Sekayam
					100%	100%	3.378.915.750	100%	3.265.635.152	100%	3.363.604.207	100%	3.464.512.333	100%	13.472.667.441	Kecamatan Kembayan
					100%	100%	2.733.298.504	100%	2.719.334.411	100%	2.800.914.443	100%	2.884.941.877	100%	11.138.489.235	Kecamatan Parindu
					100%	100%	2.693.556.500	100%	2.585.589.499	100%	2.663.157.184	100%	2.743.051.899	100%	10.685.355.082	Kecamatan Tayan Hulu
					100%	100%	3.161.168.766	100%	3.056.499.615	100%	3.148.194.603	100%	3.242.640.442	100%	12.608.503.426	Kecamatan Tayan Hilir
					100%	100%	3.187.045.380	100%	3.046.184.138	100%	3.137.569.662	100%	3.231.696.752	100%	12.602.495.932	Kecamatan Balai
					100%	100%	2.265.700.818	100%	2.229.355.833	100%	2.296.236.508	100%	2.365.123.603	100%	9.156.416.762	Kecamatan Toba
					100%	100%	3.014.484.749	100%	2.951.082.988	100%	3.039.615.478	100%	3.130.803.942	100%	12.135.987.157	Kecamatan Meliau
					100%	100%	2.437.201.194	100%	2.322.946.532	100%	2.392.634.928	100%	2.464.413.976	100%	9.617.196.630	Kecamatan Entikong

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	3.078.951.919	100%	2.920.655.275	100%	3.008.274.933	100%	3.098.523.181	100%	12.106.405.308	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,1	7,06		7,06		7,06		5,59		5,59		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah & Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,778	1,167	1,170	1,170	1,385	1,385	1,585	1,585		1,585		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja keuangan yang tepat waktu	100%	100%	261.220.831.080	100%	276.723.623.063	100%	285.025.331.755	100%	293.576.091.708	100%	1.116.545.877.605	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang sudah terinventarisir secara Baik	60,00%	60,00%	1.990.392.400	60,00%	1.760.983.289	65,00%	1.813.812.788	70,00%	1.868.227.171	70,00%	7.433.415.648	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak	5,00%	5,00%	2.401.448.900	5,00%	2.405.595.409	5,00%	2.477.763.271	5,00%	2.552.096.169	5,00%	9.836.903.750	Badan Pendapatan Daerah
			Sasaran 4.1.3 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rasio ASN	0,011	0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	80,00%	90,00%	2.918.771.600	95,00%	2.502.496.940	95,00%	2.577.571.848	95,00%	2.654.899.004	95,00%	10.653.739.392	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Sasaran 4.1.4 Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,36	2,05		2,10		2,30		2,40		2,40		
				Indeks kepuasan masyarakat	88,74	85,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi	55,00%	65,00%	3.388.411.100	70,00%	2.825.201.975	75,00%	2.909.958.034	80,00%	2.997.256.775	80,00%	12.120.827.885	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja	22,77%	26.79 %	1.931.381.700	26.79 %	1.919.288.305	26.79 %	1.976.866.954	26.79 %	2.036.172.963	26.79 %	7.863.709.922	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3	0,00%	32.56 %	309.150.000	53.49 %	320.503.291	76.74 %	330.118.390	100%	340.021.941	100%	1.299.793.622	Inspektorat
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	100%	18.602.942.708	100%	15.141.414.105	100%	15.595.656.528	100%	16.063.526.224	100%	65.403.539.565	Sekretariat DPRD
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	85,00%	100%	200.386.900	100%	144.094.760	100%	148.417.603	100%	152.870.131	100%	645.769.394	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip sesuai standar	0,00%	39,63%	301.551.500	60,47%	290.284.514	81,40%	298.993.049	100%	307.962.841	100%	1.198.791.904	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip kategori baik	10,00%	20,00%	151.271.900	25,00%	87.462.403	30,00%	90.086.275	35,00%	92.788.863	35,00%	421.609.441	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan informasi arsip	30,00%	30,00%	0,00%	30,00%	0	70,00%	20.000.000	80,00%	20.600.000	80,00%	40.600.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan	85,47%	92,00%	1.985.206.400	95,00%	812.110.558	100%	836.473.875	100%	861.568.091	100%	4.495.358.924	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	65,00%	75,00%	697.088.400	80,00%	640.653.851	90,00%	659.873.467	90,00%	679.669.671	90,00%	2.677.285.388	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	23,81%	100%	1.052.570.900	100%	335.630.515	100%	345.699.430	100%	356.070.413	100%	2.089.971.259	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data kependudukan	100%	100%	58.562.300	100%	57.161.170	100%	58.876.005	100%	60.642.285	100%	235.241.760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Misi 5: Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis													
			Tujuan 5.1. Terwujudnya mentalitas kehidupan sosial yang tertib, tumbuh kembang kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	n/a	69		72		75		80		80		
			Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Cakupan konflik SARA yang ditangani	100	100		100		100		100		100		
				Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,00205		0,00203		0,00201		0,00199		0,00199		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan	100%	100%	3.571.694.950	100%	3.285.594.185	100%	3.384.162.011	100%	3.485.686.871	100%	13.727.138.016	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi	0%	100%	44.000.000	100%	123.374.754	100%	127.075.997	100%	130.888.277	100%	425.339.027	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	2.040.953.000	100%	1.149.332.440	100%	1.183.812.413	100%	1.219.326.786	100%	5.593.424.639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)	100%	100%	308.745.000	100%	271.610.110	100%	279.758.413	100%	288.151.166	100%	1.148.264.689	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan kegiatan FKUB yang difasilitasi (%)	100%	100%	477.147.000	100%	188.496.939	100%	194.151.847	100%	199.976.403	100%	1.059.772.189	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan kegiatan Tim Tepadu Penanganan Konflik SARA yang difasilitasi (%)	100%	100%	267.807.700	100%	280.648.949	100%	289.068.417	100%	297.740.470	100%	1.135.265.536	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang difasilitasi (%)	100%	100%	553.191.800	100%	433.723.488	100%	446.735.193	100%	460.137.248	100%	1.893.787.729	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai politik yang difasilitasi (%)	100%	100%	2.311.094.700	100%	2.348.653.484	100%	2.419.113.089	100%	2.491.686.481	100%	9.570.547.754	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase fasilitasi Kepramukaan	0%	100%	543.168.200	100%	632.853.338	100%	651.838.938	100%	671.394.106	100%	2.499.254.582	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Misi 6 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat													
			Tujuan 6.1 Terwujudnya kapastian dan penegakan supremasi hukum, serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	84,15	88,22		90,72		94,05		94,05		94,05		
			Sasaran 6.1.1 Meningkatnya ketentraman masyarakat	Indeks Ketentraman Masyarakat (IKM)	89,80	91,45		91,45		93,10		93,10		93,10		
			Sasaran 6.1.3 Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase Penanganan Bencana Daerah	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Daerah	100%	100%	1.538.748.200	100%	1.154.186.753	100%	1.188.812.356	100%	1.224.476.726	100%	5.106.224.035	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	75,00%	75,00%	992.970.400	75%	725.706.388	80,00%	747.477.580	80,00%	769.901.907	80,00%	3.236.056.275	Satuan Polisi Pamong Praja
07	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	76.262.200	100%	76.165.388	100%	78.450.350	100%	80.803.860	100%	311.681.798	Kecamatan Kapuas
					100%	100%	37.247.600	100%	32.710.230	100%	33.691.537	100%	34.702.283	100%	138.351.650	Kecamatan Mukok
					100%	100%	89.537.000	100%	92.808.907	100%	95.593.174	100%	98.460.969	100%	376.400.051	Kecamatan Noyan
					100%	100%	85.421.700	100%	83.680.703	100%	86.191.124	100%	88.776.858	100%	344.070.385	Kecamatan Jangkang
					100%	100%	49.084.600	100%	56.942.536	100%	58.650.812	100%	60.410.336	100%	225.088.285	Kecamatan Bonti
					100%	100%	14.250.000	100%	10.650.000	100%	10.969.500	100%	11.298.585	100%	47.168.085	Kecamatan Beduai
					100%	100%	53.031.000	100%	56.190.272	100%	57.875.980	100%	59.612.260	100%	226.709.512	Kecamatan Sekayam
					100%	100%	67.430.800	100%	34.860.000	100%	35.905.800	100%	36.982.974	100%	175.179.574	Kecamatan Kembayan
					100%	100%	68.611.700	100%	37.325.824	100%	38.445.599	100%	39.598.967	100%	183.982.089	Kecamatan Parindu
					100%	100%	50.190.200	100%	40.546.526	100%	41.762.922	100%	43.015.809	100%	175.515.457	Kecamatan Tayan Hulu
					100%	100%	67.430.600	100%	67.421.658	100%	69.444.308	100%	71.527.637	100%	275.824.203	Kecamatan Tayan Hilir
					100%	100%	105.885.600	100%	120.558.119	100%	124.174.863	100%	127.900.108	100%	478.518.690	Kecamatan Balai
					100%	100%	51.363.800	100%	52.512.554	100%	54.087.931	100%	55.710.569	100%	213.674.853	Kecamatan Toba
					100%	100%	112.980.100	100%	49.776.698	100%	51.269.999	100%	52.808.099	100%	266.834.896	Kecamatan Meliau
					100%	100%	51.822.000	100%	51.825.206	100%	53.379.962	100%	54.981.361	100%	212.008.529	Kecamatan Entikong
			Sasaran 6.1.2 Meningkatnya ketertiban umum	Indeks Ketertiban Umum (IKU)	78,50	85,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	75,00%	80,00%	2.281.113.100	85%	1.848.960.167	90,00%	1.904.428.972	95,00%	1.961.561.841	95,00%	7.996.064.080	Satuan Polisi Pamong Praja
07	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	39.641.600	100%	39.542.286	100%	40.728.555	100%	41.950.411	100%	161.862.852	Kecamatan Kapuas
					100%	100%	27.022.700	100%	27.022.652	100%	27.833.332	100%	28.668.332	100%	110.547.015	Kecamatan Mukok
					100%	100%	19.589.000	100%	13.061.680	100%	13.453.530	100%	13.857.136	100%	59.961.347	Kecamatan Noyan

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					100%	100%	12.958.734	100%	12.455.961	100%	12.829.640	100%	13.214.529	100%	51.458.864	Kecamatan Jangkang
					100%	n/a	0	100%	5.000.000	100%	5.150.000	100%	5.304.500	100%	15.454.500	Kecamatan Bonti
					100%	100%	14.250.000	100%	30.381.690	100%	31.293.141	100%	32.231.935	100%	108.156.766	Kecamatan Beduai
					100%	100%	53.031.000	100%	663.696	100%	3.683.607	100%	3.794.115	100%	61.172.418	Kecamatan Sekayam
					100%	n/a	0	100%	9.000.000	100%	9.270.000	100%	9.548.100	100%	27.818.100	Kecamatan Kembayan
					100%	100%	8.760.600	100%	8.749.158	100%	9.011.633	100%	9.281.982	100%	35.803.372	Kecamatan Parindu
					100%	100%	49.318.300	100%	48.760.234	100%	30.223.041	100%	31.129.732	100%	159.431.307	Kecamatan Tayan Hulu
					100%	100%	1.894.700	100%	1.893.969	100%	3.950.788	100%	4.069.312	100%	11.808.769	Kecamatan Tayan Hilir
					100%	n/a	0	100%	5.000.000	100%	5.150.000	100%	5.304.500	100%	15.454.500	Kecamatan Balai
					100%	100%	6.595.800	100%	5.373.062	100%	5.534.254	100%	5.700.281	100%	23.203.397	Kecamatan Toba
					100%	100%	3.824.300	100%	2.560.779	100%	4.637.602	100%	4.776.730	100%	15.799.411	Kecamatan Meliau
					100%	100%	3.395.000	100%	3.302.704	100%	5.401.785	100%	5.563.839	100%	17.663.328	Kecamatan Entikong
			Misi 7: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan													
			Tujuan 7.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang optimal	Indeks Desa Membangun	0,6181	0,66272		0,67072		0,67889		0,68943		0,68943		
			Sasaran 7.1.1 Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Ketahanan Sosial	0,7315	0,7843		0,7938		0,8034		0,8159		0,8159		
				Indeks Ketahanan Ekonomi	0,4959	0,5317		0,5381		0,5447		0,5531		0,5531		
				Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	0,6270	0,6723		0,6804		0,6887		0,6994		0,6994		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	persentase desa yang tertata	25,77%	40,49%	317.093.300	47,85%	373.283.808	55,21%	384.482.322	62,58%	396.016.792	62,58%	1.470.876.222	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Bumdes aktif	41,10%	59,51%	206.618.400	68,71%	148.184.068	77,91%	152.629.590	87,12%	157.208.478	87,12%	664.640.536	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	55,82%	75,46%	476.108.300	85,27%	407.018.847	95,09%	419.229.412	100%	431.806.295	100%	1.734.162.854	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Sasaran 7.1.2 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	59,00	75,50		85,3		95,10		100		100,00		
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik	100%	100%	838.903.800	100%	647.020.057	100%	666.430.659	100%	686.423.578	100%	2.838.778.094	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	81.653.400	100%	81.651.594	100%	84.101.142	100%	86.624.176	100%	334.030.312	Kecamatan Kapuas
					100%	100%	3.141.200	100%	3.094.432	100%	3.187.265	100%	3.282.883	100%	12.705.780	Kecamatan Mukok
					100%	100%	49.456.000	100%	38.364.538	100%	39.515.474	100%	40.700.938	100%	168.036.951	Kecamatan Noyan
					100%	n/a	0	100%	5.931.090	100%	6.109.023	100%	6.292.293	100%	18.332.406	Kecamatan Jangkang
					100%	100%	1.936.200	100%	4.380.145	100%	4.511.549	100%	4.646.896	100%	15.474.790	Kecamatan Bonti
					100%	100%	10.000.000	100%	10.550.396	100%	10.866.908	100%	11.192.915	100%	42.610.219	Kecamatan Beduai
					100%	100%	155.304.000	100%	176.798.840	100%	182.102.805	100%	187.565.889	100%	701.771.535	Kecamatan Sekayam
					100%	100%	7.158.200	100%	17.598.931	100%	18.126.899	100%	18.670.706	100%	61.554.736	Kecamatan Kembayan
					100%	100%	140.801.200	100%	121.083.195	100%	124.715.691	100%	128.457.162	100%	515.057.247	Kecamatan Parindu
					100%	100%	8.693.600	100%	7.213.976	100%	7.430.395	100%	7.653.307	100%	30.991.278	Kecamatan Tayan Hulu

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					100%	100%	10.074.000	100%	10.072.291	100%	10.374.460	100%	10.685.694	100%	41.206.444	Kecamatan Tayan Hilir
					100%	100%	6.840.200	100%	6.723.970	100%	6.925.689	100%	7.133.460	100%	27.623.319	Kecamatan Balai
					100%	n/a	0	n/a	0	100%	5.000.000	100%	5.150.000	100%	10.150.000	Kecamatan Toba
					100%	100%	7.850.100	100%	3.638.199	100%	3.747.345	100%	3.859.765	100%	19.095.409	Kecamatan Meliau
					100%	100%	99.497.500	100%	99.335.105	100%	102.315.158	100%	105.384.613	100%	406.532.376	Kecamatan Entikong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	7.149.543.374	100%	4.873.306.022	100%	5.019.505.203	100%	5.170.090.359	100%	22.212.444.957	Kecamatan Kapuas
					100%	100%	78.542.900	100%	78.864.820	100%	81.230.765	100%	83.667.688	100%	322.306.172	Kecamatan Mukok
					100%	100%	47.040.000	100%	39.064.596	100%	40.236.534	100%	41.443.630	100%	167.784.760	Kecamatan Noyan
					100%	100%	39.850.700	100%	39.726.354	100%	40.918.145	100%	42.145.689	100%	162.640.888	Kecamatan Jangkang
					100%	100%	33.050.000	100%	32.989.760	100%	33.979.453	100%	34.998.836	100%	135.018.049	Kecamatan Bonti
					100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.600.000	100%	21.218.000	100%	81.818.000	Kecamatan Beduai
					100%	100%	31.560.800	100%	29.628.452	100%	30.517.306	100%	31.432.825	100%	123.139.382	Kecamatan Sekayam
					100%	100%	34.891.000	100%	32.292.852	100%	33.261.638	100%	34.259.487	100%	134.704.976	Kecamatan Kembayan
					100%	100%	31.109.100	100%	25.629.512	100%	26.398.397	100%	27.190.349	100%	110.327.359	Kecamatan Parindu
					100%	100%	36.365.500	100%	36.510.300	100%	37.605.609	100%	38.733.777	100%	149.215.186	Kecamatan Tayan Hulu
					100%	100%	35.698.900	100%	31.107.494	100%	32.040.719	100%	33.001.940	100%	131.849.053	Kecamatan Tayan Hilir
					100%	100%	28.873.000	100%	6.272.244	100%	6.460.411	100%	6.654.224	100%	48.259.879	Kecamatan Balai
					100%	100%	30.095.500	100%	32.059.575	100%	33.021.362	100%	34.012.003	100%	129.188.440	Kecamatan Toba
					100%	100%	31.568.600	100%	39.799.621	100%	40.993.610	100%	42.223.418	100%	154.585.249	Kecamatan Meliau
					100%	100%	26.763.000	100%	26.641.676	100%	27.440.926	100%	28.264.154	100%	109.109.756	Kecamatan Entikong
07	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	7.635.600	100%	7.635.116	100%	7.864.169	100%	8.100.095	100%	31.234.980	Kecamatan Kapuas
					100%	100%	46.088.600	100%	46.017.668	100%	47.398.198	100%	48.820.144	100%	188.324.610	Kecamatan Mukok
					100%	100%	59.161.000	100%	32.420.420	100%	33.393.033	100%	34.394.824	100%	159.369.276	Kecamatan Noyan
					100%	100%	19.563.900	100%	19.258.384	100%	19.836.136	100%	20.431.220	100%	79.089.639	Kecamatan Jangkang
					100%	n/a	0	n/a	0	100%	10.000.000	100%	10.300.000	100%	20.300.000	Kecamatan Bonti
					100%	100%	40.285.000	100%	40.331.598	100%	41.541.546	100%	42.787.792	100%	164.945.936	Kecamatan Beduai
					100%	100%	91.066.400	100%	1.863.180	100%	1.919.075	100%	1.976.648	100%	96.825.303	Kecamatan Sekayam
					100%	100%	67.500.000	100%	68.235.960	100%	70.283.039	100%	72.391.530	100%	278.410.529	Kecamatan Kembayan
					100%	100%	17.700.000	100%	12.350.000	100%	12.720.500	100%	13.102.115	100%	55.872.615	Kecamatan Parindu
					100%	100%	109.392.700	100%	105.645.892	100%	108.815.269	100%	112.079.727	100%	435.933.588	Kecamatan Tayan Hulu
					100%	100%	42.697.100	100%	38.427.378	100%	39.580.199	100%	40.767.605	100%	161.472.283	Kecamatan Tayan Hilir
					100%	n/a	0	n/a	0	100%	10.000.000	100%	10.300.000	100%	20.300.000	Kecamatan Balai
					100%	100%	54.925.000	100%	26.405.226	100%	27.197.383	100%	28.013.304	100%	136.540.913	Kecamatan Toba
					100%	100%	39.626.800	100%	27.305.545	100%	28.124.711	100%	28.968.453	100%	124.025.509	Kecamatan Meliau
					100%	100%	71.314.000	100%	73.174.404	100%	75.369.636	100%	77.630.725	100%	297.488.765	Kecamatan Entikong

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019-2024

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintah daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Perubahan RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai Tahun 2021 telah menerapkan prinsip dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan

urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II.

Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun tidak menjadi prioritas Bupati dan wakil Bupati Tahun 2019- 2024.

Adapun kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau yang telah menerapkan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, disajikan pada Tabel 7.2. Sedangkan kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau sebagaimana sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7. 1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024
Kabupaten Sanggau

URAIAN	REALISASI (TAHUN)		PROYEKSI LAMA (TAHUN)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Tidak Langsung	**810.979.272.596,00**	**844.444.820.211,00**	**916.755.015.034,10**	**916.795.562.698,26**	**916.981.270.721,73**	**981.289.452.804,70**
Belanja Pegawai	516.893.524.379,00	480.620.994.098,00	626.628.798.906,73	626.628.798.906,73	626.628.798.906,73	626.628.798.906,73
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	42.763.150.000,00	35.616.350.500,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	94.379.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.069.000.000,00	5.147.934.850,00	4.337.000.000,00	4.337.000.000,00	4.337.000.000,00	4.337.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prov/Kab/kota dan Pemerintahan Desa	4.059.248.400,00	4.060.970.000,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prov/Kab/kota dan Pemerintahan Desa	243.110.050.755,00	247.550.989.295,00	250.712.928.373,37	250.753.476.037,53	250.939.184.061,00	250.868.166.143,97
Belanja Tidak Terduga	84.299.062,00	71.447.581.468,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Langsung	**779.604.887.972,37**	**706.859.239.381,53**	**813.116.209.578,00**	**812.869.388.578,00**	**811.994.024.578,00**	**811.809.388.578,00**
TOTAL BELANJA	**1.590.584.160.568,37**	**1.499.531.375.868,87**	**1.729.871.224.612,10**	**1.729.664.951.276,26**	**1.728.975.295.299,73**	**1.793.098.841.382,70**

Tabel 7. 2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024
Kabupaten Sanggau

KODE	URAIAN	REALISASI (TAHUN)	PROYEKSI PERUBAHAN RPJMD (TAHUN)		
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**BELANJA**	**1.729.539.724.804,00**	**1.738.517.393.631,00**	**1.756.991.005.367,93**	**1.763.515.780.641,05**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.253.402.333.138,00**	**1.266.241.099.352,00**	**1.279.574.808.138,14**	**1.281.215.922.186,87**
5.1.01	Belanja Pegawai	609.228.906.670,00	695.156.043.262,00	709.059.164.127,24	723.240.347.409,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	613.195.010.336,00	535.250.708.090,00	540.603.215.170,90	529.791.150.867,48
5.1.05	Belanja Hibah	29.705.416.132,00	34.890.348.000,00	28.958.988.840,00	27.221.449.509,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.273.000.000,00	944.000.000,00	953.440.000,00	962.974.400,00
5.2	**Belanja Modal**	**219.228.446.602,00**	**200.622.652.817,00**	**202.628.879.345,17**	**204.655.168.138,62**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	76.564.205.766,00	62.761.298.646,00	63.388.911.632,46	64.022.800.748,78
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.044.535.492,00	67.575.155.173,00	68.250.906.724,73	68.933.415.791,98
5.2.04	Balanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.215.126.361,00	66.717.780.911,00	67.384.958.720,11	68.058.808.307,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.404.578.983,00	3.568.418.087,00	3.604.102.267,87	3.640.143.290,55
5.3	**Belanja Tidak terduga**	**8.186.018.156,00**	**10.428.500.200,00**	**10.949.925.210,00**	**11.168.923.714,20**
5.3.01	Belanja Tidak terduga	8.186.018.156,00	10.428.500.200,00	10.949.925.210,00	11.497.421.470,50
5.4	**Belanja Transfer**	**248.722.926.908,00**	**261.225.141.262,00**	**263.837.392.674,62**	**266.475.766.601,37**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.076.287.754,00	6.682.518.353,00	6.749.343.536,53	6.816.836.971,90
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.646.639.154,00	254.542.622.909,00	257.088.049.138,09	259.658.929.629,47

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1). Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2). Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19*.
3). Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4). Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).
5). Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6). Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu program perangkat daerah Tahun 2020 dan program perangkat daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Program Tahun 2020 disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebelum RPJMD

ditetapkan pada Agustus 2019. Program-program Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah.

Lebih rinci mengenai program perangkat daerah yang disertai pendanaan indikatif Tahun 2020 disajikan pada tabel 7.3.

2). Program Tahun 2021 sampai 2024 merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang baru maka indikator kinerja juga mengalami penyesuaian dengan *outcome* dan *output* yang akan dihasilkan atau dicapai. Namun tetap mengutamakan penggunaan indikator kinerja program (dan kegiatan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah) yang telah digunakan pada Tahun 2020. Kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam masing- masing Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai pendanaan indikatif Tahun 2021 sampai Tahun 2024 disajikan pada tabel 7.3.

Tabel 7. 3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2020
Kabupaten Sanggau

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
1.						
1.01	**Pendidikan**				**136.796.166.346**	
1.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan (%)	100	100	16.327.829.597	DISDIKBUD
1.01.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan	100	100	158.000.000	DISDIKBUD
1.01.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas pendidikan	baik	Baik	0	DISDIKBUD
1.01.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	1,19	2,04	195.855.000	DISDIKBUD
1.01.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	165.000.000	DISDIKBUD
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DISDIKBUD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DISDIKBUD
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ketersediaan PAUD/dusun	18,84	20,35	4.187.000.000	DISDIKBUD
		DAK Non Fisik			106.800.000	DISDIKBUD
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	114,45	115,56	80.719.842.000	DISDIKBUD

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	96,94	97,55		DISDIKBUD
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas baik	81,62	82,10		DISDIKBUD
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik	82,83	83,67		DISDIKBUD
		DAK SD			16.744.916.748	DISDIKBUD
		DAK SMP			15.286.896.000	DISDIKBUD
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terbentuk dan aktif	57,14	71,43	195.100.000 1.427.357.000	DISDIKBUD
		Tingkat kelulusan peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (%)	100	100		DISDIKBUD
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	86,65	89,32	0	DISDIKBUD
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	89,81	91,85		DISDIKBUD
		Persentase Guru SD/MI yang bersertifikasi	80,49	83,28		DISDIKBUD
		Persentase Guru SMP/MTs yang bersertifikasi	70,83	75,00		DISDIKBUD
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Ketersediaan layanan sistem informasi data pendidikan (%)	100	100	1.281.570.001	DISDIKBUD
		Ketersediaan dokumen perencanaaan dan pelaporan bidang pendidikan (%)	100	100		DISDIKBUD
1.02	**Kesehatan**				**187.497.053.825**	
1.02.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan kesehatan (%)	100	100	12.024.237.900	DINKES
		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100	100	1.914.465.800	DINKES_BLUD

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		pengelolaan kesehatan-BLUD (%)				
		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi RSUD M.Th. Djaman (%)	100	100	10.739.587.075	RSUD M.TH. DJAMAN
		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi RSUD M.Th. Djaman -BLUD (%)	100	100	26.000.000.000	RSUD M.TH. DJAMAN-BLUD
1.02.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan kesehatan	100	100	1.435.324.988	DINKES
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi RSUD M.Th. Djaman	100	100	1.347.800.000	RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kesehatan	baik	baik	0	DINKES
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur RSUD M.Th. Djaman	baik	baik	0	RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur RSUD M.Th. Djaman yang mengikuti diklat formal	0	38,36	500.650.000	RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan (%)	100	100	56.773.550	DINKES
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Kesehatan (%)	100	100		DINKES
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Kesehatan (%)	100	100		DINKES
		Ketersediaan dokumen perencanaan RSUD M.Th. Djaman (%)	100	100	45.644.000	RSUD M.TH. DJAMAN
		Ketersediaan laporan kinerja RSUD M.Th. Djaman (%)	100	100		RSUD M.TH. DJAMAN

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset RSUD M.Th. Djaman (%)	100	100		RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	90,00	90,00	328.261.000	DINKES
		DAK Reguler			6.267.485.000	DINKES
		DAK Non Fisik			6.267.485.000	DINKES
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	0,09	0,50	9.900.357.875	DINKES
		DAK Non Fisik			20.557.000.000	DINKES
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan	60,57	67,00	174.801.000	DINKES
		Persentase rekomendasi hasil POM yang ditindaklanjuti	100	100		DINKES
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	77,79	80,00	324.369.415	DINKES
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	441.475.700	DINKES
		DAK Penugasan			700.757.000	DINKES
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa ber ODF	3	3	164.509.750	DINKES
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) (%)	60,00	70,00	3.643.244.770	DINKES
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0045	0,50		DINKES
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	94	225		DINKES
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100		DINKES
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	12	19	903.280.100	DINKES
		Persentase pelayanan kesehatan	20,00	75,00	268.644.500	RSUD M.TH. DJAMAN

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Rumah Sakit yang memenuhi standar				
		DAK Non Fisik			4.563.997.000	DINKES
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	99.654.950	DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin (%)	90,00	100	5.084.500.000	RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas yang refresentatif	63,16	73,68	3.739.281.538	DINKES
		Persentase Pustu sesuai standar	46,15	50,55		DINKES
		Jumlah Poskesdes	167	167		DINKES
		DAK Reguler			3.799.000.000	DINKES
		DAK Penugasan			575.173.000	DINKES
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kelas Rumah Sakit M.Th. Djaman	C	C	1.663.640.350	RSUD M.TH. DJAMAN
		DAK Penugasan			46.994.890.000	RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik (%)	90,00	90,00	1.557.554.220	RSUD M.TH. DJAMAN
1.02.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan dan divaksinasi sesuai standar	100	100	119.947.500	DINKES
1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70,36	76,29	143.368.000	DINKES
1.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	58,30	66,70	225.328.000	DINKES
1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	76,72	79,78	90.508.500	DINKES

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Cakupan pelayanan nifas (%)	70,89	76,71		DINKES
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	76,10	80,88		DINKES
		DAK Non Fisik			3.563.000.000	DINKES
1.02.33	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Temenggung Gergaji	Kelas Rumah Sakit Temenggung Gergaji	D-	D-	1.195.529.556	DINKES
1.02.34	Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan Peserta JKN yang terlayani	100	100	10.075.526.788	DINKES
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**146.290.692.030**	
1.03.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi kebinamargaan dan sumberdaya air (%)	100	100	2.660.483.095	DBM SDA
1.03.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi kebinamargaan dan sumberdaya air	100	100	446.224.430	DBM SDA
1.03.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	baik	baik	69.388.800	DBM SDA
1.03.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	20	30	243.477.000	DBM SDA
1.03.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	163.661.200	DBM SDA
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DBM SDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DBM SDA
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik	4,5	6,5	4.330.000.000	DBM SDA
		DAK Penugasan			13.453.494.000	
		DAK Reguler			28.856.635.000	
1.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase ketersediaan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		55	150.000.000	DBM SDA
1.03.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase pengamanan jalan dan jembatan potensi longsor	0	10,00	1.797.419.676	DBM SDA
1.03.18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan kondisi sedang yang direhabilitasi/ dipelihara	39,88	41,88	28.092.823.288	DBM SDA
		Persentase jalan dan jembatan kondisi rusak ringan yang di rehabilitasi/dipelihara	41,46	39,46		DBM SDA
1.03.21	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Persentase perbaikan jalan dan jembatan pada kondisi tanggap darurat	100	100	300.000.000	DBM SDA
1.03.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Ketersediaan informasi/data base jalan dan jembatan (%)	100	100	649.315.725	DBM SDA
1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Ketersediaan sarana dan prasarana pemeliharaan jalan (%)	100	100	1.645.049.496	DBM SDA
		Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kebinamargaan (%)	60	65		DBM SDA
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi terpelihara (m)	61.492	76.592	9.696.389.000	DBM SDA
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	78,71	79,10		DBM SDA
		DAK Penugasan			8.279.789.000	
1.03.28	Program pengendalian banjir	Persentase penanganan kali/ saluran sebagai pengendali banjir	42,00	48,50	6.400.000.000	DBM SDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
1.03.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jalan poros desa yang dibangun (km)	60	60	29.800.310.064	DBM SDA
		Jalan poros desa yang dipelihara (km)	10	10		DBM SDA
		Jembatan perdesaan yang dibangun (m)	300	300		DBM SDA
		Jembatan perdesaan desa yang dipelihara (m)	200	200		DBM SDA
1.03.31	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan dokumen RDTR (%)	0	6,67	601.976.180	DPCKTRP
		Ketersediaan dokumen RTBL (%)	0	4,76		
1.03.32	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah bangunan gedung bersertifikat laik fungsi	0	0	91.003.180	DPCKTRP
1.03.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian tata ruang Daerah (%)	100	100	403.405.190	DPCKTRP
1.03.34	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi baik	4,50	6,50	5.984.152.954	DBM SDA
		Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi sedang	39,88	41,88		DBM SDA
		Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi rusak ringan	41,46	39,46		DBM SDA
		Persentase Peningkatan jalan dan jembatan kondisi rusak berat	14,16	12,16		DBM SDA
1.03.35	Program Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu	jalan perkotaan dan kawasan tertentu yang dipelihara (km)	2	2	1.300.417.776	DBM SDA
1.03.36	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil (orang)	275	335	375.896.186	DBM SDA
		Persentase ketersediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60,00	100		DBM SDA
1.03.37	Program Peningkatan Pengawasan dan	Ketersediaan data infrastruktur	0	100	499.380.790	DBM SDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
	Pengendalian Pekerjaan Umum	pekerjaan umum (%)				
		Ketersediaan dokumen analisa biaya dan HPS PU (%)	0	100		DBM SDA
		Ketersediaan dokumen mutu kontruksi (%)	0	100		DBM SDA
		Ketersediaan dokumen laporan realisasi fisik infrastruktur PU (%)	0	100		DBM SDA
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				**87.322.343.782**	
1.04.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan perumahan, cipta karya, tata ruang dan pertanahan (%)	100	100	1.779.735.992	DPCKTRP
1.04.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan perumahan, cipta karya, tata ruang dan pertanahan	100	100	300.549.000	DPCKTRP
1.04.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	baik	baik	0	DPCKTRP
1.04.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	64.822.750	DPCKTRP
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DPCKTRP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DPCKTRP
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	60	65	513.214.040	DPCKTRP

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	75	80		
		DAK Afirmasi			3.068.809.000	DPCKTRP
1.04.19	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah/Umum	Tingkat ketersediaan gedung kantor pemerintah yang representatif	47,73	56,82	25.964.668.000	DPCKTRP
		Tingkat ketersediaan rumah adat kecamatan	6,70	10,70		DPCKTRP
1.04.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Ketersediaan areal pemakaman yang representatif	0	6,70	1.250.000.000	DPCKTRP
1.04.21	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih	41,06	43,67	5.718.428.000	DPCKTRP
		Persentase rumah tangga bersanitasi	47,17	48,48		DPCKTRP
		DAK Reguler			3.461.328.000	DPCKTRP
		DAK Penugasan			3.400.000.000	DPCKTRP
		DAK Afirmasi			2.000.000.000	DPCKTRP
1.04.22	Program pembangunan infrastruktur permukiman perdesaaan	Presentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pedesaan	35,25	48,20	29.386.810.000	DPCKTRP
		Persentase jalan/gertak lingkungan pedesaan yang terbangun	51,94	61,39		DPCKTRP
		DAK Reguler			2.019.779.000	DPCKTRP
1.04.23	Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	29,29	35,64	8.394.200.000	DPCKTRP
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				**11.597.975.351**	
1.05.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung	100	100	862.266.550	BPBD

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		kelancaran tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah (%)				
		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja (%)	100	100	2.669.177.660	SATPOL PP
		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan kesatuan bangsa dan politik (%)	100	100	904.582.725	KANTOR KESBANGPOL
1.05.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah	100	100	92.763.200	BPBD
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja	100	100	366.812.000	SATPOL PP
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan kesatuan bangsa dan politik	100	100	218.936.000	KANTOR KESBANGPOL
1.05.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BPBD	baik	baik	21.450.000	BPBD
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	baik	baik	231.632.000	SATPOL PP
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik	baik	baik	23.065.000	KANTOR KESBANGPOL
1.05.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat formal	0	83,33	209.540.000	SATPOL PP

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
1.05.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan BPBD (%)	100	100	0	BPBD
		Ketersediaan laporan kinerja BPBD (%)	100	100		BPBD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset BPBD (%)	100	100		BPBD
		Ketersediaan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100	100	0	SATPOL PP
		Ketersediaan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100	100		SATPOL PP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Satuan Polisi Pamong Praja (%)	100	100		SATPOL PP
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (%)	100	100	32.715.950	KANTOR KESBANGPOL
		Ketersediaan laporan kinerja Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (%)	100	100		KANTOR KESBANGPOL
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kantor Kasatuan Bangsa dan Politik (%)	100	100		KANTOR KESBANGPOL
1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	75,00	80,00	831.185.350	SATPOL PP
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi	100	100	417.936.330	KANTOR KESBANGPOL
		Jumlah masyarakat yang terlibat aktif dalam pertemuan forum-forum pembauran kebangsaan	900	1.050		KANTOR KESBANGPOL
1.05.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan FKUB yang difasilitasi	100	100	149.999.850	KANTOR KESBANGPOL
		Jumlah masyarakat yang terlibat	900	1.050		KANTOR KESBANGPOL

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		aktif dalam pertemuan forum-forum kerukunan umat beragama				
1.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	penyakit masyarakat (pekat) yang ditangani	80,00	80,00	269.615.300	SATPOL PP
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Partai politik yang difasilitasi	10	12	245.788.460	KANTOR KESBANGPOL
1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana	100	100	861.988.750	BPBD
		persentase pelayanan pemulihan pasca bencana	100	100		BPBD
1.05.23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	75,00	75,00	1.241.933.950	SATPOL PP
1.05.24	Program Kewaspadaan Dini	Cakupan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang difasilitasi	100	100	442.264.776	KANTOR KESBANGPOL
		Cakupan kegiatan Tim Tepadu Penanganan Konflik SARA yang difasilitasi	100	100		KANTOR KESBANGPOL
1.05.25	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	persentase ketersediaan pokmas peduli bencana di desa/kel rawan bencana	8,70	14,49	504.321.500	BPBD
		persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10,14	20,29		BPBD
1.05.26	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Persentase Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditanggulangi	100	100	1.000.000.000	BPBD
1.06	**Sosial**				**3.936.893.211**	
1.06.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (%)	100	100	1.182.791.513	DINSOSP3AKB
1.06.2	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana	100	100	300.000.000	DINSOSP3AKB

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
	aparatur	aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana				
1.06.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana	baik	baik	45.000.000	DINSOSP3AKB
1.06.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	38.000.000	DINSOSP3AKB
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DINSOSP3AKB
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DINSOSP3AKB
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	96,30	96,90	548.577.698	DINSOSP3AKB
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	100	553.042.000	DINSOSP3AKB
1.06.18	Program pembinaan para penyandang disabilitas, ODGJ dan trauma	Persentase penyandang disabilitas dan trauma yang tertangani	100	100	213.482.000	DINSOSP3AKB
		Persentase ODGJ yang difasilitasi	100	100		DINSOSP3AKB
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	100	100	225.000.000	DINSOSP3AKB
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejateraan Sosial yang dibina	25,00	25,00	160.000.000	DINSOSP3AKB
1.06.22	Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	4,31	23,05	466.000.000	DINSOSP3AKB
1.06.23	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	100	100	205.000.000	DINSOSP3AKB

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.01.	**Tenaga Kerja**				**1.627.450.700**	
2.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (%)	100	100	709.143.750	DISNAKERTRANS
2.01.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100	88.968.000	DISNAKERTRANS
2.01.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	baik	baik	24.750.000	DISNAKERTRANS
2.01.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	44.459.950	DISNAKERTRANS
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DISNAKERTRANS
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DISNAKERTRANS
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	16	64	125.252.500	DISNAKERTRANS
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap, dan mandiri/perusahaan	12	12	217.248.200	DISNAKERTRANS
2.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang ditangani	100	100	417.628.300	DISNAKERTRANS
		Persentase hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.	100	100		DISNAKERTRANS

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**2.067.229.700**	
2.02.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	15,98	32,54	265.000.000	DINSOSP3AKB
		Rasio KDRT	0,235	0,0221		DINSOSP3AKB
		Rasio Traficking	0,004	0,004		DINSOSP3AKB
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	511.538.000	DINSOSP3AKB
2.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100	100	1.290.691.700	DINSOSP3AKB
2.03	**Pangan**				**7.903.026.105**	
2.03.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan (%)	100	100	4.063.039.905	DKPTPHP
2.03.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perikanan	100	100	673.835.700	DKPTPHP
2.03.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	baik	baik	204.400.000	DKPTPHP
2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	Ketersediaan pangan utama	119.771	127.760	2.961.750.500	DKPTPHP
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100		DKPTPHP

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.04	**Pertanahan**				**4.981.570.969**	
2.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase kepemilikan hak tanah oleh masyarakat yang difasilitasi	0	20	4.981.570.969	DPCKTRP
		Persentase tanah pemerintah daerah yang disertifikasi	95,38	97,71		DPCKTRP
2.05	**Lingkungan Hidup**				**6.877.316.008**	
2.05.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	4.854.937.508	DINAS LH
2.05.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup	100	100	250.642.500	DINAS LH
2.05.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Lingkungan Hidup	baik	baik	76.000.000	DINAS LH
2.05.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100	0	DINAS LH
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100		DINAS LH
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup (%)	100	100		DINAS LH
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	28,6	29,9	875.000.000	DINAS LH
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah yang ditangani	100	100	192.736.000	DINAS LH
2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi	Persentase cakupan perlindungan	100	100	100.000.000	DINAS LH

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
	Sumber Daya Alam	dan konservasi sumber daya alam				
2.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase cakupan RTH yang terkelola dengan baik	100	100	528.000.000	DINAS LH
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**6.766.739.510**	
2.06.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (%)	100	100	2.813.194.000	DISDUKCAPIL
2.06.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	100	473.000.010	DISDUKCAPIL
2.06.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	baik	baik	0	DISDUKCAPIL
2.06.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	50.011.000	DISDUKCAPIL
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DISDUKCAPIL
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DISDUKCAPIL
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan data kependudukan	100	100	1.904.087.500	DISDUKCAPIL
		Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	23,81	64,29		DISDUKCAPIL
		Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	85,47	90		DISDUKCAPIL
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,77	100		DISDUKCAPIL
		Persentase kepemilikan akte	65	70		DISDUKCAPIL

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		kelahiran usia 0-18				
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	13,02		DISDUKCAPIL
		DAK Non Fisik			1.526.447.000	DISDUKCAPIL
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				**5.616.407.200**	
2.07.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa (%)	100	100	1.564.923.500	DPMPEMDES
2.07.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa	100	100	123.614.300	DPMPEMDES
2.07.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	baik	baik	74.250.000	DPMPEMDES
2.07.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	21,88	70.000.000	DPMPEMDES
2.07.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (%)	100	100	0	DPMPEMDES
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (%)	100	100		DPMPEMDES
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes (%)	100	100		DPMPEMDES
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	55,82	65,64	783.894.500	DPMPEMDES
		Persentase MHA yang dibina	100	100		DPMPEMDES
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Bumdes aktif dibina	41,10	50,31	402.768.300	DPMPEMDES
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan masyarakat desa (%)	30,67	42,94	515.913.800	DPMPEMDES

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti diklat	65	70	966.433.400	DPMPEMDES
2.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase PKK aktif dibina	72,46	77,89	100.143.600	DPMPEMDES
2.07.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kinerja Pengelolaan keuangan desa kategori baik	100	100	498.575.600	DPMPEMDES
2.07.21	Program Penataan Desa	persentase desa yang tertata	25,77	33,13	515.890.200	DPMPEMDES
2.08	**Pengendaian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**2.433.701.800**	
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	63,73	66,23	387.000.000	DINSOSP3AKB
		DAK Reguler			1.356.036.000	DINSOSP3AKB
2.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan remaja yang mengikuti advokasi KIE (%)	0,21	0,42	275.665.800	DINSOSP3AKB
2.08.17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peserta KB MKJP	12,33	2,87	300.000.000	DINSOSP3AKB
2.08.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	27,63	22,37	115.000.000	DINSOSP3AKB
2.09	**Perhubungan**				**6.153.742.662**	
2.09.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan perhubungan (%)	100	100	1.827.842.825	DISHUB
2.09.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan perhubungan	100	100	286.106.127	DISHUB
2.09.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perhubungan	baik	baik	56.000.000	DISHUB
2.09.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	72,41	80.447.000	DISHUB

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.09.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	22.439.100	DISHUB
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DISHUB
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DISHUB
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketersediaan dokumen perencanaan fasilitas perhubungan (%)	100	100	430.294.210	DISHUB
		DAK Afirmasi			2.152.500.000	DISHUB
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase dermaga kondisi baik	15,00	30,00	100.000.000	DISHUB
		Persentase halte kondisi baik	44,00	44,00		DISHUB
		Persentase terminal yang berfungsi	46,00	46,00		DISHUB
		Ketersediaan dermaga (%)	18,00	18,00		DISHUB
2.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio ijin trayek	1:2.128	1:2.128	788.305.000	DISHUB
		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang)	224.247	242.910		
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (ton)	5.800	5.875		
2.09.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang diuji kelaikan	73,50	70,68	409.808.400	DISHUB
2.10	**Komunikasi dan Informatika**				**4.314.082.529**	
2.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informatika (%)	100	100	1.524.368.500	DISKOMINFO
2.10.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan	100	100	361.877.000	DISKOMINFO

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Informatika				
2.10.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kominfo	baik	baik	22.550.000	DISKOMINFO
2.10.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	20.179.000	DISKOMINFO
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DISKOMINFO
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DISKOMINFO
2.10.19	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan yang tertangani tepat waktu	100	100	1.968.951.615	DISKOMINFO
		Ketersediaan informasi publik (%)	100	100		DISKOMINFO
2.10.20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)	100	100	416.156.414	DISKOMINFO
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**2.244.110.550**	
2.11.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro (%)	100	100	1.385.153.850	DISPERINDAG KOP & UM
2.11.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro	100	100	305.913.600	DISPERINDAG KOP & UM
2.11.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	baik	baik	0	DISPERINDAG KOP & UM
2.11.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	14,29	74.000.000	DISPERINDAG KOP & UM
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi yang dibina	16,71	33,42	50.000.000	DISPERINDAG KOP & UM
		Persentase koperasi sehat	15,00	17,00		DISPERINDAG KOP & UM

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Usaha Mikro yang dibina	19,00	22,00	71.043.100	DISPERINDAG KOP & UM
		DAK Non Fisik			358.000.000	DISPERINDAG KOP & UM
2.12	**Penanaman Modal**				**3.354.416.950**	
2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (%)	100	100	1.583.209.150	DPMPTSP
2.12.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100	100	289.772.000	DPMPTSP
2.12.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas PMPTSP	baik	baik	47.250.000	DPMPTSP
2.12.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat formal	0	28,57	53.590.000	DPMPTSP
2.12.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas PMPTSP (%)	100	100	0	DPMPTSP
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas PMPTSP (%)	100	100		DPMPTSP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas PMPTSP (%)	100	100		DPMPTSP
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	80,00	80,00	621.818.100	DPMPTSP
						DPMPTSP
2.12.18	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu	85,00	85,00	758.777.700	DPMPTSP
		Persentase layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100		DPMPTSP

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**				**5.611.864.200**	
2.13.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi kepemudaan, olahraga dan pariwisata (%)	100	100	1.727.572.200	DISPORAPAR
2.13.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi kepemudaan, olahraga dan pariwisata	100	100	334.500.000	DISPORAPAR
2.13.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	baik	baik	18.500.000	DISPORAPAR
2.13.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100	0	DISPORAPAR
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100		DISPORAPAR
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100		DISPORAPAR
2.13.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan (orang)	750	1.000	1.443.000.000	DISPORAPAR
2.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase wirausaha muda yang dibina dan difasilitasi	10,00	11,00	76.000.000	DISPORAPAR
2.13.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	100	100	92.292.000	DISPORAPAR
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase atlet muda yang dibina	6	21	890.000.000	DISPORAPAR
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Gedung olahraga milik pemerintah Daerah yang representatif	40,00	60,00	1.030.000.000	DISPORAPAR

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
2.14	**Statistik**				**265.797.150**	
2.14.16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi (%)	85,00	100	265.797.150	DISKOMINFO
2.15	**Persandian**				**102.447.607**	
2.15.16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)	100	100	102.447.607	DISKOMINFO
		Persentase insiden informasi yang dapat ditangani/ dipulihkan	58,00	65,00		DISKOMINFO
2.16	**Kebudayaan**				**3.834.260.000**	
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Festival seni dan budaya yang diselenggarakan	7	8	3.834.260.000	DISDIKBUD
		Persentase lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	100	100		DISDIKBUD
2.17	**Perpustakaan**				**1.447.828.650**	
2.17.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan (%)	100	100	865.154.650	DKP
2.17.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan	100	100	266.796.000	DKP
2.17.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	baik	baik	0	DKP
2.17.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	7.500.000	DKP
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DKP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DKP
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	3.000	3.000	308.378.000	DKP

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	78.905	100		
2.18	**Kearsipan**				**511.206.000**	
2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip sesuai standar	0	18,60	168.000.000	DKP
2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5.224	1.000	241.146.000	DKP
2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip	10,00	15,00	42.060.000	DKP
2.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pelayanan informasi arsip	30,00	40,00	60.000.000	DKP
3.						
3.01	**Kelautan dan Perikanan**				**2.632.877.000**	
3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8,30	2,10	655.200.000	DKPTPHP
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6,20	6,00	148.000.000	DKPTPHP
3.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kelompok nelayan yang dibina	8,57	14,29	285.000.000	DKPTPHP
3.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Persentase sarana budidaya pada kawasan air tawar yang difasilitasi	9,90	22,20	709.360.000	DKPTPHP
3.01.25	Program pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat perikanan	Persentase sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perika nan yang terfasilitasi melalui DAK	12,00	17,30	835.317.000	DKPTPHP
3.02	**Pariwisata**				**4.236.928.000**	
3.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase event promosi pariwisata yang dikuti	41,00	50,00	350.000.000	DISPORAPAR
		DAK Non Fisik			58.580.000	DISPORAPAR

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
3.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	54,00	66,00	305.000.000	DISPORAPAR
		DAK Reguler			2.811.348.000	DISPORAPAR
		DAK Non Fisik			250.000.000	DISPORAPAR
3.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	45,68	55,17	212.000.000	DISPORAPAR
		DAK Non Fisik			250.000.000	DISPORAPAR
3.03	**Pertanian**				**20.444.121.817**	
3.03.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perkebunan dan peternakan (%)	100	100	2.138.200.788	DISBUNNAK
3.03.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perkebunan dan peternakan	100	100	348.400.000	DISBUNNAK
3.03.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan	baik	baik	21.000.000	DISBUNNAK
3.03.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan yang mengikuti diklat formal	0	48,98	208.460.000	DISBUNNAK
3.03.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	100	100	60.000.000	DISBUNNAK
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	100	100		DISBUNNAK
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	100	100		DISBUNNAK
		Ketersediaan dokumen	100	100	100.000.000	DKPTPHP

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (%)				
		Ketersediaan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (%)	100	100		DKPTPHP
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (%)	100	100		DKPTPHP
3.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok petani kebun yang bermitra dengan perusahan	1,13	3.39	95.000.000	DISBUNNAK
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang dibina	100	100		DISBUNNAK
3.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pertumbuhan produksi tanaman pangan utama (%)	3,20	3,04	8.563.196.829	DKPTPHP
		DAK Reguler			2.307.000.000	
3.03.17	Program peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase kecamatan yang terfasilitasi prasarana dan sarana pasar tani produk lokal daerah	0	20,00	367.100.000	DKPTPHP
		Nilai investasi perkebunan (juta Rp.)	9.295.070	9.305.810	138.000.000	DISBUNNAK
		Nilai investasi peternakan (juta Rp.)	101.458	101.938		DISBUNNAK
3.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian	14,00	31,20	648.200.000	DKPTPHP
3.03.19	Program peningkatan produksi pertanian	Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (Cabe)	0	10,00	1.430.000.000	DKPTPHP
3.03.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Cakupan bina kelompok petani (%) dari 1.709 kelompok tani	73,50	73,90	574.800.200	DKPTPHP
		DAK Reguler			1.387.724.000	
3.03.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Bebas Penyakit Ternak (%)	100	100	516.000.000	DISBUNNAK

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
3.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peternak yang dibina	55	60	100.000.000	DISBUNNAK
3.03.25	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase tanaman perkebunan yang dikembangkan	76,15	80,13	1.077.540.000	DISBUNNAK
		Persentase tanaman perkebunan yang diremajakan	5,13	5,43		DISBUNNAK
		Persentase ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan	30,00	40,00		DISBUNNAK
		Persentase penerapan ISPO dan RSPO	29,03	35,04		DISBUNNAK
		Persentase usaha perkebunan yang dibina	100	100		DISBUNNAK
3.03.26	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Rata-rata kadar kering karet (%)	40,00	44,00	138.500.000	DISBUNNAK
3.03.27	Program Evaluasi dan Pengendalian Perkebunan dan Peternakan	Ketersediaan data dan laporan (%)	100	100	225.000.000	DISBUNNAK
3.04	**Kehutanan**					
3.05	**Energi dan Sumber Daya Mineral**				**2.570.863.050**	
3.05.18	Program Pengembangan Energi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Ketersediaan penerangan jalan umum (%)	44,64	55,33	2.570.863.050	DPMPTSP
		Persentase ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi	100	100		DPMPTSP
		Ketersediaan informasi sumber daya mineral dan air tanah (%)	100	100		DPMPTSP
3.06	**Perdagangan**				**5.319.140.775**	
3.06.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	45.000.000	DISPERINDAG KOP & UM
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		DISPERINDAG KOP & UM
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		DISPERINDAG KOP & UM

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
3.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Ketersediaan data UDKM	100	100	247.815.325	DISPERINDAG KOP & UM
		Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	1,97	11,84		DISPERINDAG KOP & UM
3.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase SVLK yang difasilitasi	3,85	3,85	132.925.150	DISPERINDAG KOP & UM
3.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Daya tampung pasar tehadap pedagang (%)	85,61	88,02	1.393.400.300	DISPERINDAG KOP & UM
		Ketersediaan data alat UTTP (%)	100	100		DISPERINDAG KOP & UM
		Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	4	5		DISPERINDAG KOP & UM
		DAK Penugasan			3.400.000.000	
3.06.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina (%)	100	100	100.000.000	DISPERINDAG KOP & UM
3.07	**Perindustrian**				**619.031.375**	
3.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang dibina	25,50	27,00	619.031.375	DISPERINDAG KOP & UM
		Persentase industri kecil berstatus formal	46,70	50,00		DISPERINDAG KOP & UM
3.08	**Transmigrasi**				**356.618.800**	
3.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Presentase calon transmigran yang ditempatkan	79,34	79,34	356.618.800	DISNAKERTRANS

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.						
4.01	**Sekretariat Daerah**				**41.313.966.067**	
4.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretariat daerah (%)	100	100	6.195.460.380	SETDA
4.01.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi sekretariat daerah	100	100	2.089.300.000	SETDA
4.01.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Sekretariat Daerah	baik	baik	210.800.000	SETDA
4.01.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Sekretariat Daerah yang mengikuti diklat formal	0	15,17	260.140.000	SETDA
4.01.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan sekretariat daerah (%)	100	100	872.964.500	SETDA
		Ketersediaan laporan kinerja sekretariat daerah (%)	100	100		SETDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset sekretariat daerah (%)	100	100		SETDA
4.01.15	Program pembinaan pelaksanaan pembangunan	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan pembangunan daerah	60,00	70,00	490.000.000	SETDA
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Layanan Kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	100	4.705.300.618	SETDA
4.01.20	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Cakupan pendampingan penyusunan LAKIP (%)	100	100	150.000.000	SETDA
4.01.21	Program perencanaan kebutuhan ASN	Kebutuhan formasi ASN yang diusulkan (%)	24,74	20,66	182.000.000	SETDA
4.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar daerah yang difasilitasi	100	100	445.372.000	SETDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang terfasilitasi	100	100	2.032.039.227	SETDA
		Ketersediaan informasi produk hukum daerah (%)	100	100		SETDA
		Persentase perkara Perdata dan TUN Pemerintah daerah yang difasilitasi	100	100		SETDA
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Ketersediaan data pendukung LPPD dan LKPJ	100	100	3.510.392.400	SETDA
		Jumlah perayaan hari besar nasional dan daerah yang difasilitasi	4	4		SETDA
		Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dimekarkan	0	0		SETDA
		Persentase penetapan dan penegasan segmen batas wilayah administrasi antar daerah	0	33,33		SETDA
		Persentase penetapan dan penegasan segmen batas wilayah administrasi antar kecamatan	28,00	44,00		SETDA
		Persentase penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi kelurahan	0	100		SETDA
		Ketersediaan data dan informasi pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya dan fasilitas umum (%)	0	20,00		SETDA
4.01.28	Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi	100	100	281.764.000	SETDA
4.01.29	Program Peningkatan Kehumasan Daerah	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di dokumentasikan	100	100	1.782.830.457	SETDA
4.01.30	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti	80,00	82,40	117.851.475	SETDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.01.31	Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Nilai kinerja BUMD	48,60	49,00	274.417.867	SETDA
4.01.32	Program Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Baik	Baik	980.000.000	SETDA
4.01.33	Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah	Persentase layanan keprotokolan	100	100	3.316.249.180	SETDA
4.01.34	Program Peningkatan Perekonomian Daerah	Persentase rekomendasi bidang perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	85,71	86,00	447.269.472	SETDA
		Persentase keikutsertaan Pemerintah daerah pada agenda promosi	62,50	63,00		SETDA
4.01.35	Program Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Tinggi	Jumlah penerima beasiswa utusan daerah (orang)	909	123	6.780.204.756	SETDA
4.01.36	Program Fasilitasi kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu pemerintah daerah	18,83	35,00	3.286.474.765	SETDA
		Persentase peserta ibadah haji dan ziarah rohani yang di fasilitasi	100	100		SETDA
		Jumlah penerima bantuan sosial tidak terencana	60	20		SETDA
4.01.37	Program pengadaan barang/ jasa	Persentase layanan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan arsip dokumen hasil tender/seleksi	100	100	2.903.134.970	SETDA
4.02	**Pengawasan**				**6.822.000.150**	
4.02.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah (%)	100	100	1.647.770.150	INSPEKTORAT
4.02.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan	100	100	284.442.000	INSPEKTORAT

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		mendukung tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah				
4.02.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Inspektorat Kabupaten Sanggau	baik	baik	23.400.000	INSPEKTORAT
4.02.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Sanggau (%)	100	100	0	INSPEKTORAT
		Ketersediaan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Sanggau (%)	100	100		INSPEKTORAT
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Inspektorat Kabupaten Sanggau (%)	100	100		INSPEKTORAT
4.02.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja	22,77	26,79	4.338.008.000	INSPEKTORAT
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat auditor dan P2UPD Pratama	76,47	82,35	466.800.000	INSPEKTORAT
		Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat auditor dan P2UPD Pratama ke Muda	0	42,86		INSPEKTORAT
		Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat auditor Muda ke Madya	0	0		INSPEKTORAT
		Persentase Aparatur Pengawas mengikuti Diklat Keahlian/ Keterampilan/ Substansi	58,82	82,35		INSPEKTORAT
4.02.22	Program penataaan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP pada level 3	0	13,95	61.580.000	INSPEKTORAT
4.03	**Perencanaan Pembangunan**				**6.844.657.843**	
4.03.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	100	100	1.502.827.260	BAPPEDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		(%)				
4.03.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	100	100	153.743.500	BAPPEDA
4.03.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BAPPEDA	baik	baik	20.938.000	BAPPEDA
4.03.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal	0	16,22	57.000.000	BAPPEDA
4.03.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	12.636.725	BAPPEDA
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		BAPPEDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		BAPPEDA
4.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu (%)	100	100	1.585.201.688	BAPPEDA
4.03.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi tersusun dengan baik	100	100	962.825.500	BAPPEDA
4.03.23	Program perencanaan sosial budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya tersusun dengan baik	100	100	918.454.000	BAPPEDA
4.03.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam tersusun dengan baik	100	100	1.631.031.170	BAPPEDA
4.04	**Keuangan**				**25.272.559.761**	
4.04.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset	100	100	6.706.778.039	BPKAD

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		daerah (%)				
		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah (%)	100	100	1.572.002.500	BAPENDA
4.04.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100	100	820.257.678	BPKAD
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah	100	100	250.745.500	BAPENDA
4.04.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BPKAD	baik	baik	37.600.000	BPKAD
		Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BAPENDA	baik	baik	45.000.000	BAPENDA
4.04.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur BPKAD yang mengikuti diklat formal	0	26,27	50.000.000	BPKAD
		Persentase aparatur Badan Pendapatan Daerah yang mengikuti diklat formal	0	17,95	75.000.000	BAPENDA
4.04.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah (%)	100	100	425.550.000	BPKAD
		Ketersediaan laporan kinerja perangkat daerah (%)	100	100		BPKAD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset perangkat daerah (%)	100	100		BPKAD
		Ketersediaan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah (%)	100	100	0	BAPENDA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Ketersediaan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah (%)	100	100		BAPENDA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Badan Pendapatan Daerah (%)	100	100		BAPENDA
4.04.16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja keuangan yang tepat waktu	100	100	3.721.012.967	BPKAD
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan tepat waktu	100	100	7.835.465.127	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD	100	100		BPKAD
		Persentase Aset Daerah yang sudah Terinventarisir secara baik	60	60		BPKAD
4.04.18	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak	14,70	15,44	3.733.147.950	BAPENDA
4.05	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				**10.607.354.432**	
4.05.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (%)	100	100	1.559.410.874	BKPSDM
4.05.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	100	100	86.950.450	BKPSDM
4.05.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur BKPSDM	baik	baik	44.100.000	BKPSDM

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.05.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan BKPSDM (%)	100	100	0	BKPSDM
		Ketersediaan laporan kinerja BKPSDM (%)	100	100		BKPSDM
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset BKPSDM (%)	100	100		BKPSDM
4.05.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi	55,00	60,00	5.980.342.487	BKPSDM
4.05.18	Program Penyelenggaraan Mutasi, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Aparatur	Persentase pemetaan jabatan	85,00	95,00	1.774.062.492	BKPSDM
		Rata-rata kinerja aparatur	Baik	Baik		BKPSDM
4.05.19	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Ketersediaan ASN (%)	63,35	62,62	1.162.488.129	BKPSDM
		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	80,00	85,00		BKPSDM
		Persentase ketersediaan data kepegawaian/ ASN yang valid dan akurat	80,00	85,00		BKPSDM
4.06	**Penelitian dan Pengembangan**				**316.419.500**	
4.06.26	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100	100	316.419.500	BAPPEDA
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	41,86	62,2		
4.07	**Sekretariat DPRD**				**26.365.922.605**	
4.07.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretatriat DPRD (%)	100	100	4.583.843.059	SEKRETARIAT DPRD
4.07.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi sekretatriat DPRD	100	100	3.761.465.000	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.07.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur sekretatriat DPRD	baik	baik	646.850.000	SEKRETARIAT DPRD
		Ketersediaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (%)	100	100		SEKRETARIAT DPRD
4.07.5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti diklat formal	0	13,79	34.142.000	SEKRETARIAT DPRD
4.07.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan sekretariat DPRD (%)	100	100	95.000.000	SEKRETARIAT DPRD
		Ketersediaan laporan kinerja sekretariat DPRD (%)	100	100		SEKRETARIAT DPRD
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset sekretariat DPRD (%)	100	100		SEKRETARIAT DPRD
4.07.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase layanan dan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	100	15.530.558.563	SEKRETARIAT DPRD
4.07.16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan dokumen dan publikasi kegiatan Pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD (%)	100	100	450.406.500	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase kerjasama dengan Media massa	45,45	45,45		SEKRETARIAT DPRD
4.07.17	Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Persentase penyelesaian dokumen anggaran tepat waktu	100	100	1.064.643.808	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase penyelesaian hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah tepat waktu	100	100		SEKRETARIAT DPRD
4.07.18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan informasi Peraturan Perundang-undangan (%)	100	100	199.013.675	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.08	**Kewilayahan**				**20.702.929.363**	
4.08-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan (%)	100	100	1.198.898.172	KECAMATAN KAPUAS
			100	100	546.488.000	KECAMATAN SEKAYAM
			100	100	682.877.600	KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100	641.051.000	KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100	671.621.000	KECAMATAN MELIAU
			100	100	627.734.972	KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100	683.395.000	KECAMATAN ENTIKONG
			100	100	655.851.500	KECAMATAN PARINDU
			100	100	647.185.060	KECAMATAN MUKOK
			100	100	582.528.000	KECAMATAN BONTI
			100	100	648.563.000	KECAMATAN BALAI
			100	100	625.697.900	KECAMATAN BEDUAI
			100	100	670.526.646	KECAMATAN JANGKANG
			100	100	623.280.418	KECAMATAN TOBA
			100	100	529.998.500	KECAMATAN NOYAN
4.08-2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100	100	57.370.000	KECAMATAN KAPUAS
			100	100	49.876.000	KECAMATAN SEKAYAM
			100	100	43.500.000	KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100	81.660.000	KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100	48.200.000	KECAMATAN MELIAU
			100	100	91.889.000	KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100	66.360.000	KECAMATAN ENTIKONG
			100	100	22.354.000	KECAMATAN PARINDU
			100	100	73.450.000	KECAMATAN MUKOK
			100	100	46.000.000	KECAMATAN BONTI
			100	100	51.401.000	KECAMATAN BALAI
			100	100	94.535.000	KECAMATAN BEDUAI
			100	100	92.000.000	KECAMATAN JANGKANG

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
			100	100	79.200.900	KECAMATAN TOBA
			100	100	43.872.000	KECAMATAN NOYAN
4.08-3	Program peningkatan disiplin aparatur	Nilai rata-rata kedisiplinan aparatur Kecamatan	baik	baik	0	KECAMATAN KAPUAS
			baik	baik	0	KECAMATAN SEKAYAM
			baik	baik	12.600.000	KECAMATAN TAYAN HILIR
			baik	baik	15.000.000	KECAMATAN TAYAN HULU
			baik	baik	10.500.000	KECAMATAN MELIAU
			baik	baik	0	KECAMATAN KEMBAYAN
			baik	baik	14.300.000	KECAMATAN ENTIKONG
			baik	baik	13.200.000	KECAMATAN PARINDU
			baik	baik	8.000.000	KECAMATAN MUKOK
			baik	baik	11.050.000	KECAMATAN BONTI
			baik	baik	7.500.000	KECAMATAN BALAI
			baik	baik	22.100.000	KECAMATAN BEDUAI
			baik	baik	17.850.000	KECAMATAN JANGKANG
			baik	baik	11.200.000	KECAMATAN TOBA
			baik	baik	0	KECAMATAN NOYAN
4.08.6	Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan Kapuas (%)	100	100	0	KECAMATAN KAPUAS
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan Kapuas (%)	100	100		KECAMATAN KAPUAS
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan Kapuas (%)	100	100		KECAMATAN KAPUAS
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN SEKAYAM
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN SEKAYAM
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN SEKAYAM
		Ketersediaan dokumen	100	100	0	KECAMATAN TAYAN HILIR

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		perencanaan Kecamatan (%)				
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN TAYAN HILIR
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN TAYAN HILIR
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN TAYAN HULU
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN TAYAN HULU
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN TAYAN HULU
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN MELIAU
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN MELIAU
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN MELIAU
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN KEMBAYAN
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN KEMBAYAN
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN KEMBAYAN
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN ENTIKONG
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN ENTIKONG
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN ENTIKONG
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN PARINDU
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN PARINDU

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN PARINDU
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN MUKOK
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN MUKOK
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN MUKOK
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN BONTI
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN BONTI
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN BONTI
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN BALAI
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN BALAI
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN BALAI
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN BEDUAI
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN BEDUAI
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN BEDUAI
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN JANGKANG
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN JANGKANG
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN JANGKANG
		Ketersediaan dokumen	100	100	0	KECAMATAN TOBA

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		perencanaan Kecamatan (%)				
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN TOBA
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN TOBA
		Ketersediaan dokumen perencanaan Kecamatan (%)	100	100	0	KECAMATAN NOYAN
		Ketersediaan laporan kinerja Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN NOYAN
		Ketersediaan laporan keuangan dan aset Kecamatan (%)	100	100		KECAMATAN NOYAN
4.08-15	Program Pelayanan Prima	Persentase pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100	100	29.900.000	KECAMATAN KAPUAS
			100	100	39.500.000	KECAMATAN SEKAYAM
			100	100	18.018.000	KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100	15.770.000	KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100	27.345.000	KECAMATAN MELIAU
			100	100	29.700.000	KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100	33.555.000	KECAMATAN ENTIKONG
			100	100	13.200.000	KECAMATAN PARINDU
			100	100	36.900.000	KECAMATAN MUKOK
			100	100	25.060.000	KECAMATAN BONTI
			100	100	23.400.000	KECAMATAN BALAI
			100	100	26.100.000	KECAMATAN BEDUAI
			100	100	27.106.125	KECAMATAN JANGKANG
			100	100	26.275.000	KECAMATAN TOBA
			100	100	37.800.000	KECAMATAN NOYAN
4.08-16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase pengelolaan keuangan desa yang difasilitasi	100	100	52.100.000	KECAMATAN KAPUAS
			100	100	78.324.000	KECAMATAN SEKAYAM
			100	100	63.486.000	KECAMATAN TAYAN HILIR

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
			100	100	30.000.000	KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100	97.470.000	KECAMATAN MELIAU
			100	100	54.468.000	KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100	20.000.000	KECAMATAN ENTIKONG
			100	100	74.770.000	KECAMATAN PARINDU
			100	100	35.000.000	KECAMATAN MUKOK
			100	100	59.980.000	KECAMATAN BONTI
			100	100	10.000.000	KECAMATAN BALAI
			100	100	43.220.000	KECAMATAN BEDUAI
			100	100	42.000.000	KECAMATAN JANGKANG
			0	0	0	KECAMATAN TOBA
			100	100	36.000.000	KECAMATAN NOYAN
4.08-18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase satuan kelompok masyarakat di Kecamatan Kapuas yang dibina	100	100	283.125.060	KECAMATAN KAPUAS
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Kapuas yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN KAPUAS
		Persentase desa fokus di Kecamatan Sekayam yang dibina	100	100	77.496.000	KECAMATAN SEKAYAM
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Sekayam yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN SEKAYAM
		Persentase desa fokus di Kecamatan Tayan Hilir yang dibina	100	100	27.182.000	KECAMATAN TAYAN HILIR
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Tayan Hilir yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN TAYAN HILIR
		Persentase desa fokus di Kecamatan Tayan Hulu yang dibina	100	100	50.000.000	KECAMATAN TAYAN HULU
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Tayan Hulu yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN TAYAN HULU

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Persentase desa fokus di Kecamatan Meliau yang dibina	100	100	63.300.000	KECAMATAN MELIAU
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Meliau yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN MELIAU
		Persentase desa fokus di Kecamatan Kembayan yang dibina	100	100	40.000.000	KECAMATAN KEMBAYAN
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Kembayan yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN KEMBAYAN
		Persentase desa di Kecamatan Entikong yang dibina	100	100	27.993.970	KECAMATAN ENTIKONG
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Entikong yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN ENTIKONG
		Persentase desa fokus di Kecamatan Parindu yang dibina	100	100	15.000.000	KECAMATAN PARINDU
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Parindu yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN PARINDU
		Persentase desa fokus di Kecamatan Mukok yang dibina	100	100	50.500.000	KECAMATAN MUKOK
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Mukok yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN MUKOK
		Persentase desa di Kecamatan Bonti yang dibina	100	100	77.750.000	KECAMATAN BONTI
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Bonti yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN BONTI
		Persentase desa fokus di Kecamatan Balai yang dibina	100	100	40.000.000	KECAMATAN BALAI
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Balai yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN BALAI
		Persentase desa fokus di Kecamatan Beduai yang dibina	100	100	55.225.000	KECAMATAN BEDUAI
		Persentase kegiatan TP PKK	100	100		KECAMATAN BEDUAI

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
		Kecamatan Beduai yang difasilitasi				
		Persentase desa fokus di Kecamatan Jangkang yang dibina	100	100	84.962.000	KECAMATAN JANGKANG
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Jangkang yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN JANGKANG
		Persentase desa di Kecamatan Toba yang dibina	100	100	62.846.000	KECAMATAN TOBA
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Toba yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN TOBA
		Persentase desa fokus di Kecamatan Noyan yang dibina	100	100	44.750.000	KECAMATAN NOYAN
		Persentase kegiatan TP PKK Kecamatan Noyan yang difasilitasi				KECAMATAN NOYAN
4.08-19	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan kecamatan (%)	100	100	30.331.942	KECAMATAN KAPUAS
			100	100	34.946.000	KECAMATAN SEKAYAM
			100	100	40.512.400	KECAMATAN TAYAN HILIR
			100	100	54.695.000	KECAMATAN TAYAN HULU
			100	100	37.878.000	KECAMATAN MELIAU
			100	100	25.142.000	KECAMATAN KEMBAYAN
			100	100	23.330.000	KECAMATAN ENTIKONG
			100	100	52.514.500	KECAMATAN PARINDU
			100	100	70.000.000	KECAMATAN MUKOK
			100	100	25.000.000	KECAMATAN BONTI
			100	100	32.556.000	KECAMATAN BALAI
			100	100	55.000.000	KECAMATAN BEDUAI
			100	100	35.792.000	KECAMATAN JANGKANG
			100	100	50.509.698	KECAMATAN TOBA
			100	100	34.360.000	KECAMATAN NOYAN

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2019)	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)
4.08-20	Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100	100	6.873.120.000	KECAMATAN KAPUAS
		Persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang difasilitasi	100	100		KECAMATAN KAPUAS

Tabel 7. 4
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2024
Kabupaten Sanggau

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**445.994.007.925**		**504.424.832.707**		**493.773.153.891**		**498.604.685.430**		**1.942.796.679.953**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	321.003.406.602	100%	373.184.701.318	100%	359.288.219.874	100%	362.881.102.073	100%	1.416.357.429.867	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan layanan pendidikan dasar	100%	100%	124.990.601.323	100%	131.240.131.389	100%	133.864.934.017	100%	135.203.583.357	100%	525.299.250.086	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	n.a	n.a	0	100%	0	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	n.a	n.a	0	n.a	0	55%	100.000.000	60%	100.000.000	60%	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi pendidikan (%)	n.a	n.a	0	n.a	0	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	270.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan bahasa dan sastra yang difasilitasi	n.a	n.a	0	n.a	0	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	170.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**264.101.134.290**		**295.913.621.333**		**303.268.148.823**		**304.453.410.891**		**1.167.736.315.337**	**Dinas Kesehatan**
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kesehatan	100%	100%	125.950.784.959	100%	133.762.563.804	100%	136.437.815.080	100%	132.807.127.757	100%	528.958.291.600	Dinas Kesehatan & RSUD M. Th Djaman
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	0,09 point	0,50 point	132.130.841.532 3.534.957.567	0,50 point	129.070.164.823 14.555.341.532	0,50 point	132.942.269.768 14.992.001.778	0,50 point	136.930.537.861 15.441.761.831	0,50 point	531.073.813.983 48.524.062.708	Dinas Kesehatan RSUD M.Th. Djaman
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi	20,00%	30,00%	387.624.000	35,00%	16.719.827.065	40,00%	17.054.223.606	45,00%	17.395.308.078	45,00%	51.556.982.750	Dinas Kesehatan

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	90,00%	90,00%	701.570.400	90,00%	241.304.250	90,00%	246.130.335	90,00%	251.052.942	90,00%	1.440.057.927	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	77,79%	80,00%	1.395.355.832	80,00%	1.564.419.859	80,00%	1.595.708.256	80,00%	1.627.622.421	80,00%	6.183.106.368	Dinas Kesehatan
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**221.371.302.982**		**231.892.333.755**		**236.530.180.430**		**241.260.784.039**		**931.054.601.206**	**Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	11.061.486.397	100%	10.714.530.968	100%	10.928.821.587	100%	11.147.398.019	100%	43.852.236.971	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang dibangun dan dipelihara	60,00%	60,00%	15.659.493.000	60,00%	16.746.027.640	60,00%	17.080.948.193	60,00%	17.422.567.157	60,00%	66.909.035.989	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih	41,06%	46,17%	12.872.159.082	48,59%	17.545.770.935	50,90%	17.896.686.354	53,13%	18.254.620.081	53,13%	66.569.236.451	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan area pelayanaan sampah	n/a	n.a	0	32,40%	1.797.778.126	35,64%	1.833.733.689	39,20%	1.870.408.362	39,20%	5.501.920.177	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	47,17%	50,12%	4.475.950.171	51,50%	6.336.065.467	52,83%	6.462.786.776	54,09%	6.592.042.512	54,09%	23.866.844.926	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik	29,29%	41,99%	4.249.522.984	48,33%	4.493.154.466	54,68%	4.583.017.555	61,03%	4.674.677.906	61,03%	18.000.372.912	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase jalan/gertak lingkungan yang terbangun	51,94%	69,82%	22.925.278.751	77,32%	25.121.616.812	83,93%	25.624.049.148	89,75%	26.136.530.131	89,75%	99.807.474.842	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif	47,73%	65,91%	16.076.352.800	77,27%	15.104.588.835	88,64%	15.406.680.612	100%	15.714.814.224	100%	62.302.436.471	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Jalan dan Jembatan Desa yang di bangun/dipelihara	60,00%	60,00%	48.783.492.192	60,00%	44.181.429.481	60,00%	45.065.058.071	60,00%	45.966.359.232	60,00%	183.996.338.976	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Persentase fasilitas sarana umum layak	48,00%	60,00%	14.759.743.182	62,00%	19.751.320.977	65,00%	20.146.347.397	67,00%	20.549.274.344	67,00%	75.206.685.900	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Ruang dan Pertanahan
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan kabupaten dibangun/dipelihara	4,50%	8,50%	68.844.383.823	10,50%	68.087.966.036	12,50%	69.449.725.357	14,50%	70.838.719.864	14,50%	277.220.795.080	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	100%	100%	974.853.600	100%	985.985.185	100%	1.005.704.889	100%	1.025.818.986	100%	3.992.362.660	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian tata ruang (%)	100%	100%	688.587.000	100%	1.026.098.827	100%	1.046.620.804	100%	1.067.553.220	100%	3.828.859.850	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**8.203.225.313**		**5.844.104.899**		**7.877.091.317**		**8.053.794.187**		**29.978.215.715**	**Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan	100%	100%	5.938.855.313	100%	5.549.940.779	100%	5.660.939.595	100%	5.774.158.386	100%	22.923.894.073	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perumahan	100%	100%	421.962.000	100%	294.164.120	100%	300.047.402	100%	306.048.350	100%	1.322.221.873	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	60,00%	70,00%	1.842.408.000	75,00%	0	80,00%	1.916.104.320	85,00%	1.973.587.450	85,00%	5.732.099.770	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**15.650.270.528**		**13.715.208.451**		**13.989.512.620**		**14.269.302.872**		**57.624.294.471**	**Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100%	100%	6.940.910.354	100%	6.380.981.067	100%	6.508.600.688	100%	6.638.772.702	100%	26.469.264.811	Satuan Polisi Pamong Praja
				Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana	100%	100%	3.896.528.474	100%	3.605.374.076	100%	3.677.481.558	100%	3.751.031.189	100%	14.930.415.296	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	75,00%	80,00%	2.281.113.100	85%	1.848.960.167	90,00%	1.885.939.370	95,00%	1.923.658.158	95,00%	7.939.670.795	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Daerah	100%	100%	1.538.748.200	100%	1.154.186.753	100%	1.177.270.488	100%	1.200.815.898	100%	5.071.021.339	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	75,00%	75,00%	992.970.400	75%	725.706.388	80,00%	740.220.516	80,00%	755.024.926	80,00%	3.213.922.230	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**11.494.947.021**		**9.085.654.022**		**9.267.367.102**		**9.452.714.444**		**39.300.682.590**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	100%	6.753.040.321	100%	6.211.411.984	100%	6.335.640.224	100%	6.462.353.028	100%	25.762.445.557	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejateraan Sosial yang dibina	25,00%	55,00%	439.972.100	70,00%	194.436.899	85,00%	198.325.637	100%	202.292.150	100%	1.035.026.786	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	57.468.800	100%	29.999.906	100%	30.599.904	100%	31.211.902	100%	149.280.512	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	1.841.560.200	100%	1.354.999.503	100%	1.382.099.493	100%	1.409.741.483	100%	5.988.400.679	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	96,30%	97,00%	2.023.730.600	97,45%	1.106.894.847	97,75%	1.129.032.744	98,20%	1.151.613.399	98,20%	5.411.271.590	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Keluarga Berencana
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/non alam tertangani	100%	100%	115.375.000	100%	128.048.548	100%	130.609.519	100%	133.221.709	100%	507.254.776	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	100%	100%	263.800.000	100%	59.862.335	100%	61.059.582	100%	62.280.773	100%	447.002.690	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5.167.361.772**		**4.774.137.891**		**4.869.620.649**		**4.967.013.062**		**19.778.133.374**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100%	4.413.445.068	100%	4.226.818.061	100%	4.311.354.422	100%	4.397.581.511	100%	17.349.199.062	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	16,00%	64,00%	241.284.504	64,00%	158.294.775	64,00%	161.460.671	64,00%	164.689.884	64,00%	725.729.833	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap, dan mandiri/perusahaan	12,00%	42,00%	137.619.000	48,00%	89.337.537	53,00%	91.124.288	64,00%	92.946.773	64,00%	411.027.598	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial tertangani	100%	100%	375.013.200	100%	299.687.518	100%	305.681.268	100%	311.794.894	100%	1.292.176.880	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**2.087.635.200**		**2.280.733.495**		**2.326.348.165**		**2.372.875.128**		**9.067.591.988**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100%	100%	1.485.248.700	100%	1.658.487.415	100%	1.691.657.163	100%	1.725.490.307	100%	6.560.883.585	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	144.486.000	100%	121.925.517	100%	124.364.027	100%	126.851.308	100%	517.626.852	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak (%)	100%	100%	55.321.100	100%	87.942.592	100%	89.701.444	100%	91.495.473	100%	324.460.609	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	15,98%	49,11%	189.725.400	66,27%	186.544.175	83,43%	190.275.059	100%	194.080.560	100%	760.625.193	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak	100%	100%	212.854.000	100%	225.833.796	100%	230.350.472	100%	234.957.481	100%	903.995.749	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**17.961.796.617**		**19.865.638.356**		**20.262.951.123**		**20.668.210.146**		**78.758.596.242**	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan**
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan pangan, perikanan serta pertanian	100%	100%	16.085.744.635	100%	18.687.211.455	100%	19.060.955.684	100%	19.442.174.798	100%	73.276.086.572	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Lumbung Pangan (%)	12,88%	13,49%	629.466.482	14,11%	50.390.318	14,72%	51.398.124	15,33%	52.426.087	15,33%	783.681.011	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan utama	104,60%	106,69%	1.064.958.300	108,82%	726.123.972	110,99%	740.646.451	113,21%	755.459.380	113,21%	3.287.188.104	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Hortikultura dan Perikanan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase daearah rawan pangan	0,00%	0,00%	125.209.000	0,00%	260.704.815	0,00%	265.918.911	0,00%	271.237.290	0,00%	923.070.016	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	100%	100%	56.418.200	100%	141.207.796	100%	144.031.952	100%	146.912.591	100%	488.570.539	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**1.927.993.900**		**699.778.756**		**713.774.331**		**728.049.818**		**4.069.596.805**	**Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan**
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20,00%	20,00%	88.715.200	20,00%	69.550.836	20,00%	70.941.853	20,00%	72.360.690	20,00%	301.568.578	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi	0,00%	20,00%	369.077.200	20,00%	77.732.888	20,00%	79.287.546	20,00%	80.873.297	20,00%	606.970.930	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat	95,38%	97,71%	1.470.201.500	100%	552.495.032	100%	563.544.933	100%	574.815.831	100%	3.161.057.296	Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**12.876.533.321**		**12.569.725.208**		**12.821.119.712**		**13.077.542.106**		**51.344.920.348**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Lingkungan Hidup	100%	100%	6.974.527.332	100%	6.847.211.780	100%	6.984.156.016	100%	7.123.839.136	100%	27.929.734.264	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup(%)	0%	100%	450.000.000	100%	472.500.000	100%	481.950.000	100%	491.589.000	100%	1.896.039.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	919.940.700	100%	630.725.786	100%	643.340.302	100%	656.207.108	100%	2.850.213.895	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	100%	1.678.925.668	100%	1.772.547.743	100%	1.807.998.698	100%	1.844.158.672	100%	7.103.630.781	Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani	100%	100%	12.781.000	100%	27.924.568	100%	28.483.059	100%	29.052.721	100%	98.241.348	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100%	100%	166.308.800	100%	145.965.104	100%	148.884.406	100%	151.862.094	100%	613.020.404	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA	0%	100%	25.798.200	100%	25.000.148	100%	25.500.151	100%	26.010.154	100%	102.308.653	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pelaksama PPLH yang diberikan penghargaan	100%	100%	125.554.621	100%	101.318.971	100%	103.345.350	100%	105.412.257	100%	435.631.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	100%	100%	36.871.000	100%	40.859.760	100%	41.676.955	100%	42.510.494	100%	161.918.210	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	28,60%	31,10%	2.485.826.000	32,40%	2.505.671.348	33,60%	2.555.784.775	34,90%	2.606.900.470	34,90%	10.154.182.593	Dinas Lingkungan Hidup
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**9.337.065.896**		**8.654.608.174**		**8.827.700.337**		**9.004.254.344**		**35.823.628.752**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	5.543.637.896	100%	6.809.052.080	100%	6.945.233.122	100%	7.084.137.784	100%	26.382.060.882	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan	85,47%	92,00%	1.985.206.400	95,00%	812.110.558	100%	828.352.769	100%	844.919.825	100%	4.470.589.552	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	65,00%	75,00%	697.088.400	80,00%	640.653.851	90,00%	653.466.928	90,00%	666.536.267	90,00%	2.657.745.446	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	23,81%	100%	1.052.570.900	100%	335.630.515	100%	342.343.125	100%	349.189.988	100%	2.079.734.528	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan data kependudukan	100%	100%	58.562.300	100%	57.161.170	100%	58.304.393	100%	59.470.481	100%	233.498.345	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**7.033.899.020**		**8.814.733.602**		**8.991.028.274**		**9.170.848.840**		**34.010.509.736**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	100%	5.195.175.220	100%	7.239.226.822	100%	7.384.011.358	100%	7.531.691.586	100%	27.350.104.986	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	persentase desa yang tertata	25,77%	40,49%	317.093.300	47,85%	373.283.808	55,21%	380.749.484	62,58%	388.364.474	62,58%	1.459.491.066	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Bumdes aktif	41,10%	59,51%	206.618.400	68,71%	148.184.068	77,91%	151.147.749	87,12%	154.170.704	87,12%	660.120.922	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik	100%	100%	838.903.800	100%	647.020.057	100%	659.960.458	100%	673.159.667	100%	2.819.043.982	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	55,82%	75,46%	476.108.300	85,27%	407.018.847	95,09%	415.159.224	100%	423.462.408	100%	1.721.748.779	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**6.201.824.500**		**6.005.556.473**		**6.125.667.602**		**6.248.180.955**		**24.581.229.530**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.26 point	2.24 point	183.701.800	2.22 point	113.945.876	2.20 point	116.224.794	2.18 point	118.549.289	2.18 point	532.421.759	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	63,73%	68,73%	5.869.004.500	71,23%	4.823.138.731	73,73%	4.919.601.506	76,23%	5.017.993.536	76,23%	20.629.738.272	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	27,63%	56,57%	149.118.200	71,04%	1.068.471.866	85,51%	1.089.841.303	100%	1.111.638.129	100%	3.419.069.499	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**17.780.647.852**		**14.755.844.547**		**15.050.961.438**		**15.351.980.667**		**62.939.434.504**	**Dinas Perhubungan**
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan	100%	100%	9.220.775.415	100%	8.575.999.246	100%	8.747.519.231	100%	8.922.469.616	100%	35.466.763.507	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik	44,00%	47,00%	7.964.743.692	52,00%	5.612.148.036	53,00%	5.724.390.997	55,00%	5.838.878.817	55,00%	25.140.161.541	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga kondisi baik	15,00%	40,00%	595.128.745	50,00%	567.697.265	55,00%	579.051.210	60,00%	590.632.235	60,00%	2.332.509.455	Dinas Perhubungan
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**9.912.674.851**		**7.466.466.448**		**7.615.795.777**		**7.768.111.692**		**32.763.048.768**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	100%	100%	5.842.572.655	100%	4.532.444.246	100%	4.623.093.131	100%	4.715.554.994	100%	19.713.665.025	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Ketersediaan informasi publik (%)	100%	100%	1.897.565.196	100%	753.061.035	100%	768.122.256	100%	783.484.701	100%	4.202.233.188	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)	100%	100%	2.172.537.000	100%	2.180.961.167	100%	2.224.580.390	100%	2.269.071.998	100%	8.847.150.555	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**6.662.248.978**		**6.133.870.071**		**6.381.547.472**		**6.506.678.422**		**25.684.344.943**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	100%	100%	5.984.772.178	100%	5.593.981.972	100%	5.705.861.611	100%	5.819.978.844	100%	23.104.594.605	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina	16,71%	50,13%	184.576.700	66,84%	133.273.487	83,55%	135.938.957	100%	138.657.736	100%	592.446.880	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai	15,34	24,54	0	25,77	0	26,99	50.000.000	28,22	50.000.000	28,22%	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku usaha mikro terlatih	2,52%	4,50%	442.387.300	7,50%	390.302.170	10,00%	398.108.213	12,50%	406.070.378	12,50%	1.636.868.061	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang didampingi/dibina	n/a	n/a	0	n/a	0	2,66	50.000.000	3,42	50.000.000	3,42	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina	19,00%	22,00%	50.512.800	24,00%	16.312.442	25,00%	16.638.691	30,00%	16.971.465	30,00%	100.435.397	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	0,17	n/a	0	n/a	0	0,32	25.000.000	0,35	25.000.000	0,35	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**7.628.291.339**		**6.640.412.969**		**6.773.221.228**		**6.908.685.653**		**27.950.611.189**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan penanaman modal, Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	100%	6.354.700.339	100%	5.699.816.842	100%	5.813.813.179	100%	5.930.089.442	100%	23.798.419.802	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Ketersedian informasi penanaman modal	100%	100%	87.433.000	100%	35.096.810	100%	35.798.746	100%	36.514.721	100%	194.843.277	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi nilai invesatsi	100%	100%	224.186.800	100%	181.856.838	100%	185.493.975	100%	189.203.854	100%	780.741.467	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu	85,00%	90,00%	449.208.000	90,00%	366.591.002	95,00%	373.922.822	100%	381.401.278	100%	1.571.123.103	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	80,00%	80,00%	434.703.000	80,00%	335.105.879	85,00%	341.807.997	85,00%	348.644.157	85,00%	1.460.261.032	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi	100%	100%	78.060.200	100%	21.945.598	100%	22.384.510	100%	22.832.200	100%	145.222.508	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**9.705.994.585**		**8.030.306.728**		**8.190.912.863**		**8.354.731.120**		**34.281.945.295**	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	100%	100%	4.840.017.169	100%	4.558.326.605	100%	4.649.493.137	100%	4.742.483.000	100%	18.790.319.911	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan wirausaha muda yang dibina	100%	100%	1.192.155.290	100%	1.124.166.074	100%	1.146.649.395	100%	1.169.582.383	100%	4.632.553.143	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	100%	100%	3.130.653.926	100%	1.714.960.711	100%	1.749.259.925	100%	1.784.245.124	100%	8.379.119.686	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase fasilitasi Kepramukaan	0%	100%	543.168.200	100%	632.853.338	100%	645.510.405	100%	658.420.613	100%	2.479.952.556	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**200.386.900**		**144.094.760**		**146.976.655**		**149.916.188**		**641.374.504**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	85,00%	100%	200.386.900	100%	144.094.760	100%	146.976.655	100%	149.916.188	100%	641.374.504	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**381.050.100**		**400.102.605**		**408.104.657**		**416.266.750**		**1.605.524.112**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	381.050.100	100%	400.102.605	100%	408.104.657	100%	416.266.750	100%	1.605.524.112	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**5.656.647.950**		**4.558.301.379**		**4.649.467.407**		**4.742.456.755**		**19.606.873.490**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan	100%	100%	3.571.694.950	100%	3.285.594.185	100%	3.351.306.069	100%	3.418.332.190	100%	13.626.927.394	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi	0%	100%	44.000.000	100%	123.374.754	100%	125.842.249	100%	128.359.094	100%	421.576.097	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	2.040.953.000	100%	1.149.332.440	100%	1.172.319.089	100%	1.195.765.471	100%	5.558.369.999	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**5.186.019.903**		**4.701.565.116**		**4.794.596.418**		**4.889.488.347**		**19.571.669.784**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan	100%	100%	4.414.810.603	100%	3.884.054.058	100%	3.961.735.139	100%	4.040.969.842	100%	16.301.569.642	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase penggunaan koleksi perpustakaan daerah	10,00%	15,00%	771.209.300	15,00%	767.511.058	20,00%	782.861.279	20,00%	798.518.505	100%	3.120.100.142	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	n/a	n/a	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**452.823.400**		**377.746.917**		**405.301.855**		**413.407.892**		**1.649.280.065**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip sesuai standar	0,00%	39,63%	301.551.500	60,47%	290.284.514	81,40%	296.090.204	100%	302.012.008	100%	1.189.938.227	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip kategori baik	10,00%	20,00%	151.271.900	25,00%	87.462.403	30,00%	89.211.651	35,00%	90.995.884	35,00%	418.941.838	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan informasi arsip	30,00%	30,00%	0	30,00%	0	70,00%	20.000.000	80,00%	20.400.000	80,00%	40.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2.489.743.740**		**1.591.169.513**		**1.622.992.903**		**1.655.452.761**		**7.359.358.918**	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan**
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6,20%	7,00%	432.635.700	8,00%	236.175.367	9,00%	240.898.874	10,00%	245.716.852	10,00%	1.155.426.793	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8,30%	2,30%	1.834.330.340	2,58%	1.208.816.929	2,84%	1.232.993.268	3,12%	1.257.653.133	3,12%	5.533.793.670	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)	8,57%	17,14%	222.777.700	20,00%	146.177.217	22,86%	149.100.761	17,14%	152.082.777	17,14%	670.138.455	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**1.006.346.877**		**1.028.680.904**		**1.049.254.522**		**1.070.239.613**		**4.154.521.916**	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	54,00%	66,00%	688.589.777	74,00%	469.979.758	80,00%	479.379.353	90,00%	488.966.940	90,00%	2.126.915.828	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi pariwisata daerah	41,00%	58,33%	214.903.500	66,66%	158.701.820	66,66%	161.875.856	75,00%	165.113.374	75,00%	700.594.550	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase fasilitasi HaKI ekonomi kreatif	n/a	n/a	0	10,00%	50000000	20,00%	51.000.000	30%	52.020.000		153.020.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	45,68%	55,17%	102.853.600	60,34%	349.999.326	60,34%	356.999.313	65,51%	364.139.299	65,51%	1.173.991.537	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**35.022.480.997**		**28.981.373.967**		**29.561.001.446**		**30.152.221.475**		**123.717.077.886**	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Dinas Perkebunan dan Peternakan**
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan pertanian	100%	100%	8.047.191.754	100%	8.812.276.445	100%	8.988.521.974	100%	9.168.292.413	100%	35.016.282.586	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan utama(%)	7,39%	7,39%	100.000.000	7,39%	105.000.000	7,39%	107.100.000	7,39%	109.242.000	7,39%	421.342.000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (%)	0,00%	10,50%	397.858.000	10,80%	417.750.900	11,10%	426.105.918	11,40%	434.628.036	11,40%	1.676.342.854	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Hortikultura dan Perikanan
				Persentase tanaman perkebunan yang diremajakan	5,13%	5,73%	269.597.600	6,03%	283.077.480	6,33%	288.739.030	6,63%	294.513.810	6,63%	1.135.927.920	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase peternak yang dibina	55,00%	70,00%	2.328.143.000	80,00%	2.444.550.150	90,00%	2.493.441.153	100%	2.543.309.976	100%	9.809.444.279	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Ketersediaan prasarana pertanian (%)	3,20%	4,03%	17.553.565.833	4,03%	10.789.675.479	4,03%	11.005.468.989	4,03%	11.225.578.368	4,03%	50.574.288.669	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase tanaman perkebunan yang dikembangkan	76,15%	84,11%	2.254.071.610	88,09%	2.366.775.191	92,07%	2.414.110.695	96,05%	2.462.392.909	96,05%	9.497.350.405	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Bebas Penyakit Ternak (%)	100%	100%	1.158.928.000	100%	470.380.960	100%	479.788.579	100%	489.384.351	100%	2.598.481.890	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	8,00%	8,00%	258.837.900	8,00%	271.779.795	8,00%	277.215.391	8,00%	282.759.699	8,00%	1.090.592.785	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	123.394.400	100%	129.564.120	100%	132.155.402	100%	134.798.510	100%	519.912.433	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase penerapan ISPO dan RSPO	29,03	41,90%	255.074.400	48,39%	98.734.170	54,84%	100.708.853	61,29%	102.723.030	61,29%	557.240.454	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian	14,00%	48,40%	1.892.276.100	65,60%	2.386.889.905	82,80%	2.434.627.703	100%	2.483.320.257	100%	9.197.113.965	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
				Persentase kelompok petani kebun yang bermitra dengan perusahaan	1,13%	5,65%	383.542.400	7,91%	404.919.372	10,17%	413.017.759	12,43%	421.278.115	12,43%	1.622.757.646	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**													**Tidak menjadi Kewenangan Kab/Kota**
3	**29**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**													**Tidak menjadi Kewenangan Kab/Kota**

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**723.683.900**		**422.616.292**		**431.068.618**		**439.689.990**		**2.017.058.800**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase gudang yg teregistrasi	33,64%	48,60%	31.477.900	56,07%	10.279.528	63,55%	10.485.119	71,03%	10.694.821	71,03%	62.937.367	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya tampung pasar tehadap pedagang (%)	85,61%	90,43%	351.827.300	95,45%	225.991.193	95,26%	230.511.017	97,67%	235.121.237	97,67%	1.043.450.747	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersedian informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	150.500.000	100%	58.556.640	100%	59.727.773	100%	60.922.328	100%	329.706.741	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	3,00%	3,00%	63.110.600	3,00%	16.905.319	3,00%	17.243.425	3,00%	17.588.294	3,00%	114.847.638	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	1,97%	26,64%	93.493.300	41,44%	97.364.404	56,24%	99.311.692	71,04%	101.297.926	71,04%	391.467.322	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Ketersediaan data UDKM	100%	100%	33.274.800	100%	13.519.208	100%	13.789.592	100%	14.065.384	100%	74.648.984	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**5.713.579.166**		**265.507.600**		**270.817.752**		**276.864.500**		**6.526.769.018**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro**
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	5.463.644.666	100%	165.875.787	100%	169.193.303	100%	172.577.169	100%	5.971.290.925	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang dibina	25,50%	30,00%	113.088.300	32,00%	37.828.596	35,00%	38.585.168	35,00%	39.356.871	35,00%	228.858.935	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri	100%	100%	136.846.200	100%	61.803.217	100%	63.039.281	100%	64.930.460	100%	326.619.158	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**285.000.000**		**148.302.902**		**151.268.960**		**154.294.339**		**738.866.201**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Ketersedian Rencana Kawasan Transmigrasi	100%	100%	237.808.500	100%	108.475.922	100%	110.645.440	100%	112.858.349	100%	569.788.212	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi yang dibina	100%	100%	47.191.500	100%	39.826.980	100%	40.623.520	100%	41.435.990	100%	169.077.990	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**				**74.747.503.124**		**72.725.017.150**		**74.173.517.493**		**75.650.987.843**		**297.297.025.610**	**Sekretariat Daerah**
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sekretariat Daerah dan Pengelolaan Perbatasan	100%	100%	44.372.465.134	100%	38.179.031.696	100%	38.942.612.330	100%	39.721.464.577	100%	161.215.573.736	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi terhadap isu strategis bidang pemerintahan, hukum dan politik yang disampaikan kepada kepala daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi terhadap isu strategis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan yang disampaikan kepada kepala daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi terhadap isu strategis bidang kemasyarakatan, dan sumber daya manusia yang disampaikan kepada kepala daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	27.654.636.200	100%	31.794.424.273	100%	32.430.312.758	100%	33.078.919.014	100%	124.958.292.245	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100%	100%	2.420.401.790	100%	2.451.561.181	100%	2.500.592.405	100%	2.550.604.253	100%	9.923.159.628	Sekretariat Daerah

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**				**52.515.796.896**		**49.726.780.789**		**50.721.316.405**		**51.735.742.733**		**204.699.636.823**	**Sekretariat DPRD**
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang Pemerintahan bidang urusan Sekretariat DPRD	100%	100%	33.912.854.188	100%	34.585.366.684	100%	35.277.074.018	100%	35.982.615.498	100%	139.757.910.388	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	100%	18.602.942.708	100%	15.141.414.105	100%	15.444.242.387	100%	15.753.127.235	100%	64.941.726.435	Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**		**PERENCANAAN**				**7.739.410.936**		**7.884.664.447**		**8.913.297.687**		**10.140.612.757**		**34.677.985.827**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan	100%	100%	6.065.759.323	100%	6.431.661.990	100%	6.560.295.230	100%	6.691.501.134	100%	25.749.217.677	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	100%	1.233.321.183	100%	1.155.017.634	100%	1.855.017.634	100%	2.851.126.800	100%	7.094.483.251	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tersusun dengan baik	100%	100%	440.330.430	100%	297.984.823	100%	497.984.823	100%	597.984.823	100%	1.834.284.899	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik	100%	100%	665.099.924	100%	794.070.292	100%	894.070.292	100%	994.070.292	100%	3.347.310.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tersusun dengan baik	100%	100%	479.973.921	100%	267.230.531	100%	467.230.531	100%	567.230.531	100%	1.781.665.514	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**02**		**KEUANGAN**				**285.101.604.014**		**299.330.580.945**		**305.317.192.564**		**291.665.469.728**		**1.181.414.847.251**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah**
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan keuangan	100%	100%	10.611.386.629	100%	8.818.448.727	100%	8.994.817.702	100%	9.174.714.056	100%	37.599.367.113	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah	100%	100%	8.877.545.005	100%	9.621.930.457	100%	9.814.369.066	100%	10.010.656.447	100%	38.324.500.976	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja keuangan yang tepat waktu	100%	100%	261.220.831.080	100%	276.723.623.063	100%	282.258.095.524	100%	268.145.190.748	100%	1.088.347.740.415	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang sudah terinventarisir secara Baik	60,00%	60,00%	1.990.392.400	60,00%	1.760.983.289	65,00%	1.796.202.955	70,00%	1.832.127.014	70,00%	7.379.705.658	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak	5,00%	5,00%	2.401.448.900	5,00%	2.405.595.409	5,00%	2.453.707.317	5,00%	2.502.781.464	5,00%	9.763.533.090	Badan Pendapatan Daerah
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**				**14.702.113.545**		**25.586.086.961**		**26.097.808.700**		**26.619.764.874**		**93.005.774.080**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang urusan pemerintahan bidang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	11.783.341.945	100%	23.083.590.021	100%	23.545.261.821	100%	24.016.167.058	100%	82.428.360.845	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	80,00%	90,00%	2.918.771.600	95,00%	2.502.496.940	95,00%	2.552.546.879	95,00%	2.603.597.816	95,00%	10.577.413.235	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**3.388.411.100**		**2.825.201.975**		**2.881.706.015**		**2.939.340.135**		**12.034.659.224**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi	55,00%	65,00%	3.388.411.100	70,00%	2.825.201.975	75,00%	2.881.706.015	80,00%	2.939.340.135	80,00%	12.034.659.224	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**2.075.948.240**		**2.386.859.680**		**2.434.596.874**		**2.483.288.811**		**9.380.693.605**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti	100%	100%	2.075.948.240	100%	2.386.859.680	100%	2.434.596.874	100%	2.483.288.811	100%	9.380.693.605	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**06**		**PENGELOLAAN PERBATASAN**				**240.130.500**		**232.215.635**		**236.859.948**		**241.597.147**		**950.803.229**	**Sekretariat Daerah**
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi	100%	100%	240.130.500	100%	232.215.635	100%	236.859.948	100%	241.597.147	100%	950.803.229	Sekretariat Daerah
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.901.100.602**		**8.495.135.170**		**8.665.037.873**		**8.838.338.631**		**34.899.612.276**	
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**				**8.901.100.602**		**8.495.135.170**		**8.665.037.873**		**8.838.338.631**		**34.899.612.276**	Inspektorat
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan Umum penunjang unsur pengawasan pemerintahan bidang urusan Inspektorat Daerah	100%	100%	6.660.568.902	100%	6.255.343.574	100%	6.380.450.445	100%	6.508.059.454	100%	25.804.422.376	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja	22,77%	26.79 %	1.931.381.700	26.79 %	1.919.288.305	26.79 %	1.957.674.071	26.79 %	1.996.827.553	26.79 %	7.805.171.629	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3	0,00%	32.56 %	309.150.000	53.49 %	320.503.291	76.74 %	326.913.357	100%	333.451.624	100%	1.290.018.272	Inspektorat
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**				**57.300.655.909**		**53.044.032.794**		**54.130.053.450**		**55.214.368.266**		**219.689.110.419**	
7	**01**		**KECAMATAN**				**57.300.655.909**		**53.044.032.794**		**54.130.053.450**		**55.214.368.266**		**219.689.110.419**	Kecamatan Kapuas Kecamatan Sekayam Kecamatan Tayan Hilir Kecamatan Tayan Hulu Kecamatan Meliau Kecamatan Kembayan Kecamatan Entikong Kecamatan Parindu Kecamatan Mukok Kecamatan Bonti Kecamatan Balai

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Kecamatan Beduai Kecamatan Jangkang Kecamatan Toba Kecamatan Noyan
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	7.679.846.377	100%	7.332.175.422	100%	7.478.818.930	100%	7.628.395.309	100%	30.119.236.038	Kecamatan Kapuas
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.721.882.929	100%	2.606.713.140	100%	2.658.847.403	100%	2.712.024.351	100%	10.699.467.823	Kecamatan Mukok
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.189.711.432	100%	2.176.296.812	100%	2.219.822.748	100%	2.264.219.203	100%	8.850.050.195	Kecamatan Noyan
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	3.258.859.830	100%	3.145.903.984	100%	3.208.822.064	100%	3.272.998.505	100%	12.886.584.383	Kecamatan Jangkang
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.910.552.424	100%	2.788.039.829	100%	2.843.800.626	100%	2.900.676.638	100%	11.443.069.517	Kecamatan Bonti
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.518.111.574	100%	2.408.154.910	100%	2.456.318.008	100%	2.505.444.368	100%	9.888.028.861	Kecamatan Beduai
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	3.025.174.974	100%	2.903.977.286	100%	2.962.056.832	100%	3.021.297.968	100%	11.912.507.060	Kecamatan Sekayam

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	3.378.915.750	100%	3.265.635.152	100%	3.330.947.855	100%	3.397.566.812	100%	13.373.065.569	Kecamatan Kembayan
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.733.298.504	100%	2.719.334.411	100%	2.773.721.099	100%	2.829.195.521	100%	11.055.549.535	Kecamatan Parindu
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.693.556.500	100%	2.585.589.499	100%	2.637.301.289	100%	2.690.047.315	100%	10.606.494.603	Kecamatan Tayan Hulu
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	3.161.168.766	100%	3.056.499.615	100%	3.117.629.607	100%	3.179.982.199	100%	12.515.280.188	Kecamatan Tayan Hilir
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	3.187.045.380	100%	3.046.184.138	100%	3.107.107.821	100%	3.169.249.977	100%	12.509.587.316	Kecamatan Balai
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.265.700.818	100%	2.229.355.833	100%	2.273.942.950	100%	2.319.421.809	100%	9.088.421.409	Kecamatan Toba
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	3.014.484.749	100%	2.951.082.988	100%	3.010.104.648	100%	3.070.306.741	100%	12.045.979.125	Kecamatan Meliau
				Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan	100%	100%	2.437.201.194	100%	2.322.946.532	100%	2.369.405.463	100%	2.416.793.572	100%	9.546.346.761	Kecamatan Entikong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	81.653.400	100%	81.651.594	100%	83.284.626	100%	84.950.318	100%	331.539.938	Kecamatan Kapuas
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	3.141.200	100%	3.094.432	100%	3.156.321	100%	3.219.447	100%	12.611.400	Kecamatan Mukok
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	49.456.000	100%	38.364.538	100%	39.131.829	100%	39.914.465	100%	166.866.832	Kecamatan Noyan
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	n/a	n/a	0	100%	5.931.090	100%	6.049.712	100%	6.170.706	100%	18.151.508	Kecamatan Jangkang

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	1.936.200	100%	4.380.145	100%	4.467.748	100%	4.557.103	100%	15.341.196	Kecamatan Bonti
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	10.000.000	100%	10.550.396	100%	10.761.404	100%	10.976.632	100%	42.288.432	Kecamatan Beduai
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	155.304.000	100%	176.798.840	100%	180.334.817	100%	183.941.513	100%	696.379.170	Kecamatan Sekayam
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	7.158.200	100%	17.598.931	100%	17.950.910	100%	18.309.928	100%	61.017.968	Kecamatan Kembayan
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	140.801.200	100%	121.083.195	100%	123.504.859	100%	125.974.956	100%	511.364.210	Kecamatan Parindu
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	8.693.600	100%	7.213.976	100%	7.358.256	100%	7.505.421	100%	30.771.252	Kecamatan Tayan Hulu
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	10.074.000	100%	10.072.291	100%	10.273.737	100%	10.479.212	100%	40.899.239	Kecamatan Tayan Hilir
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	6.840.200	100%	6.723.970	100%	6.858.449	100%	6.995.618	100%	27.418.238	Kecamatan Balai
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	n/a	n/a	0	n/a	0	100%	5.000.000	100%	5.100.000	100%	10.100.000	Kecamatan Toba
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	7.850.100	100%	3.638.199	100%	3.710.963	100%	3.785.182	100%	18.984.444	Kecamatan Meliau
				Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN	100%	100%	99.497.500	100%	99.335.105	100%	101.321.807	100%	103.348.243	100%	403.502.655	Kecamatan Entikong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	7.149.543.374	100%	4.873.306.022	100%	4.970.772.142	100%	5.070.187.585	100%	22.063.809.124	Kecamatan Kapuas
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	78.542.900	100%	78.864.820	100%	80.442.116	100%	82.050.959	100%	319.900.795	Kecamatan Mukok
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	47.040.000	100%	39.064.596	100%	39.845.888	100%	40.642.806	100%	166.593.290	Kecamatan Noyan
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	39.850.700	100%	39.726.354	100%	40.520.881	100%	41.331.299	100%	161.429.234	Kecamatan Jangkang
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	33.050.000	100%	32.989.760	100%	33.649.555	100%	34.322.546	100%	134.011.862	Kecamatan Bonti
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.400.000	100%	20.808.000	100%	81.208.000	Kecamatan Beduai
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	31.560.800	100%	29.628.452	100%	30.221.021	100%	30.825.441	100%	122.235.715	Kecamatan Sekayam
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	34.891.000	100%	32.292.852	100%	32.938.709	100%	33.597.483	100%	133.720.044	Kecamatan Kembayan
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	31.109.100	100%	25.629.512	100%	26.142.102	100%	26.664.944	100%	109.545.659	Kecamatan Parindu
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	36.365.500	100%	36.510.300	100%	37.240.506	100%	37.985.316	100%	148.101.622	Kecamatan Tayan Hulu
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	35.698.900	100%	31.107.494	100%	31.729.644	100%	32.364.237	100%	130.900.275	Kecamatan Tayan Hilir
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	28.873.000	100%	6.272.244	100%	6.397.689	100%	6.525.643	100%	48.068.576	Kecamatan Balai
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	30.095.500	100%	32.059.575	100%	32.700.767	100%	33.354.782	100%	128.210.623	Kecamatan Toba

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	31.568.600	100%	39.799.621	100%	40.595.613	100%	41.407.526	100%	153.371.360	Kecamatan Meliau
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	26.763.000	100%	26.641.676	100%	27.174.510	100%	27.718.000	100%	108.297.185	Kecamatan Entikong
07	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	39.641.600	100%	39.542.286	100%	40.333.132	100%	41.139.794	100%	160.656.812	Kecamatan Kapuas
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	27.022.700	100%	27.022.652	100%	27.563.105	100%	28.114.367	100%	109.722.824	Kecamatan Mukok
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	19.589.000	100%	13.061.680	100%	13.322.914	100%	13.589.372	100%	59.562.965	Kecamatan Noyan
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	12.958.734	100%	12.455.961	100%	12.705.080	100%	12.959.182	100%	51.078.957	Kecamatan Jangkang
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	n/a	n/a	0	100%	5.000.000	100%	5.100.000	100%	5.202.000	100%	15.302.000	Kecamatan Bonti
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	14.250.000	100%	30.381.690	100%	30.989.324	100%	31.609.110	100%	107.230.124	Kecamatan Beduai
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	53.031.000	100%	663.696	100%	676.970	100%	690.509	100%	55.062.175	Kecamatan Sekayam
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	n/a	n/a	0	100%	9.000.000	100%	9.270.000	100%	9.548.100	100%	27.818.100	Kecamatan Kembayan
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	8.760.600	100%	8.749.158	100%	8.924.141	100%	9.102.624	100%	35.536.523	Kecamatan Parindu
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	49.318.300	100%	48.760.234	100%	49.735.439	100%	50.730.147	100%	198.544.120	Kecamatan Tayan Hulu
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	1.894.700	100%	1.893.969	100%	1.931.848	100%	1.970.485	100%	7.691.003	Kecamatan Tayan Hilir
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	n/a	n/a	0	100%	5.000.000	100%	5.150.000	100%	5.304.500	100%	15.454.500	Kecamatan Balai
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	6.595.800	100%	5.373.062	100%	5.480.523	100%	5.590.134	100%	23.039.519	Kecamatan Toba
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	3.824.300	100%	2.560.779	100%	2.611.995	100%	2.664.234	100%	11.661.308	Kecamatan Meliau
				Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan	100%	100%	3.395.000	100%	3.302.704	100%	3.368.758	100%	3.436.133	100%	13.502.595	Kecamatan Entikong
07	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	76.262.200	100%	76.165.388	100%	77.688.696	100%	79.242.470	100%	309.358.753	Kecamatan Kapuas
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	37.247.600	100%	32.710.230	100%	33.364.435	100%	34.031.723	100%	137.353.988	Kecamatan Mukok
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	89.537.000	100%	92.808.907	100%	94.665.085	100%	96.558.387	100%	373.569.379	Kecamatan Noyan
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	85.421.700	100%	83.680.703	100%	85.354.317	100%	87.061.403	100%	341.518.123	Kecamatan Jangkang
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	49.084.600	100%	56.942.536	100%	58.081.387	100%	59.243.014	100%	223.351.537	Kecamatan Bonti
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	14.250.000	100%	10.650.000	100%	10.863.000	100%	11.080.260	100%	46.843.260	Kecamatan Beduai
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	53.031.000	100%	56.190.272	100%	57.314.077	100%	58.460.359	100%	224.995.708	Kecamatan Sekayam

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	67.430.800	100%	34.860.000	100%	35.557.200	100%	36.268.344	100%	174.116.344	Kecamatan Kembayan
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	68.611.700	100%	37.325.824	100%	38.072.340	100%	38.833.787	100%	182.843.652	Kecamatan Parindu
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	50.190.200	100%	40.546.526	100%	41.357.457	100%	42.184.606	100%	174.278.788	Kecamatan Tayan Hulu
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	67.430.600	100%	67.421.658	100%	68.770.091	100%	70.145.493	100%	273.767.842	Kecamatan Tayan Hilir
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	105.885.600	100%	120.558.119	100%	122.969.281	100%	125.428.667	100%	474.841.667	Kecamatan Balai
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	51.363.800	100%	52.512.554	100%	53.562.805	100%	54.634.061	100%	212.073.220	Kecamatan Toba
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	112.980.100	100%	49.776.698	100%	50.772.232	100%	51.787.677	100%	265.316.707	Kecamatan Meliau
				Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan	100%	100%	51.822.000	100%	51.825.206	100%	52.861.710	100%	53.918.944	100%	210.427.860	Kecamatan Entikong
07	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	7.635.600	100%	7.635.116	100%	7.787.818	100%	7.943.575	100%	31.002.109	Kecamatan Kapuas
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	46.088.600	100%	46.017.668	100%	46.938.021	100%	47.876.782	100%	186.921.071	Kecamatan Mukok
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	59.161.000	100%	32.420.420	100%	33.068.828	100%	33.730.205	100%	158.380.453	Kecamatan Noyan
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	19.563.900	100%	19.258.384	100%	19.643.552	100%	20.036.423	100%	78.502.258	Kecamatan Jangkang
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	n/a	n/a	0	n/a	0	100%	10.000.000	100%	10.200.000	100%	20.200.000	Kecamatan Bonti
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	40.285.000	100%	40.331.598	100%	41.138.230	100%	41.960.995	100%	163.715.823	Kecamatan Beduai
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	91.066.400	100%	1.863.180	100%	1.900.444	100%	1.938.452	100%	96.768.476	Kecamatan Sekayam
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	67.500.000	100%	68.235.960	100%	69.600.679	100%	70.992.693	100%	276.329.332	Kecamatan Kembayan
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	17.700.000	100%	12.350.000	100%	12.597.000	100%	12.848.940	100%	55.495.940	Kecamatan Parindu
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	109.392.700	100%	105.645.892	100%	107.758.810	100%	110.991.574	100%	433.788.976	Kecamatan Tayan Hulu
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	42.697.100	100%	38.427.378	100%	39.195.926	100%	40.371.803	100%	160.692.207	Kecamatan Tayan Hilir
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	n/a	n/a	0	n/a	0	100%	10.000.000	100%	10.300.000	100%	20.300.000	Kecamatan Balai
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	54.925.000	100%	26.405.226	100%	26.933.331	100%	27.471.997	100%	135.735.554	Kecamatan Toba
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	39.626.800	100%	27.305.545	100%	27.851.656	100%	28.408.689	100%	123.192.690	Kecamatan Meliau
				Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik	100%	100%	71.314.000	100%	73.174.404	100%	74.637.892	100%	76.130.650	100%	295.256.946	Kecamatan Entikong

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2019)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**6.996.938.119**		**6.443.788.245**		**6.572.664.010**		**6.704.117.290**		**26.717.507.664**	
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**6.996.938.119**		**6.443.788.245**		**6.572.664.010**		**6.704.117.290**		**26.717.507.664**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	3.078.951.919	100%	2.920.655.275	100%	2.979.068.381	100%	3.038.649.748	100%	12.017.325.323	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)	100%	100%	308.745.000	100%	271.610.110	100%	277.042.312	100%	282.583.158	100%	1.139.980.581	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai politik yang difasilitasi (%)	100%	100%	2.311.094.700	100%	2.348.653.484	100%	2.395.626.554	100%	2.443.539.085	100%	9.498.913.822	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan kegiatan FKUB yang difasilitasi (%)	100%	100%	477.147.000	100%	188.496.939	100%	192.266.878	100%	196.112.215	100%	1.054.023.032	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan kegiatan Tim Tepadu Penanganan Konflik SARA yang difasilitasi (%)	100%	100%	267.807.700	100%	280.648.949	100%	286.261.928	100%	291.987.167	100%	1.126.705.744	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang difasilitasi (%)	100%	100%	553.191.800	100%	433.723.488	100%	442.397.958	100%	451.245.917	100%	1.880.559.163	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2019-2024

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1. Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode masa jabatan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan indikator makro pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Sanggau, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi dan nasional. Penyesuaian target indikator makro dilakukan mulai Tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat *Covid-19*. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Proyeksi indikator kinerja makro mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Sanggau

No	Indikator	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian RPJMD			
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia	65,67	66,1	65,77	66,33	66,85	67,23	67,75
2.	Angka Kemiskinan	4,57	4,46	4,46	4,36	4,26	4,16	4,07
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,07	3,52	3,21	3,2	3,2	3,2	3,2
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,3	5,23	0,70	3,54	3,62	3,71	3,79
5.	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	40.810		41.898	44.557	46.345	48.132	49.920
6.	Indeks Gini	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30

8.2. Kinerja Daerah

Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran staretegis RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Sanggau Tahun 2019-2024. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah, memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sanggau. Target IKU pemerintah daerah mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari Pandemi *Covid-19*. IKU perangkat daerah selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 8.2.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dijabarkan berdasarkan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan indikator kinerja sasaran strategis RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran strategis seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU

perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) disajikan pada Tabel 8.3.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah, IKU perangkat daerah, dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai, memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (*impact*) sampai paling rendah (*output*).

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penanganannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target pembangunan RKPD Tahun 2021 yang terlebih dahulu telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2020. Dalam Perubahan RPJMD ini dilakukan penataan ulang indikator kinerja beserta target-targetnya meliputi IKU Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Indikator Daerah (Indikator Tujuan dan Sasaran)	Kondisi Awal 2019	2020		Target Capaian RPJMD				Kondisi Akhir Tahun Rencana
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	
1	**Indeks Infrastruktur**	35,64	63,88	34,64	41,74	43,50	45,17	46,42	46,42
2	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	59,40	60,30	60,11	60,50	60,54	60,58	60,66	60,66
3	**Indeks Pembangunan Manusia**	65,67	66,1	65,77	66,33	66,85	67,23	67,75	67,75
4	**Pertumbuhan ekonomi**	4,3	5,23	0,7	3,54	3,62	3,71	3,79	3,79
5	**Indeks Gini**	0,33	0,314	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
6	**Angka Kemiskinan**	4,57	4,26	4,46	4,36	4,26	4,16	4,07	4,07
7	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	3,07	3,23	3,52	3,21	3,20	3,20	3,20	3,20
8	**Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)**	40,810		41,898	44,557	46,345	48,132	49,920	49,920
9	**Indeks Reformasi Birokrasi**	48,14	70	50,03	52	57	61	66	66
10	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**		65,00	65,00	69,00	72,00	75,00	80,00	80,00
11	**Indeks Ketentraman dan Ketertiban**	84,15	80,00	84,88	88,22	90,72	94,05	94,05	94,05
12	**Indeks Desa Membangun (IDM)**	0,6181		0,6441	0,6627	0,6707	0,6789	0,6894	0,6894

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact*
Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	35,64	41,75	42,75	43,75	44,75	44,75
2	Persentase Jalan Poros Desa dan Perkotaan dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	57,71	60,19	61,03	61,87	62,71	62,71
3	Persentase Kemantapan Jalan di wilayah perbatasan antar negara	45,98	49,18	50,78	52,38	53,98	53,98
4	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan darat	n/a	65,00	76,00	86,00	92,00	92,00
5	Persentase layanan telekomunikasi	65,3	66,82	66,90	67,00	67,02	67,02
6	Rasio rumah layak huni	0,77054	0,1348	0,1353	0,1359	0,1363	0,1363
7	Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara	62,84	49,18	50,78	52,38	53,98	53,98
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,404	60,50	60,54	60,58	60,66	60,66
9	Indeks kualitas air	48,18	50,02	50,52	51,02	51,52	51,52
10	Indeks kualitas udara	91,14	93,67	93,68	93,69	93,70	93,70
11	Indeks Kualitas Lahan	44,02	43,47	43,2	42,92	42,74	42,74
12	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	13,33	20	26,67	33,33	33,33
13	Indeks Pembangunan Manusia	65,67	66,33	66,85	67,23	67,75	67,75
14	Harapan lama sekolah	11,56	11,67	11,77	11,87	11,97	11,97
15	Rata-rata lama sekolah	6,95	7,15	7,21	7,27	7,33	7,33
16	Angka harapan hidup	71,35	72,03	72,64	73,26	73,88	73,88
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1.34	1.32	1.3	1.28	1.28
18	Persentase PMKS yang tertangani	99,2	96,97	96,97	96,97	96,97	96,97
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	61,35	80,62	80,74	80,85	80,98	80,98
20	Pengeluaran Per Kapita	8.410	8.381	8.518	8.654	8.791	8790,88
21	Pertumbuhan ekonomi	4,3	3,54	3,62	3,71	3,79	3,79
22	Indeks Gini	0,33	0,31	0,31	0,3	0,3	0,30
23	Angka Kemiskinan	4,57	4,36	4,26	4,16	4,07	4,07
24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,07	3,21	3,2	3,2	3,2	3,20
25	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	40,810	44,557	46,345	48,132	49,92	49,92

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
26	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (Rp.Juta)	5.646.388	6.911.466	7.457.947	8.047.637	8.683.953	8.683.953
27	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	19,38	19,27	19.22	19.18	19,18	19,18
28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,1	12,15	12,18	12,2	12,2	12,20
29	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (Rp.Juta)	370.550	292.973	297.621	302.342	307.139	307.139
30	Pertumbuhan investasi PMDN	8,5	8,85	5	5,5	5,5	5,50
31	Tingkat partisipasi angkatan kerja	n/a	68,31	67,55	66,79	66,02	66,02
32	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,23	0,30	0,33	0,37	0,40	0,40
33	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Indeks Ketahanan Pangan	73,63	80,63	82,5	84,04	85,45	85,45
35	Nilai SAKIP	47,41	50	57	66	71	71,00
36	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0036	3,12	3,22	3,4	3,42	3,42
37	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	3	3,3	3,6	3,9	3,90
38	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,1	7,06	7,06	7,06	5,59	5,59
39	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,778	1,167	1,17	1,385	1,585	1,585
40	Rasio ASN	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
41	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,36	2,05	2,10	2,30	2,40	2,40
42	Indeks kepuasan masyarakat	88,74	85	90	95	95	95
43	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	n/a	69	72	75	80	80
44	Cakupan konflik SARA yang ditangani	100	100	100	100	100	100
45	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,00205	0,00203	0,00201	0,00199	0,00199
46	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	84,1498	88,2248	90,7248	94,0498	94,0498	94,0498
47	Indeks Ketentraman Masyarakat (IKM)	89,7996	91,4496	91,4496	93,0996	93,0996	93,0996
48	Indeks Ketertiban Umum (IKU)	78,5	85	90	95	95	95
49	Indeks Ketahanan Sosial	0,7315	0,7843	0,7938	0,8034	0,8159	0,8159
50	Indeks Ketahanan Ekonomi	0,4959	0,5317	0,5381	0,5447	0,5531	0,5531
51	Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	0,627	0,6723	0,6804	0,6887	0,6994	0,6994
52	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	59	75,5	85,3	95,1	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Indeks Infrastruktur	35,64	41,74	43,50	45,17	46,42	46,42
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	48,14	52	57	61	66	66

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
3.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6181	0,66272	0,67072	0,67889	0,68943	0,68943
ASPEK PELAYANAN UMUM							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.	**PENDIDIKAN**						
	Persentase APK PAUD/TK dan Kesetaraan Kabupeten	21.80	23.44	25.08	26.72	28.36	30.00
	Berdirinya PAUD rintisan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit	5	10	15	20	25	30
	Persentase APK SD/MI/Paket A Kabupaten	114.45	115.56	116.67	117.78	118.89	120.00
	Persentase APM SD/MI/Paket A Kabupaten	93.87	94.21	95.01	96.87	97.76	98.86
	APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9%.	97.90	98.10	98.70	99.20	99.50	99.80
	Persentase satuan pendidikan SD/SDLB/MI menerapkan pembelajaran membangun karakter	70.00	75.0	80.0	85.0	90.00	95.00
	Persentase Peserta Didik SD/SDLB/MI Putus Sekolah	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
	Persentase Lulusan SD/SDLB/MI Melanjutkan	86.96	88.57	90.18	91.78	93.38	95.00
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	94.69	95.75	96.81	97.88	98.95	100
	Persentase SD/SDLB/MI Berakreditasi	67.4	70.9	75.2	80.1	85.1	90.0
	Persentase SD/SDLB/MI Berakreditasi minimal B	21.20	22.70	24.20	25.70	27.20	28.50
	Persentase SD/SDLB/MI Memiliki Fasilitas Internet	8.0	14.4	20.8	27.2	33.6	35.0
	Rasio guru/murid SD/MI	01:16	01:15	01:16	01:16	01:17	01:18
	Rasio siswa per Kelas SD/MI	01:18	01:18	01:18	01:17	01:17	01:17
	Persentase Sekolah SD/MI kondisi Ruang Kelas Baik	81.62	82.10	82.57	83.05	83.52	84.00
	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Sederajat	92,17	91,66	98.16	98.78	99.39	100
	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Sederajat	65,27	61,84	68.85	70.56	72.28	74.00
	APS Kelompok Usia 13-15 Tahun mencapai	64.1	67.2	68.0	71.00	72.00	73.00
	Persentase Peserta Didik SMP/MTs Putus Sekolah	0.08	0.07	0.05	0.04	0.03	0.01
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	93.32	98,53	95.99	97.33	98.66	100
	Persentase Lulusan SMP/MTs Melanjutkan ke SMA/SMLB/MA/SMK	81.64	83.71	85.78	87.86	89.93	92.00

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase SMP/SMPLB/MTs Berakreditasi	28.47	30.47	32.47	34.47	36.47	38.47
	Rasio guru/murid SMP/MTs	01:17	01:17	01:18	01:18	01:19	01:19
	Persentase Sekolah SMP/MTs kondisi Ruang Kelas Baik	82.83	83.67	84.50	85.33	86.17	87.00
	Persentase Guru SD/SDLB/MI Berkualifikasi S1/D-4	65.43	66.68	67.93	69.18	70.43	71,68
	Persentase Guru SD/SDLB/MI Bersetifikat	33.43	34.97	36.47	37.97	39.47	40.97
	Persentase Guru mengajar menurut Kelas untuk SD/MI	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kepala Sekolah SD/MI mendapatkan diklat kompetensi	90.00	92.00	94.00	96.00	98.00	100
	Persentase Guru SD/MI mendapatkan diklat kompetensi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D-4	78,82	80.07	81.32	82.57	83.82	85.07
	Persentase Guru SMP/MTs Bersetifikat	24,94	26.21	27.46	28.71	29.96	31.32
	Persentase Guru mengajar menurut mata pelajaran SMP/MTs	81.21	83.62	85.33	87.52	89.22	92.00
	Persentase Kepala Sekolah SMP/MTs mendapatkan diklat kompetensi	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100
	Persentase Guru SMP/MTs mendapatkan diklat kompetensi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase Guru PAUD/TK/TKLB Formal Berkualifikasi S1/D-4	23.78	24.00	26.00	28.00	32.00	35.00
	Persentase Guru PAUD/TK Formal Bersertifikat	10.04	11.49	13.17	14.85	15.95	21.50
	Persentase Guru PAUD/TK Non Formal Berkualifikasi S1/D-4	5.00	7.00	9.00	11.00	14.00	16.00
	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	241.280	241.582	241.884	242.186	242.488	242.790
	Jumlah Penyandang Buta Aksara dituntaskan	1.510	1.208	906	604	302	0
	Berdirinya PAUD Rintisan sekurang-kurangnya 5 Unit	5	5	5	5	5	5
	Persentase terbentuk Lembaga PKBM	8	8	8	12	13	15
	Persentase terbentuk lembaga Kursus dan Pelatihan	10	11	12	13	14	15
	persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00
	Persentase ketersediaan sekolah pendidikan dasar di wilayah perbatasan antarnegara	60.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
2.	**KESEHATAN**						

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Indek Keluarga Sehat	0,09 point	0,50 point	0,50 point	0,50 point	0,50 point	0,50 point
	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat kompetensi	20,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	45,00%
	Persentase ketersediaan obat dan BMHP	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	77,79%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
	Angka harapan hidup	n/a	71,03	71,12	71,21	71,31	71,31
	Persentase balita gizi buruk	n/a	0,44	0,29	0,14	0	0,00
	Prevalensi balita gizi kurang	n/a	1,73	1,15	0,57	0,5	0,5
	Cakupan Desa Siaga Aktif	n/a	90	90	95	100	100
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	n/a	3,52	2,35	1,18	1,18	1,18
	Angka kelangsung an hidup bayi	n/a	11.146	12.260	13.486	14.834	14.834
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	n/a	3,52	2,35	1,18	1,18	1,18
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	n/a	3,52	2,35	1,18	1,18	1,18
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	n/a	43,42	32,57	21,71	10,86	10,86
	Rasio posyandu per satuan balita	n/a	114,47	114,47	114,47	114,47	114,47
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	n/a	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Rasio dokter per satuan penduduk	n/a	13,78	15,22	16,25	16,86	16,86
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	n/a	118,69	125,27	131,44	135,76	135,76
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	n/a	100	100	100	100	100
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	n/a	85,93	90,62	95,31	100	100
	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	n/a	90	90	90	90	90
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	100	100	100	100	100
	Cakupan puskesmas (%)	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan puskesmas pembantu (%)	n/a	59,51%	61,63%	63,19%	65,03%	65,03%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	n/a	4356 Jiwa	4792 Jiwa	5271 Jiwa	5798 Jiwa	5798 Jiwa

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	n/a	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidika n epidemiolog i <24 jam (%)	n/a	100	100	100	100	100
	Predikat akuntabilitas kinerja	n/a	CC	B	B	B	B
	Indeks profesionalitas ASN	n/a	77	78	79	80	80
	Indeks kepuasan masyarakat	n/a	85	90	95	95	95
	Persentase ketersediaa Puskesmas dan Pustu di wilayah perbatasan antar negara	n/a	73,34	76,67	80	90	90
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
	Persentase Sumber Daya Air yang dibangun dan dipelihara	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
	Persentase penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih	41,06%	46,17%	48,59%	50,90%	53,13%	53,13%
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	47,17%	50,12%	51,50%	52,83%	54,09%	54,09%
	Persentase drainase kondisi baik	29,29%	41,99%	48,33%	54,68%	61,03%	61,03%
	Persentase jalan/gertak lingkungan yang terbangun	51,94%	69,82%	77,32%	83,93%	89,75%	89,75%
	Persentase Gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif	47,73%	65,91%	77,27%	88,64%	100%	100,00%
	Persentase Jalan dan Jembatan Desa yang di bangun/dipelihara	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
	Persentase fasilitas sarana umum layak	48,00%	60,00%	62,00%	65,00%	67,00%	67,00%
	Persentase Jalan kabupaten dibangun/dipelihara	4,50%	8,50%	10,50%	12,50%	14,50%	14,50%
	Kesesuaian tata ruang (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4.	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
	Ketersediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85%
5.	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	75,00%	80,00%	85%	90,00%	95,00%	95,00%
	Persentase Penanganan Bencana Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	n/a	13,02	17,16	21,3	25,44	29,59

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Desa/Kelurahan Rawan Bencana	n/a	27,81	23,67	19,53	15,38	11,24
	Persentase Kejadian Bencana yang dapat ditangani	n/a	100	100	100	100	100
	Persentase Korban Bencana yang dapat ditangani	n/a	100	100	100	100	100
	Ketersediaan SOP Penanganan Bencana Daerah	n/a	60	100	100	100	100
	Persentase kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	75,00%	75,00%	75%	80,00%	80,00%	80,00%
	Indeks ketentraman dan ketertiban	n/a	85	90	95	95	95
	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakan Perda/Perkada	n/a	85	85	90	90	90
	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	n/a	90	95	100	100	100
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	n/a	80	85	90	90	90
	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	n/a	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	n/a	100	100	100	100	100
6.	**SOSIAL**						
	Persentase Lembaga Kesejateraan Sosial yang dibina	25,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100%	100%
	Persentase penyelesaian warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	96,30%	97,00%	97,45%	97,75%	98,20%	98%
	Persentase korban bencana alam/non alam tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PMKS yang tertangani	n/a	97	97,45	97,75	98,20	98,20
	Persentase PMKS Yang difasiliasi	n/a	100	100	100	100	100
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	61,42	61,54	61,65	61,78	61,78

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	n/a	80,62	80,74	80,85	80,98	80,98
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.	**TENAGA KERJA**						
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,18%	68,31%	67,55%	66,79%	66,02%	66,02%
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	18,00%	31,18%	42,42%	50,84%	56,46%	56,46%
	Persentase kasus hubungan industrial tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	57.611	54.669	58.536	60.587	62.758	62.758
	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1%
	Persentase tenaga kerja yang terserap dan mandir/perusahaan	0%	10%	12%	14%	16%	16%
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
	Persentase kegiatan perempuan dan anak yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	1,00
	Rasio KDRT (‰)	0,235‰	0,188‰	0,164‰	0,141‰	0,117‰	0,117‰
	Ketersediaan data gender dan anak (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase jumlah desa yang memiliki komitmen terhadap KLA	15,98%	49,11%	66,27%	83,43%	100%	100%
	Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	n/a	30.09	30.10	30.15	30.18	30.18
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	n/a	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50
	Partisispasi perempuan dilembaga swasta	n/a	20.00	25.00	30.00	35.00	35.00
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	n/a	85.42	89.69	94.18	98.88	98.88
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	96.21	96.21	96.21	96.21	96.21
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	60.67	60.67	60.67	60.67	60.67
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	38.67	38.67	38.67	38.67	38.67
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n/a	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan uphan disektor non pertanian	n/a	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	n/a	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA
3.	**PANGAN**						
	Ketersediaan Lumbung Pangan (%)	12,88%	13,49%	14,11%	14,72%	15,33%	15,33%
	Ketersediaan pangan utama	104,60%	106,69%	108,82%	110,99%	113,21%	113,21%
	Presentase daearah rawan pangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	persentase hasil uji mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indiktor Ketahanan Pangan (IKP)	73,63	80,63	82,5	84,04	85,45	85,45
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72,9	74,37	75,11	75,86	76,62	76,62
	Ketersediaan energi dan protein perkapita:						
	Energi perkapita (Kkal/Kapita/Th)	3.965,49	4.045	4.086	4.127	4.168	4.168
	Protein perkapita (Kkal/Kapita/Th)	74,24	75,73	76,48	77,25	78,02	78,02
	Penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah (ton)	80	189	198	208	219	219
	Penguatan cadangan pangan (%)	80	80	80	80	80	80
	Jumlah Desa/Kelurahan Rentan Pangan:	44	40	38	36	34	34
	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan:	30	28	27	26	25	25
	Sangat Rentan:	11	9	8	7	6	6
	Rentan	19	19	19	19	19	19
	Jumlah Desa/Kelurahan Aman Pangan:	125	127	128	129	130	130
	Jumlah Desa/Kelurahan Aman Pangan:	139	141	142	143	144	144
	Aman:	37	39	40	41	42	42
	Sangat Aman	102	102	102	102	102	102
4.	**PERTANAHAN**						
	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Kepemilikan Hak Tanah Oleh Masyarakat terfasilitasi	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Persentase Tanah Pemerintah Daerah bersertifikat	95,38%	97,71%	100%	100%	100%	100%
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**						0%
	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase B3 dan Limbah B3 tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PPLH yang dilaksanakan oleh MHA	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelaksama PPLH yang diberikan penghargaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan area pelayanan pengelolaan sampah	28,60%	31,10%	32,40%	33,60%	34,90%	34,90%
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan	85,47%	92,00%	95,00%	100%	100%	100%
	Persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	65,00%	75,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90%
	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	23,81%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan data kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dari pelayanan pendaftaran penduduk (%)	n/a	76,66	80	88,33	91,66	91,66
	Cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan sipil (%)	n/a	98,75	99,25	99,5	100	100,00
	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	n/a	100	100	100	100	100,00
	Persentase kepe milikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	n/a	95	97	98	100	100
	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	n/a	100	100	100	100	100
	Persentase kepemilikan KIA	n/a	30	40	65	75	75
	Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan	n/a	100	100	100	100	100
	Persentase kepemilikan Akta Perceraian	n/a	100	100	100	100	100

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase kepemilikan Akta Kematian	n/a	100	100	100	100	100
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	n/a	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
	Ketersediaan database kependudukan	n/a	ada	ada	ada	ada	ada
	Persentase Jumlah Lembaga Pengguna yang telah menandatangani kerjasama Pemanfaatkan Data Kependudukan	n/a	100	100	100	100	100
	Indeks profesionalitas ASN	n/a	77	78	80	85	85
	Rata-rata nilai capaian SKP	n/a	81	82	83	84	84
	Indeks kepuasan masyarakat	n/a	88	90	95	95	95
	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,7	3,8	3,9	4	4
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
	persentase desa yang tertata	25,77%	40,49%	47,85%	55,21%	62,58%	62,58%
	Persentase Bumdes aktif	41,10%	59,51%	68,71%	77,91%	87,12%	87,12%
	Kinerja pengelolaan keuangan desa kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	55,82%	75,46%	85,27%	95,09%	100%	100,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	75	80	85	90	90
	Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur	n/a	100	100	100	100	100
	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	n/a	4.03	4.51	4.99	5.47	5.47
	Indeks Desa Membangun (IDM)	n/a	0.66272	0.67072	0.67889	0.68943	0.68943
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Aktif	n/a	25.05	46	68.07	92	92
	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA)	n/a	1	1	1	1	1
	Persentase Jumlah Bumdes Yang Terbentuk	n/a	0.23	0.27	0.31	0.35	0.35
	Persentase Kelompok Binaan PKK Aktif	n/a	8.07	23.02	46.04	72.47	72.47
	Persentase Pokja/Pokjanal Posyandu Aktif	n/a	5.06	22.36	39.12	61.47	61.47
	Terverifikasinya Masyarakat Hukum Adat	n/a	1	1	1	1	1
	Jumlah Kawasan Pedesaan Yang Terbentuk	n/a	1	1	1	1	1
	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	n/a	69.00	72.89	76.78	80.67	80.67
	Persentase Desa Dengan Administrasi Kategori Baik	n/a	51.53	55.53	59.53	63.53	63.53

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1.34	1.32	1.3	1.28	1.28
	Total Fertility Rate (TFR)	2.26 point	2.24 point	2.22 point	2.20 point	2.18 point	2.18 point
	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	63,73%	68,73%	71,23%	73,73%	76,23%	76,23%
	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	27,63%	56,57%	71,04%	85,51%	100%	100%
9.	**PERHUBUNGAN**						
	Ketersediaan layanan Umum penunjang pemerintahan bidang urusan Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan kondisi baik	44,00%	47,00%	52,00%	53,00%	55,00%	55,00%
	Persentase dermaga kondisi baik	15,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
	Ketersediaan informasi publik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan data dan informasi terhadap Standar Minimal Portal (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
	Persentase koperasi yang dibina	16,71%	50,13%	66,84%	83,55%	100%	100%
	Persentase koperasi sehat	15,00%	19,00%	21,00%	23,00%	25,00%	25,00%
	Persentase pengurus dan pengawas koperasi serta pelaku usaha mikro terlatih	2,52%	4,50%	7,50%	10,00%	12,50%	12,50%
	Persentase Usaha Mikro yang dibina	19,00%	22,00%	24,00%	25,00%	30,00%	30,00%
	Persentase koperasi aktif	n/a	60,41	61,18	61,95	62,72	62,72
	Peningkatan status usaha mikro menjadi usaha kecil	n/a	4	6	8	10	10
12.	**PENANAMAN MODAL**						
	Ketersedian informasi penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase realisasi nilai invesatsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan perizinan dan non perizinan tepat waktu	85,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100%	100%
	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	80,00%	80,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%
	Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	7.851.219,91	9.242.652,39	10.028.277,81	10.930.822,81	11.914.596,86	11.914.596,86

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	8,50%	8,50%	8,50%	9%	9%	9%
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	73,20	77,66	79,99	82,39	84,86	84,86
	Persentase Rasio Elektrifikasi (RE)	73,20	77,66	79,99	82,39	84,86	84,86
	Persentase rumah tangga pengguna listrik di wilayah perbatasan antarnegara	68,40	73,12	76,23	79,66	83,24	83,24
	Persentase Rasio Elektrifikasi (RE)	68,40	73,12	76,23	79,66	83,24	83,24
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
	Persentase organisasi kepemudaan dan wirausaha muda yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi Kepramukaan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Prestasi Olahraga	n/a	8	10	14	16	16
	Cakupan persentase pembinaan olahraga	n/a	100	100	100	100	100
	Cakupan pelatih / juri/wasit yang bersertifikasi (orang)	n/a	40	50	80	150	150
	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	n/a	39	52	66	78	78
	Jumlah atlet berprestasi (orang)	n/a	14	17	19	17	17
	Persentase wirausaha muda	n/a	15	17	20	25	25
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	n/a	63,49	71,43	82,54	100	100
14.	**STATISTIK**						
	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	85,00%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	**PERSANDIAN**						
	Ketersediaan pedoman informasi Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	**KEBUDAYAAN**						
	Persentase lembaga adat dan budaya daerah yang dibina dan dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengembangan nilai-nilai sejarah yang difasilitasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	50.00	65	70	75	80	80

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya	15.46	36.08	46.39	56.70	57.00	57.00
	Penyelenggaraan festival seni / Ritual dan budaya	7	8	9	9	10	10
	Persentase benda, situs, kepurbakalaan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	47.37	61.40	66.67	70.18	78.95	78.95
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	0	6/13	9/26	11/39	14/52	14/52
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	7	8	9	9	10	10
	Persentase partisipasi dalam kegiatan kebudayaan	100	100	100	100	100	100
17.	**PERPUSTAKAAN**						
	Persentase penggunaan koleksi perpustakaan daerah	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	n/a	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	n/a	100	100	100	100	100
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	n/a	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	**KEARSIPAN**						
	Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip sesuai standar	0,00%	39,63%	60,47%	81,40%	100%	100%
	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip kategori baik	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	35,00%
	Persentase pelayanan informasi arsip	30,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
	Persentase Pengelolaan Arsip Pola Baru	n/a	15	25	40	55	55
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar	n/a	39,53	60,47	81,4	100	100
	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	n/a	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Persentase kondisi fisik dan informasi arsip	n/a	20	25	30	35	35
	Persentase pelayanan informasi arsip	n/a	50	60	70	80	80
	Indeks Kepuasan masyarakat	n/a	80	85	95	95	95

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap (%)	6,20%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%
	Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya (%)	8,30%	2,30%	2,58%	2,84%	3,12%	3,12%
	Ketersediaan pengolahan dan pemasaran ikan (%)	8,57%	17,14%	20,00%	22,86%	17,14%	17,14%
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	0,49	0,52	0,54	0,55	0,56	0,56
	Produksi perikanan Budidaya (ton)	7.984,79	9.857	11.559	13.261	14.963	14.963
	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36	40,2	42,5	44	46	46
	Produksi perikanan kelompok nelayan Tangkap (ton)	1.512,90	1.760,70	1.848,20	1.931,50	2.017,10	2.017,10
2.	**PARIWISATA**						
	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	54,00%	66,00%	74,00%	80,00%	90,00%	90,00%
	Persentase promosi pariwisata daerah	41,00%	58,33%	66,66%	66,66%	75,00%	75,00%
	Persentase fasilitasi HaKI ekonomi kreatif	0,00%					
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	45,68%	55,17%	60,34%	60,34%	65,51%	65,51%
	Pertumbuhan kunjungan wisata	n/a	13,33	17,65	20	16,67	16,67
	Kunjungan Pariwisata (orang)	n/a	85	100	120	140	140
	Lama Kunjungan Wisata	n/a	1,5 hari	1,5 hari	2 hari	2 hari	2 hari
	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	n/a	118,188,000	125,000,000	130,350,000	138,000,000	138,000,000
	Cakupan persentase event promosi yang diikuti	n/a	58,33	66,66	66,66	75	75
	Persentase usaha pariwisata yang distandarisasi	n/a	15	17	20	25	25
	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	n/a	55,17	60,34	60,34	65,51	65,51
3.	**PERTANIAN**						
	Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan utama(%)	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
	Pertumbuhan produksi tanaman Strategis Hortikultura (%)	0,00%	10,50%	10,80%	11,10%	11,40%	11,40%
	Ketersediaan prasarana pertanian (%)	3,20%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%
	Bebas Penyakit Ternak (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Persentase penerapan ISPO dan RSPO	29,03	41,90%	48,39%	54,84%	61,29%	61,29%
	Persentase kelompok Tani terlatih teknologi pertanian	14,00%	48,40%	65,60%	82,80%	100%	100,00%
	Persentase kelompok petani kebun yang bermitra dengan perusahaan	1,13%	5,65%	7,91%	10,17%	12,43%	12,43%
	Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	2,77	2,93	3,02	3,12	3,2	3,20
	Kontribusi sektor pertanian (tanaman hortikultura) terhadap PDRB	0,7	0,73	0,74	0,76	0,77	0,77
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Hektar (Kw/Ha)	22,57	26,98	27,25	27,52	27,79	27,79
	Produksi sektor pertanian /Tanaman Pangan/Padi (ton)	85.131,76	78.166,26	82.910,32	87.932,95	92.225,98	92.225,98
	Produksi sektor pertanian /Hortikultura/Cabe (ton)	1.080,70	762	820	884	952	952
	Produksi sektor pertanian (ton)	219.810*	235.617	245.112	254.990	265.267	265267
	Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha/Th)						
	Kelapa Sawit (TBS)	9,78	10,07	12	13	14	14,5
	Karet	0,9	0,93	0,95	0,96	0,98	1
	Lada	1,03	0,96	0,97	0,98	0,99	1
	Kakao	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
	Kopi	0	-	0,3	0,4	0,45	0,5
	Persentase tanaman perkebunan yang dikembangkan	79,3	80,18	70,23	76,2	82,68	89,7
	Persentase peternak yang dibina	55,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100%	100%
	Persentase tanaman perkebunan yang diremajakan	10,65	5,48	1,21	1,31	1,48	1,79
	Persentase luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Persentase ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan	10,5	40	80,77	82	84	85
	Nilai Investasi Peternakan (dalam juta)	101.458	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Bebas penyakit Ternak	100	100	100	100	100	100
	Pertumbuhan Populasi ternak	10.5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	1. Ternak Besar	n/a		2,28	2,28	2,28	2,28
	2. Ternak Kecil	n/a		3	3	3	3
	3. Unggas	n/a		0,5	0,5	0,5	0,5
	Persentase Capaian Kinerja	CC	CC	B	B	B	B
	Persentase nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	75	76	77	78	79	80
	Persentase capaian hasil survey kepuasan masyarakat	75	80	85	90	95	95
4.	**PERDAGANGAN**						
	Persentase gudang yg teregistrasi	33,64%	48,60%	56,07%	63,55%	71,03%	71,03%
	Daya tampung pasar tehadap pedagang (%)	85,61%	90,43%	95,45%	95,26%	97,67%	97,67%
	Ketersedian informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pertumbuhan nilai ekspor (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	1,97%	26,64%	41,44%	56,24%	71,04%	71,04%
	Ketersediaan data UDKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kontribusi sector Perdagangan terhadap DRB	n/a	12,15	12,18	12,2	12,2	12,20
5.	**PERINDUSTRIAN**						
	Persentase IKM yang dibina	25,50%	30,00%	32,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Ketersediaan Informasi Industri	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Kontribusi sector Industri terhadap PDRB	n/a	19,27	19.22	19.18	19,18	19,18
6.	**TRANSMIGRASI**						
	Ketersedian Rencana Kawasan Transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KK transmigrasi yang ditempatkan	79,34%	79,34%	79,34%	100%	100%	100%
	Persentase Satuan Pemukiman Transmigrasi yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1.	**SEKRETARIAT DAERAH**						

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tertib administrasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	**SEKRETARIAT DPRD**						
	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat fasilitasi pelayanan sesuai ketugasan Sekretraiat DPRD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rapat-rapat yang difasilitasi oleh Sekretraiat DPRD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Raperda yang disahkan oleh DPRD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ketersediaan rencana kerja alat kelengkapan dan rencana kerja DPRD	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks profesionalitas ASN	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
1.	**PERENCANAAN**						
	Persentase Hasil Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tersusun dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tersusun dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tersusun dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	n/a	92,08%	95%	100%	100%	100%
1.1.1.	Tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
1.1.2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	n/a	98,92%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan masyarakat	n/a	85,03%	85,30%	85,70%	86%	86%
	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	n/a	95%	100%	100%	100%	100%
2.	**KEUANGAN**						
	Persentase pemenuhan laporan capaian kinerja keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Aset Daerah yang sudah terinventarisir secara Baik	60,00%	60,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
	Persentase peningkatan penerimaan pajak	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Indeks kepuasan masyarakat	n/a	85%	86%	86,50%	87%	87%
	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	n/a	95%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kepuasan layanan pembayaran pajak daerah	n/a	85%	86%	86,50%	87%	87%
	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	n/a	6,37%	6,56%	6,68%	6,87%	6,87%
3.	**KEPEGAWAIAN**						
	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu	80,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
4.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan dan Uji Kompetensi	55,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
5.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
	Persentase hasil kelitbangan ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	n/a	90%	90%	90%	90%	90%
6.	**PENGELOLAAN PERBATASAN**						
	Persentase program pembangunan kawasan perbatasan antar negara yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
1.	**INSPEKTORAT DAERAH**						

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase jumlah obyek pemeriksaan yang menjadi sasaran regular dan kinerja	22,77%	26.79 %	26.79 %	26.79 %	26.79 %	26.79 %
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan SPIP Pada Level 3	0,00%	32.56 %	53.49 %	76.74 %	100%	100%
UNSUR KEWILAYAHAN							
1.	**KECAMATAN**						
	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan untuk kelancaran tugas dan fungsi kecamatan sebagai unsur kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelayanan masyarakat terintegrasi PATEN		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tata kelola pemerintahan desa kategori baik		100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
1.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
	Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Partai politik yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan kegiatan FKUB yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan kegiatan Tim Tepadu Penanganan Konflik SARA yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kesepakatan/ rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	n/a	100	100	100	100	100
	Angka pertisipasi politik masyarakat	n/a	0	0	80	80	80
	Persentase konflik SARA yang ditangani	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Ormas yang dibina	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek	Kondisi Awal (2019)	Target Capaian RPJMD				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Ormas yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	n/a	95.24	95,45	95,65	95,83	95,65

BAB IX
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 yang disusun dengan berpedoman pada regulasi sebagai referensinya, memiliki peran strategis pada tahapan kebijakan publik dimulai dengan proses formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah beserta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 hingga rencana pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan konsistensi kebijakan publik untuk menuju pelayanan publik prima, *good governance* dan *clean governance*, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024, sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Sanggau atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau hingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024.
2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024.
3. Memastikan rangkaian *public policy* yang dimulai dari *database*, formulasi, implementasi dan monitoring hingga evaluasi kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi target kinerja.

4. Memastikan target kinerja skala prioritas yang telah dijabarkan dan menjadi indikator kinerja utama dapat dicapai dengan filosofi *specific, measurable, achievable, relevant* dan *time-based.*

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019–2024, telah menguraikan target kinerja beserta pagu indikatif, sebagai referensi ketika evaluasi akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu kepada kita semua masyarakat Kabupaten Sanggau dengan semangat berdompu, mari kita bergandengan tangan, bekerja dengan hati, mengoptimalkan seluruh potensi, sesuai tugas fungsi, mewujudkan sanggau bermartabat untuk menuju **Sanggau Maju Dan Terdepan.**

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP 19770315 200502 2 002

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Jln. Jend. Sudirman No. 09 Sanggau 78512
Telp & Fax (0564) 21174
Email : bappeda@mail.sanggau.go.id
Website : bappeda.sanggau.go.id
Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat

SABANG MERAH

(SANGGAU BANGGA MENGUKIR SEJARAH)